SEMAR 83
JAKARTA
SEMAR 83

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation

HUMI berkomitmen untuk menjadikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama dalam kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Sebagai Perusahaan Publik, HUMI berkomitmen untuk mengikuti sejumlah regulasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam operasional Perseroan agar kepercayaan investor terus meningkat.

HUMI is committed to making the principles of Good Corporate Governance (GCG) the main foundation in the Company's daily operations. As a Publicly listed Company, HUMI is committed to following a number of regulations to maintain transparency and accountability in the Company's operations so that investor confidence continues to increase.

Sepanjang tahun 2024, HUMI melakukan penguatan atas penerapan tata kelola pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, serta seluruh karyawan. Penetapan budaya ini dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang tercantum dalam Visi dan Misi, Nilai Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, Piagam Internal Audit, Pakta Integritas, Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian, Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi, serta berbagai kebijakan dan ketentuan lain yang menunjukkan komitmen HUMI atas pelaksanaan tata kelola.

Throughout 2024, HUMI strengthened the implementation of governance among the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as all employees. The establishment of this culture begins with the commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors as stated in the Vision and Mission, Corporate Values, Charter of the Board of Commissioners and Board of Directors, Internal Audit Charter, Integrity Pact, Employee Code of Ethics and Conduct, Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy, and various other policies and provisions that demonstrate HUMI's commitment to implementing governance.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Implementation Basis

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di HUMI mengacu pada pedoman tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. POJK dan SEOJK khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, dan berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan tata kelola.
4. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).

The implementation of Corporate Governance at HUMI refers to the following applicable governance guidelines as well as laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. POJK and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) specifically regarding Governance, Annual Reports, and various POJK and SEOJK related to governance.
4. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF).

5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2021.
6. Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
7. Pedoman Penerapan Tata Kelola HUMI.

5. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy in 2021.
6. The Company's Articles of Association and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
7. HUMI's Governance Code.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Principle

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dilakukan secara baik dan efektif menjadi cermin bahwa proses bisnis dan tata kelola telah berjalan secara sehat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif, Perseroan berkeyakinan mampu membangun kesinambungan usaha dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya serta menjaga kelangsungan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perseroan secara konsisten berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip inti GCG sebagaimana didefinisikan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD): *Transparancy*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness*.

The implementation of good and effective corporate governance is a reflection that the business process and governance have been running healthily and in accordance with applicable provisions and regulations. With the implementation of good and effective corporate governance, the Company believes it is able to build business continuity and provide added value for shareholders and other stakeholders as well as maintain the sustainability of the environment and surrounding communities.

The Company consistently strives to uphold the core principles of GCG as defined by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness, which are described as follows:

Selain itu, Perseroan juga telah mengadaptasi empat pilar governansi korporat sesuai Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada 2021, yaitu:

In addition, the Company has also adapted the four pillars of corporate governance in accordance with the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Committee for Governance Policy in 2021, namely:

Perilaku Beretika
Ethical Behaviour

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

In carrying out its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and trust consistently. The corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and equality and is managed independently so that each company organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

Akuntabilitas
Accountability

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Corporation can be accountable for their performance in a transparent and fair manner. Therefore, corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while still taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a prerequisite for achieving sustainable performance.

Transparansi
Transparency

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

To maintain objectivity in conducting business, corporation provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understandable by stakeholders. Corporation takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also matters that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.

Keberlanjutan
Sustainability

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

The Corporation complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibilities towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve their lives in a manner that is in line with business interests and the sustainable development agenda.

Jejak Langkah Penerapan Tata Kelola Perusahaan HUMI

HUMI's Corporate Governance Implementation Milestones

2016

Pendirian HUMI.
Establishment of HUMI.

2022

Penetapan infrastruktur tata kelola (penyusunan pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik, piagam Dewan Komisaris, piagam Direksi, Piagam Komite Audit, Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Piagam Internal Audit).
Establishment of governance infrastructure (preparation of guidelines for the implementation of good corporate governance, charters of: Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Internal Audit).

2023

- Menjadi Perusahaan Publik (*Go Public*).
  Became a Publicly Listed Company (Go Public).
- Penerbitan 24 Pedoman Tata Kelola yang akan menjadi fondasi penerapan tata kelola oleh HUMI dan Entitas Anak.
  Issuance of 24 Governance Guidelines as the foundation for implementing governance by HUMI and its Subsidiaries.

2024

- Penandatanganan Deklarasi Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
  Signing of the Integrity Pact Declaration by the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Pembentukan Komite ESG yang akan mengawasi implementasi ESG oleh HUMI.
  Establishment of the ESG Committee that will oversee the implementation of ESG by HUMI.
- Penerbitan Piagam Komite ESG serta melengkapi dan/atau menyempurnakan beberapa kebijakan internal terkait GCG.
  Issuance of the ESG Committee Charter and completing and/or enhancing several internal policies related to GCG.
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan, RUSP Luar Biasa secara *hybrid* menggunakan aplikasi eASY.KSEI (penggunaan *live streaming webinar* tayangan RUPS). Penyelenggaraan Paparan Publik secara *online* menggunakan teknologi konferensi video.
  Held a hybrid AGMS, EGMS using the eASY.KSEI application (using live streaming of the AGMS webinar). Held an online Public Expose using video conferencing technology.
- Penilaian implementasi GCG melalui metode *self-assesment*.
  Assessment of GCG implementation through the self-assessment method.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur Tata Kelola HUMI terdiri dari organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi serta organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dibantu oleh 3 Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite *Environment, Social & Governance* (ESG). Sementara itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, *Corporate* Pengembangan Usaha serta *Corporate Finance*, *Accounting* & *Investor Relations*, serta Direksi Anak Usaha yang terbagi menjadi 6 segmen utama.

HUMI's Governance Structure consists of the main organs including the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors as well as the supporting organs of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners is assisted by 3 Committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, and the Environment, Social & Governance (ESG) Committee. Meanwhile, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Business Development and Corporate Finance, Accounting & Investor Relations, as well as the Board of Directors of Subsidiaries which are divided into 6 main segments.

Struktur Tata Kelola HUMI disusun untuk menetapkan kejelasan dan pemisahan tugas dan tanggung jawab serta mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan dan pelaporan dalam organ-organ yang ada di HUMI. Struktur Tata Kelola yang memadai akan mendukung proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

HUMI's Governance Structure is designed to establish clarity and separation of duties and responsibilities as well as the mechanism and flow of decision-making and reporting in the organs in HUMI. An adequate Governance Structure will support the process of implementing GCG principles to produce achievements that are in accordance with the expectations of stakeholders.

Struktur Tata Kelola
Corporate Governance Structure

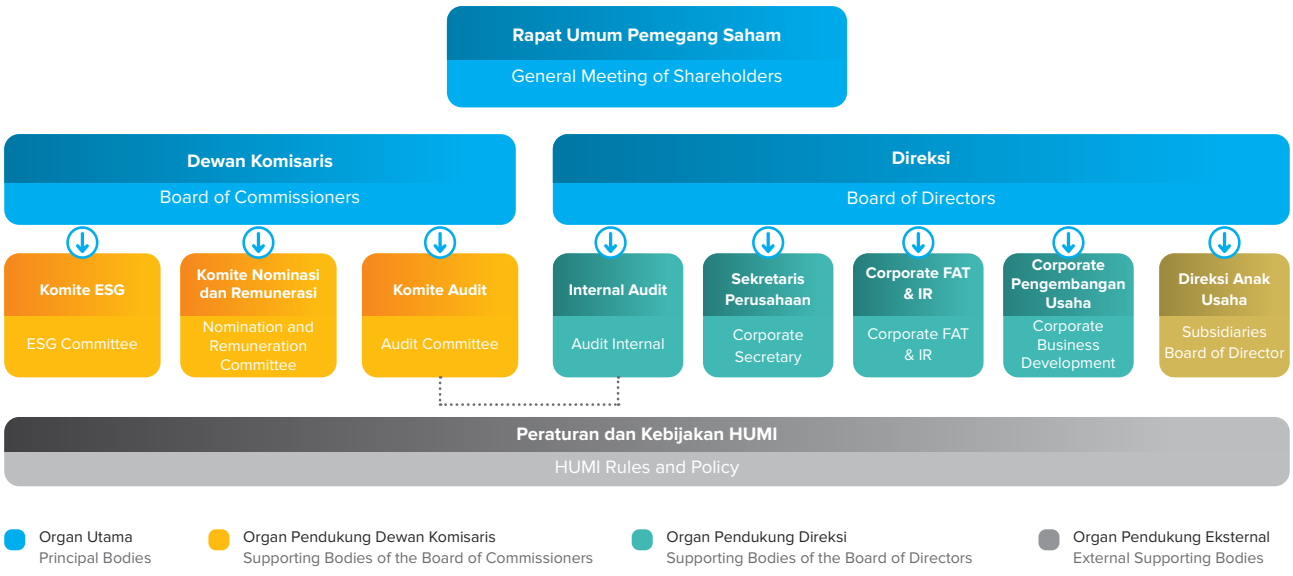

Soft Structure Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Soft Structure

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Organ Perseroan, HUMI secara berkala akan menyempurnakan dan mengkaji efektivitas *soft structure* tata kelola yang terdiri dari perangkat dan kebijakan tata kelola perusahaan untuk memastikan penerapan tata kelola dilakukan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang dinamis.

In supporting the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Company's Organs, HUMI periodically refines and reviews the effectiveness of the governance soft structure consisting of corporate governance tools and policies to ensure that governance is implemented optimally and in accordance with the development of the dynamic business world.

Penilaian Penerapan GCG

GCG Assessment

Penilaian GCG untuk memastikan HUMI mematuhi standar etika bisnis, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, sehingga menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam keputusan dan tindakan HUMI. Penilaian GCG juga membantu membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. HUMI melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG, secara mandiri (*self-assesment*) untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih independen.

GCG assessment to ensure HUMI complies with applicable business ethics standards, regulations, and policies, thus creating a high level of transparency in HUMI's decisions and actions. GCG assessment also helps build stakeholder trust. HUMI conducts a self-assessment of the quality of GCG implementation to obtain more independent assessment results.

Self-Assessment

Self-Assessment

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

Penilaian berdasarkan kriteria ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh *The Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) yang didukung oleh Asian *Development Bank* (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN.

Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian ACGS dilakukan melalui reviu atas dokumen dan informasi yang disediakan HUMI untuk masyarakat, antara lain informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, situs web, pengumuman dan materi publikasi yang dibuat oleh perusahaan tercatat.

Metodologi penilaian terdiri dari 2 tingkat yaitu:

1. Tingkat 1: item standar minimum yang diharapkan untuk diterapkan di setiap negara anggota ASEAN dan mencakup peraturan perundangan serta prinsip OECD.
2. Tingkat 2: item bonus yang merefleksikan praktik baik melebihi ekspektasi standar minimum, serta item penalti yang merefleksikan Tata Kelola yang buruk.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS versi Oktober 2023 terdiri dari aspek kriteria yang meliputi *Rights and Equitable Treatment of Shareholder, Sustainability Resilliance, Disclosure and Transparancy* dan *Responsibilties of the Board.*

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh Tim *Legal & Compliance* dan divalidasi serta disetujui oleh Komite ESG.

Hasil Penilaian

Berdasarkan penilaian ini, kinerja tingkat kepatuhan HUMI berdasarkan kriteria ACGS di tahun 2024 terpenuhi 171 pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

ASEAN Corporate Governance Scorecard

The assessment based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) criteria adopts the principles of Corporate Governance issued by The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS is one of the initiatives of the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) supported by the Asian Development Bank (ADB) to improve corporate governance practices of listed companies in ASEAN.

Assessment Procedure

The ACGS assessment procedure is carried out through a review of documents and information provided by HUMI to the public, including information contained in the Annual Report, website, announcements and publication materials made by listed companies.

The assessment methodology consists of 2 levels, namely:

1. Level 1: minimum standard items expected to be implemented in each ASEAN member country and include laws and regulations and OECD principles.
2. Level 2: bonus items that reflect good practices exceeding minimum standard expectations, as well as penalty items that reflect poor Governance.

Assessment Criteria

The new ACGS assessment criteria revised October 2023 consists of criteria aspects covering Rights and Equitable Treatment of Shareholders, Sustainability Resilience, Disclosure and Transparency and Responsibilities of the Board.

Assessor

The assessment was conducted by the Legal & Compliance Team then validated and approved by the ESG Committee.

Assessment Results

Based on this assessment, HUMI's compliance level performance based on ACGS criteria in 2024 obtained a score of 171 with the following details:

No	Aspek Aspects	Jumlah Item Pertanyaan Number of Question Items	Pencapaian 2024 Achievements 2024	N	N/A
A	Hak dan Perlakuan Adil terhadap Pemegang Saham Rights and Equitable Treatment of Shareholders	31	17	8	6
B	Keberlanjutan dan Ketahanan Sustainability and Resilience	22	17	3	2
C	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	34	27	5	2
D	Tanggung Jawab Dewan Responsibilities of the Board	87	71	10	6
	Total Nilai Total Score	174	132	26	16
	Bonus	18	15	3	0
	Penalty	26	24	0	2
		218	**171**	**29**	**18**

HUMI juga melakukan penilaian GCG berdasarkan kriteria SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan kriteria Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, dan memperoleh hasil sebagai berikut:

HUMI also conducted a GCG assessment based on the criteria of SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies and the criteria of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021, and obtained the following results:

COMPLY or EXPLAIN

SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies

No.	Aspek Aspects	Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendations	Pencapaian 2024 Achievements 2024	Explain
1	Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham Relationship of Public Companies with Shareholders in Guaranteeing Shareholders' Rights	2	5	5	0
2	Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of the Board of Commissioners	2	6	6	0
3	Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors	2	6	6	0
4	Keterbukaan Informasi Disclosure of Information	2	8	8	0
	Total Nilai **Total Score**	**8**	**25**	**25**	**0**

PUGKI - Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia 2021

General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021

No.	Aspek Aspects	Prinsip Principles	Pencapaian 2024 Achievements 2024	Rekomendasi Recommendations
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners	58	55	3
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners	22	17	5
3	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and Board of Commissioners	11	11	0
4	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Behaviour	12	12	0

No.	Aspek Aspects	Prinsip Principles	Pencapaian 2024 Achievements 2024	Rekomendasi Recommendations
5	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control, and Compliance	21	18	3
6	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency	15	10	5
7	Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham Protection of Shareholders' Rights	38	32	6
8	Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders	19	18	1
	Total	**196**	**173**	**23**

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's highest organ which has rights and authorities that are not possessed by the Board of Commissioners and the Board of Directors within the limits determined in the provisions of laws and regulations and the Company's Articles of Association.

RUPS merupakan media komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan para pemegang saham, melalui kesempatan tanya jawab yang diberikan kepada seluruh pemegang saham yang hadir pada setiap mata acara RUPS.

The GMS is a medium of communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors with shareholders, through the opportunity for questions and answers provided to all shareholders present at each GMS agenda item.

Dasar Hukum
Legal Basis

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020).
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Terbuka (POJK 16/2020).
4. Anggaran Dasar Perseroan.

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 15/2020).
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the IImplementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (POJK 16/2020).
4. Articles of Association of the Company.

Jenis RUPS
Type of GMS

Perseroan mengenal 2 jenis RUPS, yaitu:
1. RUPS Tahunan
   RUPS Tahunan (RUPST) diadakan setiap tahun, paling lambat enam bulan setelah penutupan tahun buku

The Company recognizes 2 types of GMS, namely:
1. Annual GMS
   The Annual GMS (AGMS) is held annually, no later than six months after the closing of the Company's fiscal year.

Perseroan. Hal-hal yang diputuskan dalam RUPS Tahunan meliputi:

a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
b. Pemberian pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan perhitungan tahunan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
d. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan
e. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
f. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS

2. RUPS Luar Biasa
Perseroan mengadakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) apabila Perseroan melakukan aksi korporat yang memerlukan persetujuan pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan, transaksi dengan benturan kepentingan sesuai ketentuan pasar modal, merger, akuisisi, dan sebagainya. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara RUPS Tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Matters decided in the Annual GMS include:

a. Approval of the Company's Annual Report including the supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements
b. Granting the full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for their managerial and supervisory duties that have been carried out during the relevant financial year, as long as such actions are recorded in the Annual Report and annual calculations as well as in accordance with applicable provisions
c. Determination of the use of the Company's net profit;
d. Appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms to audit the Company's books
e. Determination of salaries and other allowances for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company
f. Other matters requiring the approval of the GMS

2. Extraordinary GMS
The Company holds an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) if the Company carries out corporate actions that require shareholder approval, including but not limited to changes to the Company's Articles of Association, transactions with conflicts of interest in accordance with capital market provisions, mergers, acquisitions, and so on. An Extraordinary GMS may be held at any time based on the need to discuss and decide on the agenda of the meeting except for the agenda of the Annual GMS, by taking into account laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Pemegang Saham
Shareholders

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan yang memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Shareholders are individuals or legal entities who legally own shares of the Company and have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association. Shareholders do not intervene in the functions, duties, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Komposisi Pemegang Saham HUMI pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

HUMI's Shareholders Composition as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Pemegang Saham Shareholders Name	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	13.805.172.800	76,50
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.533.945.000	8,50
Publik Public	2.707.396.560	15,00

Hak, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
Rights, Authorities, and Responsibilities of Shareholders

Setiap individu maupun badan hukum yang menjadi pemilik saham di Perseroan memiliki hak-hak yang meliputi:

Every individual or legal entity that owns shares in the Company has rights which include:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan 1 suara.
   Kesempatan untuk mengusulkan agenda RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

   Kesempatan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS. Formulir surat kuasa tersedia di situs web HUMI pada tanggal Pemanggilan RUPS.
2. Memperoleh dan mempelajari materi RUPS selambatnya 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan, sehingga Pemegang Saham dapat memberikan suara pada saat usulan putusan agenda RUPS.
3. Kesempatan untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS.
4. Kesempatan untuk memberikan suara setuju, tidak setuju, atau abstain pada setiap usulan putusan agenda RUPS.
5. Mendapat perlakuan yang sama dari HUMI.

Sementara itu, pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham memiliki wewenang, antara lain:
1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Memberhentikan sementara anggota Direksi.
4. Menyetujui perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Menyetujui laporan tahunan.
6. Menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Menyetujui usulan alokasi penggunaan laba Perseroan termasuk pembagian dividen.

Terkait pelaksanaan RUPS, Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mempertimbangkan lokasi penyelenggaraan RUPS yang mudah dijangkau dan akan menghimbau seluruh pemegang saham untuk hadir di RUPS atau hadir secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) atau hadir melalui kuasa dengan menyampaikan informasi tersebut di seluruh kanal informasi yang dimiliki HUMI.

1. Attend the GMS and cast 1 vote.
   Opportunity to propose the GMS agenda and candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors by 1 or more shareholders representing at least 1/20 of the total number of shares with voting rights.

   Opportunity to grant power of attorney to another party if the shareholder is unable to attend the GMS. The power of attorney form is available on HUMI's website on the date of the GMS Invitation.
2. Obtain and study the GMS materials no later than 21 days before the GMS is held, so that Shareholders can vote at the time of the proposed GMS agenda resolution.
3. Opportunity to ask questions in every discussion of the agenda and every resolution of the GMS agenda.
4. Opportunity to vote in approve, not approve, or abstain on every proposed GMS agenda resolution.
5. Receive equal treatment from HUMI.

Meanwhile, during the implementation of the GMS, shareholders have the following authorities:
1. Appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Temporarily dismiss members of the Board of Directors.
4. Approve amendment and ratification of the Company's Articles of Association.
5. Approve the annual report.
6. Approve the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Approve the proposed allocation for the use of the Company's profits including the distribution of dividends.

Regarding the implementation of the GMS, the Company is committed to always considering the location of the GMS that is easy to reach and will urge all shareholders to attend the GMS or attend electronically through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) application or attend by proxy by submitting the information on all information channels owned by HUMI.

Tata Tertib RUPS
GMS Rules and Regulations

Penyelenggaraan RUPS yang akan dilakukan HUMI sebagai Perusahaan Terbuka, memiliki tata tertib, sebagai berikut:
1. Tata tertib RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada POJK 15/2020.
2. Tata tertib RUPS dapat diakses oleh pemegang saham/kuasanya pada saat pemanggilan di situs web Perseroan dan didistribusikan saat registrasi.
3. Tata tertib RUPS mengatur antara lain peserta rapat yang berhak hadir dalam RUPS, pimpinan rapat, bahasa yang digunakan dalam RUPS, kuorum pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan, mekanisme tanya jawab

The implementation of the GMS to be carried out by HUMI as a Public Company, has the following rules and regulations:
1. The GMS rules and regulations are implemented in accordance with POJK 15/2020.
2. The GMS rules and regulations can be accessed by shareholders/their proxies at the time of the invitation on the Company's website and distributed during registration
3. The GMS rules and regulations regulate, among other things, meeting participants who are entitled to attend the GMS, the chairman of the meeting, the language used in the GMS, the quorum for holding the meeting

dan pemberian tanggapan, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara pemungutan suara.

4. Pokok-pokok tata tertib RUPS dibacakan sebelum RUPS dimulai.
5. Sesuai dengan ketentuan tata tertib RUPS yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham mengenai:
   a. Kondisi umum Perseroan secara singkat
   b. Mata acara RUPS
   c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS
   d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

and making decisions, the question and answer and response mechanism, the decision-making mechanism and the voting procedure.

4. The main points of the GMS rules and regulations are read out before the GMS begins.
5. In accordance with the provisions of the GMS rules and regulations stipulated in the Company's Articles of Association, at the opening of the GMS, the GMS chairman provides an explanation to shareholders regarding:
   a. The Company's general conditions in brief
   b. The GMS agenda
   c. The decision-making mechanism related to the GMS agenda
   d. Procedures for exercising the rights of shareholders to raise questions and/or opinions

Hak Pemegang Saham dan Kehadiran Pihak Lain dalam RUPS
Shareholder Rights and Attendance of Other Parties at the GMS

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan. Adapun pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perusahaan terbuka 1 hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

Dalam penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan pada tanggal 14 Juni 2024, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS adalah para pemegang saham HUMI yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.

Shareholders, either individually or represented by a proxy, are entitled to attend the GMS held by the Company. Shareholders who are entitled to attend the GMS are shareholders whose names are recorded in the shareholder register of a public company 1 working day before the GMS invitation.

In the implementation of the Company's AGMS and EGMS on June 14, 2024, shareholders who were entitled to attend or be represented at the GMS were HUMI's shareholders who were registered in the Company's Shareholder Register on Wednesday, May 22, 2024, at 16.00 WIB.

Pemberian Kuasa dan Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Power of Attorney and Electronic Power of Attorney

Sesuai ketentuan POJK 15/2020, Perseroan memfasilitasi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemegang saham dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pemberian Kuasa wajib dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

In accordance with the provisions of POJK 15/2020, the Company facilitates shareholders to provide electronic power of attorney for shareholders to attend and vote at the GMS. Shareholders can provide their power of attorney to the Proxy through the eASY.KSEI facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). The granting of Power of Attorney must be done no later than 1 working day before the GMS is held.

Upaya Perseroan untuk Meningkatkan Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS
The Company's Efforts to Increase Shareholders Attendance at the GMS

Perseroan senantiasa berupaya meningkatkan kehadiran pemegang saham untuk menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS.

Sebagai Perusahaan Terbuka, HUMI melakukan:

1. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS secara tepat waktu, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dipublikasikan pada situs web HUMI, situs web Bursa dan situs web KSEI.
2. Dalam Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, Perseroan memaparkan secara jelas pemegang saham yang berwenang untuk menghadiri/mewakili dan memberikan

The Company always strives to increase the attendance of shareholders to exercise their rights and authorities at the GMS.

As a Public Company, HUMI carries out:

1. Announcement and Invitation of GMS in a timely manner, in Indonesian and English which is published on the websites of HUMI, Stock Exchange, and KSEI.

2. In the Announcement and Invitation of the GMS, the Company clearly states the shareholders who are authorized to attend/represent and vote in the GMS,

suara dalam RUPS, yakni pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI, 1 hari sebelum hari Pemanggilan.
3. Pada situs web HUMI tersedia kontak yang dapat digunakan pemegang saham ataupun korespondensi melalui *e-mail*.

namely the Company's shareholders whose names are registered in the Company's shareholder register or shareholders in the securities account at KSEI, 1 day before the day of the Invitation.
3. On the HUMI's website, there are contacts that can be used by shareholders or correspondence via e-mail.

Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham
The Company's Relationship with Shareholders

Hubungan Perseroan dengan pemegang saham, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
1. Memenuhi hak setiap pemegang saham untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan wajar sesuai peraturan perundang-undangan yaitu dengan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.
2. Perseroan memberikan informasi material secara tepat waktu, terukur, dan teratur kepada pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas.
3. Melaksanakan hasil RUPS dan memberikan laporan secara berkala mengenai tindak lanjut hasil RUPS dalam rangka memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.
4. Memberikan pembagian dari keuntungan Perseroan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.

The Company's relationship with shareholders is based on the following provisions:
1. Fulfilling the rights of every shareholder to receive fair and reasonable treatment in accordance with laws and regulations, namely by sending invitations to shareholders, to attend and vote in the GMS, both Annual GMS and Extraordinary GMS.
2. The Company provides material information in a timely, measurable, and regular manner to shareholders, both majority and minority.
3. Implementing the GMS resolutions and providing periodic reports on the follow-up to the GMS resolutions in order to provide added value to shareholders.
4. Providing distribution of the Company's profits to shareholders in the form of dividends and remaining assets from liquidation, in proportion to the number of shares owned.

Pelaksanaan RUPS HUMI 2024
HUMI'S GMS Implementation in 2024

Pada 2024, Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada hari yang sama, yaitu 14 Juni 2024. Penyelenggaraan RUPS tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, diselenggarakan secara *hybrid*. Seluruh peserta RUPS secara fisik hadir di Artotel Suites Mangkuluhur, Lantai M. Seluruh peserta yang hadir baik fisik maupun e-RUPS dapat mengikut RUPS. Hasil Keputusan RUPS tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan diumumkan pada situs web HUMI (www.humi.co.id), situs web BEI (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

In 2024, the Company held both Annual GMS and Extraordinary GMS on the same day, namely June 14, 2024. The implementation of the GMS has been adjusted to the provisions of the Articles of Association, POJK 15/2020 and POJK 16/2020, held in a hybrid manner. All participants of the GMS were physically present at Artotel Suites Mangkuluhur, M Floor. All participants who attended both physically and e-GMS were able to participate in the GMS. The GMS resolutions have been reported to the OJK and announced on the websites of HUMI (www.humi.co.id), IDX (www.idx.co.id), and the KSEI (www.ksei.co.id).

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, 14 Juni 2024
Annual GMS and Extraordinary GMS, June 14, 2024

RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa HUMI pada tanggal 14 Juni 2024 diselenggarakan secara *hybrid*, dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar HUMI.

The Annual GMS and Extraordinary GMS of HUMI on June 14, 2024, were held in a hybrid manner, using the Electronic General Meeting System Application of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia eASY.KSEI Application and taking into account POJK No. 16/2020 and the provisions of HUMI's Articles of Association.

Hari, Tanggal dan Waktu Day, Date and Time	Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, Pukul 14.05 s.d 16.15 WIB Friday, June 14, 2024, 14.05-16.15 WIB
Lokasi Location	Ruang Sapphire, Artotel Suites Mangkuluhur Lantai. M, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 1-3, Jakarta 12930, Indonesia Sapphire Room, Artotel Suites Mangkuluhur M Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3, Jakarta 12930, Indonesia
Pimpinan Rapat Meeting Chairman	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak., selaku Komisaris Utama Perseroan Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.,as the Company's President Commissioner
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum	• RUPS Tahunan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.346.525.800 saham atau mewakili 85,04% dari 18.046.483.743 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. The Annual GMS was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 15,346,525,800 shares or representing 85.04% of the 18,046,483,743 shares which were all shares with valid voting rights issued by the Company. • RUPS Luar Biasa telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 15.348.738.101 saham atau mewakili 85,05% dari 18.046.483.743 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. The Extraordinary GMS was attended by shareholders and proxies of shareholders representing 15,348,738,101 shares or representing 85.05% of the 18,046,483,743 shares which were all shares with valid voting rights issued by the Company.
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. selaku Komisaris Utama beserta Komisaris Independen, Daryono hadir secara fisik dan via konferensi video. Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. as the President Commissioner concurrent as Independent Commissioner, Daryono were present physically and via video conference.
Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance	Tirta Hidayat selaku Direktur Utama beserta Direktur, Dedi Hudayana hadir secara fisik dan via konferensi video. Tirta Hidayat as President Director along with Director, Dedi Hudayana were present physically and via video conference.
Kehadiran Anggota Komite Audit termasuk Ketua Komite Audit Attendance of the Audit Committee Members including Head of the Audit Committee	Daryono selaku Ketua Komite Audit beserta anggota Komite hadir secara fisik dan via konferensi video. Daryono as Head of the Audit Committee along with Committee members were present physically and via video conference.
Kehadiran Anggota Komite Nomimasi dan Remunerasi termasuk Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Attendance of the Nomination and Remuneration Committee Members including Head of the Nomination and Remuneration Committee	Daryono selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi beserta anggota Komite hadir secara fisik dan via konferensi video. Daryono as Head of the Nomination and Remuneration Committee along with Committee members were present physically and via video conference.
Kehadiran Anggota Komite ESG termasuk Ketua Komite ESG Attendance of the ESG Committee Members including Head of the ESG Committee	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. selaku Ketua Komite ESG beserta anggota Komite hadir secara fisik dan via konferensi video. Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. as Head of the ESG Committee along with Committee members were present physically and via video conference.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat Submission of Questions and/or Opinions	Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, kecuali untuk Mata Acara Kelima, karena Mata Acara Kelima tidak ada pengambilan keputusan. Namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Shareholders and proxies of shareholders were given the opportunity to raise questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, except for the Fifth Agenda, because there was no decision-making on the Fifth Agenda. However, no shareholders and proxies of shareholders raised questions and/or opinions.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Decision Making Mechanism	Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Decision-making on all agenda items was carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that deliberation to reach consensus was not achieved, decision-making was carried out by voting.
Pihak Independen untuk Validasi Pemungutan Suara Independent Party for Voting Validation	Notaris, Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn. dan PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan dan/atau melakukan validasi dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Notary, Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn. and PT EDI Indonesia, as the Share Registrar to perform calculations and/or validate and vote in the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Penyelenggaraan RUPS tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 14 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

The implementation of the GMS has been adjusted to the provisions of the Articles of Association, POJK 15/2020 and POJK 16/2020. The implementation stages of the Annual GMS and Extraordinary GMS on June 14, 2024, were as follows:

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Description
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada Regulator Notification of the Annual GMS and Extraordinary GMS to the Regulator	30 April 2024 April 30, 2024	Disampaikan 5 hari kerja sebelum Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Submitted 5 working days before the Announcement of the Annual GMS and Extraordinary GMS to the OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Announcement of the Annual GMS and Extraordinary GMS	8 Mei 2024 May 8, 2024	1. Dilakukan 14 hari sebelum Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Conducted 14 days before the Invitation of the Annual GMS and Extraordinary GMS, excluding the date of the Announcement and Invitation of the Annual GMS and Extraordinary GMS. 2. Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia pada situs web HUMI, situs web Bursa dan situs web KSEI. Published in Indonesian on the websites of HUMI, Stock Exchange and KSEI. 3. Laporan Pengumuman RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK dan Bursa pada hari dan tanggal yang sama (*e-reporting* via SPE IDXNet). The Announcement Report of the Annual GMS and Extraordinary GMS was submitted to OJK and the Stock Exchange on the same day and date (e-reporting via SPE IDXNet (IDXNet electronic reporting system)).
Tanggal Pencatatan *(Recording Date)* Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Recording Date of Shareholder Register entitled to attend the Annual GMS and Extraordinary GMS	22 Mei 2024 May 22, 2024	Tercatat 1 hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Recorded 1 working day before the Invitation for the Annual GMS and Extraordinary GMS.
Pemanggilan termasuk penjelasan atas setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa The invitation includes an explanation of each agenda item of the Annual GMS and Extraordinary GMS.	23 Mei 2024 May 23, 2024	1. Dilakukan 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Conducted 21 days before the implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS, excluding the date of the Invitation and implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS. 2. Dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada situs situs web HUMI, situs web Bursa dan situs web KSEI. Published in Indonesian and English on the websites of HUMI, Stock Exchange and KSEI. 3. Laporan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK dan Bursa pada hari dan tanggal yang sama (*e-reporting* via SPE IDXNet). The Invitation Report for the Annual GMS and Extraordinary GMS was submitted to OJK and the Stock Exchange on the same day and date (e-reporting via SPE IDXNet).
Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS	14 Juni 2024 June 14, 2024	RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan secara *hybrid* dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Pasal 18 ayat (2) AD Perseroan. Perseroan juga menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa secara fisik di sebuah ruangan. Seluruh peserta RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa mengikuti dan berpartisipasi dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. The Annual GMS and Extraordinary GMS were held in a hybrid manner using the eASY. KSEI Application and in accordance with POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies in conjunction with Article 18 paragraph (2) of the Company's Articles of Association. The Company also held the Annual GMS and Extraordinary GMS physically in a room. All participants of the Annual GMS and Extraordinary GMS attended and participated in the Annual GMS and Extraordinary GMS.

Kegiatan Activity	Tanggal Date	Keterangan Description
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Announcement of the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS	15 Juni 2024 June 15, 2024	1. Publikasi Resume RUPS Tahunan dan RUPS Luar Bisa (notariil) Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, termasuk hasil pemungutan suara setiap agenda, diunggah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di situs web HUMI, situs web Bursa dan situs web KSEI. Publication of Summary of Annual GMS and Extraordinary GMS (notary) Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS, including voting results for each agenda, were uploaded in Indonesian and English on the websites of HUMI, Stock Exchange and KSEI. 2. Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK dan Bursa pada hari dan tanggal yang sama (*e-reporting* via SPE IDXNet). Report of the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS was submitted to OJK and the Stock Exchange on the same day and date (e-reporting via SPE IDXNet).
Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kepada OJK dan BEI Submission of the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS to OJK and IDX	16 Juli 2024 July 16, 2024	1. Akta Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Bisa disampaikan ke OJK dan BEI paling lambat 30 hari kalender setelah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa diselenggarakan serta diunggah pada situs web HUMI, situs web Bursa. The Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS shall be submitted to the OJK and the IDX no later than 30 calendar days after the implementation of the Annual GMS and Extraordinary GMS and uploaded to the websites of HUMI, and the Exchange. 2. Laporan Akta Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa disampaikan ke OJK dan Bursa pada hari dan tanggal yang sama (*e-reporting* via SPE IDXNet). Report of the Summary of Minutes of the Annual GMS and Extraordinary GMS shall be submitted to OJK and the Exchange on the same day and date (e-reporting via SPE IDXNet).

Keputusan RUPS Tahunan 14 Juni 2024

Hasil keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 8, tanggal 14 Juni 2024, yang dibuat oleh Dr. Putra Hutomo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

Annual GMS Resolutions on June 14, 2024

The Annual GMS resolutions have been stated in the Deed of Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 8, dated June 14, 2024, made by Dr. Putra Hutomo, Bachelor of Law, Master of Notary, Notary in the Administrative City of South Jakarta, as follows:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan yang Berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Teraudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023). Approval of the Annual Report Ended on the thirty-first of December two thousand twenty-three (December 31, 2023) and Ratification of the Audited Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty-three (December 31, 2023).		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Total suara mayoritas:** 15.344.434.700 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. **Total majority votes:** 15,344.434,700 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes validly cast at the Meeting.		
	Setuju **Agree**	**Tidak Setuju** **Disagree**	**Blanko/Abstain** **Blank/Abstain**
	15.344.434.700 saham | shares	59.100 saham | shares	2.032.000 saham | shares

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 Desember 2023, di mana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2023, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2023, termasuk Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor 00468/2.1032/AU.1/06/12943/1/III/2024 tertanggal 30-03-2024 (tiga puluh Maret dua ribu dua puluh empat) dengan pendapat "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia". 3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). 1. Approve the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023, which contained the Audited Consolidated Financial Statements for 2023, Report on the Company's business activities and operations for 2023, including the Supervisory Report conducted by the Company's Board of Commissioners. 2. Ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2023 (thirty first December two thousand and twenty-three) which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) as contained in Report Number 00468/2.1032/AU.1/06/12943/1/III/2024 dated March 30, 2024 (thirtieth March two thousand and twenty-four) with the opinion "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2023 (thirty first December two thousand and twenty-three), as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended on that date, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards". 3. Grant the full release and discharge (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the managerial and supervisory actions carried out in the Financial year 2023 (two thousand and twenty three), as long as the managerial and supervisory actions are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2023 (thirty first of December two thousand and twenty three).
Tindak Lanjut Follow-Up	Keputusan langsung berlaku efektif. The resolutions became effective immediately.

Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga (31 Desember 2023). Determination of Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on the thirty-first of December two thousand twenty-three (December 31, 2023).
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Total suara mayoritas:** 15.344.434.700 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat **Total majority votes:** 15,344.434,700 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes validly cast at the Meeting.

Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Blanko/Abstain** Blank/Abstain
15.344.434.700 saham | shares	59.100 saham | shares	2.032.000 saham | shares

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebesar USD10.414.262,00 untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) untuk: a. Dibagikan 11% dari Laba Bersih setelah pajak yang menjadi hak pemilik entitas induk sebagai dividen tunai sebesar USD1.185.786,00 (*gross*) atau setara dengan Rp18.046.483.948,00 (*gross*) yang akan didistribusikan ke pemegang saham sebagai dividen, dimana hal ini setara dengan Rp1,00 per lembar saham dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal; b. Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar USD10.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); c. Sisa Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi pembagian dividen dan cadangan akan dicatat dalam Saldo Laba Ditahan sebesar USD9.218.476,00 untuk membiayai pengembangan usaha Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Approve the determination of the use of the Company's Net Profit after tax which became the right of the owners of the parent entity in the amount of USD10,414,262.00 (ten million four hundred fourteen thousand two hundred and sixty two United States Dollars) for the Financial Year ended on December 31, 2023 (thirty first of December two thousand twenty three) for: a. Allocate 11% of Net Profit after tax which became the right of the owners of the parent entity as cash dividend amounted to USD1,185,786.00 (gross) or equivalent to Rp18,046,483,948.00 gross) which will be distributed to shareholders as dividend, where this is equivalent to Rp1.00 per share and authorize the Board of Directors to determine the procedure for distributing the cash dividends in accordance with the provisions applicable in the Capital Market sector; b. Set aside as the Company's reserves in the amount of USD10,000.00 (ten thousand United States Dollars) as stipulated in Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT); c. The remaining Net Profit of the Company after deducting the distribution of dividends and reserves will be recorded in the Retained Earnings Balance in the amount of USD9,218,476.00 to finance the Company's business development. 2. Grant the power and authority to the Company's Board of Directors to carry out any and all necessary actions in connection with the above resolutions in accordance with applicable laws and regulations.
Tindak Lanjut Follow-Up	Dividen tunai tahun buku 2023 telah dibagikan kepada pemegang saham pada Senin, 15 Juli 2024. The cash dividend for the financial year 2023 has been distributed to shareholders on Monday, July 15, 2024.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik Perseroan (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut. Appointment of the Company's Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) for the financial year ended on December 31, 2024 and Determination of Honorarium and Other Requirements in connection with the Appointment.		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Total suara mayoritas:** 15.346.525.800 suara, atau 100% **Total majority votes:** 15,346,525,800 votes, or 100%		
	Setuju **Agree**	**Tidak Setuju** **Disagree**	**Blanko/Abstain** **Blank/Abstain**
	15.346.525.800 saham | shares	0 saham | shares	0 saham | shares

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dengan berkonsultasi terlebih dahulu dan mendapat persetujuan Pemegang Saham Utama. Pemberian wewenang ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses penyelesaian penyusunan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. Rekomendasi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain: a. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan; b. Memenuhi syarat independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik sesuai aturan yang berlaku; c. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia serta rekomendasi sehubungan dengan pengendalian intern akuntansi dan memahami kompleksitas Grup Perseroan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. 3. Dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK. 1. Grant the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2024 by taking into account the recommendations of the Audit Committee by consulting in advance and obtaining the approval of the Majority Shareholders. This granting of authority was taken considering that until the holding of this Meeting, the process of completing the preparation of the Recommendations from the Company's Audit Committee was still being carried out. The recommendations of the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based on criteria, including: a. Registered with the Financial Services Authority; b. Meet the independence requirements of Public Accountants, Public Accounting Firms, and insiders of Public Accounting Firms in accordance with applicable regulations; c. The scope of the audit includes an examination of the Company's books conducted independently in accordance with generally accepted Accounting Standards in Indonesia as well as recommendations regarding internal accounting controls and understanding the complexity of the Company's Group. 2. Grant the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, taking into account the recommendations of the Audit Committee. 3. In the event that the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm for some reason cannot carry out their duties, grant the authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has the competence and experience in the Company's business and registered with the OJK.
Tindak Lanjut Follow-Up	Keputusan langsung berlaku efektif. The resolutions became effective immediately.

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Determination of Salaries and Other Allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Total suara mayoritas:** 15.345.443.800 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. **Total majority votes:** 15,345,443,800 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes validly cast at the Meeting.		
	Setuju **Agree**	**Tidak Setuju** **Disagree**	**Blanko/Abstain** **Blank/Abstain**
	15.345.443.800 saham I shares	1.038.000 saham I shares	43.900 saham I shares

Keputusan Rapat Meeting Resolutions	1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama. 1. Grant the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2024. 2. Determine the salaries and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners as a whole for the financial year 2024 following the proportional remuneration of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee in consultation with the Majority Shareholders.
Tindak Lanjut Follow-Up	Keputusan langsung berlaku efektif. The resolutions became effective immediately.

Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realization Report of the Use of Proceeds from Public Offering.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	Tidak dilakukan pemungutan suara karena tidak ada pengambilan keputusan. No voting was carried out because no resolution was made.
Keputusan Rapat Meeting Resolutions	Tidak ada pengambilan keputusan dalam Mata Acara Kelima karena bersifat penyampaian laporan. No resolution was made in the Fifth Agenda Item because it was a report submission.
Tindak Lanjut Follow-Up	Keputusan langsung berlaku efektif. The resolutions became effective immediately.

Keputusan RUPS Luar Biasa 14 Juni 2024

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 9, tanggal 14 Juni 2024, adalah sebagai berikut:

Extraordinary GMS Resolutions on June 14, 2024

The Extraordinary GMS resolutions have been stated in the Deed of Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 9, dated June 14, 2024, as follows:

Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Approval of Amendments to the Articles of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulations.		
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Total suara mayoritas:** 15.348.667.700 suara, atau 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. **Total majority votes:** 15,348,667,700 votes, or 99.99%, or more than 1/2 of the total number of votes validly cast at the Meeting.		
	Setuju Agree	**Tidak Setuju** Disagree	**Blanko/Abstain** Blank/Abstain
	15.348.667.700 saham I shares	70.400 saham I shares	0 saham I shares
Keputusan Rapat	1. Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut "Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk didalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah sebagaimana diputuskan dalam Mata Cara Rapat ini di hadapan Notaris, termasuk tidak terbatas untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi berwenang serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.		

Meeting Resolutions	1. Approve the amendment to Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association to be as follows "The Company is required to announce the Financial Statements, including the Balance Sheet and Statement of Profit/Loss in accordance with the procedures applicable in the provisions of laws and regulations, Financial Services Authority Regulations and applicable Capital Market Regulations." and became part of the Company's Articles of Association, the other provisions of which are not amended, as required by the applicable laws and regulations. 2. Grant the authority and power to the Company's Board of Directors, with the substitution rights, to take all and any action required in connection with the resolution, including but not limited to stating/setting down the resolution in deeds made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of Article 17 paragraph 5 of the Company's Articles of Association or Article 17 of the Company's Articles of Association as a whole, so that it became part of the Company's Articles of Association, the other provisions of which are not amended as decided in the Agenda of this Meeting before a Notary, including but not limited to submitting an application for approval and/or submitting notification of the resolution of this Meeting and/or amendment to the Company's Articles of Association in the resolution of this Meeting to the authorized agency and taking the necessary actions as required by the laws and regulations applicable to the Company.
Tindak Lanjut Follow-up	Keputusan langsung berlaku efektif. The resolutions became effective immediately.

Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya
Realization of Previous Year's GMS Resolutions

Tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 kali, yaitu RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 April 2023 dan RUPS Tahunan pada 23 Juni 2023. Seluruh keputusan pada kedua RUPS tersebut telah direalisasikan pada tahun 2023.

In 2023, the Company held 2 GMS, namely the Extraordinary GMS on April 13, 2023 and the Annual GMS on June 23, 2023. All resolutions at the two GMS have been realized in 2023.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas utama mengawasi jalannya pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memastikan arah pengelolaan Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dan memastikan Perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas dan kegiatan usahanya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dan wajib bertindak secara independen.

The Board of Commissioners is an organ of the Company whose main task is to oversee the management of the Company by the Board of Directors. In carrying out these duties, the Board of Commissioners can provide advice to the Board of Directors in running the Company and ensure that the direction of the Company's management is in accordance with the stated intent and objectives, and ensure that the Company has implemented the principles of good corporate governance in all its activities and business operations. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees and must act independently.

Dasar Hukum
Legal Basis

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan.
4. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 3 November 2022 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0072608 tanggal 3 November 2022.

The legal basis used as a reference in the appointment and nomination of the Company's Board of Commissioners, includes:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Financial Services Authority Regulation (POJK), OJK Circular Letter regarding the implementation and organs of Corporate Governance.
4. The Company's Articles of Association and its amendments.
5. Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders Resolutions No. 15 dated November 3, 2022, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham RI) through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.09.0072608 dated November 3, 2022.

Pedoman Dewan Komisaris
Board of Commissioners Charter

Pedoman Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman secara berkala dilakukan evaluasi dan diperbaharui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman Dewan Komisaris disahkan pada tanggal 1 September 2022 dan telah diunggah ke situs web Perseroan www.humi.co.id.

The Board of Commissioners Charter is a reference for the Board of Commissioners in carrying out its functions, duties and responsibilities. The charter is periodically evaluated and updated with reference to the applicable rules and regulations in Indonesia. The Board of Commissioners Charter was ratified on September 1, 2022 and has been uploaded to the Company's website www.humi.co.id.

Secara garis besar, isi Pedoman Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Dasar Hukum.
3. Organisasi Dewan Komisaris.
4. Masa Jabatan.
5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang.
6. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.
7. Remunerasi.
8. Rapat Dewan Komisaris.
9. Ketentuan Terkait Rapat Dewan Komisaris.
10. Pengunduran Diri dan Pemberitahuan Sewaktu-waktu.
11. Standar Etika.
12. Ketentuan Lainnya.
13. Penutup.

In general, the contents of the Board of Commissioners Charter are as follows:

1. Introduction.
2. Legal Basis.
3. Organization of the Board of Commissioners.
4. Term of Office.
5. Duties, Responsibilities, and Authorities.
6. Performance Assessment of the Board of Commissioners.
7. Remuneration.
8. Meeting of the Board of Commissioners.
9. Provisions Related to Meeting of the Board of Commissioners.
10. Resignation and Dismissal at Any Time.
11. Ethical Standards.
12. Other Provisions.
13. Closing.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024

Structure, Number and Composition of Members of the Board of Commissioners in 2024

Susunan, jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024, telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris, di antaranya:

1. Jumlah Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang anggota Dewan Komisaris. Seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

The structure, number and composition of members of the Company's Board of Commissioners in 2024, has fulfilled all applicable provisions, as stipulated in the Board of Commissioners Charter, including:

1. The Board of Commissioners consists of 2 members of the Board of Commissioners. One of them is appointed as the President Commissioner.
2. The composition and number of members of the Board of Commissioners are determined by the GMS by taking into account the Company's vision, mission and strategic plan, so as to enable effective, precise and fast decision-making and to be able to act independently.

Hingga akhir tahun 2024 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Until the end of 2024, there were no changes to the structure and composition of members of the Board of Commissioners, so that the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Masa Jabatan** Term of Office	**Periode Jabatan** Office Period
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	Komisaris Utama President Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 3 November 2022 Appointed as President Commissioner based on the Deed of Statement of the Extraordinary GMS Resolutions No. 15 dated November 3, 2022	3 November 2022 s.d RUPS Tahunan Tahun 2027 November 3, 2022 until Annual GMS 2027	Ke-1 First
Daryono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 3 November 2022 Appointed as Independent Commissioner based on the Deed of Statement of the Extraordinary GMS Resolutions No. 15 dated November 3, 2022	3 November 2022 s.d RUPS Tahunan Tahun 2027 November 3, 2022 until Annual GMS 2027	Ke-1 First

Profil singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Brief profile of each member of the Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Masa Jabatan Dewan Komisaris
Term of Office of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Masa jabatan Dewan Komisaris untuk 1 periode paling lama adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 5 tahun berikutnya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by shareholders through the GMS mechanism. The term of office of the Board of Commissioners for 1 period is a maximum of 5 years from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the closing of the Annual GMS 5 years later, but without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term of office ends.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 kali masa jabatan, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS.

After their term of office ends, members of the Board of Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 term of office, unless otherwise determined in the GMS.

Jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila:
1. Masa jabatannya berakhir.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia dalam masa jabatannya.
5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.
6. Terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan.
7. Batal karena hukum apabila diketahui anggota Dewan Komisaris tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 110 dan Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya harus mengumumkan batalnya pengangkatan tersebut dalam surat kabar serta memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak diketahuinya.

The Board of Commissioners' term of office ends if:
1. The term of office has ended.
2. Resigned in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. No longer meets the applicable legal requirements.
4. Passed away during term of office.
5. Dismissed by GMS Resolutions.
6. Involved in financial crimes.
7. It will be cancelled by law if it is discovered that the member of the Board of Commissioners does not fulfill the requirements as referred to in Law No. 40 of 2007, Article 110, and the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors must announce the cancellation of the appointment in a newspaper and notify the Minister to be recorded in the Company Register no later than 7 days from the date of discovery.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan.
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Mengundurkan diri sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 110.

Members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons, if the member of the Board of Commissioners:
1. Unable to carry out his/her duties properly.
2. Not implementing the provisions of laws and/or regulations and/or provisions of the Company's Articles of Association.
3. Involved in financial crimes.
4. Found guilty by a court verdict that has permanent legal force.
5. Resigned in accordance with the Company's Articles of Association.
6. The appointment of members of the Board of Commissioners does not meet the requirements as referred to in Law No. 40 of 2007 article 110.

Prosedur pemberhentian sewaktu-waktu, antara lain mencakup:
1. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
2. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

The procedures for dismissal at any time include, among others:
1. The member of the Board of Commissioners concerned is given the opportunity to defend himself/herself in the GMS.
2. Providing an opportunity to defend himself/herself is not necessary if the person concerned does not object to the dismissal.

Perseroan juga telah mengatur prosedur pengunduran diri, antara lain mencakup:

1. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Perusahaan wajib memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum & HAM paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

The Company has also regulated resignation procedures, including:

1. The resignation of a member of the Board of Commissioners from his/her position before the end of his/her term of office must submit a resignation application to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. The Company must hold a GMS to decide on the resignation application no later than 90 days after the resignation application is received.
3. The Company is required to provide disclosure of information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 working days after receiving the resignation request of the Board of Commissioners and the results of the GMS.
4. The Company is required to notify the Ministry of Law & Human Rights of changes in the members of the Board of Commissioners no later than 30 days from the date of the GMS resolutions.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Perseroan bertindak dan bertanggung jawab secara kolegial, dibantu oleh Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite ESG yang memiliki kompetensi bidangnya masing-masing. Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
5. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (4) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin (4) apabila dapat membuktikan:
   a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   b. Langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
   c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

The Company's Board of Commissioners acts and is responsible collegially, assisted by the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and ESG Committee which have their respective fields of competence. The Company's Board of Commissioners has the following duties, responsibilities, and authorities:

1. The Board of Commissioners supervises management policies, the general running of management, both regarding the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors.
2. Each member of the Board of Commissioners is obliged to act in good faith, with caution and responsibility in carrying out the duties of supervision and providing advice to the Board of Directors for the interests of the Company and in accordance with the intent and objectives of the Company.
3. Each member of the Board of Commissioners must carry out his/her duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and with caution.
4. Each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his/her duties.
5. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 or more members of the Board of Commissioners, then the responsibility as referred to in point (4) shall apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners.
6. Members of the Board of Commissioners shall not be held responsible for losses as referred to in point (4) if they can prove:
   a. Has carried out supervision in good faith and with caution for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
   b. Directly or indirectly for the managerial actions of the Board of Directors that result in losses; and
   c. Has provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.

7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (7) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin (7) apabila dapat membuktikan:
    a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
    d. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
10. Dewan Komisaris wajib membuat:
    a. Risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
    b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut; dan
    c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
11. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dan dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.
12. Dewan Komisaris dapat membentuk komite dengan merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku dan wajib dilakukan evaluasi kinerja komite setiap akhir tahun buku.

7. In the event of bankruptcy due to the error or negligence of the Board of Commissioners in supervising the management carried out by the Board of Directors and the Company's assets are insufficient to pay all of the Company's obligations due to the bankruptcy, each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally responsible with the members of the Board of Directors for the obligations that have not been paid.
8. The responsibility as referred to in point (7) shall also apply to members of the Board of Commissioners who have not served 5 years before the bankruptcy declaration decision is pronounced.
9. Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the bankruptcy of the Company as referred to in point (7) if they can prove:
    a. The bankruptcy is not due to his/her fault or negligence;
    b. Has carried out supervisory duties in good faith and with caution for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
    c. Has no personal interest, either directly or indirectly, in the managerial actions by the Board of Directors that result in bankruptcy; and
    d. Has provided advice to the Board of Directors to prevent bankruptcy.
10. The Board of Commissioners is required to make:
    a. Minutes of the Board of Commissioners meeting and keep a copy thereof;
    b. Report to the Company regarding its and/or its family's shares ownership in the Company; and
    c. Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the previous financial year to the GMS.
11. Based on the Articles of Association or the GMS resolutions, the Board of Commissioners has the authority to temporarily dismiss members of the Board of Directors and may carry out managerial actions for the Company under certain circumstances for a certain period of time and all applicable provisions regarding the rights, authorities and obligations of the Board of Directors towards the Company and third parties.
12. The Board of Commissioners may form a committee by referring to the applicable legal provisions and must conduct a performance evaluation of the committee at the end of each financial year.

Pembidangan Tugas Anggota Dewan Komisaris
Division of Duties of Members of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris mengemban tugas serta merangkap jabatan sebagai ketua dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dengan rincian sebagai berikut:

Members of the Board of Commissioners carry out duties and hold concurrent positions as head of the committees under the Board of Commissioners, with the following details:

Komite Committee	Keanggotaan Komite oleh Anggota Dewan Komisaris Committee Membership by Members of the Board of Commissioners
Komite Audit Audit Committee	Daryono
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Daryono
Komite *Environment, Social & Governance* (ESG) Environment, Social & Governance (ESG) Committee	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.

Independensi Dewan Komisaris
Independence of the Board of Commissioners

Komitmen independensi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing, serta independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The independence commitment of members of the Company's Board of Commissioners has been regulated in the Board of Commissioners Charter. As regulated in the Company's Articles of Association and the Board of Commissioners Charter, each member of the Company's Board of Commissioners has his/her respective duties and authorities, and is independent in carrying out his/her duties and authorities in accordance with applicable laws and regulations.

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and controlling shareholders, and is free from business relationships or other relationships that may affect his/her ability to act independently or act solely in the interests of the company.

Misi Komisaris Independen adalah mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris.

The mission of the Independent Commissioner is to encourage the creation of a more objective climate and place fairness among various interests, including the interests of the company and the interests of stakeholders as the main principle in decision-making by the Board of Commissioners.

Pada tahun 2024, Komisaris Independen HUMI berjumlah 1 orang anggota dari total 2 anggota Dewan Komisaris atau setara dengan 50%, telah memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komposisi Komisaris Independen minimal 30% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan

In 2024, HUMI's Independent Commissioner consisted of 1 member out of a total of 2 members of the Board of Commissioners or equivalent to 50%, which has complied with POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the composition of Independent Commissioners is at least 30% of

Komisaris. Jumlah anggota Komisaris Independen HUMI juga telah memenuhi jumlah minimal Komisaris Independen yang diatur dalam ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang mensyaratkan jumlah Komisaris Independen berjumlah 50% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen diangkat berdasarkan persetujuan RUPS.

the total number of members of the Board of Commissioners. The number of Independent Commissioners in HUMI has also complied with the minimum number of Independent Commissioners stipulated in the ASEAN Corporate Governance Scorecard which requires the number of Independent Commissioners to be 50% of the total number of members of the Board of Commissioners. Independent Commissioners are appointed based on the approval of the GMS.

Pemenuhan Aspek Independensi Komisaris Independen
Fulfillment of the Independence Aspect of Independent Commissioner

Aspek Independensi Independence Aspect	Daryono
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the Company's activities in the last six months.	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Has no shares either directly or indirectly in the Company.	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan. Has no affiliated relationship with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.	✓
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya. Has no financial relationship, either directly or indirectly, with the Company or other companies that provide services and products to the Company and its affiliates.	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Has no direct or indirect business relationship related to the Company's business activities.	✓

✓ Ya I Yes ✗ Tidak I No

Fokus Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2024
Focus of Supervision of the Board of Commissioners in 2024

Selama tahun 2024, fokus pengawasan Dewan Komisaris mencakup beberapa aspek penting yaitu:

1. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan
   Direksi dan seluruh jajaran manajemen perlu terus meningkatkan dan menjaga budaya *cost consiousness* dan *cost effective* dalam mengelola keuangan perusahaan. Setiap pengeluaran perusahaan harus berelasi positif dengan peningkatan *value asset* dan peningkatan kinerja profitabilitas perusahaan.
2. Budaya pengelolaan berbasis ESG dan Keberlanjutan
   Seluruh insan perusahaan perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kesadarannya tentang pengelolaan perusahaan berbasis ESG dan Keberlanjutan kemudian menjadikan praktik tata kelola perusahaan berbasis ESG dan Keberlanjutan tersebut sebagai budaya kerja.
3. Pembenahan Organisasi
   Pembenahan organisasi dan manajemen di semua lini perlu terus dilakukan agar perusahaan mampu beradaptasi dan merespon setiap perubahan lingkungan bisnis, baik perubahan faktor eksternal maupun internal.

During 2024, the focus of supervision of the Board of Commissioners covered several important aspects, namely:

1. Efficiency and effectiveness of financial management
   The Board of Directors and all levels of management need to continue to improve and maintain a culture of cost consciousness and cost effectiveness in managing the Company's finances. Every company expenditure must be positively related to the increase in asset value and the increase in the Company's profitability performance.
2. ESG and Sustainability based management culture
   All company personnel need to continue to improve their knowledge and awareness of ESG and Sustainability-based corporate management and then make ESG and Sustainability-based corporate governance practices a work culture.
3. Organizational Improvements
   Organizational and management improvements in all lines need to be continuously carried out so that the Company is able to adapt and respond to every change in the business environment, both changes in external and internal factors.

4. Penerapan teknologi informasi manajemen berbasis ERP dan *artificial inteligence*, memulai tradisi pembagian deviden kepada pemegang saham, menerapkan strategi tumbuh kembang perusahaan secara organik dan un-organik.

4. Implementation of ERP-based management information technology and artificial intelligence, starting the tradition of distributing dividends to shareholders, implementing organic and unorganic company growth strategies.

Rekomendasi Dewan Komisaris
Recommendations of the Board of Commissioners

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

In accordance with laws and regulations, the Board of Commissioners may provide advice and recommendations to the Board of Directors aimed at improving the Company's performance.

Di tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan saran dan nasihat yang bersifat *preventive*, *proactive* dan *corrective*.

In 2024, the Board of Commissioners has provided preventive, proactive and corrective suggestions and advice.

Saran bersifat *preventive* dan *proactive* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya risiko bisnis dan/atau untuk memastikan peluang bisnis dapat diraih dan ancaman bisnis dapat ditangkal. Sedangkan saran bersifat *corrective* dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan/kelemahan dalam pengurusan perusahaan, termasuk mengoreksi ketidaksesuaian tujuan, strategi dan program kerja akibat dinamika perubahaan keadaan lingkungan bisnis dari waktu ke waktu.

Preventive and proactive suggestions are intended to prevent business risks and/or to ensure business opportunities can be achieved and business threats can be countered. While corrective suggestions are intended to correct errors/weaknesses in company management, including correcting inconsistencies in objectives, strategies and work programs due to the dynamics of changes in the business environment from time to time.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Policy and Implementation of the Board of Commissioners Meeting

Sesuai POJK 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 kali dalam 2 bulan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

In accordance with POJK 33/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners is required to hold a meeting at least 1 time in 2 months. In addition, the Board of Commissioners is also required to hold a meeting with the Board of Directors at least 1 time in 4 months.

Namun demikian, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

However, the Board of Commissioners may hold a meeting at any time at the request of one or more members of the Board of Commissioners or at the request of the Board of Directors, stating the matters to be discussed. In each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting are made and signed by the meeting chairman and all members of the Board of Commissioners present at the meeting. The minutes of the meeting contain the matters discussed and the matters decided.

Sepanjang 2024, Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali rapat internal Dewan Komisaris dan rapat bersama Direksi sebanyak 4 kali, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Commissioners has fulfilled the required meeting criteria, which have been held as many as 4 internal meetings of the Board of Commissioners and as many as 4 joint meetings with the Board of Directors, with the following recapitulation:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	Komisaris Utama President Commissioner	4	4	100
Daryono	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners Meeting Agenda for 2024

Pembahasan agenda tetap dalam rapat Dewan Komisaris setiap tahunnya sebagai berikut:

Discussion of the permanent agenda in the annual Board of Commissioners meeting is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
1	16 Januari 2024 January 16, 2024	Reviu Rekomendasi Komite Audit dan Hasil Audit Internal HUMI Review of the Audit Committee Recommendations and Internal Audit Results of HUMI	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner
2	28 Maret 2024 March 28, 2024	• Hasil Audit Tahunan 2023 2023 Annual Audit Results • Kebijakan Tantiem Perusahaan The Company's Tantiem Policy	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner
3	2 Agustus 2024 August 2, 2024	• Evaluasi Kinerja Semester 1/2024 dan Program Tahun 2024 Evaluation of the First Semester of 2024 Performance and 2024 Programs • Penunjukan AP/KAP Tahun 2024 Appointment of Public Accountant (AP)/ Public Accounting Firms (KAP) in 2024	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner
4	18 November 2024 November 18, 2024	Persiapan Laporan Keuangan Audit 2024 Preparation of 2024 Audit Financial Report	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner

Agenda Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Tahun 2024

Joint Meeting Agenda of the Board of Commissioners with the Board of Directors for 2024

No.	Tanggal Date	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance	Agenda
1	22 April 2024 April 22, 2024	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner	Direktur Utama Direktur President Director Director	Isu Strategis Keuangan dan Operasional Triwulan I/2024 Financial and Operational Strategic Issues for the First Quarter of 2024
2	5 Juli 2024 July 5, 2024	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner	Direktur Utama Direktur President Director Director	Isu Strategis Keuangan dan Operasional Triwulan II/2024 Financial and Operational Strategic Issues for the Second Quarter of 2024
3	8 Agustus 2024 August 8, 2024	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner	Direktur Utama Direktur President Director Director	Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi Coordination of the Board of Commissioners and Board of Directors
4	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Komisaris Utama Komisaris Independen President Commissioner Independent Commissioner	Direktur Utama Direktur President Director Director	Isu Strategis Keuangan dan Operasional Triwulan I/2024 Financial and Operational Strategic Issues for the First Quarter of 2024

Rapat Bersama Direksi Joint Meeting with the Board of Directors			**RUPS** GMS		
Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** Attendance	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**% Kehadiran** Attendance
4	4	100	2	2	100
4	4	100	2	2	100

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Program of the Board of Commissioners

Untuk menunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi pada bidang yang relevan.

To support the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities, the Company provides opportunities for members of the Board of Commissioners to participate in training and competency development programs in relevant fields.

Prosedur program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan anggota Dewan Komisaris berdasarkan hasil *assessment* baik dari eksternal dan atau dari internal.
2. Program pelatihan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Program pelatihan terkait dengan *Risk Management*.
4. Program pelatihan lain/seminar/*workshop* yang relevan dengan tugas Dewan Komisaris.
5. Menetapkan jenis pelatihan/seminar/*workshop* pada tahun berjalan.
6. Usulan jadwal pelatihan dan rencana anggaran biayanya.

The training program procedures for members of the Board of Commissioners are adjusted to the needs for carrying out supervisory duties, including the following:

1. Identification of training needs for members of the Board of Commissioners based on assessment results from both external and/or internal sources.
2. Training programs related to good corporate governance.
3. Training programs related to Risk Management.
4. Other training programs/seminars/workshops relevant to the duties of the Board of Commissioners.
5. Determine the type of training/seminar/workshop in the current year.
6. Proposed training schedule and budget plan.

Sepanjang tahun 2024, anggota Dewan Komisaris telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2024, members of the Board of Commissioners have participated in the following training and competency development programs:

Tanggal Date	**Program yang Diikuti** Program Followed	**Lokasi** Location	**Penyelenggara** Organizer
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. **Komisaris Utama** | President Commissioner			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *ESG Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Daryono **Komisaris Independen** I Independent Commissioner			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *ESG Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*

Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Induction Program for New Members of the Board of Commissioners

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi (*Induction Program*) mengenai Perseroan dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana HUMI ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

Melalui program orientasi ini, anggota Dewan Komisaris baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ tata kelola HUMI yang lain. Program orientasi ini berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh unit kerja *Human Capital*, antara lain meliputi:

1. Visi dan Misi.
2. Kode Etik & Perilaku.
3. Struktur Organisasi.
4. Anggaran Dasar.
5. Kebijakan Pokok Perusahaan.
6. Piagam Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
7. Peraturan terkait Industri Pelayaran dan Pasar Modal yang berlaku.
8. Laporan Tahunan.
9. Rencana Bisnis.

Members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time are given an Induction Program regarding the Company with the aim of providing an overview of business activities, HUMI's future plans, working guidelines and other matters that became the responsibility of the Board of Commissioners.

Through this induction program, new members of the Board of Commissioners are expected to work in harmony with other HUMI governance organs. This induction program is in the form of documents prepared by the Human Capital work unit, including:

1. Vision and Mission.
2. Code of Ethics & Conduct.
3. Organizational Structure.
4. Articles of Association.
5. The Company's Fundamental Policies.
6. Charter for the Board of Commissioners and Committees to the Board of Commissioners.
7. Regulations related to the Shipping Industry and Capital Markets that apply.
8. Annual Reports.
9. Business Plans.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris
Performance Assessment of Committee to the Board of Commissioners

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja masing-masing komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun berdasarkan Piagam Komite.

Penilaian kinerja dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dari masing-masing komite, termasuk di dalamnya kompetensi dan tingkat kehadiran dalam rapat.

Penilaian juga dilakukan atas saran, rekomendasi, dan masukan yang diberikan oleh:
- Komite Audit terkait penyempurnaan *soft structure* pendukung pelaksanaan audit, pelaksanaan dan peningkatan efektivitas audit dan sistem.
- Komite Nominasi dan Remunerasi terkait penyempurnaan berbagai kebijakan dan aturan pendukung pelaksanaan Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- Komite ESG terkait penyempurnaan *soft structure* pendukung pelaksanaan ESG Perseroan.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan setiap anggota komite untuk periode jabatan berikutnya.

The Board of Commissioners' assessment of the performance of each committee that supports the implementation of the Board of Commissioners' duties is carried out annually based on the Committee Charter.

Performance assessment is carried out by the Board of Commissioners based on the realization and completion of work programs that have been formulated in the annual work plan and budget of each committee, including competency and level of attendance at meetings.

The assessment is also carried out based on suggestions, recommendations and input provided by:
- Audit Committee related to the improvement of soft structures supporting audit implementation, implementation and improvement of audit effectiveness and systems.
- Nomination and Remuneration Committee related to the improvement of various policies and regulations supporting the implementation of the Company's Nomination and Remuneration.
- ESG Committee related to the improvement of soft structures supporting the implementation of the Company's ESG.

The assessment results will be used as consideration by the Company's Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss each committee member for the next term of office.

Direksi
Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki peran, tanggung jawab penuh, serta kewenangan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk kepengurusan dan mewakili Perseroan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi menyusun strategi bisnis, rencana jangka panjang dan pendek, rencana kerja, dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk manajemen risiko dan melaksanakannya dengan persetujuan Dewan Komisaris.

The Board of Directors is an organ of the Company that has a role, full responsibility, and authority as stipulated in the Company's Articles of Association for the management and representation of the Company. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors prepares business strategies, long-term and short-term plans, work plans, and the Company's annual budget, including risk management and implements them with the approval of the Board of Commissioners.

Dasar Hukum
Legal Basis

Dasar hukum yang menjadi acuan penunjukan Direksi Perseroan, antara lain:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran OJK terkait penerapan dan organ Tata Kelola Perusahaan.
4. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 3 November 2022 yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09.0072608 tanggal 3 November 2022.

The legal basis for the appointment of the Company's Board of Directors includes:
1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets.
3. Financial Services Authority Regulation (POJK), OJK Circular Letter regarding the implementation and organs of Corporate Governance.
4. The Company's Articles of Association and its amendments.
5. Deed of Statement of the General Meeting of Shareholders Resolutions No. 15 dated November 3, 2022, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Menkumham RI) through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.09.0072608 dated November 3, 2022.

Pedoman Direksi
Board of Directors Charter

Perseroan telah menyusun Pedoman Direksi sebagai acuan bagi Direksi dalam menjalankan kepengurusan dan pengelolaan Perseroan dengan menjunjung tinggi sikap profesional, objektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan HUMI, untuk meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Pedoman Direksi yang secara berkala dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pedoman Direksi disahkan pada tanggal 1 September 2022, dan telah diunggah di situs web Perseroan www.humi.co.id.

The Company has prepared the Board of Directors Charter as a reference for the Board of Directors in carrying out the management and administration of the Company by upholding a professional attitude, objective, strategic minded and prioritizing the interests of HUMI, to increase added value for stakeholders and ensure business sustainability. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is guided by the Board of Directors Charter which is periodically evaluated and updated with reference to the applicable rules and regulations in Indonesia. The Board of Directors Charter was ratified on September 1, 2022, and has been uploaded to the Company's website www.humi.co.id.

Adapun isi dari Pedoman Direksi adalah sebagai berikut:
1. Pendahuluan.
2. Dasar Hukum.
3. Organisasi Direksi.
4. Masa Jabatan.
5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang.

The contents of the Board of Directors Charter are as follows:
1. Introduction.
2. Legal Basis.
3. Organization of the Board of Directors.
4. Term of Office.
5. Duties, Responsibilities, and Authorities.

6. Penilaian Kinerja Direksi.
7. Remunerasi.
8. Rapat Direksi.
9. Ketentuan Terkait Rapat Direksi.
10. Pengunduran Diri, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Sewaktu-waktu.
11. Standar Etika.
12. Ketentuan Lainnya.
13. Penutup.

6. Performance Assessment of the Board of Directors.
7. Remuneration.
8. Meeting of the Board of Directors.
9. Provisions Related to Meeting of the Board of Directors.
10. Resignation and Dismissal at Any Time.
11. Ethical Standards.
12. Other Provisions.
13. Closing.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi Tahun 2024
Structure, Number and Composition of Members of the Board of Directors in 2024

Susunan, jumlah, dan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur Piagam Direksi, yakni:
1. Jumlah Direksi untuk Perusahaan Terbuka sedikitnya terdiri dari 2 orang anggota, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.

The structure, number and composition of members of the Company's Board of Directors have complied with all applicable laws and regulations, as regulated in the Board of Directors Charter, namely:
1. The number of Board of Directors for a Public Company consists of at least 2 members, and one of them is appointed as President Director.
2. The composition and number of members of the Board of Directors are determined by the GMS by taking into account the Company's vision, mission, and strategic plan, so as to enable effective, precise and fast decision-making and to be able to act independently.

Hingga akhir tahun 2024 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Direksi, sehingga susunan Direksi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Until the end of 2024, there were no changes to the structure and composition of the Board of Directors, so that the composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period
Tirta Hidayat	Direktur Utama President Director	Diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 3 November 2022 Appointed as President Director based on the Deed of Statement of the Extraordinary GMS No. 15 dated November 3, 2022	3 November 2022 s.d RUPS Tahunan Tahun 2027 November 3, 2022 until Annual GMS 2027	Ke-1 First
Dedi Hudayana	Direktur Director	Diangkat sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 15 tanggal 3 November 2022 Appointed as Director based on the Deed of Statement of the Extraordinary GMS No. 15 dated November 3, 2022	3 November 2022 s.d RUPS Tahunan Tahun 2027 November 3, 2022 until Annual GMS 2027	Ke-1 First

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat di bagian Profil Direksi dalam bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Brief profile of each member of the Board of Directors can be seen in the Board of Directors Profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Masa Jabatan Direksi
Term of Office of the Board of Directors

Masa jabatan Direksi Perseroan untuk 1 periode paling lama adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 5 tahun berikutnya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum

The term of office of the Company's Board of Directors for 1 period is a maximum of 5 years calculated from the date determined by the GMS that appointed them and ends at the closing of the Annual GMS 5 years later, but without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term of office

masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 kali masa jabatan, kecuali ditetapkan lain dalam RUPS.

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1. Masa jabatannya berakhir.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
4. Meninggal dunia dalam masa jabatannya.
5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.
6. Terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan.
7. Batal karena hukum apabila diketahui anggota Direksi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 93 dan Dewan Komisaris atau anggota Direksi lainnya harus mengumumkan batalnya pengangkatan tersebut dalam surat kabar serta memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perusahaan selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak diketahuinya.

Anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi juga dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan.
4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Mengundurkan diri sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 93.

Prosedur pemberhentian sementara antara lain mencakup:
1. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
2. RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
3. Dalam hal jangka waktu 30 hari telah lewat RUPS tidak diselenggarakan atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Prosedur pemberhentian sewaktu-waktu, antara lain juga mencakup:
1. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

ends in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.

After their term of office ends, members of the Board of Directors may be reappointed by the GMS for 1 term of office, unless otherwise determined in the GMS.

The Board of Directors' term of office ends if:
1. The term of office has ended.
2. Resigned in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. No longer meets the applicable legal requirements.
4. Passed away during term of office.
5. Dismissed by GMS Resolutions.
6. Involved in financial crimes.
7. It will be cancelled by law if it is discovered that the member of the Board of Commissioners does not fulfill the requirements as referred to in Law No. 40 of 2007, Article 93, and the Board of Commissioners or other members of the Board of Directors must announce the cancellation of the appointment in a newspaper and notify the Minister to be recorded in the Company Register no later than 7 days from the date of discovery.

Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons and notifying in writing to the relevant member of the Board of Directors. Members of the Board of Directors may also be dismissed at any time based on the GMS resolutions by stating the reasons, if the member of the Board of Directors:
1. Unable to carry out his/her duties properly.
2. Not implementing the provisions of laws and/or regulations and/or provisions of the Company's Articles of Association.
3. Involved in financial crimes.
4. Found guilty by a court verdict that has permanent legal force.
5. Resigned in accordance with the Company's Articles of Association.
6. The appointment of members of the Board of Commissioners does not meet the requirements as referred to in Law No. 40 of 2007 article 93.

Temporary dismissal procedures include:
1. Within a maximum period of 30 days after the date of temporary dismissal, a GMS must be held.
2. The GMS may revoke or confirm the resolution on temporary dismissal.
3. In the event that the 30-day period has passed and the GMS is not held or the GMS cannot make a resolution, the temporary dismissal shall be void.

The procedures for dismissal at any time also include:

1. The relevant member of the Board of Directors is given the opportunity to defend himself in the GMS.

2. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.

Perseroan juga telah mengatur prosedur pengunduran diri, antara lain mencakup:
1. Pengunduran diri anggota Direksi dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Perusahaan wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Kementerian Hukum & HAM paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

2. The opportunity to defend himself is not necessary if the relevant member does not object to the dismissal.

The Company has also regulated resignation procedures, including:
1. The resignation of a member of the Board of Directors from his position before the end of his term of office must submit a resignation application to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
2. The Company must hold a GMS to decide on the resignation application no later than 90 days after the resignation application is received.
3. The Company is required to provide disclosure of information to the public and submit it to the Financial Services Authority no later than 2 working days after receiving the resignation request of the Board of Commissioners and the results of the GMS.
4. The Company is required to notify the Ministry of Law & Human Rights of changes in the members of the Board of Commissioners no later than 30 days from the date of the GMS resolutions.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors

Direksi Perseroan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang, sebagai berikut:
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin (6) apabila dapat membuktikan:
   a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

The Company's Board of Directors has the following duties, responsibilities and authorities:
1. The Board of Directors is tasked with running and being responsible for the management of the Company for the interests of the Issuer or Public Company in accordance with the intent and purpose of the Company as set out in the articles of association.
2. The Board of Directors is required to hold an Annual GMS and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the articles of association.
3. Each member of the Board of Directors must carry out their duties and responsibilities in good faith, with full responsibility, and prudence.
4. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Directors may form a committee.
5. In the event that a committee is formed, the Board of Directors is required to evaluate the committee's performance at the end of each financial year.
6. Each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for losses of the Issuer or Public Company caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in carrying out their duties.
7. Members of the Board of Directors cannot be held responsible for the Company's losses as referred to in point (6) if they can prove:
   a. The loss is not due to his fault or negligence;
   b. Has carried out management in good faith, with full responsibility, and prudence for the benefit and in accordance with the intent and purpose of the Company;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

8. Direksi berwenang mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
   a. Terdapat perkara di pengadilan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
   b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
10. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin (9), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
    c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Direksi wajib membuat:
    a. Membuat daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS;
    b. Risalah rapat Direksi;
    c. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan; dan
    d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan dokumen Perseroan lainnya.
12. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan perusahaan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
13. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin (12) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.
14. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
    a. Mengalihkan kekayaan Perseroan;
    b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
15. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
16. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS. Dalam hal

c. Does not have a conflict of interest either directly or indirectly regarding management actions that result in losses; and
d. Has taken action to prevent the occurrence or continuation of such losses.

8. The Board of Directors is authorized to represent the Company in and out of court.
9. Members of the Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
   a. There is a case in court between the Issuer or Public Company and the relevant member of the Board of Directors; and
   b. The relevant member of the Board of Directors has interests that conflict with the interests of the Company.
10. In the event of a situation as referred to in point (9), the person entitled to represent the Company is:
    a. Other members of the Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
    b. The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company; and
    c. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
11. The Board of Directors is obliged to make:
    a. Making a Shareholder register, special register, minutes of GMS;
    b. Minutes of the Board of Directors meetings;
    c. Making annual reports and financial documents of the Company; and
    d. Maintaining all register, minutes, and financial documents of the Company as referred to in letter a, letter b, letter c, and other Company documents.
12. Members of the Board of Directors are required to report to the Company regarding the shares owned by the relevant member of the Board of Directors and/or his family in the Company and other companies to be recorded in a special register.
13. Members of the Board of Directors who do not carry out the obligations as referred to in point (12) and cause losses to the Company, are personally responsible for the Company's losses.
14. The Board of Directors is required to request approval from the GMS for:
    a. Transferring the Company's assets;
    b. Making the Company's assets a collateral for debts; which is more than 50% of the Company's net assets in 1 transaction or more, whether related to each other or not.
15. The Board of Directors may grant written authority to 1 or more employees of the Company or to other persons for and on behalf of the Company to carry out certain legal acts as described in the power of attorney.
16. The Board of Directors is not authorized to file a bankruptcy petition for the Company itself to the Commercial Court before obtaining approval from the

kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi kecuali Direksi dapat membuktikan:

a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

GMS. In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors and the bankrupt assets are insufficient to pay all of the Company's obligations, each member of the Board of Directors is jointly and severally responsible for all unpaid obligations unless the Board of Directors can prove:

a. The bankruptcy is not due to his fault or negligence;
b. Has carried out management in good faith, prudence, and with full responsibility for the interests of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
c. Has no conflict of interest, either directly or indirectly, regarding the management actions taken; and
d. Has taken action to prevent bankruptcy from occurring.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-masing Anggota Direksi
Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Selain menjalankan tugas dan tanggung jawab secara kolektif, Direksi Perseroan juga melaksanakan tugas secara individu, seperti dipaparkan pada tabel berikut:

In addition to carrying out duties and responsibilities collectively, the Company's Board of Directors also carries out duties individually, as presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Uraian Tugas Job Description
Tirta Hidayat (Direktur Utama) (President Director)	Bertanggung jawab terhadap rencana strategi bisnis dalam mencapai keberlanjutan Perusahaan. Responsible for business strategy plans in achieving the Company's sustainability.
	Bertanggung jawab pengelolaan investasi Perusahaan baik jangka menengah dan panjang. Responsible for managing the Company's investments in the medium and long term.
	Bertanggung jawab program pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG dengan memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengelola resiko perusahaan dan kepatuhan. Responsible for the Company's integrated internal control and risk management program which is part of the GCG program implementation by fulfilling the requirements of accountability, transparency, and orderly administration in accordance with the provisions of laws and regulations in order to manage the Company's risk and compliance.
	Bertanggung jawab pengelolaan *Financial*, *Accounting* dan *Investor Relations* serta optimalisasi nilai aset. Responsible for the management of Financial, Accounting and Investor Relations and optimization of asset value.
	Bertanggung jawab penerapan legal dan kepatuhan baik dari sisi komersil maupun kepatuhan terhadap regulator. Responsible for legal implementation and compliance both from the commercial side and compliance with regulators.
	Bertanggung jawab pengembangan SDM untuk efektivitas organisasi dan produktivitas SDM yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Responsible for HR development for organizational effectiveness and HR productivity protected by laws and regulations.
	Memutuskan dan mengarahkan pengelolaan barang dan jasa serta lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan latar belakang kebudayaan. Decide and direct the management of goods and services and a work environment that is free from all forms of pressure (harassment) that may arise as a result of differences in cultural background.

Nama dan Jabatan Name and Position	Uraian Tugas Job Description
Dedi Hudayana (Direktur) (Director)	Bertanggung jawab untuk riset dan pengembangan, pengelolaan pelanggan serta rekayasa teknis dalam rangka memperluas pangsa pasar. Responsible for research and development, customer management and technical engineering in order to expand market share.
	Bertanggung jawab pengelolaan operasi melalui *partnership* untuk menghasilkan pengembangan bisnis dan *maintaining* bisnis yang ada agar berkelanjutan. Responsible for managing operations through partnerships to generate business development and maintain existing businesses to be sustainable.
	Bertanggung jawab tata kelola teknologi informasi yang efektif baik secara *hardware* dan optimalisasi *software* baik di induk Perusahaan maupun anak dan unit usaha. Responsible for effective information technology governance, both in terms of hardware and software optimization, both in the parent company as well as subsidiaries and business units.
	Bertanggung jawab pengelolaan Manajemen Risiko, Keselamatan, dan Kualitas (MRSQ) agar Perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan. Responsible for managing the Management of Risk, Safety, and Quality (MRSQ) so that the Company meets the established standards.

Independensi Direksi
Independence of the Board of Directors

Komitmen independensi anggota Direksi Perseroan telah diatur dalam Piagam Direksi. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Direksi, setiap anggota Direksi Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing serta independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The independence commitment of members of the Company's Board of Directors has been regulated in the Board of Directors Charter. As regulated in the Company's Articles of Association and the Board of Directors Charter, each member of the Company's Board of Directors has his respective duties and authorities, and is independent in carrying out his duties and authorities in accordance with applicable laws and regulations.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2024
Implementation of Duties and Responsibilites of the Board of Directors in 2024

Pada tahun 2024, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selain menjalankan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tahun buku, antara lain sebagai berikut:
1. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja dan strategi bisnis Perusahaan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa Tahun Buku 2024.
3. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.
4. Mengevaluasi kinerja Perseroan dan mengambil langkah-langkah perbaikan.

In 2024, the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities in addition to implementing the GMS resolutions held in the financial year, including the following:
1. Provided direction in the preparation of the Company's work plan and business strategy.
2. Held the Annual GMS for the 2023 Financial Year and the Extraordinary GMS for the 2024 Financial Year.
3. Made a Shareholder Register, Special Register, Minutes of the GMS and Minutes of the Board of Directors' Meeting.
4. Evaluated the Company's performance and took corrective measures.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi
Policy and Implementation of the Board of Directors Meeting

Sesuai POJK 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam 1 bulan. Selain itu, Direksi juga wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam 4 bulan.

Namun demikian, Direksi dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan satu atau beberapa anggota Direksi atau permintaan Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Direksi dibuatkan risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat.

According to POJK 33/2014, the Board of Directors is required to hold a meeting at least once in 1 month. In addition, the Board of Directors is also required to hold a joint meeting with the Board of Commissioners at least 1 time in 4 months.

However, the Board of Directors may hold a meeting at any time at the request of one or more members of the Board of Directors or at the request of the Board of Commissioners, by stating the matters to be discussed. In each Board of Directors meeting, minutes of the meeting are made and signed by the meeting chairman and all members of the Board of Directors

Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Sepanjang 2024 Direksi telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 21 kali rapat internal Direksi dan rapat bersama Dewan Komisaris sebanyak 31 kali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

present at the meeting. The minutes of the meeting contain the matters discussed and the matters decided.

Throughout 2024, the Board of Directors has fulfilled the required meeting criteria, which have been carried out as many as 21 internal meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Board of Commissioners as many as 31 times with the following recapitulation:

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Internal Direksi Internal Meeting of the Board of Directors			Rapat Bersama Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners			RUPS GMS		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran Attendance
Tirta Hidayat	Direktur Utama President Director	21	16	76	31	31	100	2	2	100
Dedi Hudayana	Direktur Director	21	20	95	31	29	94	2	2	100

Agenda Rapat Direksi Tahun 2024
Board of Directors Meeting Agenda for 2024

Sepanjang tahun 2024, Rapat Direksi membahas agenda-agenda, antara lain sesuai di bawah ini.

Throughout 2024, the Board of Directors Meeting discussed agendas, including those listed below.

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
1	4 Januari 2024 January 4, 2024	Koordinasi Direksi Board of Directors Coordination	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
2.	15 Januari 2024 January 15, 2024	Rencana Monitoring Capex 2024 Capex Monitoring Plan 2024	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
3.	22 Januari 2024 January 22, 2024	Pengembangan Usaha Business Development	• Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
4.	20 Maret 2024 March 20, 2024	Isu-isu Audit Report Audit Report Issues	• Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
5.	23 Maret 2024 March 23, 2024	Penyelesaian Laporan Keuangan 2023 Completion of Financial Statements 2023	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
6.	26 Maret 2024 March 26, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
7.	18 April 2024 April 18, 2024	Penyelesaian Laporan Keuangan Anak Usaha 2023 Completion of Subsidiaries' Financial Statements 2023	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
8.	29 April 2024 April 29, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors
9.	6 Mei 2024 May 6, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • President Director • Direktur • Director • Organ Direksi • Organs of the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participant
10.	6 Juni 2024 June 6, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
11.	6 Juni 2024 June 6, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
12.	25 Juni 2024 June 25, 2024	Hasil Audit Internal Internal Audit Results	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
13.	10 Juli 2024 July 10, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
14.	15 Juli 2024 July 15, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
15.	29 Juli 2024 July 29, 2024	Persiapan Rapat Isu Strategis Strategic Issues Meeting Preparation	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
16.	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
17.	24 September 2024 September 24, 2024	Teknologi Informasi Information Technology	• Direktur • Organ Direksi • Director • Organs of the Board of Directors
18.	1 Oktober 2024 October 1, 2024	ESG: *Initial Assesment & Benchmarking*	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
19.	7 Oktober 2024 October 7, 2024	Produk Teknis Kapal Vessel Engineering Products	• Direktur • Organ Direksi • Director • Organs of the Board of Directors
20.	28 Oktober 2024 October 28 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors
21.	8 November 2024 November 8, 2024	Isu Strategis Anak Usaha Strategic Issues of Subsidiaries	• Direktur • Organ Direksi • Director • Organs of the Board of Directors

Agenda Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris Tahun 2024
Joint Meeting Agenda of the Board of Directors with the Board of Commissioners for 2024

No.	Tanggal Date	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Agenda
1.	2 Februari 2024 February 2, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Penyusunan Audit Report Audit Report Preparation
2.	26 Februari 2024 February 26, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Pengembangan Usaha Business Development
3.	5 Maret 2024 March 5, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Pengembangan Usaha Business Development

No.	Tanggal Date	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Agenda
4.	27 Maret 2024 March 27, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study
5.	17 April 2024 April 17, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Audit Report 2023
6	18 April 2024 April 18, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Isu Kinerja Operasional Triwulan I/2024 Operational Performance Issues for the First Quarter of 2024
7	29 April 2024 April 29, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Pengembangan Usaha Business Development
8	30 Mei 2024 May 30, 2024	• Direktur Utama • Organ Direksi • President Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	RUPS Tahunan Anak Usaha Annual GMS of Subsidiaries
9	4 Juni 2024 June 4, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	RUPS Tahunan Anak Usaha Annual GMS of Subsidiaries
10	5 Juni 2024 June 5, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Persiapan RUPS Tahunan HUMI HUMI's Annual GMS preparation
11	10 Juni 2024 June 10, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	RUPS Tahunan Anak Usaha Annual GMS of Subsidiaries
12	13 Juni 2024 June 13, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Persiapan RUPS Tahunan HUMI HUMI's Annual GMS preparation
13	2 Juli 2024 July 2, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study

No.	Tanggal Date	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Agenda
14	22 Juli 2024 July 22, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Isu Kinerja Operasional Triwulan II/2024 Operational Performance Issues for the Second Quarter of 2024
15	24 Juli 2024 July 24, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Isu Kinerja Operasional Triwulan II/2024 Operational Performance Issues for the Second Quarter of 2024
16	25 Juli 2024 July 25, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	SDM Human Resources
17	2 Agustus 2024 August 2, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study
18	19 Agustus 2024 August 19, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study
19	20 Agustus 2024 August 20, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Koordinasi Direksi dan Dewan Komisaris Coordination of the Board of Directors and Board of Commissioners
20	22 Agustus 2024 August 22, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Fasilitas Pembiayaan Pengembangan Usaha Business Development Financing Facilities
21	10 September 2024 September 10, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent Commissioner	Progress Digitalisasi Keuangan Financial Digitalization Progress
22	10 September 2024 September 10, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Pengembangan Usaha Business Development
23	30 September 2024 September 30, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Pengembangan Usaha Business Development

No.	Tanggal Date	Direksi yang Hadir Board of Directors in Attendance	Dewan Komisaris yang Hadir Board of Commissioners in Attendance	Agenda
24	14 Oktober 2024 October 14, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Isu Kinerja Operasional Triwulan III/2024 Operational Performance Issues for the Third Quarter of 2024
25	17 Oktober 2024 October 17, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	RKAP 2025 Anak Usaha Company's Work Plan and Budget 2025 of Subsidiaries
26	18 Oktober 2024 October 18, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	RKAP 2025 Anak Usaha Company's Work Plan and Budget 2025 of Subsidiaries
27	23 Oktober 2024 October 23, 2024	• Direktur Utama • Organ Direksi • President Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study
28	25 Oktober 2024 October 25, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	*Business Plan* 5 Tahun 5 Year Business Plan
29	20 November 2024 November 20, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	RKAP 2025 Company's Work Plan and Budget 2025
30	20 November 2024 November 20, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Studi Kelayakan Pembelian Kapal Vessel Purchase Feasibility Study
31	20 Desember 2024 December 20, 2024	• Direktur Utama • Direktur • Organ Direksi • President Director • Director • Organs of the Board of Directors	• Komisaris Utama • Komisaris Independen • President Commissioner • Independent	Portfolio Bisnis Anak Usaha Business Portfolio of Subsidiaries

Program Pengembangan Kompetensi Direksi
Competency Development Program of the Board of Directors

Untuk menunjang Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memfasilitasi dilakukannya pengembangan kompetensi anggota Direksi selaras dengan perkembangan ekonomi, dinamika industri pelayaran dan tata kelola yang terus berkembang.

To support the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities, the Company facilitates the competency development of members of the Board of Directors in line with economic developments, the dynamics of the shipping industry and governance that continue to develop.

Prosedur program pelatihan bagi anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan antara lain meliputi sebagai berikut:

The training program procedures for members of the Board of Directors are adjusted to the needs for carrying out supervisory duties, including the following:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan anggota Direksi berdasarkan hasil *assessment* baik dari eksternal dan atau dari internal.
2. Program pelatihan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
3. Program pelatihan terkait dengan *Risk Management*.
4. Program pelatihan lain/seminar/*workshop* yang relevan dengan tugas Direksi.
5. Menetapkan jenis pelatihan/seminar/*workshop* pada tahun berjalan.
6. Usulan jadwal Pelatihan dan rencana anggaran biayanya.

1. Identification of training needs for members of the Board of Directors based on assessment results from both external and/or internal sources.
2. Training programs related to good corporate governance.
3. Training programs related to Risk Management.
4. Other training programs/seminars/workshops relevant to the duties of the Board of Directors.
5. Determine the type of training/seminar/workshop in the current year.
6. Proposed training schedule and budget plan.

Sepanjang tahun 2024, anggota Direksi telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2024, members of the Board of Directors have participated in the following training and competency development programs:

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Tirta Hidayat **Direktur Utama** | **President Director**			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *ESG Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance : Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*
Dedi Hudayana **Direktur** | **Director**			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru
Induction Program for New Members of the Board of Directors

Anggota Direksi Perseroan yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi (*Induction Program*) mengenai Perseroan dengan tujuan memberikan gambaran atas aktivitas bisnis, rencana HUMI ke depan, pedoman kerja dan hal lainnya yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Members of the Company's Board of Directors who are appointed for the first time are given an Induction Program regarding the Company with the aim of providing an overview of business activities, HUMI's future plans, working guidelines and other matters that became the responsibility of the Board of Directors.

Melalui program orientasi ini, anggota Direksi baru diharapkan dapat bekerja selaras dengan organ tata kelola HUMI yang lain. Program orientasi ini berupa dokumen-dokumen yang disiapkan oleh unit kerja Human Capital, antara lain meliputi:

1. Visi dan Misi.
2. Kode Etik & Perilaku.
3. Struktur Organisasi.

Through this induction program, new members of the Board of Directors are expected to work in harmony with other HUMI governance organs. This induction program is in the form of documents prepared by the Human Capital work unit, including:

1. Vision and Mission.
2. Code of Ethics & Conduct.
3. Organizational Structure.

4. Anggaran Dasar.
5. Kebijakan Pokok Perusahaan.
6. Piagam Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
7. Peraturan terkait Industri Pelayaran dan Pasar Modal yang berlaku.
8. Laporan Tahunan.
9. Rencana Bisnis.

4. Articles of Association.
5. The Company's Fundamental Policies.
6. Charter for the Board of Commissioners and Committees to the Board of Commissioners.
7. Regulations related to the Shipping Industry and Capital Markets that apply.
8. Annual Reports.
9. Business Plans.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi
Performance Assessment of Supporting Organs to the Board of Directors

Penilaian kinerja organ pendukung Direksi dilakukan secara transparan, objektif dan sistematis berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang telah tersusun dalam target KPI (*Key Performance Indicator*) yang telah disepakati di awal tahun yang merupakan turunan dari target tahunan Direksi, menjadi target divisi hingga menjadi target individu.

The performance assessment of supporting organs to the Board of Directors is carried out transparently, objectively and systematically based on the realization and completion of work programs that have been arranged in the KPI (Key Performance Indicator) targets that have been agreed upon at the beginning of the year which are derived from the Board of Directors' annual targets, becoming division targets and becoming individual targets.

Metode Penilaian Kinerja yang berlaku untuk organ pendukung Direksi berdasarkan KPI yang terdiri dari:

1. Objektif kerja tahunan yang dituangkan dalam target KPI masing-masing jabatan.
2. Penilaian aspek Perilaku, berdasarkan *core competencies*.
3. Penilaian aspek kompetensi manajerial.

The Performance Assessment Method applicable for the supporting organs to the Board of Directors is based on KPIs which consist of:

1. Annual work objectives outlined in the KPI targets of each position.
2. Assessment of Behavioral aspects, based on core competencies.
3. Assessment of managerial competency aspects.

Pada tahun 2024, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ pendukung Direksi yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan, Kepala Internal Audit, *Corporate* Pengembangan Bisnis, *Corporate Finance*, *Accounting* & *Investor Relations* dinilai berjalan dengan baik dan efektif.

In 2024, the implementation of the duties and responsibilities of the supporting organs to the Board of Directors consisted of the Corporate Secretary, Head of Internal Audit, Corporate Business Development, Corporate Finance, Accounting & Investor Relations was considered to be running well and effectively.

Informasi tentang Komite Pendukung Direksi
Information about the Supporting Committees to the Board of Directors

Hingga akhir tahun 2024, Direksi tidak membentuk komite yang mendukung operasional Direksi.

Until the end of 2024, the Board of Directors has not formed any committees to support the Board of Directors' operations.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information about the Board of Commissioners and Board of Directors

Sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi harus bersikap independen dan terbebas dari kepentingan. Berikut adalah informasi terkait independensi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

In accordance with the provisions of the law, in carrying out their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and the Board of Directors must be independent and free from interests. The following is information related to the independence of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diperbolehkan merangkap jabatan lain dengan ketentuan sebagai berikut:

Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are permitted to hold other concurrent positions with the following provisions:

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Piagam Dewan Komisaris telah mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan, yakni Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai komite paling banyak pada 5 komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Adapun persyaratan terkait rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

1. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau peraturan Perusahaan.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan, maka wajib dilaporkan kepada seluruh organ Perseroan dan pejabat Sekretaris Perusahaan mencatat serta mendokumentasikan.

Concurrent Positions of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners Charter has regulated provisions regarding the concurrent positions of the Company's Board of Commissioners, namely that the Board of Commissioners may hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Directors at most 2 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
2. Members of the Board of Commissioners at most 2 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
3. In the event that a member of the Board of Commissioners does not hold Concurrent Positionss as a member of the Board of Directors, the member of the Board of Commissioners concerned may hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners at a maximum of 4 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
4. A member of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as a committee at a maximum of 5 committees in an Issuer or Public Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

The requirements for holding concurrent positions are as follows:

1. Concurrent positions may only be held as long as they do not conflict with applicable laws and/or Company regulations.
2. In the event that a member of the Board of Commissioners holds concurrent positions, it must be reported to all organs of the Company and the Corporate Secretary must record and document them.

3. Hal-hal lain yang belum ada terkait rangkap jabatan dapat dibuat ketentuan tersendiri dengan mengacu pada kebijakan ini.

3. Other matters that do not yet exist regarding concurrent positions can be made into separate provisions by referring to this policy.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris HUMI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The concurrent positions of HUMI's Board of Commissioners in 2024 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Dalam Grup Perusahaan Within the Company Group	Luar Perusahaan Outside the Company
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. (Komisaris Utama) (President Commissioner)	• Komisaris PT Humpuss Transportasi Kimia (2021-sekarang). Commissioner of PT Humpuss Transportasi Kimia (2021-present). • Ketua Komite ESG PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Head of the ESG Committee of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.	Tidak Ada None
Daryono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	• Ketua Komite Audit PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Head of the Audit Committee of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. • Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Head of the Nomination and Remuneration Committee of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. • Komisaris PT ETSI Hutama Maritim (2018-sekarang). Commissioner of PT ETSI Hutama Maritim (2018-present)	Tidak Ada None

Rangkap Jabatan Direksi

Ketentuan mengenai rangkap jabatan Direksi Perseroan telah diatur dalam Pedoman Direksi, yang mengatur Direksi hanya merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 Emiten atau Perusahaan Publik di luar usaha Perseroan.

2. Anggota komite paling banyak pada 5 komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Untuk merangkap jabatan, Perseroan juga telah menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau peraturan Perseroan.
2. Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan, maka wajib dilaporkan kepada seluruh organ Perseroan dan pejabat Sekretaris Perusahaan mencatat serta mendokumentasikan.
3. Hal-hal lain yang belum ada terkait rangkap jabatan dapat dibuat ketentuan tersendiri dengan mengacu pada kebijakan ini.

Selain itu, anggota Direksi bertanggung jawab terhadap pengawasan pada Anak Perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan. Sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan, maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori rangkap jabatan.

Concurrent Positions of the Board of Directors

Provisions regarding concurrent positions of the Company's Board of Directors have been regulated in the Board of Directors Charter, which stipulate that the Board of Directors may only hold concurrent positions as:

1. Members of the Board of Commissioners at most 3 Issuers or Public Companies outside the Company's business.
2. Members of a committee at most 5 committees at Issuers or Public Companies where the person concerned also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

To hold concurrent positions, the Company has also set the following requirements:

1. Concurrent positions may only be held as long as they do not conflict with applicable laws and/or Company regulations.
2. In the event that a member of the Board of Directors holds concurrent positions, it must be reported to all organs of the Company and the Corporate Secretary must record and document them.
3. Other matters that do not yet exist regarding concurrent positions can be made into separate provisions by referring to this policy.

In addition, members of the Board of Directors are responsible for supervision of Subsidiaries, carrying out functional duties as members of the Board of Commissioners in Subsidiaries controlled by the Company. As long as the concurrent positions do not result in the person concerned neglecting the implementation of duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Company, then this is not included in the category of concurrent positions.

Rangkap jabatan Direksi HUMI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The concurrent positions of HUMI's Board of Directors in 2024 are as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Dalam Grup Perusahaan Within the Company Group	Luar Perusahaan Outside the Company
Tirta Hidayat (Direktur Utama) (President Director)	• Komisaris PT PCS Internasional (2023-sekarang). Commissioner of PT PCS Internasional (2023-present) • Komisaris PT Humpuss Transportasi Curah (2023-sekarang). Commissioner of PT Humpuss Transportasi Curah (2023-present).	Tidak Ada None
Dedi Hudayana (Direktur) (Director)	• Direktur PT Humpuss Transportasi Curah (2009-sekarang). Director of PT Humpuss Transportasi Curah (2009-present) • Direktur PT Energi Maritim Internasional (2018-sekarang). Director of PT Energi Maritim Internasional (2018-present) • Direktur PT CTS Internasional (2018-sekarang). Director of PT CTS Internasional (2018-present) • Komisaris PT Hikmah Sarana Bahari (2023-sekarang). Commissioner of PT Hikmah Sarana Bahari (2023-present) • Komisaris PT Anoa Sulawesi Regas (2023-sekarang). Commissioner of PT Anoa Sulawesi Regas (2023-present) • Komisaris PT MCS Internasional (2019-sekarang). Commissioner of PT MCS Internasional (2019-present)	Tidak Ada None

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Shares Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors

HUMI menyelenggarakan daftar khusus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai salah satu bentuk komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Daftar khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi berserta anggota keluarganya di Perseroan.

HUMI maintains a special register for all members of the Board of Commissioners and Board of Directors as a form of commitment to avoiding activities that have the potential to cause conflicts of interest. The special register contains information on shares ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their family members in the Company.

Pada 2024, kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta anggota keluarganya di Perseroan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

In 2024, the shares ownership of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and their family members in the Company, as detailed in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Dalam Grup Perusahaan Within the Company Group	Luar Perusahaan Outside the Company
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak. (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Daryono (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Tirta Hidayat (Direktur Utama) (President Director)	Tidak Ada None	Tidak Ada None
Dedi Hudayana (Direktur) (Director)	HITS* (285.800 lembar (0%)) (285,800 shares (0%))	Tidak Ada None

*MSOP HITS Tahun 2017 | MSOP of HITS in 2017

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali
Affiliated Relationships of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi HUMI tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun keuangan, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of HUMI do not have any affiliated relationships, either family or financial, with fellow members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders.

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.

The criteria for affiliated relationships between members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Major Shareholders or Controlling Shareholders include:

1. Affiliated relationships between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors.
2. Affiliated relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.
3. Affiliated relationship between members of the Board of Directors and Major and/or Controlling Shareholders.
4. Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners.
5. Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and Major and/or Controlling Shareholders.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Afiliasi** Affiliated Relationships		
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors	**Pemegang Saham Utama/Pengendali** Major/Controlling Shareholders
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	Komisaris Utama President Commissioner	✗	✗	✗
Daryono	Komisaris Independen Independent Commissioner	✗	✗	✗
Direksi Board of Directors				
Tirta Hidayat	Direktur Utama President Director	✗	✗	✗
Dedi Hudayana	Direktur Director	✗	✗	✗

✓ Ya | Yes ✗ Tidak | No

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan keberagaman menjadi referensi bagi HUMI dalam melakukan perencanaan suksesi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. HUMI telah mengatur Kebijakan Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi No. 19/Pedoman-GCG/XII/2023 pada tanggal 4 Desember 2023 dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Lampiran SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

The diversity policy became a reference for HUMI in planning the succession of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. HUMI has regulated the Policy on the Composition Diversity of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 19/Pedoman-GCG/XII/2023 on December 4, 2023, by taking into account the provisions contained in the Attachment to OJk Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Corporate Governance of Public Companies.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik secara individu, yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan tidak mengenal perbedaan gender. Setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat dengan memperhatikan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi serta pemahaman industri pelayaran dan integritasnya.

The composition diversity of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors is a combination of individual characteristics, which are adjusted to the needs of the Company without recognizing gender differences. Each member of the Board of Commissioners and member of the Board of Directors is appointed by considering the appropriate expertise, knowledge, and experience in the division of duties and functions of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as an understanding of the shipping industry and its integrity.

Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan akan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta menunjang pencapaian visi dan misi Perseroan untuk terus bertumbuh dan berkembang. Perusahaan berupaya untuk menjaga bauran keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencakup di antaranya bidang akuntansi, ekonomi, hukum, teknologi informasi, teknik kapal, pelayaran, dan bisnis.

The composition diversity of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company that is appropriate and in accordance with the needs of the Company will support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors and support the achievement of the Company's vision and mission to continue to grow and develop. The Company strives to maintain a blend of expertise and experience of members of the Board of Commissioners and Board of Directors which include, among others, accounting, economics, law, information technology, ship engineering, shipping, and business.

Identifikasi keahlian Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja serta pelatihan yang pernah diikuti. HUMI berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik melalui pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang relevan.

Identification of expertise of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out based on educational background, work experience and training that has been attended. HUMI is committed to improving the competence of members of the Board of Commissioners and Board of Directors, both through training, workshops, and other relevant activities.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Composition Diversity of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Aspek keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris, terbagi menjadi:

1. Keahlian
   Anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian yang beragam di bidang akuntansi, hukum dan pelayaran.
2. Pengalaman Kerja
   Anggota Dewan Komisaris memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari profesional pada perusahaan pelayaran maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, kantor hukum, konsultan, dosen dan pejabat pemerintahan.
3. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Dewan Komisaris.
4. Usia
   Anggota Dewan Komisaris memiliki keberagaman jenjang usia.
5. Independensi
   a. Minimum 30% anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; dan
   b. Masa jabatan Komisaris Independen sebanyak 2 periode berturut-turut.

The composition diversity aspect of members of the Board of Commissioners is divided into:

1. Expertise
   Members of the Board of Commissioners have diverse expertise in the fields of accounting, law and shipping.
2. Work Experience
   Members of the Board of Commissioners have diverse work experiences, including professionals in shipping companies and national/multinational financial institutions, law firms, consultants, lecturers and government officials.
3. Gender
   Considering the gender diversity of members of the Board of Commissioners.
4. Age
   Members of the Board of Commissioners have a diversity of age levels.
5. Independence
   a. Minimum 30% of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners; and
   b. The term of office of Independent Commissioners is 2 consecutive periods.

Aspek Keberagaman Anggota Dewan Komisaris Diversity Aspect of Members of the Board of Commissioners	
Pendidikan **Education**	Jenjang pendidikan anggota Dewan Komisaris meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana dengan berbagai bidang pendidikan seperti Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen. The education level of members of the Board of Commissioners includes Bachelor's Degree and Master's Degree from various fields of education such as Economics, Accounting, and Management.
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain: 1. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada institusi keuangan nasional. 2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat atau Senior Eksekutif atau posisi penting lainnya pada Perusahaan swasta nasional. Diverse work experiences, including: 1. Members of the Board of Commissioners and/or Officials or Senior Executives or other key positions in national financial institutions. 2. Members of the Board of Commissioners and/or Officials or Senior Executives or other key positions in national private Companies.
Independensi **Independence**	1. Terdapat 1 Komisaris Independen dari 2 anggota Dewan Komisaris atau 50% anggota Dewan Komisaris HUMI merupakan Komisaris Independen. 2. Komisaris Independen menjabat kurang dari 2 tahun. 1. There is 1 Independent Commissioner out of 2 members of the Board of Commissioners or 50% of the members of HUMI's Board of Commissioners are Independent Commissioners. 2. Independent Commissioners served less than 2 years.
Usia **Age**	Keberagaman usia anggota Dewan Komisaris pada rentang usia yang cukup produktif dan matang, yaitu berusia antara 60-66 tahun. Age diversity of members of the Board of Commissioners is in a fairly productive and mature age range, namely between 60-66 years old.
Jenis Kelamin **Gender**	Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin laki-laki. All members of the Board of Commissioners are male.

Aspek keberagaman komposisi anggota Direksi, terbagi menjadi:

1. Keahlian
   Anggota Direksi memiliki keahlian di bidang akuntansi, ekonomi, hukum, teknologi informasi, teknik kapal, pelayaran dan bisnis.
2. Pengalaman Kerja
   Anggota Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam antara lain berasal dari professional pada perusahaan pelayaran maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, kantor hukum, konsultan, dosen, perencana manajemen kapal dan pendukungnya.
3. Jenis Kelamin
   Mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin dari anggota Direksi.
4. Usia
   Anggota Direksi memiliki keberagaman jenjang usia, mulai dari 50 tahun.
5. Independensi
   a. Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama; dan
   b. Mayoritas Direksi merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan pemegang saham utama.

The diversity aspects in the composition of members of the Board of Directors are divided into:

1. Expertise
   The members of the Board of Directors have expertise in the fields of accounting, economics, law, information technology, ship engineering, shipping and business.
2. Work Experience
   The members of the Board of Directors have diverse work experience, including professionals from shipping companies and national/multinational financial institutions, law firms, consultants, lecturers, ship management planners and their supporters.
3. Gender
   Taking into account the gender diversity of the Board of Directors members.
4. Age
   The Board of Directors members have a diverse age range, starting from 50 years old.
5. Independence
   a. The President Director is a party that is independent of the controlling shareholders and the major shareholders; and
   b. The majority of the Board of Directors is a party that is independent of the controlling shareholders and the major shareholders.

Aspek Keberagaman Anggota Direksi Diversity Aspect of Members of the Board of Directors	
Pendidikan **Education**	Jenjang pendidikan meliputi tingkat Sarjana dan Pasca Sarjana dengan berbagai bidang pendidikan seperti Ekonomi, Regional Science dan Ilmu Pelayaran. The education level includes Bachelor's Degree and Master's Degree from various fields of education such as Economics, Regional Science, and Shipping Science.
Pengalaman Kerja **Work Experience**	Pengalaman kerja yang beragam, antara lain: 1. Anggota Direksi di institusi keuangan dan non keuangan nasional maupun multinasional. 2. Berbagai posisi penting di Perusahaan pelayaran, seperti Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III dan IV, Direktur PT LIS Internasional, Kepala Operasi & *Agency* serta perusahaan pelayaran nasional lainnya. Diverse work experiences, including: 1. Members of the Board of Directors in national and multinational financial and non-financial institutions. 2. Various key positions inshipping Companies, such as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia III and IV, Director of PT LIS Internasional, Head of Operations & Agency as well as other national shipping companies.
Independensi **Independence**	Seluruh anggota Direksi tidak memiiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris termasuk Pemegang Saham Utama dan Pengendali HUMI. All members of the Board of Directors do not have any affiliated relationships with fellow members of the Board of Directors, Board of Commissioners including the Major and Controlling Shareholders of HUMI.
Usia **Age**	Keberagaman usia anggota Direksi pada rentang usia yang cukup produktif dan matang, yaitu berusia antara 59-65 tahun. Age diversity of members of the Board of Directors is in a fairly productive and mature age range, namely between 59-65 years old.
Jenis Kelamin **Gender**	Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berjenis kelamin laki-laki. All members of the Board of Directors are male.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, setelah sebelumnya Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penilaian mandiri atas kinerja individual maupun kolektif kolegial. Hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

The performance assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out based on certain criteria that have been determined by considering their functions, duties, and responsibilities in accordance with laws and regulations and company policies. Evaluated periodically and reported to the Company's shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders, after the Board of Commissioners and Board of Directors has previously conducted an independent assessment of individual and collective collegial performance. This is to improve the implementation quality of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang saham untuk melakukan penunjukan kembali. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Results of the performance evaluation of the Board of Commissioners and the Board of Directors individually are one of the basic considerations for shareholders to make reappointments. Results of the performance evaluation of the Board of Commissioners as a whole and the performance of each member of the Board of Directors are an inseparable part of the remuneration scheme for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Kebijakan, Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Policy, Procedure and Criteria of Performance Assessment of the Board of Commissioners

1. Penilaian Kinerja dilakukan setiap tahun secara *self assessment* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Hasil penilaian (*self assessment*) masing-masing anggota Dewan Komisaris dikompilasi dan dilakukan *review* oleh Komisaris Utama guna menjadi masukan untuk peningkatan kinerja Dewan Komisaris di masa mendatang maupun *action plan* (jika diperlukan).

2. Kriteria penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:
   a. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan perusahaan
   b. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan/atau bersama Komite, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
   c. Efektivitas penerapan manajemen risiko
   d. Pemantauan atas pelaksanaan sistem pengendalian internal

1. Performance Assessment is conducted annually through self-assessment to assess the performance of the Board of Commissioners collegially. The results of the assessment (self-assessment) of each member of the Board of Commissioners are compiled and reviewed by the President Commissioner to be used as input for improving the performance of the Board of Commissioners in the future or action plan (if necessary).
2. The performance assessment criteria of the Board of Commissioners are carried out by considering several components, including:
   a. Effectiveness of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners in carrying out the supervisory function of company management
   b. Attendance at meetings of the Board of Commissioners and/or with the Committee, joint meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors
   c. Effectiveness of the implementation of risk management
   d. Monitoring the implementation of the internal control system

e. Pemantauan atas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
f. Usulan dan nasehat Dewan Komisaris kepada Direksi dan manajemen dari *Holding*, anak/unit usaha Perseroan

3. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara kolegial. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun buku 2024 dengan predikat "Baik".

e. Monitoring the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR)
f. Proposal and advice from the Board of Commissioners to the Board of Directors and management of the Holding, subsidiaries/business units of the Company

3. The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out collegially. Results of the performance assessment of the Board of Commissioners for the financial year 2024 with the predicate "Good".

Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Recommendation and Follow-up

Pada tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.

In 2024, there were no recommendations that have not been followed up by the Board of Commissioners.

Kebijakan, Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi
Policy, Procedure and Criteria of Performance Assessment of the Board of Directors

1. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan sendiri (*self-assessment*) setiap 6 bulan oleh masing-masing anggota Direksi. Hasil *self-assessment* direviu oleh Direktur Utama guna mendapatkan masukan sebelum diajukan ke Dewan Komisaris untuk disetujui.

2. Kriteria penilaian mencakup aspek proses (*process*) dan aspek hasil (*output*).
   a. Penilaian aspek proses pengurusan Perseroan mencakup penyusunan dan pengendalian anggaran, penyusunan dan implementasi strategi, kebijakan dan program kerja selama tahun 2024, tentunya termasuk aspek tata kelola perusahaan (GCG).

   b. Penilaian aspek hasil pencakup kinerja seluruh aspek pengurusan perusahaan meliputi: tingkat utilitas kapal, produktivitas, efisiensi dan *safety* kapal, kinerja kesehatan dan profitabilitas keuangan perusahaan, kinerja soliditas dan sinergitas pengelolaan sumber daya pendukung bisnis Perseroan.

3. Penilaian kinerja Direksi tahun buku 2024 oleh Dewan Komisaris, dengan predikat "Cukup Baik" dalam mengelola HUMI. Penilaian yang dilakukan menunjukan bahwa Direksi senantiasa memastikan pencapaian kinerja HUMI yang memenuhi ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Performance assessment of members of the Board of Directors is carried out independently (self-assessment) every 6 months by each member of the Board of Directors. The self-assessment results are reviewed by the President Director to obtain input before being submitted to the Board of Commissioners for approval.
2. The assessment criteria include process aspects and output aspects.
   a. Assessment of the Company's management process aspects including the preparation and control of the budget, preparation and implementation of strategies, policies and work programs during 2024, also certainly including aspects of corporate governance (GCG).
   b. Assessment of the output aspects including the performance of all aspects of the Company's management including: vessel utility level, productivity, efficiency and safety of vessels, performance of the Company's financial soundness and profitability, performance of solidity and synergy in managing the Company's business supporting resources.
3. Performance assessment of the Board of Directors for the 2024 financial year by the Board of Commissioners, was given the predicate "Fairly Good" in managing HUMI. The assessment shows that the Board of Directors always ensures the achievement of HUMI's performance that meets the expectations of shareholders and other stakeholders.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Recommendation and Follow-up

Pada tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi.

In 2024, there were no recommendations that have not been followed up by the Board of Directors.

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan Nominasi
Nomination Policy

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pemegang Saham Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan juga dapat berasal dari sumber lainnya.

Members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. Controlling Shareholders may propose the names of candidates for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to be discussed by the Nomination and Remuneration Committee. In addition, candidates for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors may also come from other sources.

Nama-nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan haruslah memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi.

The names proposed as candidates for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors must meet the criteria in accordance with applicable laws and regulations, and the Board of Commissioners Charter and the Board of Directors Charter.

Pada Piagam Dewan Komisaris dan Piagam Direksi Perseroan telah ditetapkan kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu:

In the Company's Board of Commissioners Charter and Board of Directors Charter, the criteria for members of the Board of Commissioners and Board of Directors have been set out, namely:

Persyaratan dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Perseroan telah menetapkan kriteria persyaratan bagi setiap calon anggota Dewan Komisaris yang tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai

Requirement and Criteria for Members of the Board of Commissioners

The Company has set the criteria for each candidate for member of the Board of Commissioners as stated in the Board of Commissioners Charter. The requirements that must be met are as follows:

1. Possess good morals, ethics, and integrity.
2. Competent in legal matters.
3. In the 5 years prior to appointment and during his/her term of office:
   a. Has never been declared bankrupt
   b. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners declared guilty of causing a company to go bankrupt
   c. Has never been convicted of crimes detrimental to state finances and/or related to the financial sector
   d. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his/her term of office:
      - Failed to convene Annual GMS
      - Had his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners not accepted by the GMS or failed to provide accountability as a member of

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan

e. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
f. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan

4. Dewan Komisaris wajib mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang dilakukan secara periodik dan pernyataan mengenai benturan kepentingan tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.

Selain persyaratan di atas, calon anggota Dewan Komisaris juga harus memenuhi persyaratan khusus, yakni:

1. Setiap anggota Dewan Komisaris harus berintegritas, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan memenuhi kualifikasi lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria seleksi anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris setelah mempertimbangkan hasil kajian Komite Nominasi dan Remunerasi.

Persyaratan dan Kriteria Anggota Direksi

Perseroan telah menetapkan kriteria persyaratan bagi setiap calon anggota Direksi yang tercantum dalam Pedoman Direksi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
      - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS
      - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran

the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS
- Caused a company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority

e. Has a commitment to comply with laws and regulations
f. Has knowledge and/or expertise in the field required by the Company

4. The Board of Commissioners is obliged to disclose all conflicts of interest periodically and statements regarding such conflicts of interest are disclosed in the annual report.

In addition to the above requirements, prospective members of the Board of Commissioners must also meet special requirements, namely:

1. Each member of the Board of Commissioners must have integrity, have the experience and capabilities required to carry out their duties and meet other qualifications stipulated in the Company's Articles of Association as well as laws and regulations.
2. The selection criteria for members of the Board of Commissioners are determined by a meeting of the Board of Commissioners after considering the findings of the Nomination and Remuneration Committee.

Requirement and Criteria of Members of the Board of Directors

The Company has set the criteria for each candidate for Board of Directors as stated in the Board of Directors Charter. The requirements that must be met are as follows:

1. Possess good morals, ethics, and integrity.
2. Competent in legal matters.
3. In the 5 years prior to appointment and during his term of office:
   a. Has never been declared bankrupt
   b. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners declared guilty of causing a company to go bankrupt
   c. Has never been convicted of crimes detrimental to state finances and/or related to the financial sector
   d. Has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who during his term of office:
      - Failed to convene Annual GMS
      - Had his accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners not accepted by the GMS or failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS
      - Caused a company that obtained licenses, approvals, or registrations from the Financial

dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan

4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik

Selain itu, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu:

1. Berperilaku baik, mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dan memenuhi kualifikasi lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
3. Memiliki pemahaman yang baik atas peraturan-peraturan Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, peraturan terkait dengan bisnis Perseroan, beserta Anggaran Dasar Perseroan.
4. Melaksanakan tugasnya tanpa ada benturan kepentingan.
5. Calon Direksi wajib membuat surat pernyataan dan disampaikan kepada Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 4 ayat (1).

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut disampaikan proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Services Authority to fail to fulfill its obligation to submit annual reports and/or financial statements to the Financial Services Authority

4. Has a commitment to comply with laws and regulations
5. Has knowledge and/or expertise in the field required by the Issuer or Public Company

In addition, prospective members of the Board of Directors must also meet special requirements, namely:

1. Behave ethically, possess the necessary experience and capabilities to carry out their duties and meet other qualifications stipulated in the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
2. Appointed based on expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the Company.
3. Have a good understanding of the regulations of Limited Liability Companies, Capital Markets, Indonesia Stock Exchange, regulations related to the Company's business, along with the Company's Articles of Association.
4. Carry out his duties without any conflicts of interest.
5. Prospective Board of Directors are required to make a written statement and submit it to the Issuer or Public Company as referred to in POJK No. 33 of 2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Article 4 paragraph (1).

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

The appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners is carried out through the mechanism of the General Meeting of Shareholders. The following is the nomination process for the Board of Commissioners and Board of Directors.

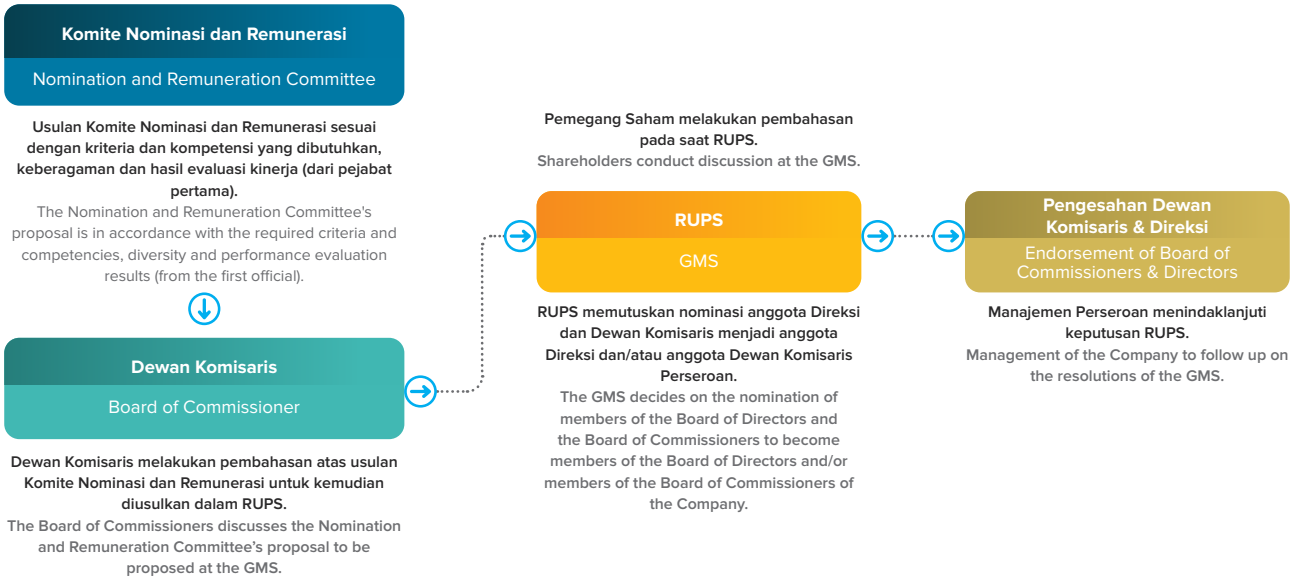

Kebijakan Remunerasi
Remuneration Policy

1. Perseroan berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil, dan seimbang. Dalam menyusun kebijakan remunerasi, Perseroan tidak menggunakan jasa konsultan eksternal, namun untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh jasa konsultan eksternal yang independen guna menjaga remunerasi HUMI agar tetap kompetitif, adil, dan seimbang.
2. Kebijakan remunerasi Perseroan menjadi salah satu aspek yang penting untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan-karyawan yang berkualitas. Perseroan menerapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, baik yang tetap maupun yang variabel.
3. Secara berkala dan berkesinambungan, HUMI melakukan kajian pada sistem remunerasi dan kesejahteraan karyawan. Dalam rangka memastikan independensi pemberian remunerasi terhadap seluruh karyawan, maka HUMI memastikan evaluasi kinerja, dan penentuan remunerasi dilakukan melalui bobot dari setiap pekerjaan yang disandang oleh setiap profesi.

1. The Company is committed to implementing a competitive, fair, and balanced remuneration system. In preparing the remuneration policy, the Company does not use external consultant services, but to maintain competitive remuneration, the Company always conducts benchmarking through surveys conducted by independent external consultant services to maintain HUMI's remuneration to remain competitive, fair, and balanced.
2. The Company's remuneration policy is one of the important aspects to motivate and retain quality employees. The Company implements a remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, both fixed and variable.
3. Periodically and continuously, HUMI conducts a review of the remuneration and employee welfare system. In order to ensure the independence of remuneration for all employees, HUMI ensures that performance evaluation and remuneration determination are carried out through the weight of each job held by each profession.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan remunerasi dan melakukan evaluasi secara berkala yang dilakukan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

Evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut didasarkan atas kinerja, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan pada masa mendatang.

Remuneration Determination Procedure

Based on the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners and Board of Directors are given honorarium and allowances/facilities including bonuses, the type and amount of which are determined by the GMS by taking into account the applicable laws and regulations. The Board of Commissioners supervises the implementation of the remuneration policy and conducts periodic evaluations through the Nomination and Remuneration Committee.

Evaluation of the Nomination and Remuneration Committee is based on performance, fairness with the peer group, the Company's long-term targets and strategies, fulfillment of reserves as stipulated in laws and regulations and the Company's future income potential.

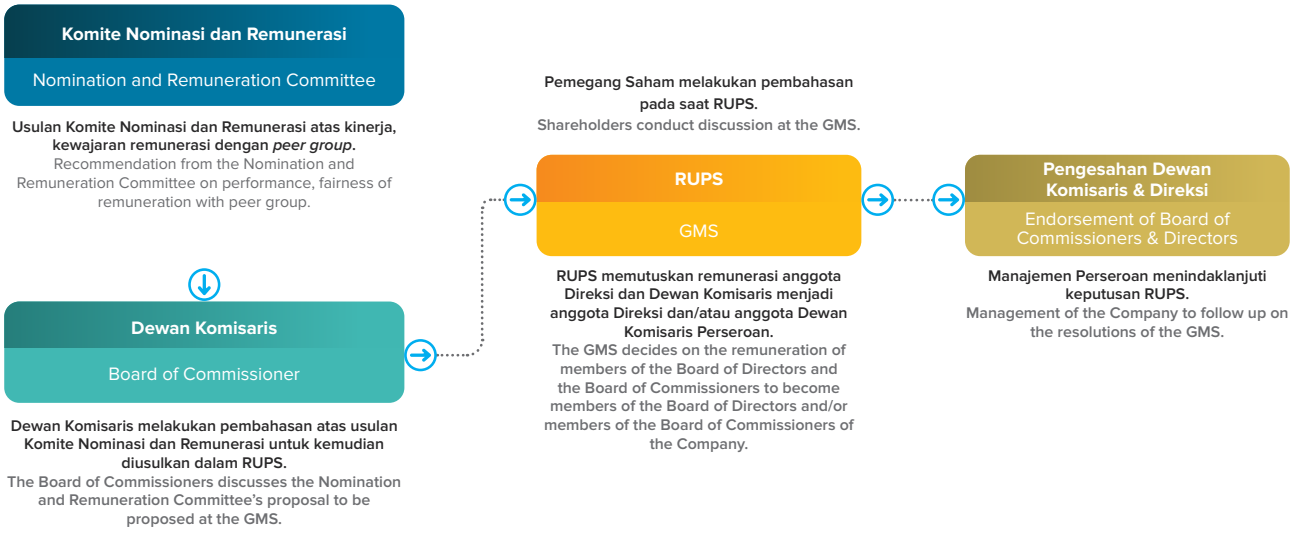

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, komponen remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan tetap dan/atau variabel dan Insentif.

Remuneration Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Company's Articles of Association and the Nomination and Remuneration Committee Charter, the remuneration components of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors consist of salaries, fixed and/or variable allowances and incentives.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada 14 Juni 2024, pemegang saham memutuskan menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2024 mengikuti proporsional remunerasi Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemegang Saham Utama.

Tahun 2024, total remunerasi yang diberikan Perseroan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp9.715.480.523,-.

Transparency of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Annual GMS resolutions of the Financial Year 2023 which was held on June 14, 2024, the shareholders approved and granted authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the Company's Board of Directors for the financial year ended on December 31, 2024, as well as to determine the salary and/or other allowances for members of the Company's Board of Commissioners collegially for the financial year 2024 following the proportional remuneration of the Company's Board of Directors, taking into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee in prior consultation with the Major Shareholders.

In 2024, the total remuneration provided by the Company for members of the Board of Commissioners and Board of Directors amounted to Rp9,715,480,523,-.

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation Policy

Sepanjang tahun 2024, HUMI tidak menjalankan program terkait pemberian kompensasi jangka panjang bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun karyawan Perseroan dalam bentuk program insentif jangka panjang, opsi saham, atau bentuk lainnya.

Throughout 2024, HUMI did not run any programs related to the provision of long-term compensation for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or employees of the Company in the form of long-term incentive programs, stock options, or any other forms.

Pengungkapan Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Disclosure of Shares Ownership by Members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan tata kelola perusahaan mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang dilakukan atas saham Perseroan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah transaksi saham tersebut.

The corporate governance policy stipulates that members of the Board of Commissioners and Board of Directors are required to report transactions made on the Company's shares no later than 3 working days after the shares transaction.

Perseroan melaporkan kepemilikan atas saham Perseroan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris setiap bulannya melalui sistem pelaporan *online* Bursa Efek Indonesia (IDXNet). Sepanjang tahun 2024, tidak ada transaksi atas saham Perseroan yang dilakukan oleh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris yang mengakibatkan perubahan kepemilikan jumlah saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

The Company reports the Company's shares ownership by members of the Board of Directors and Board of Commissioners every month through the Indonesia Stock Exchange's online reporting system (IDXNet). Throughout 2024, there were no transactions of the Company's shares carried out by members of the Board of Directors or Board of Commissioners that resulted in changes in the Company's shares ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners.

Kepemilikan jumlah saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan pada halaman 76 di Laporan Tahunan ini.

The Company's shares ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners is disclosed on page 76 in this Annual Report.

Komite Tingkat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Level Committee

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi HUMI dibantu oleh Komite Tingkat Dewan Komisaris. Komite Tingkat Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Pedoman Komite yang disusun dan ditinjau ulang secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan praktik terbaik penerapan Tata Kelola.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners in supervising HUMI is assisted by the Board of Commissioners Level Committee. The Board of Commissioners Level Committee carries out its duties and responsibilities by referring to the Committee Charter which is prepared and reviewed periodically based on applicable regulations in Indonesia and best practices in the implementation of Governance.

Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite ESG.

The Board of Commissioners level committees consist of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and ESG Committee.

Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam pelaksanaan tugasnya untuk memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal, serta auditor eksternal. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, meliputi proses pelaporan keuangan, serta manajemen risiko dan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dengan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tentang Penetapan Susunan Komite Audit.

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee in carrying out its duties to monitor and ensure the effectiveness of the internal control system and the implementation of duties of internal auditors, as well as external auditors. In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee monitors and evaluates the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal control, including the financial reporting process, as well as risk management and the implementation of a good corporate governance system. Referring to the Board of Commissioners Decree No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 concerning the Determination of the Audit Committee Composition.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata Kelola, Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
3. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Legal Basis

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) and OJK Circular Letter, regarding the Implementation of Governance, Establishment and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee, Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Use of Services of Public Accountant and Public Accounting Firms, Affiliated Transactions and Conflicts of Interest in Certain Transactions.
2. The Company's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Komite Audit

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 4 November 2022 dan digunakan sebagai pedoman arah dan perilaku Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dan telah diunggah ke situs web Perseroan, www.humi.co.id. Adapun isi dari Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

Audit Committee Charter

The Company has an Audit Committee Charter that has been ratified by the Company's Board of Commissioners on November 4, 2022, and is used as a guideline for the direction and behavior of the Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities professionally and independently and has been uploaded to the Company's website, www.humi.co.id. The contents of the Audit Committee Charter are as follows:

1. Pendahuluan.
2. Dasar Hukum.
3. Definisi.
4. Komposisi, Struktur dan Masa Jabatan.
5. Persyaratan Keanggotaan.
6. Tugas dan Tanggung Jawab.
7. Wewenang.
8. Tata Cara, Prosedur dan Penyelenggaraan Rapat.
9. Pelaporan.
10. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan.
11. Standar Etika.
12. Penutup.

Masa Jabatan Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Apabila seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Jumlah, susunan, dan komposisi anggota Komite Audit Perseroan telah diatur dalam Piagam Komite Audit, yaitu:

1. Paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
2. Komite Audit diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.

Komposisi dan susunan Komite Audit ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023, dengan susunan sebagai berikut:

1. Introduction.
2. Legal Basis.
3. Definitions.
4. Composition, Structure and Term of Office.
5. Membership Requirements.
6. Duties and Responsibilities.
7. Authorities.
8. Methods, Procedures and Holding of Meetings.
9. Reporting.
10. Handling Complaints or Reporting Related to Alleged Violations Concerning Financial Reporting.
11. Ethical Standards.
12. Closing.

Term of Office of the Audit Committee

The term of office of the Audit Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, and may only be re-elected for 1 subsequent period.

If an Independent Commissioner who serves as the Head of the Audit Committee resigns before his term of office as a Commissioner of the Company, the Head of the Audit Committee will be replaced by another Independent Commissioner.

Number, Structure and Composition of the Audit Committee Membership

The number, structure and composition of the Company's Audit Committee members are regulated in the Audit Committee Charter, namely:

1. Consist of at least 3 people from Independent Commissioners and parties from outside the Company.
2. The Audit Committee is chaired by one of the Independent Commissioners who also serves as a member.

The composition and structure of the Audit Committee was determined on March 31, 2023, through the Board of Commissioners Decree No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023, with the following structure:

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2024
Composition of the Audit Committee as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term Period
Daryono	Ketua Head	SK Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 – present	Ke-1 First
Mirawati Sudjono	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 – present	Ke-1 First
JT Duma	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 - present	Ke-1 First

Profil Komite Audit
Audit Committee Profile

Daryono

Ketua Komite Audit
Head of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this report.

Mirawati Sudjono

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committee/Independent Party

Usia **Age**	68 tahun 68 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	31 Maret 2023 s.d. Sekarang March 31, 2023 - present

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Master of Science, di bidang Accounting dari University of Wisconsin, Amerika Serikat (1990).
  Master of Science, in Accounting from University of Wisconsin, USA (1990).
- Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (1986).
  Accountant at Indonesian State College of Accountancy (1986).

Riwayat Pekerjaan
Professional History

- Komisaris Independen & Ketua Komite Audit PT PNM Ventura Capital (2017-2021).
  Independent Commissioner & Head of the Audit Committe of PT PNM Ventura Capital (2017-2021).
- Anggota Komite Anggaran, Audit dan Aktuari BPJS Ketenagakerjaan (2016-2020).
  Member of the Budget, Audit and Actuary Committe of BPJS Ketenagakerjaan (2016-2020).
- Deputi Bidang Pelayanan Publik di Kementriaan PAN dan RB (2013-2016).
  Deputy of Public Service at the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (2013-2016).
- Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali (2012-2013).
  Head of BPKP Representative for Bali Province (2012-2013).
- Kepala Direktorat Pengawasan Industri dan Distribusi di Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (2010-2012).
  Head of Directorate of Industrial and Distribution Supervision at the Deputy for Supervision of Goverment Agencies for the Economy (2010-2012).
- Ketua Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP BPKP (2008-2010).
  Head of Task Force of Implementation Development of SPIP BPKP (2008-2010).
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2008-2010).
  Head of Supervision Research and Development Center of BPKP (2008-2010).
- Koordinator Pengembang Policy Evalustion BPKP (2005-2008).
  Policy Evaluation Development Coodinator of BPKP (2005-2008).
- Kepala Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi dan Perdagangan di Deputi Bidang Akuntan Negara BPK (2004-2005).
  Head of Directorate of Supervision of Agribusiness Enterprises, Construction and Trade Services at Deputy State Accountant of BPK (2004-2005).
- Anggota Satgas GCG BPKP Pusat (1999-2025).
  Member of GCG Task Force of Central BPKP (1999-2025).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di Dalam Grup Perseroan | Within the Company Group:
- Anggota Komite Audit HITS (2021-sekarang).
  Member of the HITS Audit Committe (2021-present).
- Anggota Komite Audit GTSI (2021-sekarang).
  Member of the GTSI Audit Committe (2021-present).

Di Luar Perseroan | Outside the Company Group:
Tidak Ada | None.

JT Duma

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Member of the Audit Committe

Usia **Age**	78 tahun 78 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	31 Maret 2023 s.d. Sekarang March 31, 2023 - present

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Program Magister, MM di LPMI Jakarta (2004).
  Masters Program, MM at LPMI Jakarta (2004).
- Sarjana Ekonomi di Universitas Kristen Indonesia (1974).
  Bachelor of Economics from Christian University of Indonesia (1974).

Riwayat Pekerjaan
Professional History

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi HIT (2020-2023).
  Member of HITS Nomination and Remuneration Committe (2020-2023).
- Anggota Komite Audit HITS (2012-2020).
  Member of HITS Audit Committe (2012-2020).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi HITS (2009-2012).
  Member of HITS Nomination and Remuneration (2009-2012).
- Komisaris Pertambangan Batu Bara (2004-2009).
  Commisioner at Pertambangan Batu Bara (2004-2009).
- Komisaris PT Podium (2001-2004).
  Commissioner at PT Podium (2001-2004).
- PT Pertamina (1975-2001).
  PT Pertamina (1975-2001).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di Dalam Grup Perseroan:
Within the Company Group:

- Anggota Komite Audit HITS (2021-sekarang).
  Member of HITS Audit Committe (2021-present).
- Anggota Komite Audit GTSI (2021-sekarang).
  Member of GTSI Audit Committe (2021-present).

Di Luar Perseroan:
Outside the Company Group:
Tidak Ada.
None.

Pernyataan Independensi dan Persyaratan Komite Audit

Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan di bidangnya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang baik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 orang anggota non Komisaris sebagai Pihak Independen.

Declaration of Independence and Requirements for the Audit Committee

All members of the Committee have high commitment and integrity with the necessary abilities and expertise in their fields to support the implementation of good governance.

In carrying out their duties and responsibilities, all members of the Audit Committee have met all independence criteria and are able to carry out their duties and responsibilities independently, supporting the Company's interest, and cannot be influenced by any party, consisting of 1 head who is also a member who is an Independent Commissioner, and 2 non-Commissioner members as Independent Parties.

Pernyataan tentang Independensi Komite Audit
Declaration of Independence of the Audit Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Daryono	Mirawati Sudjono	JT Duma
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa *assurance*/audit *non-assurance*/audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada HUMI dan anak perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum penunjukan. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, Public Appraisal Services Firm or other party that is currently or has provided assurance/non-assurance/audit services, appraisal services and/or other consulting services to HUMI and its subsidiaries within the last 6 months prior to the appointment.	✓	✓	✓
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan HUMI dan anak perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum penunjukkannya, kecuali Komisaris Independen. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the activities of HUMI and its subsidiaries within the last 6 months prior to their appointment, except for the Independent Commissioner.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham HUMI baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham HUMI baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut. Does not own HUMI shares either directly or indirectly. In the event that a Committee member acquires HUMI shares, either directly or indirectly as a result of a legal incident, the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 months after acquiring the shares.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliate with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha HUMI dan anak perusahaannya. Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of HUMI and its subsidiaries.	✓	✓	✓

✓ Ya | Yes ✗ Tidak | No

Selain wajib memenuhi kriteria independensi, anggota Komite Audit Perseroan juga mesti memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, antara lain:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan industri pelayaran dan distribusi energi serta peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh HUMI.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang industri pelayaran dan distribusi energi. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi dalam hal memenuhi kriteria:
   a. Memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi; dan

Apart from being required to meet independence criteria, members of the Company's Audit Committee must also fulfill the requirements set out in the Audit Committee Charter, including:

1. Have high integrity, adequate capabilities, expertise, and experience in accordance with their field of work and educational background, and able to communicate effectively.
2. Understand financial statements, the Company's business, particularly those connected to the Company's business, audit processes, risk management and laws and regulations in the capital market sector, regulations in shipping industry and energy distribution as well as other laws and regulations.
3. Must comply with the Code of Conduct set by HUMI.
4. Willing to continously enhance competence through education and training.
5. Must have at least 1 member with a background in accounting and/or finance, and at least one member with expertise in the shipping industry and energy distribution. Members of the Audit Committee who come from independent parties are deemed to have expertise in the financial or accounting field in terms of fulfilling the following criteria:
   a. Have knowledge in the field of finance and/or accounting; and

b. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
6. Anggota Komite Audit wajib independen dan bukan merupakan bagian dari manajemen HUMI dan anak usaha/unit usaha, kecuali Komisaris Independen.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa *assurance*/audit *non-assurance*/audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada HUMI dan anak perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum penunjukan.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan HUMI dan anak perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir sebelum penunjukannya, kecuali Komisaris Independen.
9. Tidak mempunyai saham HUMI baik langsung maupun tidak langsung.
10. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham HUMI baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
11. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha HUMI dan anak perusahaannya.
13. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota komite.
14. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:
1. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan HUMI.
2. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan HUMI.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal dengan:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik yang didasarkan pada, dan tidak terbatas pada independensi, ruang lingkup penugasan, *fee*, keahlian, dan metode yang digunakan;
   b. Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit;
   c. Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting;

b. Have at least 5 years of work experience in the field of finance and/or accounting.
6. Members of the Audit Committee must be independent and not part of HUMI's management and its subsidiaries/ business units, except for Independent Commissioners
7. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Firm, or other party that is or has provided assurance/non-assurance/ audit services, appraisal and/or other consulting services to HUMI and its subsidiaries within the last 6 months before appointment.
8. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of HUMI and its subsidiaries in the last 6 months before the appointment, except for Independent Commissioners.
9. Does not own any shares of HUMI either directly or indirectly
10. In the event that a Committee member acquires HUMI shares, directly or indirectly due to a legal event, such shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 months after acquiring the shares.
11. Does not have any affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.
12. Does not have any direct or indirect business relationship related to the business activities of HUMI and its subsidiaries.
13. Members of the Board of Directors are prohibited from being Committee members.
14. The Honorarium for members of the audit Committee is determinated by the Board of Commissioners.

Duties and Responsibilities of the Audit Committe

The Audit Committee has responsibilites including:
1. Review financial information to be disclosed by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to HUMI's f inancial information.
2. Review laws and regulations related to HUMI's activities
3. Provide independent opinions in the event dissenting opinion between management and accountants regarding the services provided.
4. Assist the Board of Commissioners in actively supervising the activities of external auditors by:
   a. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment and/or replacement of Public Accountants based on, but not limited to, independence, scope of assignment, fees, expertise, and methods used;
   b. Discussing audit plans, including the nature and scope of the audit;
   c. Reviewing the adequacy of the audit by the public accounting firm by considering all significant risks;

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan uji, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan; dan
e. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dilaksanakannya RUPS Tahunan HUMI.

5. Komite Audit berhak untuk meminta laporan Internal Audit secara resmi paling sedikit satu kali setiap bulan. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Komite Audit menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris.
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku di HUMI.
7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
8. Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris.
9. Ketua Komite Audit juga bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
   a. Menentukan rencana kerja tahunan
   b. Menentukan jadwal rapat tahunan
   c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
   d. Membuat *self-asessment* mengenai efektivitas dari kegiatan komite
   e. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite untuk mencatat Rapat Komite Audit dan membuat Risalah Rapat Komite Audit

d. Monitoring and evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information by public accountants and/or Public Accounting Firms, including their compliance with applicable financial accounting standards, adequacy of fieldwork time, adequacy of testing, and recommendations for improvement provided; and
e. Results of the Audit Committee's evaluation of the performance of public accountants in performing their duties are communicated no later than 30 (thirty) days before the Annual GMS of HUMI.

5. The Audit Committee has the right to request an official Internal Audit report at least once a month. Based on such reports, the Audit Committee reviews and reports to the Board of Commissioners
6. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on complaints of violations of the provisions or regulations applicable in HUMI.
7. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.
8. The perfomance assessment of the Audit Committee is conducted by the Board of Commissioners.
9. The Head of the Audit Committee is also tasked and responsible for coordinating all Committee activities to fulfill the Committee's objectives in accordance with its establishment, including being responsible for the following matters:
   a. Determine the annual work plan
   b. Determine the annual meeting schedule
   c. Create periodic reports on Committee's activities and matters deemend necessary to be of concern to the Board of Commissioners
   d. Conduct a self-assessment of the effectiveness of Committee's activitites
   e. Appoint non-Board of Commissoners Audit Committee members or appoint another third party as the Committee Secretary to record Audit Committee Meetings and prepare Minutes of the Audit Committee Meeting

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Rapat Komite Audit telah diatur dalam Piagam Komite Audit, yakni Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam 1 tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari anggota, termasuk Komisaris Independen dan pihak eksternal yang independen. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non-fisik. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 18 kali rapat. Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

Meeting and Level of Attendance of the Audit Committee

Audit Committee Meetings have been regulated in the Audit Committee Charter, namely that the Audit Committee must hold meetings at least 4 times in 1 year and be attended by at least 51% of members, including Independent Commissioners and independent external parties. Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings that are not attended physically are conducted via teleconference, video conference, or other electronic media that allow all Committee Meeting participants to see and hear each other directly, and participate in the meeting.

Throughout 2024, the Audit Committee held a total of 18 meetings. The frequency and level of attendance of Audit Committee members at Audit Committee Meetings are as follows:

Kehadiran Anggota pada Rapat Komite Audit
Attendance of Members at Audit Committee Meetings

Periode Period	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran di Rapat Meeting Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Rata-rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1 Januari-31 Desember 2024 January 1-December 31, 2024	Daryono	18	18	100%	100%
	Mirawati Sudjono	18	18	100%	
	JT Duma	18	18	100%	

Dalam rapat Komite Audit sendiri terdapat 11 kali rapat internal Komite Audit, 4 kali rapat Komite Audit bersama dengan Internal Audit, dan 3 kali rapat Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite Audit telah membahas agenda-agenda sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan kecukupan laporan keuangan publikasi dan pelaporan kepada otoritas.
2. Rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
3. Rencana audit, ruang lingkup dan temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan kecukupan sistem pengendalian intern.
4. Membahas isu-isu kinerja operasional.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Laporan pelaksanaan tugas Komite Audit yang meliputi aktivitas dan rekomendasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan kembali dan mereviu Piagam Komite Audit dan Piagam Audit Internal.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Internal Audit dan memberikan saran atas temuan Internal Audit.
3. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris sehubungan audit dan manajemen resiko.
4. Menghadiri rapat Komite dan memberikan saran.
5. Melakukan rapat dengan Kantor Akuntan Publik sehubungan dengan audit atas Laporan Keuangan.
6. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas Audit Internal.

Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025

Komite Audit telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Melakukan kajian terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.
2. Melakukan kajian terhadap efektivitas pengendalian internal.
3. Melakukan kajian terkait tata kelola.
4. Melakukan pengawasan terkait pertumbuhan bisnis dan strategi.

In the Audit Committee meeting itself, there are 11 internal Audit Committee meetings, 4 joint Audit Committee meetings with Internal Audit, and 3 Audit Committee meetings with the Public Accounting Firm (KAP).

Audit Committee Meeting Agenda

Throughout 2024, the Audit Committee meetings have discussed the following agendas:

1. Financial performance and adequacy of published financial statements and reporting to authorities.
2. Recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants and/or Public Accounting Firms.
3. Audit plan, scope and audit findings, follow-up to audit recommendations and adequacy of internal control systems.
4. Discussing operational performance issues.

Report on the Implementation of Audit Committee's Duties in 2024

Report on the implementation of Audit Committee's duties, which includes activities and recommendations generated throughout the year 2024, is as follows:

1. Review the Audit Committee Charter and Internal Audit Charter.
2. Conduct coordination meetings with Internal Audit and provide suggestions on Internal Audit findings.
3. Provide advise to the Board of Commissioners regarding audit and risk management.
4. Attend Committee meetings and provide suggestions.
5. Conduct meetings with Public Accounting Firms regarding the audit of Financial Statements.
6. Conduct evaluations of the effectiveness of Internal Audit.

Audit Committee Work Plan 2025

The Audit Committee has established a work plan for 2025 by providing the following strategic priorities:

1. Conduct a study on the accountability and transparency of financial statements.
2. Conduct a study on the effectiveness of internal control.
3. Conduct a study related to governance
4. Conducting supervision related to business growth and strategy.

Pelatihan Komite Audit Tahun 2024

Perseroan senantiasa menyelenggarakan program pendidikan ataupun pelatihan untuk anggota Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi dan penambahan wawasan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap anggota Komite Audit.

Sepanjang 2024, anggota Komite Audit telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Audit Committee Training in 2024

The Company always provides educational and training programs for members of the Audit Committee to develop competence and increase insight to support the implementation of the duties and responsibilities of each member of the Audit Committee.

Throughout 2024, members of the Audit Committee have participated in the following training and competency development programs:

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Daryono **Ketua Komite Audit** **Head of the Audit Committee**			
Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Daryanto dapat dilihat di program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris. The competency development program followed by Daryanto can be seen in the Board of Commissioners competency development program.			
Mirawati Sudjono **Anggota Komite Audit** **Member of the Audit Committee**			
23 Januari 2024 January 23, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP), *Batch* 38, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 38, as Resource Person	Jakarta	IKAI
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
30 Januari 2024 January 30, 2024	*Town Hall Meeting: Highlights of The New Global Internal Audit Standards*	*Online*	IIA
3 Februari 2024 February 3, 2024	Fundamental Audit Internal (*Qualified Internal Auditor*/QIA)	Jakarta	CIAR
5 Maret 2024 March 5, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP), *Batch* 39, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 39, as Resource Person	Jakarta	IKAI
27 Maret 2024 March 27, 2024	Tantangan Produk Pasar Modal & Keuangan Syariah dalam Dinamika Sosial & Suku Bunga Challenges of Sharia Capital Market and Financial Products in Social Dynamics & Interest Rates	*Online*	OJK
28 Maret 2024 March 28, 2024	Peran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan (TKBI) dalam Mendorong Transisi Energi menju *Net Zero Emission* Indonesia. The Role of Sustainable Finance Taxonomy (TKBI) in Driving Energy Transition towards Net Zero Emissions in Indonesia.	*Online*	OJK
2 Mei 2024 May 2, 2024	*How Prevent Accounting Fraud in Financial Sector*	*Online*	OJK
6 Mei 2024 May 6, 2024	Sosialiasi Pilar Governisasi ETAK dan ARA 2023 Socialization of ETAK and ARA 2023 Governance Pillars	*Online*	KNKG
4 Juni 2024 June 4, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 41, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 41, as Resource Person	Jakarta	IKAI
20 Juni 2024 June 20, 2024	*Navigating The Half-Year: Roadmap to Success*	*Online*	OJK
25 Juni 2024 June 25, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 42, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 42, as Resource Person	*Online*	IKAI
4 Juli 2024 July 4, 2024	*How to Mitigate Transition & Physical Risks in the Financial Sector*	*Online*	OJK
6 Juli 2024 July 6, 2024	*Internal Auditors Readiness in Facing Cyber Attacks*	*Online*	YPIA
9 Juli 2024 July 9, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 43, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 43, as Resource Person	Jakarta	IKAI

Tanggal Date	**Program yang Diikuti** Program Followed	**Lokasi** Location	**Penyelenggara** Organizer
10-11 Juli 2024 July 10-11, 2024	Konferensi Internal Auditor: *Elevating Internal Audit As A Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization* Internal Auditor Conference: Elevating Internal Audit as a Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization	Yogyakarta	YPIA
15 Juli 2024 July 15, 2024	*Fundamental Audit Internal* (FAI), sebagai Narasumber Internal Audit Fundamentals (FAI), as resource person	Jakarta	YPIA/CIAR
17 Juli 2024 July 17, 2024	*Implementation of Sustainability Reporting in Indonesia*	*Online*	IAI + IAPI
31 Juli 2024 July 31, 2024	Regulasi & Praktek MR Pol Institusi Sektor Publik Indo Regulation & Practice of MR Pol Public Sector Institutions Indo	*Online*	APWI
6 Agustus 2024 August 6, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 44, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 44, as Resource Person	Jakarta	IKAI
20 Agustus 2024 August 20, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 45, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 45, as Resource Person	Jakarta	IKAI
2 September 2024 September 2, 2024	*Fundamental Audit Internal* (FAI) , sebagai Narasumber Internal Audit Fundamentals (FAI), as resource person	Jakarta	YPIA/CIAR
3 September 2024 September 3, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 46, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 46, as Resource Person	Jakarta	IKAI
3 Oktober 2024 October 3, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 49, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 49, as Resource Person	Bandung	IKAI & PIS
8 Oktober 2024 October 8, 2024	Certification in Audit Committee Practices (CACP) *Batch* 47, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 47, as Resource Person	Jakarta	IKAI
17 Oktober 2024 October 17, 2024	*Carbon Trading and Its Effect On Indonesian's Economy*	*Online*	OJK
22 Oktober 2024 October 22, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 48, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 48, as Resource Person	Jakarta	IKAI
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 IHT#11 : Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	HUMI
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*
30 Oktober 2024 October 30, 2024	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit PTNBH, sebagai Narasumber Duties and Responsibilities of the PTNBH's Audit Committee, as a Resource Person	Bogor	Universitas Terbuka
31 Oktober 2024 October 31, 2024	EV *Insurance, International Best Practices for Innovation of New Synergy Products and Services*	*Online*	OJK
4 November 2024 November 4, 2024	*Fundamental Auditor Internal* (FAI) , sebagai Narasumber Internal Auditor Fundamentals (FAI), as Resource Person	Jakarta	YPIA/CIAR
5 November 2024 November 5, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 50, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 50, as Resource Person	Jakarta	IKAI
12 November 2024 November 12, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 52, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 52, as Resource Person	Jakarta	IKAI & PT Pelindo
18 November 2024 November 18, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 53, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 53, as Resource Person	Ciawi	IKAI & PT Pelindo
18 November 2024 November 18, 2024	*The 2nd OJK International Research Forum* (IRF) tahun 2024 dengan Topik: *Driving Financial Innovations to Enchance a Better Financial Life* The 2nd OJK International Research Forum (IRF) in 2024 with the Topic: Driving Financial Innovations to Enhance a Better Financial Life	*Online*	OJK
26 November 2024 November 26, 2024	*Risk & Governance Summit 2024*	*Online*	OJK
19 November 2024 November 19, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 51, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 51, as Resource Person	Jakarta	IKAI
3 Desember 2024 December 3, 2024	*Certification in Audit Committee Practices* (CACP) *Batch* 54, sebagai Narasumber Certification in Audit Committee Practices (CACP), Batch 54, as Resource Person	Jakarta	IKAI & PT Pelindo
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 IHT#11 : Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
JT Duma **Anggota Komite Audit** **Member of the Audit Committee**			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: Financial Numery for Commissioners and Directors	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) merupakan salah satu Komite penunjang Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat mengenai penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan mengacu pada SK No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) is one of the supporting committees of the Board of Commissioners which was established to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory functions regarding the determination of qualifications and the nomination process as well as remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors. Referring to Decree No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023, concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of the Work of the Nomination and Remuneration Committee.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan pembentukan KNR Perseroan, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata Kelola, Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
3. ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Company's Nomination and Remuneration Committee (NRC) includes:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) and OJK Circular Letter, regarding the Implementation of Governance, Nomination and Remuneration Committees.
2. The Company's Articles of Association concerning the duties and authorities of the Board of Commissioners.
3. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

KNR Perseroan telah memiliki Piagam atau Pedoman yang disetujui pada tanggal 4 November 2022 oleh Dewan Komisaris, dan digunakan sebagai Landasan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (*Nomination and Remuneration Committee Charter*/NRCC) yang bersifat mengikat bagi seluruh anggota komite dan telah diunggah ke situs web Perseroan, www.humi.co.id. Adapun isi dari Piagam KNR adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Dasar Hukum.
3. Definisi.
4. Komposisi, Struktur, dan Masa Jabatan.
5. Persyaratan Keanggotaan.
6. Tugas dan Tanggung Jawab.
   a. Terkait dengan fungsi Nominasi; dan
   b. Terkait dengan fungsi Remunerasi.
7. Tata Cara, Prosedur, dan Penyelenggaraan Rapat.
8. Pelaporan.
9. Standar Etika.
10. Penutup.

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Company's Nomination and Remuneration Committee (NRC) has established a Charter approved on November 4, 2022, by the Board of Commissioners. This charter serves as the foundation for the operations of the Nomination and Remuneration Committee (NRCC) and is binding for all committee members. The charter has been uploaded to the Company's website, www.humi.co.id. Contents of the Nomination and Remuneration Committee Charter (NRCC) are as follows:

1. Introduction.
2. Legal Basis.
3. Definitions
4. Composition, Structure, and Term of Office
5. Membership Requirements
6. Duties and Responsibilities.
   a. Related to the Nomination function; and
   b. Related to the Remuneration function.
7. Methods, Procedures, and Holding of Meetings.
8. Reporting.
9. Ethical Standards.
10. Closing

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Penggantian anggota KNR yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota KNR dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Jumlah, Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Jumlah, susunan, dan komposisi anggota Komite Nominasi Remunerasi Perseroan telah diatur dalam Piagam KNR, yakni:

1. Paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari Komisaris Independen dan anggota lainnya yang dapat berasal dari:
   a. Anggota Dewan Komisaris
   b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan dan/atau
   c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi SDM, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota KNR tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi SDM
2. KNR Perseroan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.

Komposisi dan susunan KNR ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2023 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023, dengan susunan sebagai berikut:

Term of Office of the Nomination and Remuneration Committee

The term of office of members of the Nomination and Remuneration Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association, and may only be re-elected for 1 subsequent period. Replacement of members of the NRC who are not from the Board of Commissioners shall be carried out no later than 60 days since the NRC member in question is no longer able to carry out his/her functions.

Number, Structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Number, structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee members have been regulated in the Nomination dan Remuneration Committee Charter as follows:

1. Consist of at least 3 people from Independent Commissioners and other members may be from:
   a. Board of Commissioners members
   b. External Parties and/or
   c. Individuals holding managerial positions under the Board of Directors responsible for HR, provided that the majority of NRC members cannot come from individuals holding managerial positions responsible for HR
2. The NRC is chaired by one of the Independent Commissioners serving as a member.

The composition and structure of the NRC was determined on March 31, 2023 through the Decree of the Board of Commissioners No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023, with the following structure:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2024
Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term Period
Daryono	Ketua Head	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 - present	Ke-1 First
HM Roy Sembel	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 - present	Ke-1 First
Desi Arifianti	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Board of Commissioners Decree Number 002/SK/Dekom-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.	31 Maret 2023 s.d Sekarang March 31, 2023 - present	Ke-1 First

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Profile

Daryono

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Head of the Nomination and Remuneration Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan pada laporan ini.
His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this report.

HM Roy Sembel

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Usia **Age**	60 tahun 60 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	31 Maret 2023 s.d. sekarang March 31, 2023 - present

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Doktoral (S3) bidang *Corporate Finance di University of Pittsburgh*, Amerika Serikat (1996).
  Doctorate (S3) in Corporate Finance from the University of Pittsburgh, United States (1996).
- Magister Manajemen (S2) bidang Manajemen dan Keuangan dari Erasmus University Rotterdam, Belanda (1990).
  Master of Management (S2) in Management and Finance from Erasmus University Rotterdam, Netherlands (1990).
- Magister Manajemen (S2) bidang Manajemen dan Keuangan dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat (1989).
  Master of Management in Finance from the University of Pennsylvania, United States (1989).
- Sarjana (S1) FMIPA/Statistik dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor (1986).
  Bachelor of Science in Mathematics and Statistics from Bogor Agricultural University (IPB), Bogor (1989).

Riwayat Pekerjaan
Professional History

Beliau pernah menyandang berbagai jabatan penting sebelumnya, di antaranya yaitu:
- Dekan IPMI International Business School.
- Dekan UPH Business School.
- Direktur Program Pasca Sarjana UPH.
- Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara.
- Direktur Program MM Keuangan Universitas Bina Nusantara.

He has held various important positions previously, including:
- Dean of IPMI International Business School.
- Dean of UPH Business School.
- Director of Postgraduate Programs at UPH.
- Dean of the Faculty of Economics at Multimedia Nusantara University.
- Director of the Finance MM Program at Bina Nusantara University.

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai:
- Komisaris Independen di PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013-2018).
- Senior Counselor di Vriens & Partner (2012-2015).
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Pemantau Risiko di Bank Niaga (2005-2007).
- Konsultan Senior di McKinsey & Co Indonesia (1998-2001).

In addition, he has also served as:
- Independent Commissioner at PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (2013-2018).
- Senior Counselor at Vriens & Patner (2012-2015).
- Independent Commissioner and Head of the Risk Monitoring Committee at Bank Niaga (2005-2007).
- Senior Consultant McKinsey & Co Indonesia (1998-2001)

Rangkap Jabatan **Concurrent Position**	Di Dalam Grup Perseroan: Within the Company Group: • Komisaris Utama PT ETSI Hutama Maritim. President Commissioner of PT ETSI Hutama Maritim. • Anggota Komite KNR HITS (2021-sekarang). Member of the NRC Committee of GTSI (2021-present). • Anggota Komite KNR GTSI (2021-sekarang). Member of the NRC Committee of HITS (2021-present). Di Luar Perseroan: Tidak Ada. Outside the Company Group: None.

Desi Arifianti

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of Nomination and Remuneration Committee

Usia **Age**	43 tahun 43 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	31 Maret 2023 s.d. sekarang March 31, 2023 - present

Riwayat Pendidikan **Educational Background**	Sarjana (S1) Sastra Inggris dari Universitas Pertiwi, Jakarta (2004). Bachelor of English Literature from Universitas Pratiwi Jakarta (2004).
Riwayat Pekerjaan **Professional History**	• Kepala Departemen *Human Capital and General Affair* HUMI (2023-sekarang). Head of Human Capital and General Affairs Department at HUMI (2023-present). • Asistan Manajer *Human Capital* HITS (2016-2022). Assistant Manager Human Capital at HITS (2016-2022). • Sekretaris Direktur Utama HITS (2013-2015). Secretary to President Director at HITS (2013-2015). • PT Humpuss (2004-2012). PT Humpuss (2004-2012).
Rangkap Jabatan **Concurrent Position**	Di Dalam Grup Perseroan: Within the Company Group: • Anggota Komite KNR HITS (2021-sekarang). Member of the NRC Committee of GTSI (2021-present). • Anggota Komite KNR GTSI (2021-sekarang). Member of the NRC Committee of HITS (2021-present). Di Luar Perseroan: Tidak Ada. Outside the Company Group: None.

Pernyataan Independensi dan Persyaratan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Declaration of Independence and Requirements for the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out their duties and responsibilities, all members of the Nomination and Remuneration Committee have met all independence criteria and are able to carry out their duties and responsibilities independently, uphold the interests of the Company, and cannot be influenced by any party.

All members of the Nomination and Remuneration Committee carry out their duties, responsibilities and authorities professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with laws and regulations.

Pernyataan tentang Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Declaration of Independence and Requirements for the Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Daryono	HM Roy Sembel	Desi Arifianti
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama. Has no affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha HUMI dan anak perusahaannya. Has no direct or indirect business relationship related to the business activities of HUMI and its subsidiaries.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham HUMI baik langsung maupun tidak langsung. Does not own HUMI shares either directly or indirectly.	✓	✓	✓

✓ Ya I Yes ✗ Tidak I No

Selain harus memenuhi kriteria independensi, anggota KNR juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Piagam KNR, yakni:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, peraturan industri pelayaran dan distribusi energi serta peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh HUMI.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
6. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha HUMI dan anak perusahaannya.
8. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota KNR.

In addition to meeting the independence criteria, members of the Nomination and Remuneration Committee must also fulfill the requirements set forth in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which include:

1. Have high integrity, adequate capabilities, expertise, and experience in accordance with their field of work and educational background, and able to communicate effectively.
2. Understand the Company's business, especially that related to the Company's business and laws and regulations in the capital market sector, regulations in shipping industry and energy distribution as well as other laws and regulations.
3. Must comply with the Code of Conduct set by HUMI.
4. Willing to continously enhance competence through education and training.
5. Have expertise and experience in the areas related to nominations and/or remunerations.
6. Does not have any affiliated relationship with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders.
7. Does not have any direct or indirect business relationship related to the business activities of HUMI and its subsidiaries.
8. Members of the Board of Directors are prohibited from being Committee members.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Terkait dengan Fungsi Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
   d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   e. KNR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
      - Memberikan rekomendasi komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Menyusun kebijakan mengenai sistem, prosedur pemilihan dan/atau penggantian serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi HUMI;
      - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
      - Membantu penelaahan dan pengusulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait remunerasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris khususnya:
      - Struktur Remunerasi, berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha HUMI di industri;
      - Kebijakan atas Remunerasi; dan
      - Besaran atas Remunerasi.

Duties dan Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee has responsibilities including:

1. Related to Nomination Function:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
      - Composition of positions for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
      - Policies and criteria required in the nomination process; and
      - Performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   b. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners based on established benchmarks as evaluation materials.
   c. Provide recommendations to the Board of Commissioners on capacity development program for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
   d. Propose eligible candidates for positions as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders.
   e. The NRC is required to perfom the following duties:
      - Provide recommendations on the composition and nomination process of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
      - Formulate policies regarding systems, selection and/or replacement procedures as well as criteria required in the nomination process for potential members of the Board of Commissioners, Board of Directors of HUMI;
      - Assist in the exectuion of evaluation of the perfomance of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
      - Formulate capacity development programs for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
      - Assist in the review and proposal of candidates who meet the qualifications as members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
2. Related to Remuneration Function:
   a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, particularly:
      - Remuneration structure, including salaries, honorariums, incentives, and/or allowances that are fixed and/or variable according to the business activities and business scale of HUMI in the industry.
      - Remuneration policies; and
      - Amount of Remuneration.

b. Kegiatan sebagaimana angka 1 di atas dapat dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang independen dan dievaluasi oleh KNR secara berkala sesuai dengan ketentuan HUMI.
c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

b. Activities as described in point 1 above can be carried out with the assistance of independent third parties and evaluated periodically by the NRC in accordance with HUMI's provisions.
c. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessments in accordance with the Remuneration received by each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners.

Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sedikitnya 3 kali dalam 1 tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, salah satunya merupakan Ketua KNR. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non-fisik. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

Sepanjang tahun 2024, KNR telah mengadakan rapat sebanyak 3 kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota KNR dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Meeting and Level of Attendance for the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee holds meetings as needed or at least 3 times in 1 year and attended by at least 2/3 of the total number of members, one of whom is the Head of the NRC. Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings that are not attended physically are conducted via teleconference, video conference, or other electronic media that allow all Committee Meeting participants to see and hear each other directly, and participate in the meeting.

Throughout 2024, the NRC has held meetings as many as 3 times. The frequency and level of attendance of NRC members in the Meetings are as follows:

Kehadiran Anggota pada Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Member Attendance at Nomination and Remuneration Committee Meetings

Periode Period	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran di Rapat Meeting Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Level	Rata-rata Tingkat Kehadiran Average Attendance Level
1 Januari-31 Desember 2024 January 1-December 31, 2024	Daryono	3	3	100%	89%
	HM Roy Sembel	3	3	100%	
	Desi Arifianti	3	2	67%	

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, rapat KNR telah membahas agenda-agenda rapat sebagai berikut:
1. 12 Februari 2024, membahas mengenai Remunerasi.
2. 22 Maret 2024, membahas mengenai asuransi purna jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. 16 Juli 2024, membahas mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda in 2024

Throughout 2024, the NRC meetings have discussed the following meeting agendas:
1. February 12, 2024, discussing Remuneration.
2. March 22, 2024, discussing post-employment insurance for the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. July 16, 2024, discussing the Nomination and Remuneration Committee Charter.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Laporan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2024:
1. Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Komite untuk tahun anggaran 2024.

2. Rekomendasi lainnya, yang bersifat insidentil terkait dengan berbagai isu penting yang perlu mendapatkan perhatian manajemen, termasuk kinerja organisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Report on the Implementation of the Nomination and Remuneration Committee's Duties in 2024

Report on the implementation of the Nomination and Remuneration Committee's duties throughout 2024:
1. Performance Assessment of the Board of Directors, Board of Commissioners and Committees for the 2024 financial year.
2. Other recommendations, which are incidental in nature related to various important issues that need management attention, including organizational performance and Human Resource development.

3. *Review*, atas beberapa kebijakan perusahaan, terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
   a. Kebijakan suksesi Direksi.
   b. Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. Prosedur penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Kebijakan penilaian kinerja Direksi serta Dewan Komisaris.
   e. Kebijakan program pelatihan/orientasi Direksi serta Dewan Komisaris.

Rencana Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai Kriteria Penilaian Kinerja Direksi.
2. Penyusunan Kriteria Dewan Komisaris dan Direksi.
3. *Review* Kebijakan Remunerasi Purna Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan Suksesi Direksi

HUMI memiliki dan menjalankan kebijakan suksesi Direksi dijalankan HUMI untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, memastikan bahwa HUMI memiliki sistem manajemen talenta yang dikelola oleh Departemen *Human Capital* sebagai sarana untuk mengidentifikasi manajemen senior yang memiliki potensi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan HUMI di masa mendatang.
2. Departemen *Human Capital* bersama dengan Komite Nominasi dan Remunerasi mengidentifikasi karyawan yang bertalenta yang berasal dari internal HUMI, namun tidak menutup kemungkinan karyawan yang bertalenta yang merupakan pihak profesional untuk perencanaan suksesi Direksi, termasuk Direksi.
3. Terhadap karyawan yang bertalenta yang berasal dari internal HUMI, Departmen *Human Capital* melakukan evaluasi agar selanjutnya dapat menyediakan kesempatan pengembangan diri bagi para karyawan yang bertalenta tersebut, baik berupa pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan maupun kesempatan pengembangan karier, dan lain-lain. Karyawan yang bertalenta yang teridentifikasi sebagai calon pengganti anggota Direksi, dievaluasi dan diidentifikasi serta harus memenuhi persyaratan kriteria kandidat Direksi HUMI.

Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Untuk menunjang Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Perseroan memberikan kesempatan kepada anggota KNR untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang diselenggarakan oleh internal

3. Review of several company policies, related to good corporate governance including:
   a. Board of Directors succession policy.
   b. Nomination Procedure for the Board of Directors and Board of Commissioners.
   c. Remuneration Determination Procedure for the Board of Directors and Board of Commissioners.
   d. Performance Assessment Policy for the Board of Directors and Board of Commissioners.
   e. Training/Orientation Program Policy for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Work Plan 2025

The Nomination and Remuneration Committee has established a work plan for 2025 by providing the following strategic priorities:

1. Discussion on the Performance Assessment Criteria for the Board of Directors.
2. Preparation of Criteria for the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Review of the Post-Employment Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Board of Directors Succession Policy

HUMI has and implements a succession policy of the Board of Directors implemented by HUMI to prepare for leadership regeneration. The policy regulates several matters as follows:

1. The Board of Commissioners, assisted by the Nomination and Remuneration Committee, ensures that HUMI has a talent management system managed by the Human Capital Department as a means to identify senior management with the potential to maintain the continuity of HUMI's leadership in the future.
2. The Human Capital Department together with the Nomination and Remuneration Committee identifies talented employees from within HUMI, but does not rule out the possibility of talented employees who are professionals for the succession planning of the Board of Directors, including the Board of Directors.
3. For talented employees from within HUMI, the Human Capital Department conducts an evaluation so that it can provide self-development opportunities for these talented employees, both in the form of required training and career development opportunities, etc. Talented employees who are identified as candidates to replace members of the Board of Directors are evaluated and identified and must meet the criteria for candidates for the Board of Directors of HUMI.

Nomination and Remuneration Committee Training in 2024

To support the Nomination and Remuneration Committee in carrying out its duties and responsibilities, the Company provides opportunities for NRC members to participate in training and competency development programs, both organized by the Company's internal and external parties.

Perseroan ataupun pihak eksternal. Sepanjang 2024, anggota KNR telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Throughout 2024, NRC members have participated in the following training and competency development programs:

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Daryono **Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi** **Head of the Nomination and Remuneration Committee**			
Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Daryanto dapat dilihat di program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris. The competency development program followed by Daryanto can be seen in the Board of Commissioners' competency development program.			
HM Roy Sembel **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi** **Member of the Nomination and Remuneration Committee**			
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3 : ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
Desi Arifianti **Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi** **Member of the Nomination and Remuneration Committee**			
11 Januari 2024 Januari 11, 2024	Sosialiasi Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP No. 58/2023) Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Socialization of Government Regulation No. 58 of 2023 (PP No. 58/2023) Concerning Withholding Rates for Income Tax Article 21 on Income in Connection with Work, Services, or Activities of Individual Taxpayers.	ZOOM	DJP dan KADIN Directorate General of Taxes and Indonesian Chamber of Commerce and Industry
18 Januari 2024 January 18, 2024	IHT#1: ESG & *Sustainability*	Jakarta	*In-House*
19 Januari 2024 January 19, 2024	*Managing Your People & Its Organization*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors* IHT#3: *Financial Numery for Commissioners and Directors* IHT#3: ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
15 Februari 2024 February 15, 2024	Mengungkap Karakter Calon Karyawan dengan Grafologi Revealing the Character of Prospective Employees with Graphology	ZOOM	GadjianAcademy
16 Februari 2024 February 16, 2024	Seluk Beluk Menyusun Perjanjian Kerja Karyawan The Ins and Outs of Drafting Employee Employment Agreements	ZOOM	GadjianAcademy
21 Februari 2024 February 21, 2024	*Designing Effective Performance Management System*	ZOOM	GadjianAcademy
28 Februari 2024 February 28, 2024	Membuat Sistem *Reward & Punishment* Karyawan Creating an Employee Reward & Punishment System	ZOOM	GadjianAcademy
17 Mei 2024 May 17, 2024	*Talkshow: "Reinventing Talent Management: Strategies for Star Retention and Optimization"*	ZOOM	PPIM FEB UI 2023
29 Mei 2024 May 29, 2024	IHT#4: Sosialisasi PPh 21 TER IHT#4: Socialization of Income Tax 21 TER	ZOOM	*In-House*
12 Juni 2024 June 12, 2024	Pelaksanaan *In House Training Awareness & Internal Auditor* ISO Series Implementation of In-House Training Awareness & Internal Auditor ISO Series	Jakarta	*In-House*
21 Juni 2024 June 21, 2024	IHT#5 - *Cascading KPI From Corporate to Individu* IHT#5 - Cascading KPI From Corporate to Individual	Jakarta	*In-House*
11 Juli 2024 July 11, 2024	IHT#6 - *Legal Insight for Non - Legal Practitioner in Business and Project Finance*	Jakarta	*In-House*
12 Juli 2024 July 12, 2024	IHT#7 - *Marine Insights for Non - Marine Practitioners*	Jakarta	*In-House*
24 Juli 2024 July 24, 2024	*Sharing Time* CGAP Sharing Time of CGAP	Jakarta	*In-House*

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
21 Agustus 2024 August 21, 2024	IHT#8: 5R (Manajemen 5R, Identifikasi IBPR, Lingkungan Kerja) IHT#8: 5R (5R Management, IBPR Identification, Work Environment)	Jakarta	*In-House*
27 Agustus 2024 August 27, 2024	IHT#10 - *Communication Skill and Personal Branding*	Jakarta	*In-House*
17 September 2024 September 17, 2024	*Kickstart Your ESG Journey:* *Levereging B Impact Assessment to Measure, Improve, and Manage Your Companys HR Performances*	Online	B Market Builder & Wongke
1 Oktober 2024 October 1, 2024	Seri Webinar - *Decent Work and Responsible Bussiness Conduct* Ep 4 "Mendorong Pemagangan Mandiri yang Berkualitas untuk Mencapai Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab" Ep 4 "Promoting Quality Independent Internships to Achieve Responsible Business Practices"	Online	APINDO International Labour Organization
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11: Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 IHT#11 : Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11: *Board Evaluation Performance: Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*
26 Oktober 2024 October 26, 2024	Teknik Wawancara Berbasis Kompetensi/Perilaku (BEI) Competency Behavior Based Interview Techniques (BEI)	Online	HRM Club
11 Desember 2024 December 11, 2024	IHT#12 *Awareness Compliance Management System* ISO 37301:2021	Jakarta	*In-House*

Komite *Environment, Social, & Governance* (ESG)

Environment, Social, & Governance (ESG) Committee

Komite ESG dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukannya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait pengawasan terhadap program HUMI dalam implementasi ESG yang dilakukan oleh HUMI dan entitas anak untuk aspek keberlanjutan, yang untuk selanjutnya melaporkan rekomendasi dan pendapatnya secara independen dan profesional kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite ESG di Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (*Environmental*, *Social and Governance*/ESG).

The ESG Committee was established and is responsible to the Board of Commissioners. Its establishment is intended to support the implementation of the Board of Commissioners' duties related to the supervision of the HUMI's program in the implementation of ESG carried out by HUMI and its subsidiaries for sustainability aspects, which will then report their recommendations and opinions independently and professionally to the Board of Commissioners. The establishment of the ESG Committee in the Company refers to the Board of Commissioners Decree No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 dated January 19, 2024, concerning the Determination of the Environmental, Social and Governance (ESG) Committee Composition.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan pembentukan Komite ESG Perseroan, antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK, terkait Penerapan Tata Kelola.
2. Anggaran Dasar Perseroan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
3. Pedoman-pedoman dan Manual Penerapan Tata Kelola HUMI.

Legal Basis

The legal basis for the establishment of the Company's ESG Committee includes:

1. Financial Services Authority Regulation (POJK) and OJK Circular Letter, regarding the Implementation of Governance.
2. The Company's Articles of Association regarding the duties and authorities of the Board of Commissioners.
3. Guidelines and Manual for the Implementation of HUMI's Governance.

Piagam Komite ESG

Komite ESG mengacu pada Piagam Komite ESG yang merupakan Landasan Kerja bagi Komite ESG. Piagam tersebut mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggota Komite ESG.

ESG Committee Charter

The ESG Committee refers to the ESG Committee Charter which is the Working Platform for the ESG Committee. The charter is binding and must be complied with by every member of the ESG Committee.

Adapun isi dari Piagam Komite ESG mengatur hal-hal, antara lain:

1. Dasar Hukum.
2. Definisi.
3. Komposisi, Struktur dan Masa Jabatan.
4. Persyaratan Keanggotaan.
5. Tugas dan Tanggung Jawab.
6. Wewenang.
7. Tata Cara, Prosedur dan Penyelenggaraan Rapat.
8. Pelaporan.
9. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan.
10. Standar Etika.

Masa Jabatan Komite ESG

Sesuai ketentuan yang berlaku, masa jabatan anggota Komite ESG tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah, Susunan, dan Komposisi Komite ESG

Jumlah susunan, dan komposisi anggota Komite ESG Perseroan telah diatur dalam Piagam Komite ESG, yang di antaranya mengatur bahwa jumlah Komite ESG terdiri dari paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari Dewan Komisaris dan/atau anggota lainnya yang dapat berasal dari:

1. Anggota Dewan Komisaris.
2. Pihak yang berasal dari luar Perseroan dan/atau.
3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi.

Contents of the ESG Committee Charter regulate matters including:

1. Legal Basis.
2. Definitions.
3. Composition, Structure and Term of Office.
4. Membership Requirements.
5. Duties and Responsibilities.
6. Authorities.
7. Methods, Procedures and Holding of Meetings.
8. Reporting.
9. Handling Complaints or Reporting Related to Alleged Violations Concerning Financial Reporting.
10. Ethical Standards.

Term of Office of ESG Committee

In accordance with applicable provisions, the term of office of ESG Committee members may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association.

Number, Structure, and Composition of the ESG Committee

The number, structure, and composition of the Company's ESG Committee members have been regulated in the ESG Committee Charter, which among other things stipulates that the ESG Committee consists of at least 3 people from the Board of Commissioners and/or other members who may come from:

1. Members of the Board of Commissioners.
2. Parties from outside the Company and/or.
3. Parties occupying managerial positions under the Board of Directors.

Susunan Komite ESG saat Laporan ini Diterbitkan
ESG Committee Composition when this Report was Published

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Office Period
Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	Ketua Head	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024. Board of Commissioners Decree No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 dated January 19, 2024.	19 Januari 2024 s.d Sekarang January 19, 2024-present	Ke-1 First
HM Roy Sembel	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024. Board of Commissioners Decree No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 dated January 19, 2024.	19 Januari 2024 s.d Sekarang January 19, 2024-present	Ke-1 First
Okty Saptarini M.	Anggota Member	SK Dewan Komisaris No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 tanggal 19 Januari 2024. Board of Commissioners Decree No. 001/SK/Dekom-HUMI/I/2024 dated January 19, 2024.	19 Januari 2024 s.d Sekarang January 19, 2024-present	Ke-1 First

Profil Komite ESG

ESG Committee Profile

Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.

Ketua Komite ESG
Head of the ESG Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di Bab Profil Perusahaan pada laporan ini di halaman 66
His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile Chapter of this report on page 66

HM Roy Sembel

Anggota Komite ESG/Pihak Independen
Member of the ESG Committee/Independent Party

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Komite Nominasi dan Remunerasi di Bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini di halaman 212
His profile can be seen in the Nomination and Remuneration Committee Profile section in the Corporate Governance Chapter of this report on page 212

Okty Saptarini M.

Anggota Komite ESG/Sekretaris Perusahaan
Member of the ESG Committee/VP of Corporate Secretary

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Sekretaris Perusahaan di Bab Tata Kelola Perusahaan pada laporan ini di halaman 226
Her profile can be seen in the Corporate Secretary Profile section in the Corporate Governance Chapter of this report on page 226

Independensi Komite ESG

Seluruh anggota Komite ESG memiliki komitmen dan integritas yang tinggi dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan di bidangnya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Komite ESG telah memenuhi seluruh kriteria independensi dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara *upervise*, menjunjung tinggi kepentingan Perseroan, dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Independence of the ESG Committee

All members of the ESG Committee have high commitment and integrity with the necessary capabilities and expertise in their fields to support the implementation of good governance. In carrying out their duties and responsibilities, all members of the ESG Committee have met all independence criteria and are able to carry out their duties and responsibilities in a supervisory manner, uphold the interests of the Company, and cannot be influenced by any party.

Pernyataan tentang Independensi Komite ESG
Statement of Independence of the ESG Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	HM Roy Sembel	Okty Saptarini M.
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di HUMI. Has no direct or indirect shares in HUMI.	✓	✓	✓
Keluarga tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di HUMI. Family has no direct or indirect shares in HUMI.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama HUMI. Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Major Shareholders of HUMI.	✓	✓	✓

Aspek Independensi Independence Aspect	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	HM Roy Sembel	Okty Saptarini M.
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha HUMI. Has no direct or indirect business relationships related to HUMI's business activities.	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau merupakan calon atau menjabat sebagai kepala/wakil kepala pemerintahan daerah. Not serving as an administrator of a political party and/or candidate/member of the legislature and/or is a candidate or serving as head/deputy head of regional government.	✓	✓	✓

✓ Ya | Yes ✕ Tidak | No

Selain memenuhi kriteria independensi, anggota Komite ESG juga mesti memenuhi persyaratan keanggotaan Komite ESG yang ditetapkan dalam Piagam Komite ESG adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dan proses penerapan tata kelola perusahaan dan/atau tanggung jawab sosial secara umum serta perundang-undangan di bidang pelayaran dan pasar modal.
3. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh HUMI.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui *upervise* dan pelatihan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Komite ESG memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif sehubungan dengan ESG *Matters*, dan merekomendasikan kebijakan, rencana aksi, dan pengungkapan yang sesuai dengan strategi.
2. Menyiapkan suatu sistem ESG yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan dan target ESG.
3. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya program peningkatan kualitas ESG.
4. Melaksanakan tugas yang relevan dengan tujuan Komite ESG yang sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ESG serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari pelaksanaan program ESG di Perseroan.
6. Melakukan penilaian penerapan program ESG secara menyeluruh dan menentukan peluang untuk perbaikan.
7. Melaporkan kepada Dewan Komisaris pada setiap akhir tahun buku, atas pelaksanaan kerja Komite ESG beserta pencapaian program ESG di Perseroan dan rekomendasi terkait program ESG Perseroan.

In addition to meeting the independence criteria, ESG Committee members must also meet the ESG Committee membership requirements set out in the ESG Committee Charter, as follows:

1. Have high integrity, adequate capabilities, knowledge and experience in accordance with their field of work and educational background, and be able to communicate well.
2. Have adequate knowledge and understanding of the principles and processes of implementing corporate governance and/or social responsibility in general and legislation in the fields of shipping and capital markets.
3. Must comply with the Code of Conduct set by HUMI.
4. Willing to continuously improve competence through oversight and training.

Duties and Responsibilities of the ESG Committee

The ESG Committee has duties and responsibilities, including:

1. Set direction and formulate effective strategies regarding ESG Matters, and recommend policies, action plans, and disclosures that are in line with the strategy.
2. Set up a harmonized ESG system, and align ESG objectives and targets.
3. Provide the necessary support to ensure the implementation of the ESG quality improvement program.
4. Carry out tasks relevant to the objectives of the ESG Committee as requested by the Board of Commissioners from time to time.
5. Supervise the implementation of the ESG program and manage the risks and impacts of the implementation of the ESG program in the Company.
6. Conduct a comprehensive assessment of the implementation of the ESG program and determine opportunities for improvement.
7. Report to the Board of Commissioners at the end of each financial year, on the implementation of the ESG Committee's work along with the achievements of the ESG program in the Company and recommendations related to the Company's ESG program.

8. Komite ESG akan memberikan laporan kepada Dewan Komisaris:
   a. Atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris
   b. Rencana kerja tahunan
   c. Jadwal rapat tahunan
   d. Laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
   e. *Self-asessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite

8. The ESG Committee will provide a report to the Board of Commissioners:
   a. For every assignment given by the Board of Commissioners
   b. Annual work plan
   c. Annual meeting schedule
   d. Periodic reports on Committee activities and matters deemed necessary to be of concern to the Board of Commissioners
   e. Self-assessment on the effectiveness of Committee activities

Kebijakan dan Frekuensi Rapat Komite ESG

Rapat Komite ESG telah diatur dalam Piagam Komite ESG, yakni Komite ESG wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari jumlah anggota. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non-fisik. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat.

ESG Committee Meeting Policy and Frequency

ESG Committee meetings have been regulated in the ESG Committee Charter, namely that the ESG Committee must hold meetings at least 2 times in 1 year and be attended by at least 51% of the total number of members. Meetings can be held either with physical or non-physical attendance. Meetings that are not attended physically are conducted via teleconference, video conference, or other electronic media that allow all Committee Meeting participants to see and hear each other directly, and participate in the meeting.

Sepanjang tahun 2024, Komite ESG telah mengadakan rapat sebanyak 2 kali. Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota komite ESG dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the ESG Committee has held meetings as many as 2 times. The frequency and level of attendance of ESG committee members in the Meetings are as follows:

Periode Period	**Nama** Name	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Kehadiran di Rapat** Meeting Attendance	**Tingkat Kehadiran** Attendance Level	**Rata-rata Tingkat Kehadiran** Average Attendance Level
1 Januari-31 Desember 2024 January 1-December 31, 2024	Abdul Rachim Sofyan, SE, Ak.	2	2	100%	100%
	HM Roy Sembel	2	2	100%	
	Okty Saptarini M.	2	2	100%	

Agenda Rapat Komite ESG Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, rapat Komite ESG telah membahas agenda-agenda rapat sebagai berikut:

1. Rapat Komite ESG tanggal 29 Januari 2024, membahas rencana kerja tahun buku 2024.
2. Rapat Komite ESG tanggal 28 Agustus 2024, membahas rencana penilaian GCG tahun buku 2024.

ESG Committee Meeting in 2024

Throughout 2024, the ESG Committee meetings have discussed the following meeting agendas:

1. ESG Committee Meeting on January 29, 2024, discussing the work plan of financial year 2024.
2. ESG Committee Meeting on August 28, 2024, discussing the GCG assessment plan of financial year 2024.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite ESG Tahun 2024

Laporan pelaksanaan tugas Komite ESG di sepanjang tahun 2024:

1. Meminta kepada VP *of Corporate Secretary* HUMI, yang juga menjadi Anggota Komite ESG, untuk membentuk Tim Keberlanjutan untuk perencanaan peta keberlanjutan dan implementasi ESG dalam jangka Panjang. Telah ditindaklajuti dengan SK Direksi No. 037/

Report on the Implementation of ESG Committee's Duties in 2024

Report on the implementation of the ESG Committee's duties throughout 2024:

1. Requesting HUMI's VP of Corporate Secretary, who is also a Member of the ESG Committee, to form a Sustainability Team for planning sustainability maps and implementing ESG in the long term. This has been followed up with the Board of Directors Decree No. 037/

SK-DU/HUMI/VIII/2024 tentang *Task Force Team* untuk Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Strategi ESG HUMI dan Entitas Anak.
2. Menerbitkan Memo kepada Dewan Komisaris HUMI untuk Penilaian Penerapan GCG Tahun 2024. Telah ditindaklanjuti dengan Memorandum dari Dewan Komisaris ke Direksi HUMI.
3. Telah melakukan Rapat Bersama dengan Komite ESG GTSI, untuk penyelerasan kegiatan Komite ESG.

Rencana Kerja Komite ESG Tahun 2025

Komite ESG telah menetapkan rencana kerja tahun 2025 dengan memberikan prioritas strategis sebagai berikut:
1. Mengkaji Laporan Penilaian Pelaksanaan GCG tahun buku 2024 secara *self-assesment* berdasarkan ACGS.
2. Mengkaji Kebijakan Tata Kelola dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris HUMI jika perlu dilakukan perubahan.
3. Laporan Penilaian Implementasi GCG Tahun 2025.

SK-DU/HUMI/VIII/2024 concerning the Task Force Team for the Preparation of the ESG Strategy Development Roadmap for HUMI and its Subsidiaries.
2. Issued a Memo to HUMI's Board of Commissioners for the Implementation of GCG Assessment in 2024. Followed up with a Memorandum from the Board of Commissioners to HUMI's Board of Directors.
3. Conducted a Joint Meeting with GTSI's ESG Committee, to align the activities of the ESG Committee.

ESG Committee Work Plan 2025

The ESG Committee has established a work plan for 2025 by providing the following strategic priorities:
1. Review the Report on GCG Implementation Assessment for financial year 2024 through self-assessment based on ACGS.
2. Review the Governance Policy and provide recommendations to the HUMI's Board of Commissioners if changes are necessary.
3. Report of GCG Implementation Assessment 2025.

Komite Tingkat Direksi

Board of Directors Level Committee

Direksi tidak memiliki Komite tingkat Direksi yang bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional HUMI.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Perseroan dibantu oleh organ-organ pendukung di bawah Direksi, yaitu Sekretaris Perusahaan, Internal Audit, *Corporate Finance, Accounting* & *Investor Relations,* dan *Corporate* Pengembangan Usaha.

The Board of Directors does not have a Board of Directors-level Committee tasked with assisting the Board of Directors in carrying out HUMI's operational activities.

In carrying out its duties, the Company's Board of Directors is assisted by supporting organs under the Board of Directors, namely the Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Finance, Accounting & Investor Relations, and Corporate Business Development.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

HUMI memiliki Sekretaris Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memelihara reputasi dengan membangun komunikasi serta hubungan yang baik dengan para Pemangku Kepentingan sekaligus berfungsi sebagai penghubung Perseroan dengan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan Direksi, dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terutama peraturan di bidang pasar modal dan memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

HUMI has a Corporate Secretary who is tasked and responsible for maintaining reputation by building good communication and relationships with Stakeholders while also functioning as a liaison between the Company and stakeholders. The Corporate Secretary is also responsible for facilitating the needs of the Board of Directors, by ensuring compliance with laws and regulations, especially regulations in the capital market sector and ensuring the implementation of Good Corporate Governance.

Dasar Hukum
Legal Basis

HUMI telah mengangkat Okty Saptarini M. sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 42/SK/DU-HUMI/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai pemenuhan POJK No. 35/POJK.04/2014 Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 27 Oktober 2023 dan diumumkan kepada publik melalui sistem SPE atau IDXNet (*e-reporting*) pada tanggal yang sama.

HUMI has appointed Okty Saptarini M. as Corporate Secretary based on the Board of Directors Decree No. 42/SK/DU-HUMI/X/2023 dated October 26, 2023, in fulfillment of POJK No. 35/POJK.04/2014. The appointment has been reported to OJK on October 27, 2023, and announced to the public through the SPE or IDXNet (e-reporting) system on the same date.

Masa Jabatan dan Domisili
Term of Office and Domicile

Okty Saptarini M. menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif sejak 26 Oktober 2023 hingga saat ini. Beliau berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Okty Saptarini M. has served as Corporate Secretary effective from October 26, 2023, until present. She is domiciled in Jakarta, Indonesia.

Struktur Unit Kerja Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Work Unit Structure

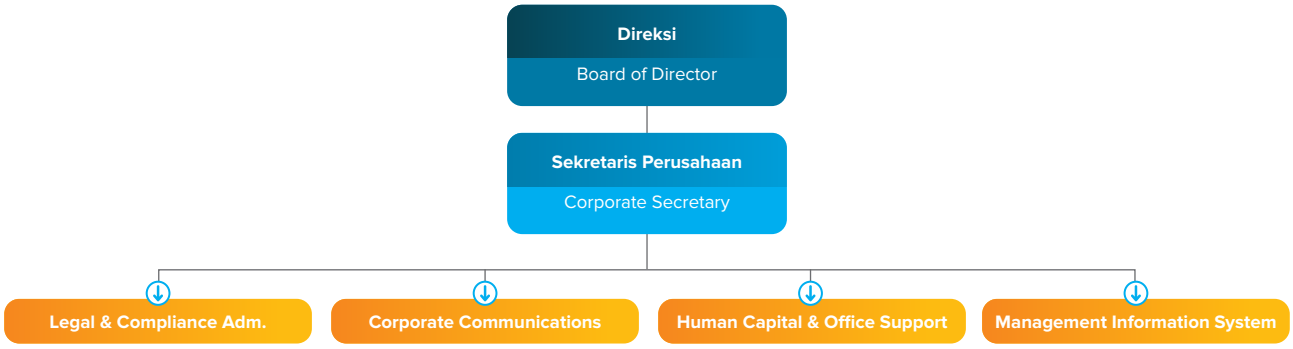

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

Okty Saptarini M.

Sekretaris Perusahaan
VP of Corporate Secretary

Usia **Age**	51 tahun 51 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	26 Oktober 2023-sekarang October 26, 2023-present

Dasar Hukum Pengangkatan
Legal Basis of Appointment

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 42/SK/DU-HUMI/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
Served as Corporate Secretary based on Board of Directors Decree No. 42/SK/DU-HUMI/X/2023 dated October 26, 2023.

Riwayat Pendidikan
Educational Background

- Magister Manajemen (S2) bidang Komunikasi di Universitas Trisakti, Jakarta (2010).
  Master's Degree in Management (S2) in Communication from Trisakti University, Jakarta (2010).
- Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid, Jakarta (1995).
  Bachelor's Degree in Communication Science (S1) from Sahid University, Jakarta (1995)

Riwayat Pekerjaan
Professional History

- PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, *Public Affairs Manager* (2013-2015), *Head of Community Development* (2015-2018), Sekretaris Perusahaan (2018-2023).
  PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, Public Affairs Manager (2013-2015), Head of Community Development (2015-2018), Corporate Secretary (2018-2023).
- *Corporate Public Relations* (1997-2010) PT Timor Distributor Nasional, PT Timor Putra Nasional, dan PT Intragolf Link Resort.
  Corporate Public Relations (1997-2010) at PT Timor Distributor Nasional, PT Timor Putra Nasional, and PT Intragolf Link Resort.
- PT Balisani Sentrawisata (1995-1997).
  PT Balisani Sentrawisata (1995-1997).

Rangkap Jabatan
Concurrent Position

Di Dalam Grup Perseroan:
Within the Company Group:
- Anggota Komite ESG GTSI (2021-sekarang).
  ESG Committee Member at GTSI (2021-present).

Di Luar Perseroan: Tidak Ada.
Outside the Company: None.

Standarisasi Profesi
Professional Standardization

- Standar Profesi Sekretaris Perusahaan Pendidikan Dasar 1 *Batch* 2 - Indonesia Corporate Secretary Association (2023).
  Corporate Secretary Professional Standards Basic Education 1 Batch 2 - Indonesia Corporate Secretary Association (2023).
- Standar Profesi Sekretaris Perusahaan Pendidikan Dasar 2 *Batch* 2 - Indonesia Corporate Secretary Association (2023).
  Corporate Secretary Professional Standards Basic Education 2 Batch 2 - Indonesia Corporate Secretary Association (2023).

Keanggotaan Organisasi
Organization Membership

- Asosiasi Emiten Indonesia - Anggota Komite Kajian Hukum Pasar Modal & GCG (2023-sekarang).
  Indonesian Public Listed Companies Association (AEI) - Member of the Capital Market & GCG Legal Review Committee (2023-present).
- Indonesian National Shipowner Association - Wakil Sekretaris Umum (2023-sekarang).
  Indonesian National Shipowners' Association - Deputy Secretary General (2023-present).
- Perhimpunan Hubungan Masyarakat - Anggota (2021-sekarang).
  Indonesia Public Relations Association - Member (2021-present).
- Indonesia Corporate Secretary Association - Anggota (2014-sekarang).
  Indonesia Corporate Secretary Association - Member (2014-present).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Sesuai fungsi yang diembannya, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Sebagai penghubung antara HUMI dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Mengelola program internalisasi Visi, Misi dan Nilai Perusahaan dalam rangka implementasi dari kebijakan pengelolaan dan program penerjemahan Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan.
5. Menyusun *stakeholders mapping*, *stakeholder relationship program* dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan *stakeholders engagement* sesuai dengan target dan tujuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Menyusun *Roadmap Sustainability* Perusahaan (SP), kebijakan SP, SP *quarterly meeting* sehingga program-program yang tertuang dalam *roadmap* dapat terlaksana sebagaimana rencana Perusahaan.
7. Membuat dan menyimpan daftar pemegang saham dengan kepemilikan 5% saham atau lebih dan daftar 20 pemegang saham terbesar, serta mengunggah informasi tersebut ke dalam situs web HUMI, menyediakan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya, baik dalam HUMI maupun afiliasinya dan/atau perusahaan lain, yang antara mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peran lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan HUMI, serta mengunggah informasi tersebut dalam situs web HUMI.
8. Menyusun dan melakukan pengkinian pedoman tata kelola dan internalisasinya serta penilaian implementasi tata kelola setiap tahun, pelaksanaan Paparan Publik dan RUPS, penyelenggaraan Rapat Direksi, Komisaris dan/atau gabungan keduanya beserta risalah rapatnya, laporan berkala dan insidentil yang ditetapkan oleh OJK, termasuk Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Keterbukaan Informasi Perusahaan dalam rangka untuk memenuhi seluruh kepatuhan perusahaan secara tepat waktu.
9. Pengelolaan komunikasi eksternal melalui *media relations* serta pelaksanaan kegiatan *event management* baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.
10. Penanganan litigasi, *legal counsel program* serta *compliance administration program* yang dimanfaatkan oleh internal Perusahaan sebagai upaya pelayanan hukum yang terintegrasi, termasuk pengkinian dan aktivitas *awareness* kepatuhan.
11. Efektivitas organisasi, program pengembangan SDM, program remunerasi dan *retention* serta hubungan industrial dalam rangka tercapainya organisasi yang efektif dan SDM yang produktif bagi *holding* dan anak usaha/unit usaha.

In accordance with the functions she carries out, the Corporate Secretary has duties and responsibilities, including:

1. As a liaison between HUMI and shareholders, regulators and other stakeholders.
2. Provide input to the Board of Commissioners and Board of Directors to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market sector.
3. Follow the development of the Capital Market in particular, and the laws and regulations applicable in the Capital Market sector.
4. Manage the internalization program of the Company's Vision, Mission and Values in order to implement the management policy and translation program of the Company's Vision, Mission and Values.
5. Prepare stakeholder mapping, stakeholder relationship program in order to implement the stakeholder engagement policy in accordance with the targets and objectives set by the Company.
6. Prepare the Company's Sustainability Roadmap (SP), SP policy, SP quarterly meeting so that the programs contained in the roadmap can be implemented as planned by the Company.
7. Create and maintain a shareholder register with shares ownership of 5% or more and a list of the 20 largest shareholders, and upload this information to HUMI's website, provide a special register containing information regarding the shares of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their families, both in HUMI and its affiliates and/or other companies, which includes shares ownership, business relationships and other roles that give rise to a conflict of interest with HUMI, and upload this information to HUMI's website.
8. Prepare and update governance code and their internalization as well as assess the implementation of governance every year, conduct Public Expose and GMS, organize Board of Directors, Board of Commissioners and/or joint meetings along with minutes of meetings, periodic and incidental reports stipulated by OJK, including Annual Reports, Sustainability Reports, and Information Disclosure of the Company in order to fulfill all company compliance in a timely manner.
9. Management of external communication through media relations and implementation of event management activities for both internal and external needs.
10. Handling of litigation, legal counsel programs and compliance administration programs utilized by the Company internally as an integrated legal service effort, including compliance awareness updates and activities.
11. Organizational effectiveness, HR development programs, remuneration and retention programs and industrial relations in order to achieve an effective organization and productive HR for the holding and subsidiaries/business units.

12. Melakukan pengkinian kebijakan IT, rencana *security system* dan implementasi keamanan sistem, untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan serta pengelolaan *helpdesk* dalam rangka untuk mencapai peningkatan kepuasan *user* ICT.
13. Program pengadaan barang dan jasa, laporan identifikasi aset, optimalisasi penggunaan gudang, lingkungan kerja yang kondusif, efektivitas pemanfaatan *outsourcing,* dan pengelolaan vendor sebagai upaya untuk pengelolaan program umum yang optimal.
14. Pengelolaan program budaya perusahaan agar tingkat *awareness* karyawan terhadap budaya perusahaan ditingkatkan dan menghasilkan tingkat loyalitas ke perusahaan (*sense of belonging*).

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Sepanjang 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, untuk memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, BEI, dan regulator lain yang terkait dengan pasar modal dan menyampaikan informasi tersebut serta memberi masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020, yaitu RUPS Tahunan 2023 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Juni 2024. Pelaksanaan RUPS juga telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy)* melalui aplikasi eASY.KSEI dan di tempat RUPS. Rincian penyelenggaraan RUPS dijelaskan pada Sub-Bab RUPS dalam Bab Laporan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.
3. Senantiasa melakukan pengkinian (*update*) informasi yang dimuat dalam situs web HUMI, di antaranya pada menu Perusahaan terkait Berita & Informasi, Investor terkait Laporan, RUPS, Presentasi Investor, Keterbukaan Informasi Bursa.
4. Bekerja sama dengan unit *Investor Relations* dalam pemenuhan kewajiban Paparan Publik Tahunan 2024 dan Paparan Publik Insidentil.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyelenggarakan rapat Direksi sebanyak 21 kali, dan menyelenggarakan rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris sebanyak sebanyak 31 kali, serta membuat dan mengadminitrasikan risalah rapat serta daftar hadirnya.
7. Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menyiapkan dokumentasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi HUMI.
9. Membantu menyiapkan materi untuk pelaksanaan program orientasi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi HUMI.
10. Pelatihan dan Sosialisasi Regulasi (*Compliance Awareness Program*) berupa sosialisasi regulasi baru

12. Update IT policies, security system plans and system security implementation, to support the smooth operation of the company and helpdesk management in order to achieve increased ICT user satisfaction.
13. Program for the procurement of goods and services, asset identification report, optimization of warehouse usage, conducive work environment, effectiveness of outsourcing utilization, and vendor management as an effort for optimal general program management.
14. Management of corporate culture program so that employee awareness level of corporate culture is increased and results in loyalty level to the company (sense of belonging).

Report on the Implementation of Corporate Secretary's Duties in 2024

Throughout 2024, the Corporate Secretary has carried out the following duties and responsibilities in accordance with the functions entrusted to her:

1. Follow the development of the Capital Market, especially the laws and regulations applicable in the Capital Market, to ensure compliance with new regulations issued by the OJK, BEI, and other regulators related to the capital market and convey such information and provide input to the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. Organize a GMS in accordance with POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020, namely the Annual GMS 2023 and the Extraordinary GMS on June 14, 2024. The implementation of the GMS has also provided an alternative for granting power of attorney electronically (e-proxy) through the eASY.KSEI application and at the GMS venue. Details of the implementation of the GMS are explained in the GMS Sub-Chapter in the Corporate Governance Report Chapter in this Annual Report.
3. Always update the information contained on HUMI's website, including the Company menu regarding News & Information, Investor regarding Reports, GMS, Investor Presentations, and IDX Acnnouncement.
4. Cooperate with the Investor Relations unit in fulfilling the obligations of the Annual Public Expose 2024 and Incidental Public Expose.
5. Conduct information disclosure to the public in accordance with applicable provisions.
6. Organize 21 Board of Directors meetings and organize 31 Board of Directors meetings inviting the Board of Commissioners, as well as to create and administer minutes of the meeting and attendance lists.
7. Submit periodic reports and incidental reports to regulators in accordance with applicable provisions.
8. Prepare documentation for prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of HUMI.
9. Assist in preparing materials for the implementation of orientation programs for prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of HUMI.
10. Regulation Training and Socialization (Compliance Awareness Program) in the form of socialization of new

dan dikirimkan ke *e-mail* para *key persons* di HUMI Grup.

11. Pada tahun 2024, Unit Kerja *Human Capital* secara berkala menjalankan program *In-House Training* (IHT) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di tingkat manajerial. Hingga akhir tahun 2024, telah terlaksana sebanyak 14 IHT. Pemenuhan jam pelatihan rata-rata karyawan mencapai 13,11 jam/karyawan.
12. *Employee Wellness Program:* Sebagai bagian dari misi keberlanjutan perusahaan, *Human Capital* pada tahun 2024 mencanangkan *Employee Wellness Program* yang mencakup layanan kesehatan, kebugaran fisik, dan dukungan kesejahteraan lainnya.
13. *Program Diversity & Inclusion:* Keberhasilan dalam memperluas inisiatif *Diversity & Inclusion* dimana HUMI Grup berhasil meningkatkan jumlah partisipasi perempuan di level manajerial sebesar 3%.
14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Program K3 berhasil meningkatkan tingkat keamanan di lingkungan kerja melalui pelatihan dan bersama-sama HSE melakukan pengawasan ketat terhadap prosedur keselamatan.
15. Pengelolaan Aset: meningkatkan pemeliharaan aset perusahaan, termasuk infrastruktur kantor dan kendaraan operasional.
16. Kampanye Komunikasi: Pada tahun 2024, Unit Kerja *Corporate Communication* meluncurkan kampanye "HUMI Untuk Masa Depan", yang berfokus pada inisiatif keberlanjutan HUMI. *Engagement* di *platform* media sosial HUMI mengalami peningkatan sebesar 13,84% pada tahun 2024.
17. Penyusunan dan Peluncuran Laporan Keberlanjutan 2024: Unit Kerja *Corporate Communication*, menerbitkan Laporan Keberlanjutan HUMI yang pertama yang mencerminkan pengelolaan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
18. Peluncuran Sistem Informasi Terintegrasi: Pada 2024, Unit Kerja MIS bekerja sama dengan Tim Project ODOO melakukan perencanaan Sistem Informasi Terintegrasi yang menggabungkan seluruh data operasional, keuangan, dan manajemen risiko ke dalam satu platform digital. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, serta mengurangi waktu pemrosesan data sebesar 60%.
19. *Cloud Migration*: Sebagai bagian dari transformasi digital, MIS berhasil melakukan migrasi sistem utama HUMI Grup ke *cloud-based system*, yang meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi operasional.

regulations and sent to the e-mails of key persons in the HUMI Group.

11. In 2024, the Human Capital Work Unit periodically run an In-House Training (IHT) program aimed at improving competency at the managerial level. By the end of 2024, 14 IHTs have been implemented. The average employee training hours reached 13.11 hours/employee.
12. Employee Wellness Program: As part of the Company's sustainability mission, In 2024, Human Capital launched an Employee Wellness Program that includes health services, physical fitness, and other welfare support.
13. Diversity & Inclusion Program: Success in expanding the Diversity & Inclusion initiative where HUMI Group succeeded in increasing the number of women's participation at the managerial level by 3%.
14. Occupational Safety and Health (K3): The K3 program succeeded in increasing the level of safety in the work environment through training and together with HSE conducting strict supervision of safety procedures.
15. Asset Management: improving the maintenance of company assets, including office infrastructure and operational vehicles.
16. Communication Campaign: In 2024, the Corporate Communication Work Unit launched the "HUMI For the Future" campaign, which focuses on HUMI's sustainability initiatives. Engagement on HUMI's social media platforms increased by 13.84% in 2024.
17. Preparation and Launch of the 2024 Sustainability Report: The Corporate Communication Work Unit published HUMI's first Sustainability Report that reflects environmental, social, and governance (ESG) management.
18. Launch of the Integrated Information System: In 2024, the MIS Work Unit collaborated with the ODOO Project Team to plan an Integrated Information System that combines all operational, financial, and risk management data into one digital platform. This system supports faster, data-driven decision-making, and reduces data processing time by 60%.
19. Cloud Migration: As part of the digital transformation, MIS successfully migrated HUMI Group's main systems to a cloud-based system, which increases flexibility, security, and operational efficiency.

Pengembangan Kompetensi
Competency Development

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Okty Saptarini M. **Sekretaris Perusahaan** | **VP of Corporate Secretary**			
2 Januari 2024 January 2, 2024	Jurus Sakti Membuat *New Year Resolution* Ala Harvard The Magic Trick to Make Harvard-Style New Year Resolutions	Zoom	Bisnis Hack
11 Januari 2024 January 11, 2024	Webinar Sosialisasi Waran Terstruktur sebagai Alternatif Diversifikasi Aset Webinar on Socialization of Structured Warrants as Asset Diversification Alternative	Zoom	Propami - Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia Association of Indonesian Capital Market Professional (PROPAMI)

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
18 Januari 2024 January 18, 2024	IHT#1: ESG & *Sustainability*	Jakarta	*In-House*
19 Januari 2024 January 19, 2024	IHT#2: *Managing People*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Corporate Law & Trade Practices Issue for Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: *Financial Numery for Commissioners and Directors*	Jakarta	*In-House*
25 Januari 2024 January 25, 2024	IHT#3: ESG *Priority Agenda for the Boards*	Jakarta	*In-House*
1 April 2024 April 1, 2024	POJK No. 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka POJK No. 4 of 2024 Concerning Report on Shares Ownership and Changes to the Shares Ownership in Public Companies and Report on Shares Pledging Activities of Public Companies	Zoom	AEI Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)
1-2 Mei 2024 May 1-2, 2024	MBTI	Zoom	Kelas HR HR Class
6 Mei 2024 May 6, 2024	*Talkshow*: Sosialisasi Pilar Governansi ETAK (Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) dan *Annual Report Award* 2023 Talkshow: Socialization of ETAK Governance Pillars (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, Sustainability) and Annual Report Award 2023	Zoom	
14 Mei 2024 May 14, 2024	*Leader's Talk Series: Strategies For Growth (Ambidextrous Leadership Approach)*	Zoom	Act Consulting - ESQ Leadership
29 Mei 2024 May 29, 2024	*The ESG Ratings Phenomenon: What, Why, and How*	Zoom	ICSA Indonesian Corporate Secretary Association
29 Mei 2024 May 29, 2024	IHT#4: Sosialisasi PPh 21 TER IHT#4: Socialization of Income Tax 21 TER	Zoom	*In-House*
3 Juni 2024 June 3, 2024	Sosialisasi Peraturan KSEI No. VI-D tentang Biaya Layanan Jasa Sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) Socialization of KSEI Regulation No. VI-D concerning Service Fees for the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)	Zoom	KSEI Indonesia Central Securities Depository
12 Juni 2024 June 12, 2024	*Awareness & Internal Auditor* ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Jakarta	*In-House*
21 Juni 2024 June 21, 2024	IHT#5 - *Cascading KPI From Corporate to Individu*	Jakarta	*In-House*
4 Juli 2024 July 4, 2024	Mejadikan Bisnis Lebih Berkelanjutan melalui Bursa Karbon Making Business More Sustainable through Carbon Exchanges	Main Hall	IDX Channel
26 Juli 2024 July 26, 2024	*HC Contribution to drive Managing Crisis and Business Challenge*	Zoom	AHCA
30 Juli 2024 July 30, 2024	*HC Role in Handling Exponential Growth of Company Netrwork*	Zoom	AHCA
31 Juli 2024 July 31, 2024	*Monetizing* CSR melalui SROI Monetizing CSR through SROI	Zoom	AEI Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)
1 Agustus 2024 August 1, 2024	Modul 1: Pengenalan Risiko Iklim (*Climate Risk)* dan *Net Zero* Module 1: Introduction to Climate Risk and Net Zero	Main Hall	IDX
21 Agustus 2024 August 21, 2024	IHT#8: 5R (Manajemen 5R, Identifikasi IBPR, Lingkungan Kerja) IHT#8: 5R (5R Management, IBPR Identification, Working Environment)	Jakarta	*In-House*
27 Agustus 2024 August 27, 2024	IHT#10: *Communication Skill & Personal Branding*	Jakarta	*In-House*
5 September 2024 September 5, 2024	*Promoting Sustainable & Climate Resilient Indonesia Capital Market* 2024 & Pendalaman POJK terkait Laporan Insidentil serta Laporan Berkala Emiten sebagai Narasumber Promoting Sustainable & Climate Resilient Indonesia Capital Market 2024 & In-depth Study of POJK on Incidental Reports and Periodic Reports of Issuers as Resource Persons	Surabaya	AEI Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
23 Oktober 2024 October 23, 2024	*The ACMF-ISSB Technical Training for Corporates*	Zoom	ACMF - ASEAN Capital Market Forum
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : Menuju Adopsi IFRS S1 dan S2 IHT#11 : Towards Adoption of IFRS S1 and S2	Jakarta	*In-House*
24 Oktober 2024 October 24, 2024	IHT#11 : *Board Evaluation Performance : Building Value and Effectiveness*	Jakarta	*In-House*
31 Oktober 2024 October 31, 2024	*Unlocking ESG Potential: Enhancing Sustainability Reporting Tools for Future Growth*	Jakarta	CESGS
18 November 2024 November 18, 2024	*A Cutting-Edge Approach to Sustainability Reporting*	Zoom	AEI Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)
19 November 2024 November 19, 2024	Sosialisasi UU No. 59 Tahun 2024: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Socialization of Law No. 59 of 2024: National Long-Term Development Plan 2025-2045	Zoom	Bappenas The National Development Planning Agency
20 November 2024 November 20, 2024	Pojok Pintar Manajemen Seri#15|24 Management Smart Corner Series #15|24	Zoom	PPM
5 Desember 2024 December 5, 2024	*Responsible Business Forum* 2024	Main Hall	IGCN
11 Desember 2024 December 11, 2024	IHT#12: *Awareness Compliance Management System* ISO 37301:2021	Jakarta	*In-House*
20 Desember 2024 December 20,2024	IHT#13: *Unlocking HUMI's Women Potential*	Jakarta	*In-House*

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Tahun 2024
Implementation of Information Disclosure in 2024

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi kepada publik, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media massa, situs web BEI dan situs web HUMI dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Inggris, serta menyampaikan laporan secara berkala maupun insidentil kepada BEI dan OJK sebagai berikut:

In order to support information disclosure to the public, the Corporate Secretary has conveyed information to the public through mass media, the websites of IDX and HUMI using Indonesian and English, as well as submitting periodic and incidental reports to the IDX and OJK as follows:

No.	Jenis Laporan Type of Report	Tujuan Designation	Periode Laporan Report Period	Jumlah Total
Laporan Berkala **Periodic Report**				
1	Laporan Keuangan Financial Statements	OJK & BEI OJK & IDX	Tahunan dan Triwulan Annually and Quarterly	8
2	Laporan Registrasi Pemegang Efek Report of Securities Holders Registration	BEI IDX	Bulanan Monthly	13
3	Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Annual Report & Sustainability Report	OJK & BEI OJK & IDX	Tahunan Annually	3
4	Laporan Realisasi KAP/AP Public Accounting Firm/Public Accountant Realization Report	OJK & BEI OJK & IDX	Tahunan Annually	1
5	Paparan Publik Public Expose	BEI IDX	Tahunan Annually	5
6	RUPS GMS	OJK & BEI OJK & IDX	Tahunan dan Situasional Annually and Situationally	5
Laporan Insidentil **Incidental Report**				
1	Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Report on the Use of Proceeds from Public Offering	OJK & BEI OJK & IDX	Januari & Juli Jnuary & July	2
2	Laporan Informasi Material Report of Material Information	OJK & BEI OJK & IDX	Situasional Situationally	22

No.	Jenis Laporan Type of Report	Tujuan Designation	Periode Laporan Report Period	Jumlah Total
3	Perubahan Organ Dewan Komisaris dan Direksi Changes in Organs of the Board of Commissioners and Board of Directors	OJK & BEI OJK & IDX	Situasional Situationally	0
4	Perubahan KAP/AP Changes to PAF/PA	OJK & BEI OJK & IDX	Situasional Situationally	5
5	Tanggapan Permintaan Penjelasan Response to the Request for Explanation	BEI IDX	Situasional Situationally	8
6	Iklan Laporan Keuangan Financial Statements Ads	OJK & BEI OJK & IDX	Situasional Situationally	1

Internal Audit

Internal Audit

Fungsi Audit Internal Perseroan dilaksanakan oleh Unit Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Unit Internal Audit memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Perseroan melalui proses audit. Unit Internal Audit berperan dalam pencegahan *fraud*, deteksi *fraud*, dan investigasi *fraud*. Unit Internal Audit memiliki akses langsung kepada Komite Audit untuk mengkoordinasikan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan hasil audit. Penetapan Kepala Unit Internal Audit di Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 007/SK/DIREKSI-HUMI/IX/2022.

The Company's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit Unit which is directly responsible to the President Director. The Internal Audit Unit has a strategic role in supporting the achievement of the Company's performance through the audit process. The Internal Audit Unit plays a role in fraud prevention, fraud detection, and fraud investigation. The Internal Audit Unit has direct access to the Audit Committee to coordinate and manage information related to audit activities and results. The appointment of the Company's Head of the Internal Audit Unit refers to the Board of Directors Decree No. 007/SK/DIREKSI-HUMI/IX/2022.

Dasar Hukum
Legal Basis

Penunjukan Unit Internal Audit Perseroan berlandaskan pada ketentuan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit HUMI dan Piagam Unit Internal Audit HUMI.

The appointment of the Company's Internal Audit Unit is based on the provisions of POJK No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of HUMI's Internal Audit Unit Charter.

Piagam Internal Audit
Internal Audit Unit Charter

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Internal Audit berpedoman pada Piagam Internal Audit yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Unit Internal Audit. Piagam tersebut telah diperbaharui dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 7 Januari 2025, dan telah diunggah ke situs web Perseroan, www.humi.co.id.

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit is guided by the Internal Audit Charter which is binding for every member of the Internal Audit Unit. The charter has been updated and approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners on January 7, 2025, and has been uploaded to the Company's website, www.humi.co.id.

Adapun isi dari Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Pendahuluan.
2. Pernyataan Visi & Misi Unit Audit Internal.
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan.
4. Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal.
5. Independensi.
6. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal.

The contents of the Internal Audit Charter are as follows:
1. Introduction.
2. Vision & Mission Statement of the Internal Audit Unit.
3. Objectives and Scope of Work.
4. Structure and Position of the Internal Audit Unit.
5. Independence.
6. Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit.

7. Wewenang Unit Audit Internal.
8. Kode Etik Unit Audit Internal.
9. Penutup.

7. Authorities of the Internal Audit Unit.
8. Code of Conduct of the Internal Audit Unit.
9. Closing.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal
Party Who Appoints and Dismisses the Head of Internal Audit

Unit Internal Audit dipimpin oleh Kepala Audit Internal, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Kepala Unit Internal Audit Perseroan, wajib diberitahukan kepada OJK. HUMI telah mengangkat Rahadian Agung Nugroho sebagai Kepala Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/Direksi-HUMI/IX/2022 tanggal 26 September 2022 sebagai pemenuhan POJK No. 56/POJK.04/2015. Pengangkatan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan kepada publik melalui sistem SPE atau IDXNet (e-reporting) pada tanggal yang sama, tertera pada situs web HUMI (www.humi.co.id).

The Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit, appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Every appointment, replacement, and dismissal of the Company's Head of Internal Audit Unit must be notified to the OJK. HUMI has appointed Rahadian Agung Nugroho as Head of Internal Audit based on the Board of Directors Decree No. 007/Direksi-HUMI/IX/2022 dated September 26, 2022, in fulfillment of POJK No. 56/POJK.04/2015. The appointment has been reported to OJK and to the public through the SPE or IDXNet (e-reporting) system on the same date, as stated on HUMI's website (www.humi.co.id).

Struktur dan Kedudukan Kepala Unit Internal Audit
Structure and Position of the Head of Internal Audit Unit

Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan secara tidak langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Garis pelaporan tidak langsung kepada Komite Audit melalui pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkait pengendalian internal dan manajemen risiko dengan struktur sebagai berikut:

The Head of Internal Audit is directly responsible to the President Director and indirectly to the Board of Commissioners through the Audit Committee. The indirect reporting line to the Audit Committee is through regular meetings to discuss issues related to internal control and risk management with the following structure:

Struktur Unit Internal Audit
Structure of Internal Audit Unit

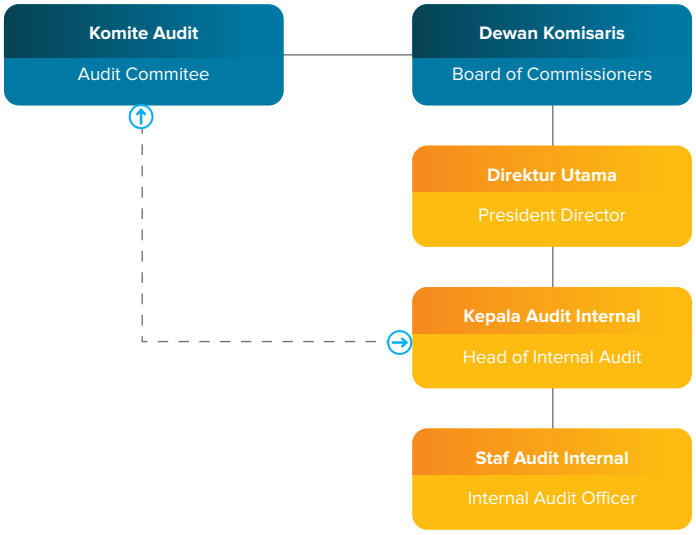

Independensi dan Persyaratan Internal Audit
Independence and Requirements of the Internal Audit

Unit Internal Audit merupakan fungsi *advisor*/penasihat yang mempunyai kondisi bebas dari situasi yang dapat menurunkan kemampuan aktivitas internal auditor untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak dalam Perusahaan. Untuk itu, Unit Internal Audit:

The Internal Audit Unit is an advisory function that has a condition free from situations that can reduce the ability of internal auditor activities to carry out their responsibilities impartially in the Company. For that, the Internal Audit Unit:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan independen terhadap setiap unit kerja di Grup HUMI.
2. Tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari.
3. Tidak diperkenankan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Internal Audit dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di HUMI maupun Anak atau Unit usaha.

1. Responsible directly to the President Director and independent of each work unit in the HUMI Group.
2. Not directly involved in the Company's daily operational activities.
3. It is not permitted to have concurrent duties and positions as internal auditors and perpetrators in the Internal Audit Unit from the implementation of the Company's operational activities either in HUMI or its Subsidiaries or Business Units.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit
Duties and Responsibilities of the Internal Audit

Unit Internal Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal Tahunan (RKAT).
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan manajemen.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.
7. Menyusun program untuk mengevaluasi *Quality Assurance* kegiatan audit internal yang dilakukan.

The Internal Audit Unit has duties and responsibilities, including:

1. Prepare and implement the Annual Internal Audit Work Plan (RKAT).
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with management policies.
3. Conduct audits and assessments of efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities.
4. Provide suggestions for improvement and objective information on audited activities at all levels of management.
5. Create audit report and submit the report to the President Director and Board of Commissioners.
6. Monitor, analyze, and report the implementation of recommended follow-up improvements.
7. Prepare a program to evaluate the Quality Assurance of internal audit activities carried out.

Profil Kepala Unit Internal Audit
Head of Internal Audit Unit Profile

Rahadian Agung Nugroho

Kepala Unit Internal Audit
Head of the Internal Audit Unit

Usia **Age**	58 tahun 58 years old
Kewarganegaraan **Citizenship**	Indonesia Indonesian
Domisili **Domicile**	Jakarta
Periode Jabatan **Term of Office**	26 September 2022 s.d Sekarang September 26, 2022-present
Dasar Hukum Pengangkatan **Legal Basis of Appointment**	Menjabat sebagai Ketua Unit Internal Audit sejak 26 September 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 007/Direksi-HUMI/IX/2022. Served as Head of Internal Audit Unit since September 26, 2022, based on Board of Directors Decree No. 007/Direksi-HUMI/IX/2022.

Riwayat Pendidikan **Educational Background**	• Master Business Administration (S2) bidang *Accounting and Finance di Mastricht School of Management* (MSM) Mastricht University, Netherlands (1994). Master's Degree in Business Administration (S2) in the Field of Accounting and Finance from Mastricht School of Management (MSM) Mastricht University, Netherlands (1994). • Sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta (1990). Bachelor's Degree in Accounting (S1) from Trisakti University, Jakarta (1990).
Riwayat Pekerjaan **Professional History**	• Manajer Keuangan dan Pajak PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (2012-2022). Manager of Finance and Tax at PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (2012-2022). • Manajer Akunting di PT Humpuss Transportasi Kimia (2009-2012). Manager of Accounting at PT Humpuss Transportasi Kimia (2009-2012). • Manajer Akunting Humpuss Sea Transport Ltd., (2009). Manager of Accounting at Humpuss Sea Transport Ltd., (2009). • Manajer Akunting di PT Humpuss Aromatik (1997-2009). Manager of Accounting at PT Humpuss Aromatik (1997-2009). • Asisten Manajer Keuangan di PT Humpuss (1994-1997). Assistant Manager of Finance at PT Humpuss (1994-1997). • Asisten Manajer Keuangan di Tupperware Indonesia (PT Imawi Benjaya) (1993-1994). Assistant Manager of Finance at Tupperware Indonesia (PT Imawi Benjaya) (1993-1994). • Internal Auditor di PT Bank Summa (1989-1992). Internal Auditor at PT Bank Summa (1989-1992).
Rangkap Jabatan **Concurrent Position**	Di Dalam Grup Perseroan: Tidak ada Within the Company Group: None Di Luar Perseroan: Tidak ada Outside the Company: None
Hubungan Afiliasi **Affiliated Relationship**	Tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham utama/pengendali. Has no affiliated relationship with other members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as major/controlling shareholders.

Ruang Lingkup Unit Internal Audit
Internal Audit Unit Scope

Berdasarkan tujuan utama dibentuknya Unit Internal Audit, yaitu untuk menguji dan mengevaluasi apakah kerangka kerja proses manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan telah memadai dan berfungsi secara baik, juga untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada Direktur Utama dan manajemen unit kerja untuk memperbaiki manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, dengan ruang lingkup pekerjaan Unit Internal Audit, meliputi:

1. Pengujian dan evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal di Grup HUMI dengan mengadaptasi *Internal Control Framework* COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).
2. Evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Identification & Risk Assessment*), Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*), Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*), dan Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*).
3. Evaluasi kepatuhan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kapal dan di Grup HUMI.
4. Evaluasi efektivitas kebijakan sistem dan prosedur yang berlaku di kapal, dan di Grup HUMI serta memberikan rekomendasi perbaikan.
5. Melaksanakan audit khusus/investigasi yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
6. Memberikan konsultasi kepada Direktur Utama dan atau Pimpinan Unit Kerja untuk mendorong peningkatan kinerja dan/atau ketaatan kepada ketentuan yang berlaku.

Based on the main objective of establishing the Internal Audit Unit, namely to test and evaluate whether the process framework for risk management, control and corporate governance is adequate and functioning well, and also to provide suggestions or recommendations to the President Director and work unit management to improve risk management, internal control and corporate governance, with the scope of work of the Internal Audit Unit, including:

1. Test and evaluate the effectiveness of internal control implementation in HUMI Group by adapting the Internal Control Framework COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
2. Evaluation related to the implementation of internal control which includes Control Environment, Identification and Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities.
3. Evaluate compliance with applicable laws and regulations on board and in HUMI Group.
4. Evaluate the effectiveness of applicable system policies and procedures on board and in HUMI Group and provide recommendations for improvement.
5. Conduct special audits/investigations assigned by the President Director.
6. Provide consultation to the President Director and/or Work Unit Leaders to encourage improved performance and/or compliance with applicable provisions.

Kode Etik Auditor
Auditor Code of Conduct

Unit Internal Audit Perseroan selalu bekerja untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan penerapan prosedur pengendalian sesuai dengan Manual Kerja dan Piagam Internal Audit Perseroan. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Unit Internal Audit juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *Institute of Internal Auditor* (IIA), yaitu:

1. Integritas
   Integritas auditor internal membentuk kepercayaan dan oleh karenanya menjadi dasar untuk menyandarkan terhadap pertimbangannya.
2. Objektivitas
   Auditor internal menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan. Serta melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam memberikan pertimbangan.
3. Kerahasiaan
   Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum.
4. Kompetensi
   Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

The Company's Internal Audit Unit always works to ensure that the internal control system is implemented effectively and efficiently by implementing control procedures in accordance with the Company's Work Manual and Internal Audit Charter. As a reference towards global best practices, the Internal Audit Unit also uses standards and codes of conduct issued by the Institute of Internal Auditors (IIA), namely:

1. Integrity
   The integrity of internal auditors establishes trust and therefore becomes the basis for relying on their judgment.
2. Objectivity
   Internal auditors apply high professional objectivity in obtaining, evaluating, and communicating information about activities carried out. And make a balanced assessment of all relevant matters and are not unduly influenced by personal interests or by other parties in providing considerations.
3. Confidentiality
   Internal auditors respect the value and ownership of information they receive and do not disclose such information without proper authority, unless required by law.
4. Competence
   Internal auditors apply the knowledge, skills and experience necessary to provide internal audit services.

Sumber Daya Manusia dan Sertifikasi Profesi
Human Resources and Professional Certification

Mengacu pada Piagam Unit Internal Audit, maka jumlah pegawai Unit Internal Audit Perseroan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang Ketua. Per 31 Desember 2024, jumlah karyawan Unit Audit Internal HUMI tercatat sebanyak 2 orang dengan rincian sebagai berikut:

Referring to the Internal Audit Unit Charter, the number of employees of the Company's Internal Audit Unit consists of at least 1 Chairperson. As of December 31, 2024, the number of employees of HUMI's Internal Audit Unit was recorded at 2 people with the following details:

Jabatan Position	**Jumlah Karyawan (orang)** Number of Employees (people)
Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit Unit	1
Anggota Audit Internal Internal Audit Member	1
Jumlah **Total**	**2**

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Unit Audit Internal Tahun 2024
Internal Audit Unit Training and Competency Development in 2024

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya pada tahun 2024, para karyawan Unit Audit Internal Perseroan mengikuti beberapa program pendidikan dan pelatihan di bidang terkait sebagai berikut:

In order to improve knowledge and understanding to assist in carrying out their duties in 2024, employees of the Company's Internal Audit Unit participated in several education and training programs in related fields as follows:

Tanggal Date	Program yang Diikuti Program Followed	Lokasi Location	Penyelenggara Organizer
Rahadian Agung Nugroho **Kepala Internal Audit** **Head of Internal Audit**			
18 Januari 2024 January 18, 2024	Sesi 1: *Concepts and Issue: ESG, Sustainability, CSR, GRI, and SDGs in Shipping Industry* Sesi 2: *Deep Dive ESG and Sustainability Impact in HUMI* Session 1: Concepts and Issue: ESG, Sustainability, CSR, GRI, and SDGs in Shipping Industry Session 2: Deep Dive ESG and Sustainability Impact in HUMI	Jakarta	*In-House*
19 Januari 2024 January 19, 2024	*Managing Your People and Its Organization*	Jakarta	*In-House*
12 Juni 2024 June 12, 2024	Pelaksanaan *In House Training Awareness & Internal Auditor ISO Series* Implementation of In-House Training Awareness & Internal Auditor ISO Series	Jakarta	*In-House*
21 Juni 2024 June 21, 2024	IHT#5 - *Cascading KPI From Corporate to Individu* IHT#5 - Cascading KPI From Corporate to Individual Level	Jakarta	*In-House*
12 Juni 2024 June 12, 2024	Pelaksanaan *In House Training Awareness & Internal Auditor ISO Series* Implementation of In-House Training Awareness & Internal Auditor ISO Series	Jakarta	*In-House*
8-9 Juli 2024 July 8-9, 2024	Pelatihan *Workshop* COSO Reguler (*Online*) angkatan 32 Training Workshop of COSO Reguler (Online) Batch 32	Online	YPIA
11 Juli 2024 July 11, 2024	IHT#6 - *Legal Insight for Non - Legal Practitioner in Business and Project Finance*	Jakarta	*In-House*
12 Juli 2024 July 12, 2024	IHT#7 - *Marine Insights for Non - Marine Practitioners*	Jakarta	*In-House*
15 Agustus 2024 August 15, 2024	*Workshop Standars & Code of Ethics for Professional Internal Auditor* Workshop of Standards & Code of Ethics for Professional Internal Auditor	Zoom	YPIA
16 Agustus 2024 August 16, 2024	*Workshop Standars & Code of Ethics for Professional Internal Auditor* Workshop of Standards & Code of Ethics for Professional Internal Auditor	Zoom	YPIA
21 Agustus 2024 August 21, 2024	Manajemen 5R 5R Management	Jakarta	*In-House*
27 Agustus 2024 August 27, 2024	IHT#10 - *Communication Skill and Personal Branding*	Jakarta	*In-House*
11 Desember 2024 December 11, 2024	IHT#12 *Awareness Compliance Management System* ISO 37301:2021	Jakarta	*In-House*

Laporan Kegiatan Unit Internal Audit Tahun 2024
Report of Internal Audit Unit Activities in 2024

Sepanjang tahun 2024, Unit Audit Internal telah melakukan kegiatan 8 kegiatan audit.

Throughout 2024, the Internal Audit Unit has conducted 8 audit activities.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan audit tergambar dalam tabel berikut:

Realization of the implementation of audit activities is illustrated in the following table:

Objek Audit Audit Object	Kegiatan Audit Internal Internal Audit Activity	Mulai Start	Selesai End	Jumlah Temuan Number of Findings
Audit Operasional *Docking* Kapal PCSI Operational Audit of Vessel Docking of PCSI	Audit Operasional *Docking* Kapal Griya Cirebon di PCSI/MATRANS Operational Audit of Docking of Griya Cirebon Vessel at PCSI/MATRANS	Januari 2024 January 2024	Mei 2024 May 2024	9
Audit Operasional *Docking* Kapal HTC Operational Audit of Vessel Docking of HTC	Audit Operasional *Docking* Kapal Semar Delapan Belas di HTC Operational Audit of Docking of Semar Delapan Belas Vessel at HTC	Februari 2024 February 2024	April 2024 April 2024	4

Objek Audit Audit Object	Kegiatan Audit Internal Internal Audit Activity	Mulai Start	Selesai End	Jumlah Temuan Number of Findings
Penugasan Khusus Special Assignment	Reviu *Progress* Penyelesaian Kapal Semar Duapuluh Sembilan di HTC Review of Completion Progress of Semar Duapuluh Sembilan Vessel at HTC	Februari 2024 February 2024	Mei 2024 May 2024	2
Audit Pencapaian Perekrutan Awak Kapal di MCSI Audit of Crews Recruitment Achievements at MCSI	Audit atas Pencapaian Perekrutan Awak Kapal di MCSI Audit of Crews Recruitment Achievements at MCSI	Mei 2024 May 2024	Agtustus 2024 August 2024	8
Pendampingan Audit dengan Tim IA HITS Audit Assistance with the Internal Audit Team of HITS	Pendampingan Audit Proyek Pengerukan LISI Audit Assistance for Dredging Project of LISI	Agustus 2024 August 2024	November 2024 November 2024	15
Audit Operasional Bahan Bakar dan *Sparepart* Operational Audit of Fuel and Sparepart	Audit atas Pengadaan serta Pengelolaan Bahan Bakar Kapal dan *Sparepart* di PCSI Audit of Procurement and Management of Vessel Fuel and Spare Parts at PCSI	Oktober 2024 October 2024	Desember 2024 December 2024	6
Audit *Human Capital* Audit of Human Capital	Audit *Human Capital* di MCSI Audit of Human Capital at MCSI	November 2024 November 2024	Desember 2024 December 2024	7

Objek Audit Audit Object	Kegiatan Audit Internal Internal Audit Activity	Mulai Start	Selesai End
Control Risk Assessment (CRA)	*Control Risk Assessment* (CRA) dan *Internal Control Self-Assessment* pada GTSI, PCSI, HTC dan MCSI Control Risk Assessment (CRA) and Internal Control Self-Assessment at GTSI Tbk, PCSI, HTC and MCSI	Januari 2024 January 2024	Juli 2024 July 2024

Frekuensi Rapat Unit Audit Internal dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
Frequency of Internal Audit Unit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Unit Audit Internal juga berpartisipasi sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan presentasi dalam rapat Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan frekuensi kehadiran sepanjang tahun 2024.

The Internal Audit Unit also participates as a meeting participant or delivers presentations in meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee with a frequency of attendance throughout 2024.

Rekapitulasi Kehadiran Unit Audit Internal pada Rapat Tahun 2024
Recapitulation of Internal Audit Unit Meeting Attendance in 2024

	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	% Kehadiran % Attendance
Rapat dengan Direksi Meeting with the Board of Directors	12	12	100%
Rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit Meeting with the Board of Commissioners and/or Committee Audit	12	12	100%
Rata-rata Kehadiran Attendance Average	12	12	100%

Evaluasi Kinerja Unit Audit Internal
Performance Evaluation of Internal Audit Unit

Evaluasi kinerja dari Internal Audit dilakukan dalam melihat pencapaian rencana penugasan pada tahun 2024 dengan realisasi penugasan dan Laporan Audit. Pada tahun 2024 persentase realisasi penugasan mencapai sekitar 95%. Evaluasi Kinerja juga dilakukan secara berkala dengan melakukan koordinasi bersama Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris setiap tahun.

The performance evaluation of Internal Audit is carried out in viewing the achievement of the assignment plan in 2024 with the assignment realization and the Audit Report. In 2024, the percentage of assignment realization reached around 95%. Performance Evaluation is also carried out periodically by coordinating with the Audit Committee under the Board of Commissioners every year.

Rencana Kerja Tahun 2025
Work Plan 2025

Unit Kerja Audit Internal bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) tahun 2025 berbasis risiko (*Risk Based Audit*) yang dikomunikasikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan. Berikut RKPT tahun 2025 yang mencakup fungsi audit internal yaitu *assurance:*

The Internal Audit Work Unit is responsible for preparing the Annual Supervisory Work Plan (RKPT) 2025 based on Risk-Based Audit which is communicated to the Board of Directors for approval. The following is the RKPT 2025 which includes the internal audit function, namely assurance:

No	Kegiatan Audit Audit Activity	Perusahaan Company	Rencana Pelaksanaan Implementation Plan
1	Penugasan Khusus Direksi Special Assignment of the Board of Directors	Grup HUMI Group of HUMI	*To Be Discuss*
2	*Control Rsk Assessment* (CRA), *update* tahun 2025 Control Risk Assessment (CRA), update for 2025	Grup HUMI Group of HUMI	Januari-Februari January-February
3	Audit *Human Capital* Audit of Human Capital	PCSI	Januari-Februari January-February
4	Audit Internal ISO: 37301 (Kepatuhan) Internal Audit ISO: 37301 (Compliance)	HUMI	Januari January
5	Audit *Human Capital* Audit of Human Capital	GTSI dan HTC GTSI and HTC	Februari-Maret February-March
6	Evaluasi Pedoman CAPEX dan Reviu Proses Pengajuan Kapal Baru Evaluation of CAPEX Guidelines and Review of New Vessel Submission Process	Grup HUMI Group of HUMI	Maret March
7	Audit *Human Capital* Audit of Human Capital	HUMI	April-Mei April-May
8	Pendampingan Audit pada Proyek LISI Audit Assistance on LISI's Projects	HIT (LISI)	April-Mei April-May
9	Reviu/Evaluasi Pengadaan ERP Review/Evaluation of ERP Procurement	Grup HUMI Group of HUMI	Juni-Juli June-July
10	Audit *Docking* Kapal dan Pemeriksaan pada Pemilihan Galangan Kapal Audit of Vessel Docking and Inspection on Shipyard Selection	PCSI	Juli-Agustus July-August
11	Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan PMS Evaluation of PMS Planning and Implementation	GTSI, PCSI dan HTC GTSI, PCSI and HTC	Agustus August
12	Reviu *Employment* Kontrak pada Kapal yang *Existing* Review of Employment Contract on Existing Vessels	GTSI, PCSI dan HTC GTSI, PCSI and HTC	September
13	Reviu Proses Rekonsiliasi Piutang dan Hutang *Intercompany* Review of Intercompany Receivables and Payables Reconciliation Process	Grup HUMI Group of HUMI	Oktober October
14	Audit Kargo Muatan Kapal Audit of Vessel Cargo	PCSI	November
15	*Monitoring* Tindak Lanjut atas Hasil Audit tahun 2025 Monitoring Follow-up on Audit Results in 2025	Grup HUMI Group of HUMI	Januari-Desember January-December
16	*Monitoring* Tindak Lanjut Langkah Mitigasi atas *Control Risk Assessment* (CRA) Monitoring Follow-up on Mitigation Steps on Control Risk Assessment (CRA)	Grup HUMI Group of HUMI	Maret-Desember March-December
17	*Monitoring* Tindak Lanjut *Management Letter* EY 2024 Monitoring Follow-up on Management Letter of EY 2024	Grup HUMI Group of HUMI	Mei-Desember May-December

Sistem Manajemen Risiko

Risk Management System

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan operasionalnya dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perseroan. Karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi semakin penting bagi gerak langkah HUMI dalam menjalankan usahanya.

In carrying out its business activities, the Company realizes that risk is an inseparable part of every operational activity and can affect the Company's business results and performance. Therefore, the implementation of risk management is increasingly important for HUMI's steps in running its business.

Manajemen risiko membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis Perseroan. Menyadari akan risiko-risiko yang dihadapi, Perseroan secara proaktif berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajemen risiko di Perseroan. Untuk dapat memperoleh legitimasi di seluruh organisasi, kebijakan penerapan manajemen risiko perlu ditegaskan melalui komitmen manajemen yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Risk management assists decision making by considering uncertainty and its impact on achieving the Company's strategic objectives. Aware of the risks faced, the Company proactively seeks to improve risk management capabilities in the Company. In order to gain legitimacy throughout the organization, the policy of implementing risk management needs to be emphasized through management commitments that are adjusted to applicable regulations.

Tujuan utama penerapan manajemen risiko adalah menjaga kelangsungan bisnis untuk jangka panjang dengan memastikan pasokan produk yang konsisten dan andal kepada pelanggan untuk menjaga pertumbuhan di masa depan dan memastikan manfaat yang cukup kepada pemegang saham.

The main objective of implementing risk management is to maintain long-term business continuity by ensuring consistent and reliable product supply to customers to maintain future growth and ensure sufficient benefits to shareholders.

Mengacu dengan kerangka kerja tata perusahaan yang diterbitkan oleh OJK, tanggung jawab untuk manajemen risiko terletak terutama pada Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan. Komite Manajemen mendukung fungsi pengawasan ini dan memberi nasihat kepada Direksi untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko.

Referring to the corporate governance framework issued by OJK, the responsibility for risk management lies primarily with the Board of Directors, while the Board of Commissioners carries out supervision. The Management Committee supports this oversight function and advises the Board of Directors to identify, assess, and mitigate risks.

Implementasi Sistem Manajemen Risiko

Implementation of Risk Management System

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam mencapai sasaran jangka panjang Perseroan. Kebijakan tersebut juga merupakan wujud komitmen untuk penerapan manajemen risiko di seluruh organisasi secara luas dan terintegrasi, dalam rangka menunjang kepastian pencapaian sasaran jangka panjang Perseroan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur sesuai persyaratan internasional.

The Company has established a Risk Management Policy as a reference in achieving the Company's long-term goals. The policy is also a form of commitment to the implementation of risk management throughout the organization in a broad and integrated manner, in order to support the certainty of achieving the Company's long-term goals, as well as providing a framework for implementing risk management systematically and measurably according to international requirements.

Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada Kerangka Terintegrasi COSO-ERM (*Committee of Sponsoring Organizations - Enterprise Risk Management Integrated Framework*). COSO-ERM mengatur seluruh kegiatan yang ada di seluruh jajaran manajemen mulai dari atas hingga unit-unit bisnis Perseroan.

The Company's Risk Management Policy refers to the COSO-ERM Integrated Framework (Committee of Sponsoring Organizations - Enterprise Risk Management Integrated Framework). COSO-ERM regulates all activities at all levels of management from the top to the Company's business units.

Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan mengacu pada COSO-ERM yang telah diperbaharui pada tahun 2017, dengan penyempurnaan sebagai berikut:

1. Lebih jelas menghubungkan manajemen risiko Perusahaan dengan banyaknya aspek ekspektasi Pemangku Kepentingan.
2. Posisi risiko dalam konteks kinerja organisasi, bukan sebagai subjek yang terisolasi/terpisah.
3. Memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi risiko dengan lebih baik sehingga organisasi dapat mengetahui risiko lebih dahulu bahwa perubahan menciptakan peluang bukan hanya potensi hambatan/krisis saja.
4. Pembaharuan COSO-ERM tahun 2017 juga memberi penekanan yang lebih kuat tentang bagaimana manajemen risiko Perusahaan menginformasikan strategi dan kinerja.

Kerangka kerja Manajemen Risiko COSO-ERM yang telah diperbarui tergambar dalam diagram berikut:

The Company's Risk Management Framework refers to COSO-ERM which was updated in 2017, with the following improvements:

1. More clearly linking the Company's risk management to the many aspects of Stakeholder expectations.
2. Positioning risk in the context of organizational performance, not as an isolated/separate subject.
3. Enables organizations to better anticipate risks so that organizations can know the risks in advance that changes create opportunities, not just potential obstacles/crises.
4. The update of COSO-ERM 2017 also places a stronger emphasis on how the Company's risk management informs strategy and performance.

The updated COSO-ERM Risk Management framework is depicted in the following diagram:

Kerangka Kerja Manajemen Risiko
Risk Management Framework

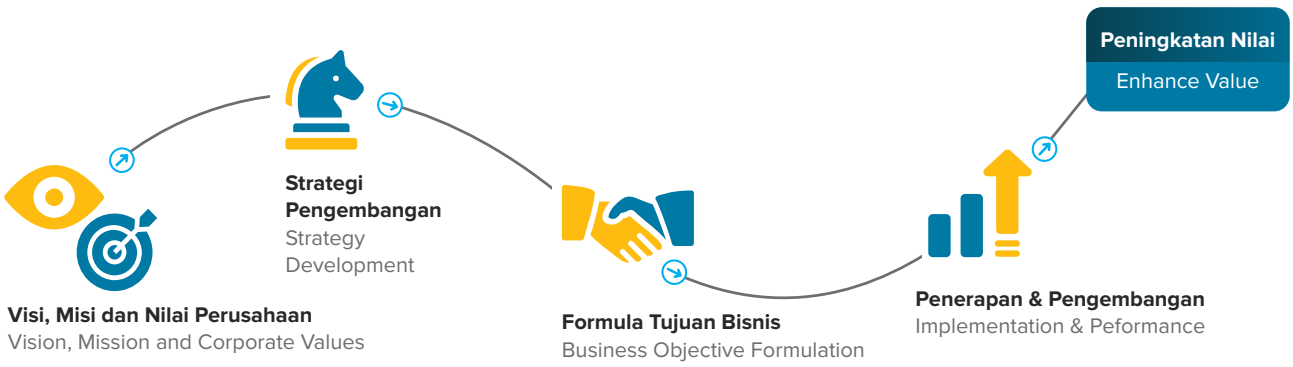

Kerangka manajemen risiko COSO-ERM tahun 2017, adalah seperangkat prinsip yang disusun dalam 5 komponen yang saling terkait, yaitu:

The COSO-ERM risk management framework 2017 is a set of principles arranged in 5 interrelated components, namely:

Tata Kelola dan Budaya Organisasi Governance and Organizational Culture	Tata kelola mengatur irama organisasi, memperkuat pentingnya dan menerapkan tanggung jawab pengawasan manajemen risiko organisasi. Budaya Organisasi berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan dilakukan di organisasi, dan pemahaman risiko dalam organisasi/entitas. Governance sets the rhythm of the organization, reinforcing the importance and implementation of organizational risk management oversight responsibilities. Organizational Culture deals with ethical values, desired behaviors within the organization, and the understanding of risk within the organization/entity.
Strategi dan Penentuan Tujuan Strategy and Objective Setting	1. Manajemen risiko organisasi, strategi dan penetapan tujuan bekerja secara bersama-sama dalam proses perencanaan strategis. Organizational risk management, strategy and objective setting work together in the strategic planning process. 2. Selera risiko (*risk appetite*) ditentukan dan diselaraskan dengan strategi. Risk appetite is defined and aligned with strategy. 3. Tujuan bisnis menempatkan strategi ke dalam praktik dalam bentuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Business objectives put strategy into practice by identifying, assessing, and responding to risks.
Kinerja Performance	Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi dan dinilai. Risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahannya dalam konteks selera risiko. Organisasi kemudian memilih respon risiko dan mendasarkan pengambilan risiko pada asumsi perhitungan jumlah risiko yang telah dibuat. Hasil dari proses ini dilaporkan kepada pemangku kepentingan risiko kunci. Risks that could impact the achievement of business strategies and objectives need to be identified and assessed. Risks are prioritized based on their severity in the context of risk appetite. The organization then selects risk responses and bases risk taking on assumptions of the calculated amount of risk. The results of this process are reported to key risk stakeholders.
Kajian dan Revisi Review and Revision	Dengan mengkaji kinerja entitas, organisasi dapat mempertimbangkan seberapa berfungsinya komponen manajemen risiko Perusahaan dari waktu ke waktu dengan melihat perubahan substansial serta revisi apa yang diperlukan. By assessing the entity's performance, the organization can consider how effective the Company's risk management components are functioning over time by examining any substantial changes and identifying necessary revisions.
Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan Information, Communication, and Reporting	Manajemen risiko organisasi memerlukan proses berkesinambungan untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan dari sumber internal dan eksternal yang mengalir ke atas, ke bawah dan di seluruh organisasi. Organizational risk management requires a continuous process of obtaining and sharing necessary information from internal and external sources that flows up, down and across the organization.

Kelima komponen dalam kerangka Manajemen Risiko COSO-ERM (versi 2017) ini didukung oleh seperangkat prinsip.

The five components in the COSO-ERM Risk Management framework (2017 version) are supported by a set of principles.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut Direksi dan Dewan Komisaris memahami dan berusaha mengelola risiko yang terkait dengan strategi dan tujuan bisnisnya.

By adhering to these principles, the Board of Directors and the Board of Commissioners understand and strive to manage the risks associated with their business strategies and objectives.

20 Prinsip COSO-ERM (versi 2017)
20 Principles of COSO-ERM (2017 version)

Tata Kelola dan Budaya Organisasi Governance and Organizational Culture	1. Menerapkan Pengawasan Risiko Dewan 2. Membangun Struktur Operasi 3. Mendefinisikan Budaya yang Diinginkan 4. Menunjukkan Komitmen pada Nilai-nilai Inti 5. Menarik, Mengembangkan, dan Mempertahankan Individu yang Memiliki Kemampuan	1. Implement Board Risk Oversight 2. Establish Operating Structure 3. Define Desired Culture 4. Demonstrate Commitment to Core Values 5. Attract, Develop, and Retain Capable Individuals
Strategi dan Penentuan Tujuan Strategy and Objective Setting	6. Menganalisis Konteks Bisnis 7. Mendefinisikan *Risk Appetite* 8. Mengevaluasi Strategi Alternatif 9. Merumuskan Tujuan Bisnis	6. Analyze Business Context 7. Define Risk Appetite 8. Evaluate Alternative Strategies 9. Formulate Business Objectives
Kinerja Performance	10. Mengidentifikasi Risiko 11. Menilai Tingkat Keparahan Risiko 12. Memprioritaskan Risiko 13. Menerapkan Respon Risiko 14. Mengembangkan Tampilan Portofolio	10. Identify Risks 11. Assess Risks Severity 12. Prioritize Risks 13. Implement Risk Responses 14. Develop Portfolio Views

Kajian dan Revisi Review and Revision	15. Menilai Perubahan Substansial 16. Meninjau Risiko dan Kinerja 17. Mengupayakan Peningkatan Manajemen Risiko Perusahaan	15. Assess Substantial Changes 16. Review Risks and Performances 17. Strives for Improved Corporate Risk Management
Informasi, Komunikasi, dan Pelaporan Information, Communication, and Reporting	18. Memanfaatkan Informasi dan Teknologi 19. Mengkomunikasikan Informasi Risiko 20. Laporan Risiko, Budaya, dan Kinerja	18. Leverage Information and Technology 19. Communicate Risk Information 20. Risk, Culture, and Performance Report

Fungsi Manajemen Risiko
Risk Management Function

Fungsi manajemen dan pengelolaan risiko di Perseroan dijalankan oleh Unit Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk memastikan seluruh proses manajemen risiko Perseroan telah dijalankan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan.

The risk management functions in the Company are carried out by the Internal Audit Unit which is directly responsible to the President Director to ensure that all of the Company's risk management processes have been carried out in accordance with the established guidelines and procedures.

Struktur Manajemen Risiko
Risk Management Structure

Struktur tata kelola manajemen risiko di Perseroan berfungsi untuk melakukan evaluasi efektivitas manajemen risiko yang telah ditetapkan, untuk kemudian disempurnakan atau diperbaharui. Adapun struktur tata kelola manajemen risiko di Perusahaan adalah sebagai berikut:

The risk management governance structure in the Company functions to evaluate the effectiveness of established risk management, to then be refined or updated. The risk management governance structure in the Company is as follows:

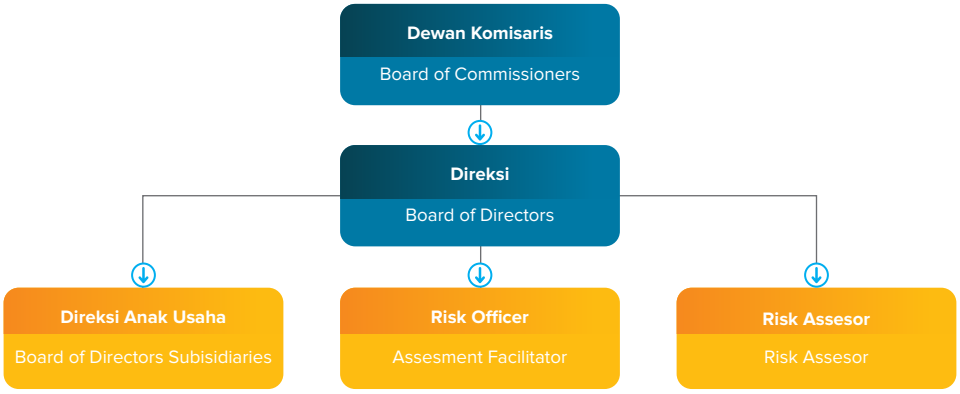

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab
Scope of Duties and Responsibilities

1. Menyusun pedoman/kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif secara tertulis. Mengkaji dan memberikan masukan kepada Direksi terkait kebijakan dan strategi manajemen risiko sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas usaha Perusahaan secara signifikan.
2. Meningkatkan kesadaran atau pemahaman terhadap proses manajemen risiko untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis Perusahaan sejalan dengan strategi manajemen risiko secara keseluruhan melalui pelatihan yang memadai.
3. Memastikan bahwa setiap unit kerja terlibat secara aktif dan mendukung pengelolaan risiko yang sejalan dengan *framework* dan kebijakan yang ditetapkan dengan melakukan koordinasi dan fasilitasi proses manajemen risiko di setiap unit kerja.

1. Prepare comprehensive written Risk Management guidelines/policies and strategies. Review and provide input to the Board of Directors regarding risk management policies and strategies at least once a year or at a higher frequency by considering changes in factors that significantly affect the Company's business activities.
2. Increase awareness or understanding of the risk management process to ensure that the Company's business activities are in line with the overall risk management strategy through adequate training.
3. Ensure that each work unit is actively involved and supports risk management in line with the established framework and policies by coordinating and facilitating the risk management process in each work unit.

4. Membangun sistem deteksi dini, sistem respon dan program mitigasi risiko untuk risiko-risiko kritis Perusahaan, berdasarkan kepada temuan risiko kritis yang ada.
5. Melakukan analisa dan menyelesaikan isu risiko yang tidak bisa dipecahkan pada tingkat unit kerja atau yang memerlukan otoritas Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menyelesaikannya dan melaporkannya kepada Direksi.
6. Memantau proses pelaporan mengenai hasil dari proses manajemen risiko dari setiap unit kerja.
7. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai tentang *framework* manajemen risiko Perusahaan.

4. Establish an early detection system, response system and risk mitigation program for the Company's critical risks, based on existing critical risk findings.
5. Conduct analysis and resolve risk issues that cannot be resolved at the work unit level or that require the authority of the Risk Management Work Unit to resolve and report them to the Board of Directors.
6. Monitor the reporting process regarding the results of the risk management process from each work unit.
7. Develop a Risk Management culture at all levels of the organization, including adequate communication about the Company's risk management framework.

Pengelolaan dan Mitigasi Risiko
Risk Management and Mitigation

Perseroan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko sebagai acuan dalam pengelolaan risiko yang mungkin dihadapi Perseroan dan penentuan upaya mitigasinya. Terkait bidang dan aktivitas usaha, Perseroan dihadapkan dengan berbagai risiko perubahan kondisi ekonomi global yang cepat. Oleh karena itu, Perseroan telah melakukan *risk assessment* di beberapa proses bisnis untuk menggali potensi-potensi risiko, dan telah mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkatan risikonya.

The Company has prepared a Risk Management Policy as a reference in managing risks that may be faced by the Company and determining its mitigation efforts. In relation to business fields and activities, the Company is faced with various risks of rapid changes in global economic conditions. Therefore, the Company has conducted risk assessments in several business processes to explore potential risks, and has classified risks based on their risk levels.

Adapun risiko-risiko yang dihadapi Perseroan pada tahun 2024 berdasarkan pengelompokannya, serta upaya untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

The risks faced by the Company in 2024 based on their grouping, as well as efforts to manage and mitigate these risks, can be presented as follows:

Jenis Risiko Type of Risk	**Risiko yang Dihadapi** Risk Posed	**Dampak** Impact	**Mitigasi** Mitigation
Finansial Financial	Potensi likuiditas terkait dengan ketersediaan dana untuk menjalankan aktivitas Perseroan. Liquidity risk pertains to the availability of funds to conduct the Company's activities.	Gangguan terhadap kelancaran operasional akibat kurangnya dana operasional. Operational disruptions due to insufficient operational funds.	• Manajemen hutang bank termasuk pemantauan tingkat suku bunga dan fluktuasi forex. Bank loan management including monitoring interest rate and forex fluctuations. • Membuat *aging schedule* untuk memantau *collection* piutang usaha. Creating an aging schedule to monitor trade receivables. • Diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko likuiditas. Diversifying funding sources to mitigate liquidity risks.
Perencanaan dan Strategi Plan and Strategy Risk	Potensi proyek baru mengalami kerugian. The potential for new projetcs to incur losses.	Kerugian investasi dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan. Investment losses affecting profitability.	• Penerapan prosedur CAPEX untuk memastikan investasi memenuhi prinsip GCG dan kehati-hatian. Implementation of CAPEX procedures to ensure investment meet GCG principles and prudence. • Evaluasi mendalam terhadap studi kelayakan dan risiko pasar sebelum pengambilan keputusan investasi. In-dept evaluation of feasibility studies and market risk before investment decisions.

Jenis Risiko Type of Risk	Risiko yang Dihadapi Risk Posed	Dampak Impact	Mitigasi Mitigation
Operasional Operating	Potensi kerusakan kapal, idle kapal, atau kenaikan harga bahan bakar. Potential vessel damage, idle vessels or fuel price fluctuations.	Tidak beroperasinya kapal dapat memengaruhi pemenuhan kontrak pelanggan dan pendapatan. Vessel inoperatability may affect customer contract fulfillment and revenue.	• Penerapan PMS dan memastikan persediaan *sparepart*. Implementation of PMS and ensuring spare parts availability. • Pelatihan rutin mengenai risiko kecelakaan. Routine training on accident risks. • Strategi diversifikasi sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar tertentu. Diversifying energy sources to reduce dependency on specific fuel types.
Eksternal External	Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan risiko dari pihak ketiga. Fluctuations in foreign exchange rates and third party risks.	Risiko kerugian finansial dari fluktuasi forex dan kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajibannya. Financial losses due to forex fluctuations and third part defaults.	• Memantau kondisi ekonomi secara berkala. Regularly monitoring global economic conditions. • *Hedging* nilai tukar mata uang. Currency exchange rate heding. • Evaluasi kelayakan mitra kerja untuk mengurangi risiko *counterpart*. Evaluating partner feasibility to reduce counterparty risks.
Reputasi Reputation	Potensi kerusakan reputasi terkait publikasi negatif di media. The potential damage to reputation due to negative media coverage.	Penurunan kepercayaan konsumen, gangguan hubungan dengan mitra, dan potensi penurunan harga saham. Decline in consumer trust disrupted partnership and potential stock price drops.	• Klarifikasi cepat kepada media dan regulator. Prompt clarification to media and regulators. • Sosialisasi terkait standar keamanan operasional dan GCG. Socialization on operational safety standards and GCG. • Komitmen menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan. Commitment to maintaining good relationshops with stakeholders. • Membangun strategi komunikasi krisis yang kuat. Building a robust crisis communication strategy.
Hukum, Litigasi, dan lain-lain Legal, Litigation, etc.	Potensi pelanggaran atau keterlambatan pelaporan. Potential violations or repoirting delays.	Investigasi mendalam oleh regulator dapat menyebabkan pencabutan izin usaha atau denda besar. In-dept investigations may lead to licence revocation or significant fines.	• Komitmen untuk memenuhi kewajiban pelaporan tepat waktu dengan penerapan *monitoring tools*. Commitment to timely reporting compliance using monitoring tools. • Melakukan audit reguler terhadap kepatuhan internal dan eksternal untuk mengantisipasi pelanggaran. Conducting regular audits of internal and external compliance to anticipate violations.
Keselamatan Safety	Potensi kecelakaan kerja di darat maupun laut. Potential workplace accidents on land or at sea.	Kerugian finansial, operasional, dan reputasi akibat kecelakaan kerja. Financial operational and reputational losses due to accidents.	• Monitoring dan pelatihan berkala oleh QHSSE. Regular monitoring and training by QHSSE. • Memberikan penghargaan untuk operasional dengan *zero accident*. Providing rewards for operations achieving zero accidents. • Penerapan teknologi keselamatan modern untuk mencegah kecelakaan. Implementing modern safety technologies to prevant accidents.

Hasil Kajian atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
Results of the Risk Management System Effectiveness Study

Unit Internal Audit yang menjalankan fungsi ini, secara aktif melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang dihadapi Perseroan untuk menentukan tingkatan risiko dan mengidentifikasi kemungkinan munculnya risiko baru, serta mencari mitigasi risiko yang harus dilakukan dalam menanggulangi risiko tersebut. Efektivitas manajemen risiko dinilai berdasarkan seberapa besar penanganan/mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi risiko. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan secara berkala.

The Internal Audit Unit that carries out this function, actively evaluates the risks faced by the Company to determine the level of risk and identify the possibility of new risks emerging, as well as seeking risk mitigation that must be carried out in overcoming these risks. The effectiveness of risk management is assessed based on how much the handling/mitigation carried out can reduce the risk. Evaluations are carried out every quarter and reported periodically.

Mitigasi risiko yang dianggap efektif, selanjutnya dikumpulkan dan direkap untuk menjadi bank data/ pustaka risiko. Pustaka risiko akan diberikan kepada semua *risk owner*, sebagai panduan penyusunan profil risiko selanjutnya. Untuk menilai pelaksanaan manajemen risiko Perseroan secara menyeluruh, maka dalam program kerja Unit Internal Audit selanjutnya dilakukan penilaian untuk mengetahui kekurangan pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Risk mitigation that is considered effective is then collected and summarized to become a data bank/risk library. The risk library will be given to all risk owners, as a guide for compiling further risk profiles. To assess the implementation of the Company's risk management as a whole, the Internal Audit Unit's work program will then conduct an assessment to determine the shortcomings in the implementation of risk management in the Company as a basis for making improvements in the future.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
Evaluation of the Risk Management System Effectiveness

Dalam mengelola usaha Perseroan memiliki risiko operasional dan non operasional sehingga Perseroan telah melakukan identifikasi potensi risiko yang ada di lingkungan Perseroan, serta kemungkinan adanya dampak yang muncul akibat adanya risiko tersebut. Perseroan telah menetapkan langkah mitigasi yang akan diambil jika potensi risiko tersebut terjadi.

In managing the Company's business, it has operational and non-operational risks, so the Company has identified potential risks in the Company's environment, as well as the potential impacts that arise due to these risks. The Company has determined the mitigation measures that will be taken if these potential risks occur.

Perseroan berupaya membangun tata kelola perusahaan yang baik, serta mengukur dan memitigasi risiko potensial yang akan dihadapi dengan menerapkan pengelolaan risiko. Kegiatan Manajemen Risiko Perseroan berperan untuk pengelolaan risiko terutama pada pelaksanaan langkah mitigasi yang dilakukan oleh Perseroan. Unit Manajemen Risiko akan melakukan pemantauan secara rutin setiap satu bulan sekali untuk memantau langkah mitigasi yang telah dilaksanakan Perseroan.

The Company strives to build good corporate governance, as well as measure and mitigate potential risks that will be faced by implementing risk management. The Company's Risk Management activities play a role in risk management, especially in the implementation of mitigation measures taken by the Company. The Risk Management Unit will conduct routine monitoring once a month to monitor the mitigation measures that have been implemented by the Company.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

Direksi percaya bahwa sistem manajemen resiko yang ada di perusahaan telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi dan mengelola risiko-risiko yang relevan dan kami berkomitmen untuk terus memperbaiki dan memperkuat sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis dan regulasi yang terus berubah.

The Board of Directors believes that the risk management system in the Company has been well designed and implemented to identify, evaluate and manage relevant risks and we are committed to continuously improving and strengthening it in accordance with the development of the business environment and regulations that continue to change.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

HUMI menjalankan sistem pengendalian internal (*Internal Control System*) dengan mengadaptasi kerangka pengendalian internal dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* (versi 2013).

HUMI implements an internal control system by adapting the internal control framework from COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) - Internal Control Integrated Framework (2013 version).

Kerangka pengendalian internal tersebut memiliki 5 komponen utama, dan 17 prinsip untuk mendukung tercapainya *internal control* yang efektif yaitu, sebagai berikut:

The internal control framework has 5 main components and 17 principles to support the achievement of effective internal control, namely as follows:

COSO - Internal Control Integrated Framework (2013)

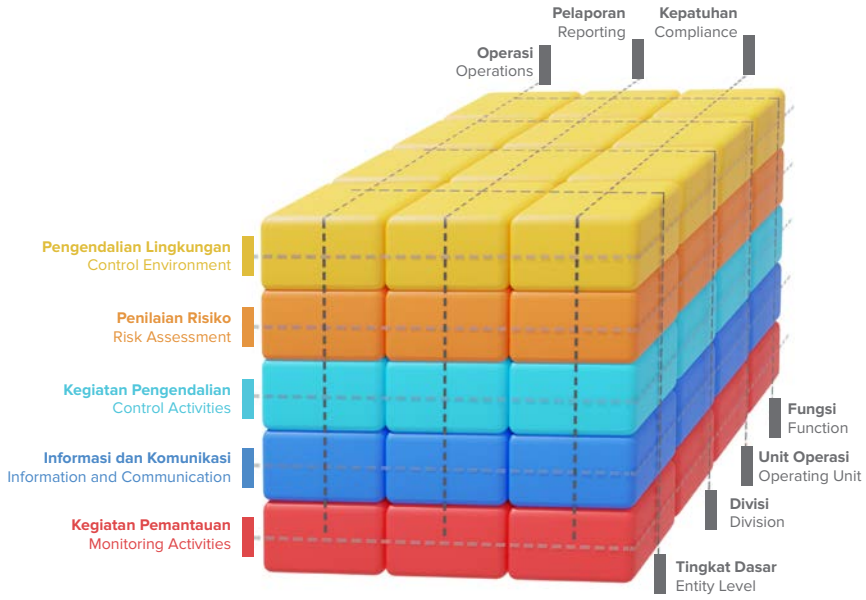

Dasar Penetapan
Basis for Determination

Kebijakan pengendalian internal Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) - *Internal Control Integrated Framework* (versi 2013), yang mengatur semua aktivitas yang ada di seluruh tingkat manajemen dari tingkat atas sampai bisnis unit Perusahaan.

The Company's internal control policy refers to COSO (Committee of Sponsoring Organizations) - Internal Control Integrated Framework (2013 version), which regulates all activities at all levels of management from the top level to the Company's business units.

Kebijakan mengenai pengendalian internal Perseroan tertuang dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 1 September 2022, di mana dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik diperlukan seperangkat kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai pedoman operasional perusahaan.

The Company's internal control policy is stated in the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance signed by the Board of Directors and the Board of Commissioners on September 1, 2022, where in the implementation of good corporate governance a set of policies and procedures are required to be used as guidelines for the Company's operations.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen, kesungguhan, dan kepedulian Direksi terhadap pentingnya pengendalian internal dalam keberlangsungan dan keberlanjutan Perseroan.

This policy demonstrates the Board of Directors' commitment, sincerity and concern for the importance of internal control in the continuity and sustainability of the Company.

5 Komponen Utama COSO-Internal Control Framework
5 Main Components of COSO-Internal Control Framework

Sistem pengendalian internal Perseroan mengadaptasi prinsip COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang terdiri dari 5 komponen utama, yakni:

1. Lingkungan Pengendalian
   Elemen lingkungan pengendalian Perseroan diwujudkan dalam bentuk pengawasan manajemen dan budaya pengendalian, dimana ruang lingkup pengendalian dilakukan baik di seluruh tingkatan, yaitu pengendalian tingkat aktivitas maupun pengendalian tingkat entitas.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
   Risiko-risiko yang material dan memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap pencapaian tujuan Perseroan telah diidentifikasi dan diukur secara berkelanjutan oleh seluruh unit. Proses identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah risiko Perseroan. Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola dan dilaksanakan pada seluruh tingkatan unit operasional, termasuk didalamnya proses identifikasi, analisis, dan penilaian risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan Perseroan.
3. Kegiatan Pengendalian
   Kegiatan pengendalian meliputi:
   a. Aktivitas pengendalian secara umum telah melibatkan seluruh pegawai termasuk Direksi, yang disusun untuk memastikan arahan manajemen telah dilaksanakan dan tindakan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi telah dilakukan.
   b. Kegiatan pengendalian sesuai dengan fungsi organisasi, yang sekurang-kurangnya meliputi:
      - Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
      - Direksi aktif meminta presentasi dan laporan kinerja secara berkala, sehingga dapat mengevaluasi perkembangan Perseroan terhadap tujuan yang telah ditetapkan
      - Pengendalian sistem informasi
      - Pengendalian aset fisik
      - Dokumentasi, mencakup dokumentasi kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai
4. Informasi dan Komunikasi
   Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, meliputi:
   a. Sistem Akuntansi
      Mencakup metode, catatan dan proses rekonsiliasi data akunting dengan sistem informasi.

The Company's internal control system adapts the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) principles which consist of 5 main components, namely:

1. Control Environment
   The Company's control environment elements are manifested in the form of management supervision and control culture, where the scope of control is carried out at all levels, namely activity level control and entity level control.
2. Risk Identification and Assessment
   Material risks that have an adverse effect on the achievement of the Company's objectives have been identified and measured continuously by all units. The risk identification process is carried out to identify the amount of the Company's risks. Risk assessment is a process to determine how risks should be managed and implemented at all levels of operational units, including the process of identifying, analyzing, and assessing risks faced in achieving the Company's objectives.
3. Control Activities
   Control activities include:
   a. Control activities generally involve all employees including the Board of Directors, which are designed to ensure that management directives have been implemented and actions to address identified risks have been taken.
   b. Control activities in accordance with organizational functions, which at least include:
      - Top Management Reviews
      - The Board of Directors actively requests presentations and performance reports periodically, so that it can evaluate the Company's progress towards the goals that have been set;
      - Information system control
      - Physical asset control
      - Documentation, including adequate documentation of policies, procedures, accounting systems and standards as well as audit processes
4. Information and Communication
   The accounting, information and communication system aims to identify issues that may arise and is used as a means of exchanging information in order to carry out tasks in accordance with their respective responsibilities, including:
   a. Accounting System
      Covers methods, records and processes for reconciling accounting data with information systems.

b. Sistem Informasi
Perseroan telah memiliki saluran komunikasi untuk memastikan semua karyawan memahami, mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di antaranya:
- Tersedianya jalur komunikasi bagi karyawan untuk melaporkan tindakan yang menyimpang antara lain melalui *Whistleblowing System*
- Masukan karyawan diakomodasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan perbaikan, antara lain melalui *survey* karyawan
- Komunikasi lintas unit dilaksanakan secara efektif
- Ketepatan waktu *follow up* manajemen terhadap komunikasi yang diperoleh dari pelanggan, pemasok, regulator dan pihak eksternal lainnya
- Perseroan telah memiliki mekanisme pelaporan risiko yang handal, tepat waktu dan mudah diakses

5. Kegiatan Pemantauan
a. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian internal. Aktivitas pemantauan (evaluasi) terhadap kecukupan Sistem Pengendalian Internal dilakukan berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal sehingga dapat meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal dan efektivitasnya. Aktivitas pemantauan (evaluasi) terhadap Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkala atau insidentil oleh Internal Audit
b. Fungsi Internal Audit telah independen terhadap fungsi yang menjalankan aktivitas harian dan memiliki akses terhadap semua kegiatan operasional
c. Tingkat pengawasan terhadap operasional dilakukan secara berjenjang termasuk pengawasan oleh pihak eksternal yang terdiri dari Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik)

Penerapan sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan untuk dapat memberikan suatu keyakinan bahwa Perseroan memiliki kehandalan laporan dan informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.

b. Information System
The Company has communication channels to ensure that all employees understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities, including:
- Availability of communication channels for employees to report deviant actions, including through the Whistleblowing System
- Employee input is accommodated to increase productivity, quality and improvement, including through employee surveys
- Cross-unit communication is implemented effectively
- Timeliness of management follow-up on communications received from customers, suppliers, regulators and other external parties
- The Company has a reliable, timely and easily accessible risk reporting mechanism

5. Monitoring Activities
a. Monitoring activities are carried out to monitor the effectiveness of the implementation of internal control. Monitoring (evaluation) activities of the adequacy of Internal Control System are carried out in relation to changes in internal and external conditions so as to increase the capacity of the internal control system and its effectiveness. Monitoring (evaluation) activities of the Internal Control System are carried out periodically or incidentally by Internal Audit
b. The Internal Audit function has been independent of the function that carries out daily activities and has access to all operational activities
c. The level of supervision of operations is carried out in stages including supervision by external parties consisting of External Auditors (Public Accounting Firms)

The implementation of the Company's internal control system is aimed at providing assurance that the Company has reliable reports and information, compliance with applicable regulations as well as efficiency and effectiveness of operational activities.

17 Prinsip Efektif Pengendalian Internal COSO-*Internal Control Framework*
17 Principles of Effective Internal Control COSO-Internal Control Framework

5 Komponen COSO 5 COSO Components	17 Prinsip Pengendalian Internal COSO 17 Principles of COSO Internal Control	
Lingkungan Pengendalian Control Environment	1. Komitmen terhadap integritas dan nilai etika 2. Melaksanakan tanggung jawab pengawasan 3. Menerapkan struktur wewenang dan tanggung jawab 4. Komitmen terhadap kompetensi 5. Mendorong akuntabilitas atas internal *control system*	1. Commitment to integrity and ethical values 2. Carry out oversight responsibility 3. Implement structure, authority and responsibility 4. Commitment to competency 5. Enforces accountability for internal control system
Identifikasi dan Penilaian Identification and Assessnent	6. Menentukan tujuan 7. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko 8. Menilai risiko *fraud* 9. Mengidentifikasi dan menganalisis perubahan signifikan	6. Determine objectives 7. Identify and analyze risks 8. Assess fraud risks 9. Identify and analyze significant changes
Kegiatan Pengendalian Control Activities	10. Mengembangkan kegiatan pengendalian 11. Mengembangkan kontrol umum atas teknologi 12. Merinci kepada kebijakan dan prosedur	10. Develop control activities 11. Develop general control over technology 12. Detail the policies and procedures
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	13. Menggunakan informasi yang relevan 14. Komunikasi internal yang efektif 15. Komunikasi eksternal yang efektif	13. Use relevant information 14. Effective internal communication 15. Effective external communication
Kegiatan Pemantauan Monitoring Activities	16. Evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah 17. Mengevaluasi dan melaporkan setiap kekurangan	16. Ongoing and/or separate evaluations 17. Evaluate and report any deficiencies

Model Tiga Lini dari The Institute of Internal Auditor (The IIA), Tahun 2020 - Pembaharuan terhadap Model Pertahanan Tiga Lini

Three Lines of Defense from The Institute of Internal Auditors (The IIA), 2020 - an Update to the Three Lines of Defense Mode

Selain 5 komponen utama dari COSO tersebut, sistem pengendalian internal Perseroan juga terdiri dari 3 lini pengendalian.

In addition to the 5 main components of COSO, the Company's internal control system also consists of 3 lines of control.

Pada periode sebelumnya, Perseroan mengacu pada model "*Three-Line of Defense*", kemudian di tahun 2020, *The Institute of Internal Auditor* mengeluarkan model pengendalian internal yang terbaru yaitu model "*Three-Line Model*".

In the previous period, the Company referred to the "Three-Line of Defense" model, then in 2020, The Institute of Internal Auditors issued the latest internal control model, namely the "Three-Line Model".

Pada model terbaru ini semua peran bekerja sama secara kolektif dalam menciptakan dan menjaga nilai, semua selaras satu sama lain dan dengan kepentingan yang menjadi prioritas pemangku kepentingan.

In this new model, all roles work together collectively to create and maintain value, all aligned with each other and with the interests that became the priority of stakeholders.

Salah satu perbedaannya dibandingkan dengan model sebelumnya (*Three-Line of Defense*), pada model yang baru *Three-Line Model*, peranan auditor internal tidak hanya pada pertahanan yang terakhir (pertahanan lapis ke-3) saja namun juga berperan secara kolektif.

One of the differences compared to the previous model (Three-Line of Defense), in the new Three-Line Model, the role of the internal auditor is not only in the last line of defense (3rd layer of defense) but also plays a collective role.

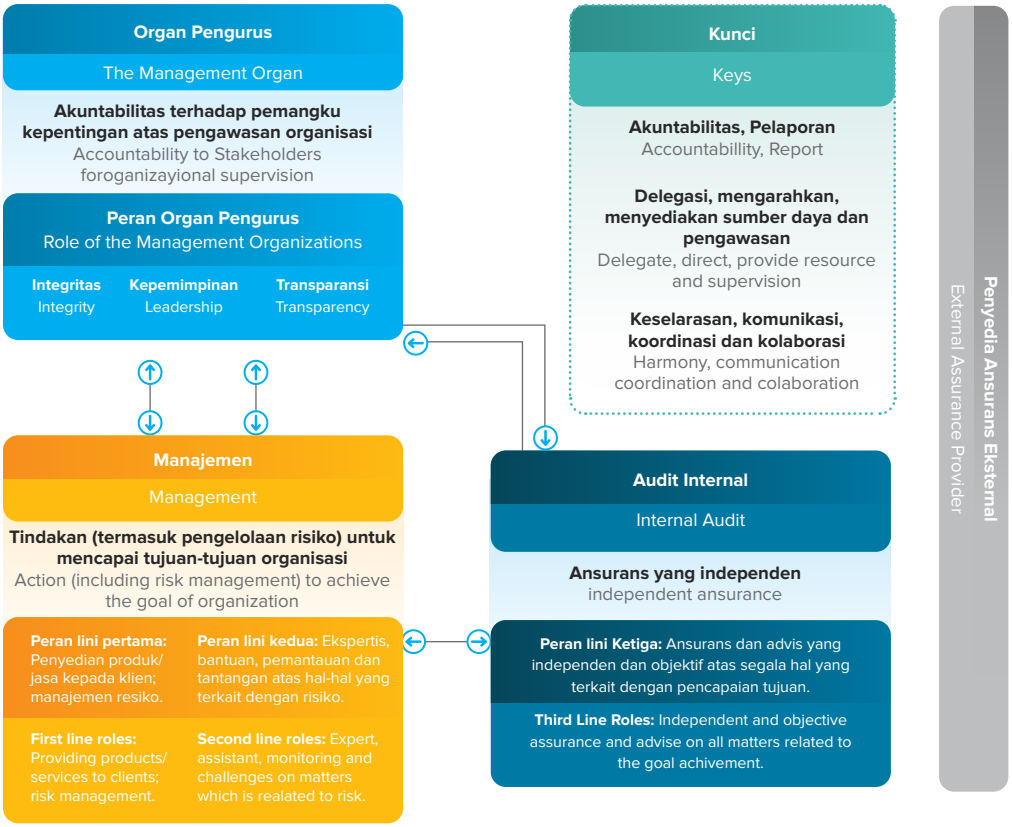

Prinsip-prinsip Model Tiga Lini Three-Line Model Principles	**Uraian** Description
Prinsip 1 Tata Kelola **Principle 1** Governance	Tata kelola organisasi membutuhkan struktur dan proses-proses yang memadai dan yang memungkinkan: • Akuntabilitas pengurus kepada pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan organisasi dengan integritas kepemimpinan dan keterbukaan. • Tindakan-tindakan (termasuk mengelola risiko) oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengambilan keputusan berbasis risiko dan penerapan sumber daya. • *Assurance* dan nasihat oleh fungsi audit internal yang independen untuk memberikan kejelasan dan keyakinan serta mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan melalui tanya-jawab yang mendalam dan komunikasi yang berwawasan. Organizational governance requires adequate structures and processes that enable: • Accountability of management to stakeholders in carrying out organizational oversight with leadership integrity and transparency. • Actions (including managing risk) by management to achieve the organization's objectives through risk-based decision making and resource deployment. • Assurance and advice by an independent internal audit function to provide clarity and confidence as well as promote and facilitate ongoing development through in-depth inquiry and insightful communication.

Prinsip-prinsip Model Tiga Lini Three-Line Model Principles	**Uraian** Description
Prinsip 2 Peranan Organ Pengurus **Principle 2** The Role of Management Organs	Organ Pengurus memastikan: • Struktur dan proses-proses yang memadai telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif. • Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan utama para Pemangku Kepentingan. Organ Pengurus: • Mendelegasikan tanggung jawab dan menyediakan sumber daya kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi serta memastikan terpenuhinya kepatuhan terhadap hukum, ketentuan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. • Membentuk dan mengawasi fungsi audit internal yang independen, objektif, dan kompeten, guna memberikan kejelasan dan keyakinan atas progres terhadap pencapaian tujuan organisasi. Management Organs ensure that: • Adequate structures and processes are in place for effective governance. • The organization's objectives and activities are aligned with the primary interests of stakeholders. Management Organs: • Delegate responsibility and provide resources to management to achieve organizational goals and ensure compliance with laws, regulations and ethical values. • Establish and oversee an independent, objective and competent internal audit function, to provide clarity and assurance on progress towards achieving organizational goals.
Prinsip 3 Peran Manajemen dan Lini Pertama serta Kedua **Principle 3** The Role of Management as well as the First and Second Lines	• Peran-peran lini pertama secara langsung selaras dengan pemberian produk dan jasa kepada pelanggan organisasi termasuk fungsi-fungsi pendukung. • Peran-peran lini kedua memberikan bantuan terkait dengan pengelolaan risiko. Peranan lini pertama dan lini kedua dapat dibentuk menjadi satu atau terpisah. Peranan lini kedua dapat ditugaskan kepada para spesialis yang akan memberikan keahlian pelengkap, dukungan, pemantauan dan kritik terhadap mereka yang menjalankan lini pertama. Peranan lini kedua dapat fokus pada tujuan manajemen risiko yang spesifik. • First-line roles are directly aligned with the delivery of products and services to the organization's customers including support functions. • Second-line roles provide assistance related to risk management. First-line and second-line roles can be combined or separated. Second-line roles can be assigned to specialists who will provide complementary expertise, support, monitoring and critique to those performing the first line. Second-line roles can focus on specific risk management objectives.
Prinsip 4 Peran Lini Ketiga **Principle 4** The Role of the Third Line	• Audit internal memberikan *assurance* dan nasihat yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko. • Auditor internal melaporkan temuannya kepada manajemen dan organ pengurus untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan. • Internal audit provides independent and objective assurance and advice on the adequacy and effectiveness of governance and risk management. • Internal auditors report their findings to management and the management organs to encourage and facilitate continuous improvement.
Prinsip 5 Independensi Lini Ketiga **Principle 5** Independence of the Third Line	• Independensi audit internal dari tanggung jawab manajemen terkait keobjektifan, kewenangan dan kredibilitasnya. • Independensi ini dibangun melalui akuntabilitas kepada organ pengurus, akses tak terbatas pada sumber daya manusia, sumber daya organisasi dan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya dan bebas dari bias atau campur tangan pihak lain dalam perencanaan dan menjalankan kegiatan audit. • Independence of internal audit from management responsibilities related to its objectivity, authority and credibility. • This independence is built through accountability to the management organs, unrestricted access to human resources, organizational resources and data needed to complete its work and freedom from bias or interference from others in planning and conducting audit activities.
Prinsip 6 Menciptakan dan Melindungi Nilai **Principle 6** Create and Protect Value	• Semua peran bekerja bersama secara kolektif dalam menciptakan dan menjaga nilai, semua selaras satu sama lain dan dengan kepentingan yang menjadi prioritas pemangku kepentingan. • Keselarasan aktivitas dicapai melalui komunikasi, kerja sama dan kolaborasi. Hal ini memastikan keandalan, keterkaitan dan transparansi dari informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan berbasis risiko. • All roles work together collectively to create and maintain value, all aligned with each other and with the interests that became the priorities of stakeholders. • Alignment of activities is achieved through communication, cooperation and collaboration. This ensures the reliability, relevance and transparency of the information needed to make risk-based decisions.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2024
Evaluation of the Internal Control System Effectiveness in 2024

Perseroan melakukan evaluasi internal terhadap efektivitas sistem pengendalian internal melalui pelaksanaan kegiatan rutin Unit Internal Audit yang dilaksanakan setiap tahun.

The Company conducts an internal evaluation of the effectiveness of the internal control system through the implementation of Internal Audit Unit routine activities which are carried out every year.

Unit Internal Audit menilai aspek pengendalian internal Perseroan di tahun 2024 sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dengan mengevaluasi *Standard Operating Procedure* (SOP) secara berkala agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasi, tata kelola perusahaan (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) dan risiko Perusahaan (*risk*).

The Internal Audit Unit assessed that the Company's internal control aspects in 2024 were quite adequate but need to be improved by periodically evaluating the Standard Operating Procedure (SOP) to suit current conditions. This aims to evaluate operational activities, corporate governance and compliance and risks of the Company.

Audit internal dapat memberikan masukan untuk perbaikan yang dapat dilakukan. Hasil dari evaluasi dijadikan referensi oleh manajemen untuk tindakan perbaikan, kemutakhiran sistem untuk jalannya kegiatan operasi yang lebih efektif.

Internal audits can provide input for improvements that can be made. The evaluation results are used as a reference by management for corrective actions, system updates for more effective operational activities.

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko
Statement of the Audit Committee on the Effectiveness of Internal Control System and Risk Management

Komite Audit menilai bahwa:
1. Perseroan telah memiliki Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko yang terus menerus dilakukan monitoring, *review*, dan perbaikan.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Perseoran saat ini masih harus ditingkatkan kembali. Hal ini tercermin dari evaluasi terhadap rencana Audit Internal tahunan, memantau pelaksanaan dan hasil audit, serta tindak lanjut penyelesaiannya oleh manajemen Perseoran.

The Audit Committee assesses that:
1. The Company has an Internal Control System and risk management that is continuously monitored, reviewed and improved.
2. The Company's current implementation of the internal control system still needs to be improved. This is reflected in the evaluation of the annual Internal Audit plan, monitoring the implementation and results of the audit, and the follow-up of its resolution by the Company's management.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal
Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh Direksi bersama-sama antara lain dengan Unit Internal Audit untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi berkomitmen untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di semua tingkatan sebagai landasan untuk mencapai tujuan melindungi dan meningkatkan nilai Perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian internal secara efektif agar Perseroan dapat mencapai tujuannya.

The internal control system is a process carried out by the Board of Directors together with the Internal Audit Unit to ensure the implementation of corporate governance. Both the Board of Commissioners and the Board of Directors are committed to ensuring the implementation of good corporate governance at all levels as a basis for achieving the goal of protecting and increasing the value of the Company. The Board of Directors is responsible for implementing internal control effectively so that the Company can achieve its goals.

Upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Internal pada Tahun 2025 dan Tahun Mendatang
Efforts to Improve Internal Control Systems in 2025 and the Coming Years

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan adalah dengan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara menyeluruh di lingkungan Perseroan. Serta, dalam upaya peningkatan yang sejalan dengan Tujuan yang dimiliki Sistem Pengendalian Internal yaitu bertujuan memberikan layanan yang memadai untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Perseroan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset perseroan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efforts made to improve the Internal Control System in the Company are by implementing a comprehensive Internal Control System in the Company's environment. Also, in an effort to improve in line with the Objectives of the Internal Control System, namely to provide adequate services to achieve the effectiveness and efficiency of achieving the Company's goals, reliability of financial reporting, security of the Company's assets and compliance with laws and regulations.

Upaya peningkatan sistem pengendalian internal untuk di masa yang mendatang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi pada kebijakan, melakukan pelatihan kepada karyawan dan implementasi teknologi untuk mendukung dan memperkuat perlindungan terhadap risiko internal.

Efforts to improve the internal control system for the future are carried out by evaluating policies, providing training to employees and implementing technology to support and strengthen protection against internal risks.

Perkara Penting
Significant Cases

Perkara Penting yang Dihadapi HUMI
Significant Cases Encountered by HUMI

Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perseroan serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maupun kepada entitas anak.

Throughout 2024, there were no issues and/or legal cases encountered by the Company and members of the Board of Commissioners and Board of Directors, or subsidiaries.

Sanksi Administrasi
Administrative Sanctions

Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat sanksi administrasi yang dikenakan oleh otoritas baik kepada Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi, maupun kepada entitas anak.

Throughout 2024, there were no administrative sanctions imposed by the authorities on the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors, or subsidiaries.

Perkara Perpajakan
Tax Cases

Di sepanjang tahun 2024 tidak terdapat perkara perpajakan yang dihadapi Perseroan.

Throughout 2024, there were no tax cases encountered by the Company.

Kebijakan Anti-*Fraud* dan Korupsi
Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy

Perseroan menjalankan program dan prosedur antisuap dan korupsi sebagaimana yang tertuang pada Kebijakan Anti Korupsi dan Anti-*Fraud* No. 02/Pedoman-GCG/XII/2023. Kebijakan merupakan salah satu bentuk pernyataan komitmen HUMI dalam mendukung praktik antisuap dan korupsi. Kebijakan tersebut berlaku di lingkungan Perseroan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, mitra kerja dan instansi pemerintah. Kebijakan ini berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan Perseroan tanpa kecuali.

The Company implements anti-fraud and anti-corruption programs and procedures as stated in the Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy No. 02/Pedoman-GCG/XII/2023. The policy is a form of HUMI's commitment statement in supporting anti-fraud and anti-corruption practices. The policy applies within the Company's environment by involving all stakeholders including employees, business partners and government agencies. This policy applies to the Board of Commissioners, Board of Directors, management and all employees of the Company without exception.

Komitmen Perusahaan
Company Commitment

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang bersih dari tindak pidana korupsi dan kecurangan karena dapat mengganggu stabilitas perusahaan, merugikan keuangan perusahaan, dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan usaha perusahaan.

The Company is committed to implementing corporate governance that is free from corruption and fraud because it can disrupt the Company's stability, harm the Company's finances, and hinder the growth and sustainability of the Company's business.

Pada Kebijakan Antisuap dan Korupsi untuk mencegah praktik suap dan korupsi, HUMI memiliki berbagai ketentuan, antara lain:

1. Program *Awareness,* melalui pelatihan, seminar, sosialisasi, *sharing session* dan sejenisnya tentang antisuap dan antikorupsi kepada pihak internal dan eksternal secara berkala.
2. Kewajiban penandatanganan Pakta Integritas (termasuk Kode Etik dan Komitmen Antisuap dan Korupsi) secara berkala (setiap awal tahun) oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh karyawan. Selain itu, Rekan Usaha yang akan bekerja sama dengan HUMI Grup juga diminta untuk menandatangani Pakta Integritas untuk Rekan Usaha (Kode Etik Vendor).
3. Uji Tuntas (*Due Diligence*), melalui:
   a. *Know Your Customer* (KYC), yaitu uji tuntas yang dilakukan terhadap (calon) pelanggan dan rekanan, melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian tujuan kerja sama yang dilakukan oleh HUMI.
   b. *Know Your Employee* (KYE), yaitu uji tuntas yang dilakukan terhadap calon karyawan maupun kepada karyawan dan Orang Bekerja untuk HUMI, melalui serangkaian pemeriksaan agar HUMI mengetahui latar belakang dari calon karyawan/karyawan sehingga dapat meminimalisasi potensi risiko pelanggaran internal.

In the Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy to prevent fraud and corruption practices, HUMI has various provisions, including:

1. Awareness Program, through training, seminars, socialization, sharing sessions and the like on anti-fraud and anti-corruption to internal and external parties on a regular basis.
2. The obligation to sign the Integrity Pact (including the Code of Conduct and Anti-Fraud and Anti-Corruption Commitment) periodically (at the start of every year) by all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees. In addition, Business Partners who will cooperate with HUMI Group are also asked to sign the Integrity Pact for Business Partners (Vendor Code of Conduct).
3. Due Diligence, through:
   a. Know Your Customer (KYC), which is due diligence conducted on (prospective) customers and partners, through a series of examinations to ensure the suitability of the cooperation objectives carried out by HUMI.
   b. Know Your Employee (KYE), which is due diligence conducted on prospective employees as well as employees and People Working for HUMI, through a series of examinations so that HUMI knows the background of prospective employees/employees so that it can minimize the potential risk of internal violations.

Panduan atas Gratifikasi
Gratification Guidelines

1. Sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan.
2. Tidak diperbolehkan dalam bentuk uang tunai kecuali dalam rangka *sponsorship* atau promosi perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung, wajib mencantumkan logo perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Tidak diperbolehkan dalam bentuk-bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.

1. As long as the gift is intended to foster good relations within reasonable limits and pay attention to equal relations, mutual respect and is not intended to bribe the parties concerned.
2. It is not permitted in the form of cash except in the context of company sponsorship or promotion by attaching supporting documents, it is mandatory to include the company logo as an integral part.
3. It is not permitted in forms that violate morality and the law.

Apabila dalam pelaksanaannya, menemukan atau menghadapi peristiwa yang termasuk dalam tindakan-tindakan yang dilarang, maka seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ataupun karyawan Perseroan wajib melaporkan kepada atasan langsung dan Sekretaris Perusahaan secara tertulis.

If in the implementation, they find or encounter events that are included in prohibited actions, then all members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or employees of the Company are required to report to their direct superiors and the Corporate Secretary in writing.

Konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau tindakan disiplin seperti pemecatan melalui mekanisme yang berlaku pada peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

The consequences for violating this policy will be subject to administrative sanctions and/or disciplinary actions such as dismissal through the mechanisms applicable to company regulations and applicable laws.

HUMI memiliki komitmen anti-*fraud* dan korupsi yang antara lain dinyatakan dalam bentuk deklarasi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal, di antaranya melalui *e-mail* dan situs web. Deklarasi komitmen anti-suap dan korupsi yang merupakan bagian dari Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Komitmen Anti-suap dan Korupsi.

HUMI has an anti-fraud and anti-corruption commitment which is stated in the form of a declaration that is written and announced openly to all parties, both internal and external, including via e-mail and website. The declaration of anti-fraud and anti-corruption commitment is part of the Declaration of Integrity Pact, Code of Conduct and Anti-Fraud and Anti-Corruption Commitment.

Detil isi dari Kebijakan Anti-*Fraud* dan Korupsi dapat dilihat pada situs web HUMI. HUMI juga memiliki kebijakan terkait anti-*fraud* dan korupsi yang saling melengkapi satu sama lain, di antaranya Kode Etik dan Perilaku dan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*).

Details of the Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy can be viewed on HUMI's website. HUMI also has policies related to anti-fraud and corruption that complement each other, including the Code of Ethics and Conduct and the Whistleblowing Policy.

Sebagai bentuk pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pengendalian *fraud*, HUMI melaksanakan penandatanganan dan penerapan pakta integritas setiap tahun oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun seluruh karyawan HUMI termasuk karyawan *outsource*. Isi dari pakta integritas tersebut merupakan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan menentang segala tindakan *fraud*, suap dan korupsi serta pelanggaran terhadap terhadap Kode Etik dan Perilaku Kepegawaian HUMI.

As a form of active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners on fraud control, HUMI carries out the signing and implementation of an integrity pact every year by all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of HUMI including outsourced employees. The contents of the integrity pact are a commitment to always uphold integrity and oppose all acts of fraud, bribery and corruption as well as violations of HUMI's Employee Code of Ethics and Conduct.

Zero Tolerance to Fraud
Zero Tolerance to Fraud

Dalam menjalankan program pengelolaan anti-*fraud*, HUMI konsisten berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap tindakan dan pelaku *fraud* (*zero tolerance to fraud*) yang berarti setiap pelaku *fraud* di HUMI akan ditindak tegas, tanpa terkecuali termasuk tuntutan pidana. Penerapan prinsip *zero tolerance to fraud* bertujuan untuk membangun budaya anti-*fraud* atau budaya kerja yang berintegritas karena hal tersebut merupakan salah satu pondasi yang penting bagi HUMI dalam menjaga aset, pelanggan dan *stakeholder* lainnya serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

In implementing the anti-fraud management program, HUMI is consistently committed to zero tolerance for fraudulent actions and perpetrators (zero tolerance to fraud), which means that every perpetrator of fraud in HUMI will be dealt with firmly, without exception, including criminal charges. The application of the principle of zero tolerance to fraud aims to build an anti-fraud culture or a work culture with integrity because it is one of the important foundations for HUMI in maintaining assets, customers and other stakeholders and supporting sustainable growth.

Pelatihan/Sosialisasi Anti-*Fraud* dan Korupsi

HUMI secara agresif mendorong pencegahan anti-*fraud* dan korupsi dengan melibatkan peran aktif seluruh karyawan, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara berkala, pada awal tahun HUMI melakukan penandatanganan Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Komitmen Antikorupsi (Pakta) oleh Dewan Komisaris dan Direksi HUMI. Pada tahun 2024, penandatanganan dilakukan pada 26 Januari 2024. Penandatangan Pakta Integritas ini ditindaklanjuti ke seluruh jenjang organisasi melalui kewajiban atestasi Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Komitmen Antikorupsi setiap tahun oleh seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

Pengungkapan

Pada tahun 2024, HUMI tidak mendapatkan laporan atas pelanggaran gratifikasi atau korupsi yang merugikan Perseroan atau pihak lain.

Training/Socialization of Anti-Fraud and Anti-Corruption

HUMI aggressively promotes anti-fraud and anti-corruption prevention by involving the active role of all employees, work partners, and other stakeholders.

Periodically, at the beginning of the year HUMI signs the Declaration of Integrity Pact, Code of Conduct and Anti-Corruption Commitment (Pact) by the Board of Commissioners and Board of Directors of HUMI. In 2024, the signing was carried out on January 26, 2024. The signing of this Integrity Pact is followed up at all levels of the organization through the obligation to attest the Declaration of Integrity Pact, Code of Conduct and Anti-Corruption Commitment every year by all employees, both permanent and non-permanent.

Disclosure

In 2024, HUMI did not receive any reports of violations of gratification or corruption that harmed the Company or other parties.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Company Information and Data

Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan informasi kepada publik dan kepatuhan terhadap regulasi, Perseroan memberikan kemudahan akses informasi dan data perusahaan bagi para pemangku kepentingan, antara lain mengenai jasa bisnis operasi, kinerja keuangan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan, melalui berbagai kanal komunikasi yang tersedia termasuk media sosial, situs web, *email blast* dan paparan publik bagi pemegang saham dan publik, siaran pers, serta kanal komunikasi khusus internal untuk karyawan HUMI. Selain itu, Perseroan juga selalu melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui sistem pelaporan elektronik (SPE-IDXNet) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

In order to uphold disclosure of information principle to the public and compliance with regulations, the Company provides easy access to company information and data for stakeholders, including regarding operational business services, financial performance, and implementation of corporate governance, through various available communication channels including social media, websites, email blasts and public expose for shareholders and the public, press releases, and special internal communication channels for HUMI employees. In addition, the Company also always reports material information and facts through an electronic reporting system (SPE-IDXNet) to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

To obtain more detailed information regarding the Company, the general public and investors can contact:

Sekretaris Perusahaan dan/atau Investor Relations
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.
Mangkuluhur City Tower One Lantai 27
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : +62 21 395 06655
E-mail : corpsec@humi.co.id

Corporate Secretary and/or Investor Relations
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.
Mangkuluhur City Tower One 27th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia
Phone : +62 21 395 06655
E-mail : corpsec@humi.co.id

Investor Relations

Investor Relations

Berkaitan dengan penyediaan akses informasi dan data perusahaan, HUMI memiliki unit kerja *Investor Relations* yang memiliki tanggung jawab untuk membangun reputasi HUMI melalui pengembangan hubungan dan komunikasi dengan investor baik secara interaktif maupun penyampaian informasi secara berkala. Unit kerja *Investor Relations* berperan mengkomunikasikan informasi yang relevan dan memfasilitasi para investor dalam proses pengambilan keputusan investasi, termasuk untuk menanamkan persepsi dan ekspektasi investor terkait strategi, prospek bisnis, serta kinerja operasional dan keuangan HUMI.

In relation to providing access to company information and data, HUMI has an Investor Relations work unit that is responsible for building HUMI's reputation through developing relationships and communication with investors, both interactively and by delivering information periodically. The Investor Relations work unit plays a role in communicating relevant information and facilitating investors in the investment decision-making process, including instilling investor perceptions and expectations regarding HUMI's strategy, business prospects, and operational and financial performance.

Tugas dan tanggung jawab *Investor Relations* adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan materi presentasi kinerja HUMI untuk keperluan pelaksanaan pertemuan analis, Paparan Publik dalam rangka menjamin keterbukaan.
- Transparansi informasi perusahaan baik informasi keuangan maupun non keuangan serta strategi HUMI.
- Komunikasi kinerja HUMI kepada pihak eksternal seperti investor, analis, dan pelaku pasar modal lainnya.

Duties and responsibilities of the Investor Relations are as follows:

- Prepare HUMI's performance presentation materials for the purpose of implementing analyst meetings, Public Expose in order to ensure transparency.
- Transparency of company information, both financial and non-financial information, as well as HUMI 's strategies.
- Communication of HUMI's performance to external parties such as investors, analysts, and other capital market players.

- Mengelola komunikasi dan korespondensi dengan investor, analis, perusahaan sekuritas, dan lembaga pemeringkat.
- Menjaga kerahasiaan informasi dan tidak memanfaatkan informasi rahasia tersebut untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan pihak tertentu lainnya.
- Berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan untuk penyusunan, penerbitan, dan distribusi Laporan Tahunan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Penyediaan data dan informasi mengenai kinerja HUMI melalui situs web, antara lain Laporan keuangan bulanan dan triwulan, Laporan Tahunan yang merupakan laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja, bisnis dan aktivitas lain HUMI.

- Manage communication and correspondence with investors, analysts, securities companies, and rating agencies.
- Maintain confidentiality of information and not use confidential information for personal interests or the benefit of other parties.
- Coordinate with the Corporate Secretary for the preparation, publication, and distribution of the Annual Reports to all stakeholders.
- Provision of data and information regarding HUMI's performance through the website, including monthly and quarterly financial statements, Annual Reports which are comprehensive reports for the public and stakeholders regarding HUMI's performance achievements, business and other activities.

Kegiatan Investor Relations

Pada tahun 2024, aktivitas dan interaksi unit kerja *Investor Relations* dengan investor, analis, dan pelaku pasar modal, sebagai berikut:

Investor Relations Activities

In 2024, the activities and interactions of the Investor Relations work unit with investors, analysts, and capital market players are as follows:

Pertemuan Analis Analyst Meeting	Diselenggarakan 2 kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Februari 2024, membahas mengenai kinerja HUMI Triwulan IV 2023. Held 2 times a year, in January and February 2024, discussing HUMI's performance in the Fourth Quarter of 2023.
Paparan Publik Public Expose	• Penyelenggaraan Paparan Publik dalam bentuk paparan kinerja keuangan dan strategi HUMI kepada publik, media, analis, investor maupun calon investor. Implementation of Public Expose in the form of presentation of HUMI's financial performance and strategy to the public, media, analysts, investors and potential investors. • Penyelenggaraan Paparan Publik 2024 dilakukan 2 kali, yaitu Paparan Publik Inisdentil yang dilaksanakan secara daring dalam bentuk *video conference call* menggunakan platform Zoom Webinar sesuai permintaan Bursa, dikarenakan HUMI mengalami peristiwa atau kejadian yang diindikasi mempengaruhi nilai efek sehingga diperlukan penjelasan oleh HUMI kepada publik. Sedangkan Paparan Publik Tahunan 2024 dilakukan dalam bentuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IE Peraturan Bursa, sehingga dianggap telah memenuhi kewajiban Paparan Publik Tahunan. Implementation of Public Expose 2024 was carried out 2 times, namely Incidental Public Expose which was carried out online in the form of a video conference call using the Zoom Webinar platform as requested by the Exchange, because HUMI experienced an event or incident that was indicated to affect the value of the securities so that an explanation was required by HUMI to the public. While the Annual Public Expose 2024 was carried out in the form of conveying information as referred to in the provisions of IE of the Exchange Regulations, so that it was considered to have fulfilled the obligation of the Annual Public Expose.

Media Sosial
Social Media

HUMI memiliki dan mengelola 4 akun media sosial yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi aktivitas HUMI seperti *brand*, jasa yang dihasilkan, tips, serta informasi lainnya. Beberapa media sosial tersebut juga memberikan respons terhadap pertanyaan *follower* baik yang sudah menjadi maupun belum menjadi pemegang saham HUMI.

HUMI owns and manages 4 social media accounts that function as a medium for conveying information on HUMI's activities such as brands, services produced, tips, and other information. Several of these social media also provide responses to follower questions, both those who are and are not yet HUMI's shareholders.

HUMI juga menggunakan media sosial sebagai bentuk transparansi informasi terkait aktivitas keuangan dan operasional HUMI. Ke-4 akun media sosial HUMI, tersebut sebagai berikut:

HUMI also uses social media as a form of transparency of information related to HUMI's financial and operational activities. HUMI's 4 social media accounts are as follows:

LinkedIn
HUMI - PT Humpuss Maritim Internasional Tbk

Facebook
Humpuss Maritim Internasional

Instagram
Humpussmaritim

Youtube
Lighthouse Seafarer Network

Siaran Pers
Press Release

HUMI juga melakukan aktivitas hubungan baik dengan media massa melalui beragam aktivitas, termasuk pendistribusian siaran pers, menjadi salah satu prioritas utama HUMI. Diyakini bahwa media massa memiliki peranan penting dalam perjalanan, pertumbuhan dan perkembangan, dan pencapaian HUMI ke depan.

HUMI also carries out good relations activities with the mass media through various activities, including the distribution of press releases, which is one of HUMI's main priorities. It is believed that the mass media has an important role in HUMI's journey, growth and development, and future achievements.

Sepanjang tahun 2024, HUMI telah mengeluarkan 12 siaran pers. Judul dan isi lengkap seluruh siaran pers HUMI dapat diakses di https://www.humi.co.id.

Throughout 2024, HUMI has issued 12 press releases. The full title and content of all HUMI's press releases can be accessed at https://www.humi.co.id.

No	Tema Siaran Pers Press Release Theme	Jumlah Distribusi Siaran Pers Number of Press Release Distributions
1	Perusahaan | Company	32
2	Keuangan | Financial	49
3	Komersial | Commercial	42
4	*Environment, Social & Governance* (ESG)	28
	Jumlah | **Total**	**151**

Kode Etik
Code of Conduct

Kepercayaan dari masyarakat dan para pelaku pasar menjadi hal penting bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Salah satu hal penting dalam membangun kepercayaan ialah dengan menerapkan etika dan perilaku segenap insan Perseroan yang bersandar pada nilai-nilai etika, prinsip-prinsip tata kelola, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan telah mengatur etika dan perilaku segenap insan Perseroan dalam Kode Etik Perseroan. Kode etik tersebut menjadi panduan dan acuan bagi segenap insan Perseroan dalam bersikap dan berperilaku secara pantas, sesuai dengan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip tata kelola, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Trust from the public and market players is important for the sustainability of the Company's business. One of the important things in building trust is to implement ethics and behavior of all Company personnel based on ethical values, governance principles, and applicable laws and regulations. Therefore, the Company has regulated the ethics and behavior of all Company personnel in the Company's Code of Conduct. The code of conduct serves as a guide and reference for all Company personnel in behaving appropriately, in accordance with ethical values, governance principles, and applicable laws and regulations.

Isi Kode Etik
Code of Conduct Contents

Kode Etik Perseroan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi atau golongan dengan kepentingan perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara sebagai langsung.

The Company's Code of Conduct regulates the following matters:

- To avoid conflicts of interest between personal or group interests and interests of the Company, directly or indirectly.

- Memberi penjelasan secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yang menyangkut segala kegiatan di luar Perseroan, kepemilikan saham, dan segala hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Memberi penjelasan secara tertulis atas kepemilikan saham dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perseroan.
- Untuk kepentingan usaha, seluruh insan Perseroan berperan dan bertanggung jawab untuk menjaga informasi Perseroan yang rahasia, terutama informasi internal yang belum atau tidak dipublikasikan ke publik, data, dokumen, atau informasi apapun yang dapat berdampak buruk terhadap bisnis Perseroan atau harga sahamnya.
- Seluruh insan Perseroan dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perseroan. Seluruh insan HUMI dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Provide written explanations to parties appointed by the Company, concerning all activities outside the Company, shares ownership, and all relationships that may cause a conflict of interest.
- Provide written explanations regarding shares ownership in business entities that became partners or competitors of the Company.
- For the benefit of the business, all Company personnel play a role and are responsible for maintaining confidential Company information, especially internal information that has not been or is not published to the public, data, documents, or any information that may have a negative impact on the Company's business or its shares price.
- All Company personnel are prohibited from abusing their authority and taking advantage, either directly or indirectly, of the knowledge obtained from the Company's business activities. All HUMI's personnel are prohibited from requesting or accepting, allowing or agreeing to receive gratification related to their positions and contrary to their obligations in accordance with applicable laws and regulations.

Pokok-pokok kode etik yang harus dipatuhi seluruh karyawan serta orang bekerja di Perusahaan dan menjadi etika dasar dalam berinteraksi secara profesional, yaitu:

The main points of the code of conduct that must be adhered to by all employees and people working in the Company and became the basic ethics in interacting professionally, namely:

01

Integritas
Integrity

Nilai dasar dan wajib dimiliki oleh setiap karyawan serta orang bekerja untuk HUMI. Dilarang melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan kebijakan, prosedur HUMI, ketentuan regulasi dan peraturan perundang-undangan, tidak mengambil keuntungan dari siapapun atau apapun, penyalahgunaan informasi rahasia, atau kegiatan operasional lainnya yang dilarang oleh aturan internal.

A core value and must be owned by every employee and people working for HUMI. It is prohibited to carry out any actions that are contrary to HUMI's policies, procedures, regulatory provisions as well as laws and regulations, not to take advantage of anyone or anything, misuse of confidential information, or other operational activities prohibited by internal rules.

02

Benturan Kepentingan
Conflicts of Interest

Karyawan dan orang yang bekerja di Perusahaan berkewajiban untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi atau golongan dengan kepentingan Perusahaan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara sebagai berikut: Memberi penjelasan secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan, yang menyangkut segala kegiatan di luar Perusahaan, kepemilikan saham, dan segala hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan memberi penjelasan secara tertulis atas kepemilikan saham dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perusahaan.

Employees and people working in the Company are obliged to avoid conflicts of interest between personal or group interests and the interests of the Company, directly or indirectly, in the following ways: Provide a written explanation to the party appointed by the Company, concerning all activities outside the Company, shares ownership, and all relationships that may give rise to a conflict of interest and provide a written explanation of shares ownership in business entities that became partners or competitors of the Company.

Kerahasiaan
Confidentiality

03

Untuk kepentingan usaha, semua karyawan Perusahaan berperan dan bertanggung jawab untuk menjaga informasi Perusahaan yang rahasia, terutama informasi internal yang belum atau tidak dipublikasikan ke publik, data, dokumen, atau informasi apapun yang dapat berdampak buruk terhadap bisnis Perusahaan atau harga sahamnya.

For business purposes, all Company employees have a role and responsibility to maintain confidential Company information, especially internal information that has not been or is not published to the public, data, documents, or any information that could have a negative impact on the Company's business or its shares price.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi
Abuse of Position and Gratification

04

Seluruh karyawan dan orang yang bekerja di Perusahaan dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung, dari pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Perusahaan untuk keuntungan pribadi, keuntungan bagi anggota keluarganya dan pihak-pihak lainnya.

All employees and people working in the Company are prohibited from abusing their authority and taking advantage, either directly or indirectly, of the knowledge obtained from the Company's business activities for personal gain, the benefit of their family members and other parties.

Penerimaan hadiah dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan mempengaruhi kemampuan dalam mengambil keputusan bisnis yang objektif.

1. Seluruh personil Perseroan harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak diperkenankan membukukan dan/atau mengubah dan/atau menghapus pembukuan, dengan maksud untuk mengaburkan transaksi.
2. Integritas Sistem.
3. Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*).
4. Sanksi Pelanggaran/Ketidakpatuhan.
5. Pengawasan Pelaksanaan dan Pemutakhiran.

Acceptance of gifts may result in a conflict of interest and affect the ability to make objective business decisions.

1. All Company personnel must present accurate and accountable data, are not permitted to record and/or change and/or delete bookkeeping, with the intention of obscuring transactions.
2. System Integrity.
3. Annual Disclosure.
4. Sanctions for Violations/Non-Compliance.
5. Supervision of Implementation and Updating.

Pernyataan Kode Etik Berlaku bagi Setiap Tingkatan di HUMI
Code of Conduct Statement Applies to Every Level at HUMI

Kode Etik Perseroan wajib dipatuhi dan diterapkan oleh segenap insan Perseroan sebagai dasar untuk membangun dan mengelola perilaku secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam dan di luar lingkungan Perusahaan. Direktur Utama Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait Kode Etik dan Perilaku yang telah disempurnakan atau diperbaharui dalam Surat Keputusan Direktur Utama tentang *Code of Conduct*.

The Company's Code of Conduct must be complied with and implemented by all Company personnel as a basis for building and managing behavior consistently in accordance with applicable provisions within and outside the Company's environment. The Company's President Director has established policies related to the Code of Ethics and Conduct that have been refined or updated in the President Director's Decree concerning the Code of Conduct.

Penandatanganan Pakta Integritas
Integrity Pact Signing

HUMI telah melakukan penandatanganan Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Komitmen Antikorupsi oleh Dewan Komisaris dan Direksi HUMI pada tanggal 26 Januari 2024 untuk tahun buku 2024. Penandatangan Pakta Integritas ini ditindaklanjuti ke seluruh jenjang organisasi melalui kewajiban atestasi Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik, dan Komitmen Antikorupsi setiap tahun oleh seluruh karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap.

HUMI has signed the Declaration of Integrity Pact, Code of Conduct and Anti-Corruption Commitment by the Board of Commissioners and Board of Directors of HUMI on January 26, 2024, for the financial year 2024. The signing of this Integrity Pact is followed up at all levels of the organization through the obligation to attest the Declaration of Integrity Pact, Code of Conduct, and Anti-Corruption Commitment every year by all employees, both permanent and non-permanent.

Sosialisasi Kode Etik
Code of Conduct Socialization

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi untuk menanamkan dan membudayakan nilai-nilai positif Kode Etik. Terkait hal itu, Perseroan telah melakukan sejumlah inisiatif sebagai berikut:

1. Terdapat *Values* HUMI, yakni *Harmony*, *Uncompromized Integrity*, *Meaningfull*, *Innovation for Growth*. Hal ini menjadi fondasi tata nilai utama yang harus dipegang teguh dan senantiasa diterapkan di HUMI.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi/*refreshment* internal perihal Kode Etik Perilaku Karyawan.
3. Mewajibkan karyawan untuk mengikuti rangkaian internalisasi *Values* HUMI.

The Company continuously conducts socialization to instill and cultivate the positive values of the Code of Conduct. In this regard, the Company has undertaken a number of initiatives as follows:

1. HUMI Values, namely Harmony, Uncompromized Integrity, Meaningfull, Innovation for Growth. This became the foundation of the core values that must be upheld and always applied in HUMI.
2. Conduct internal socialization/refreshment activities regarding the Employee Code of Conduct.
3. Require employees to follow a series of HUMI Values internalization.

Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik
Monitoring of the Implementation of the Code of Conduct

Pemantauan pelaksanaan Kode Etik Perseroan dilakukan oleh Bagian *Human Capital*. HUMI secara tegas memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, ganti kerugian, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Monitoring of the implementation of the Company's Code of Conduct is carried out by the Human Capital Division. HUMI firmly provides sanctions for employees who violate the provisions applicable in the Code of Conduct can be subject to sanctions in the form of verbal warnings, written warnings, compensation, and Termination of Employment (PHK) in accordance with applicable laws and regulations.

Kebijakan Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran
Disciplinary Enforcement Policy and Determination of Sanctions for Violations

Perseroan telah menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran kode etik, sesuai dengan jenis dan tingkatan pelanggaran yang dilakukan. Semua benturan kepentingan atau pelanggaran harus dilaporkan dan ditangani oleh masing-masing karyawan dengan ketentuan:

- Karyawan melaporkan kepada atasan dan dievaluasi oleh atasan langsung dengan tindasan kepada divisi yang membidangi *Human Capital*.
- Direksi, melaporkan kepada dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris, melaporkan kepada dan dievaluasi oleh Pemegang Saham.

The Company has set sanctions for every violation of the code of conduct, according to the type and level of violation committed. All conflicts of interest or violations must be reported and handled by each employee with the following provisions:

- Employees report to superiors and are evaluated by their direct superiors with oversight to the division in charge of Human Capital.
- Board of Directors, reports to and is evaluated by the Board of Commissioners.
- Board of Commissioners, reports to and is evaluated by Shareholders.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik, tidak saja berlaku untuk karyawan darat, namun berlaku juga dengan awak kapal.

Sanctions for violations of the code of conduct not only apply to onshore employees, but also to crew members.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya perilaku indisipliner dan memberikan efek jera kepada para pelanggar kode etik. Praktik pemberian sanksi dikategorikan ke dalam 3 jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan, berupa Surat Peringatan Tertulis.
2. Sanksi Sedang, berupa Tidak Dipekerjakan Kembali.
3. Sanksi Berat, berupa Tidak Dipekerjakan Kembali.

This is done as an effort to prevent indiscipline behavior and provide a deterrent effect to violators of the code of conduct. The practice of giving sanctions is categorized into 3 types of sanctions as follows:

1. Mild Sanctions, in the form of a Written Warning Letter.
2. Moderate Sanctions, in the form of Termination of Employment.
3. Severe Sanctions, in the form of Termination of Employment.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik Tahun 2024
Number of Code of Conduct Violations in 2024

Selama tahun 2024 terdapat 1 karyawan yang dikenakan sanksi dengan rincian sebagai berikut:

During 2024, there were 1 employees who were subject to sanctions with the following details:

Jenis Pelanggaran Type of Violation	2024	2023
Ringan (Pembinaan tertulis) Mild (Written Warning)	0	1
Sedang (Pembinaan tertulis) Moderate (Written Warning)	1	0
Berat (Peringatan terakhir/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)) Severe (Final Warning/Termination of Employment)	0	0

Sedangkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh awak kapal selama tahun 2024 terdapat 0 awak kapal yang dikenakan sanksi yaitu sebagai berikut:

Meanwhile, the number of violations committed by the crews during 2024 amounted to 0 the crews who were subject to sanctions were as follows:

Jenis Pelanggaran Type of Violation	2024	2023
Ringan (Pembinaan tertulis) Mild (Written Warning)	0	2
Sedang (Pembinaan tertulis) Moderate (Written Warning)	0	0
Berat (Peringatan terakhir/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)) Severe (Final Warning/Termination of Employment)	0	2

Kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang Dalam
Insider Trading Prevention Policy

Kebijakan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam transaksi pribadi saham oleh karyawan dan manajemen (dalam hal ini anggota Dewan Komisaris dan Direksi) HUMI mengatur adanya periode *Blackout*, yaitu pelarangan seluruh karyawan serta manajemen untuk melakukan kegiatan transaksi dalam bentuk saham pada periode-periode tertentu.

Periode *Blackout* wajib diumumkan kepada seluruh karyawan HUMI, selama kurun waktu 10 hari kerja sebelum HUMI menyampaikan keterbukaan informasi material atau periode dimulai 1 bulan sebelum menyampaikan keterbukaan informasi material dan berakhir 2 hari setelah keterbukaan informasi material tersebut. Juga termasuk periode lainnya yang ditentukan oleh Direksi sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi material.

The Insider Trading Policy in personal shares transactions by employees and management (in this case members of the Board of Commissioners and Board of Directors) of HUMI regulates the existence of a Blackout period, namely a prohibition on all employees and management from carrying out transaction activities in the form of shares during certain periods.

The Blackout Period must be announced to all HUMI's employees, for a period of 10 working days before HUMI delivers disclosure of material information or a period starting 1 month before delivering disclosure of material information and ending 2 days after the disclosure of material information. Also includes other periods determined by the Board of Directors in connection with the delivery of the disclosure of material information.

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

Upaya peningkatan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS). Kebijakan terkait WBS telah diberlakukan Perseroan sebagai sistem kontrol terhadap penyelenggaraan kegiatan kerja Dewan Komisaris, Direksi, serta segenap karyawan Perseroan, baik darat maupun awak kapal. Perseroan mendorong partisipasi dari setiap insan Perseroan untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran melalui sistem WBS. Informasi yang dapat dilaporkan melalui WBS antara lain:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan perpajakan.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan.
3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
4. Kecurangan (*fraud*).
5. Gratifikasi.
6. Pelanggaran Kode Etik Perseroan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya.
7. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan Perseroan.
8. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap Perseroan atau merugikan kepentingan Perseroan.
9. Pelanggaran prosedur operasi standar Perseroan, terutama terkait dengan pengadaan barang atau jasa serta pemberian manfaat dan renumerasi.

Efforts to improve the implementation of good corporate governance principles, one of which is by implementing a Whistleblowing System (WBS). The Company has implemented policies related to WBS as a control system for the implementation of work activities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees of the Company, both onshore and crews. The Company encourages the participation of every employee of the Company to submit information related to violations through the WBS system. Information that can be reported through WBS includes:

1. Deviation from applicable laws and regulations including tax provisions.
2. Abuse of position for interests other than the Company.
3. Corruption, Collusion, and Nepotism.
4. Fraud.
5. Gratification.
6. Violation of the Company's Code of Conduct or violation of general norms of decency.
7. Actions that endanger occupational safety and health, or endanger the security of the Company.
8. Actions that may cause financial or non-financial losses to the Company or harm the interests of the Company.
9. Violation of the Company's standard operating procedures, especially related to the procurement of goods or services and the provision of benefits and remuneration.

Penyampaian Laporan Pelanggaran
Submission of Violation Reports

Pelaporan melalui WBS difasilitasi melalui saluran pelaporan yang dikelola oleh Perseroan, disampaikan melalui:

1. E-mail: ayolapor@humi.co.id
2. Laporan dalam bentuk *hard copy* dapat dikirimkan ke alamat:
   Tim Pengelola WBS
   Mangkuluhur City Tower One Lantai 27
   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
   Jakarta 12930, Indonesia

Reporting via WBS is facilitated through reporting channels managed by the Company, delivered via:

1. E-mail: ayolapor@humi.co.id
2. Reports in hard copy can be sent to the following address:

   WBS Management Team
   Mangkuluhur City Tower One 27th Floor
   Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
   Jakarta 12930, Indonesia

Mekanisme Penanganan Pengaduan Melalui Saluran WBS
Complaints Handling Mechanism Through WBS Channels

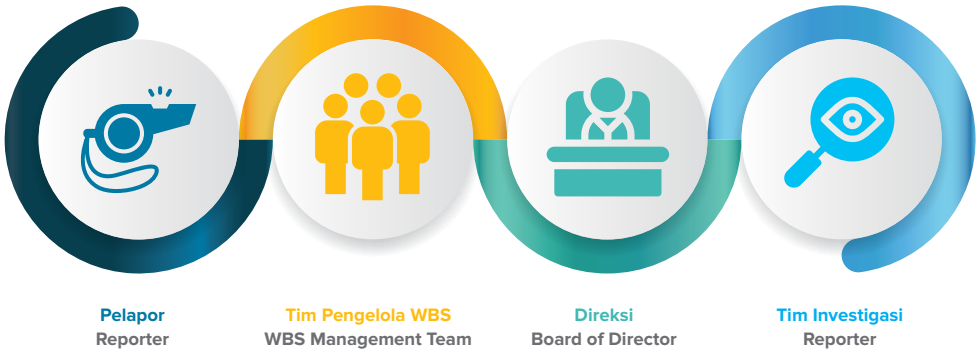

Perlindungan bagi Pelapor
Protection for Whistleblower

Tim WBS bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan bagi pelapor, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.

Sebagaimana diatur dalam kebijakan internal HUMI, manajemen berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas saat melapor ataupun saat laporannya ditindaklanjuti oleh unit yang melakukan investigasi. Seluruh nama/identitas/*e-mail*/ nomor telepon pelapor hanya dapat diberikan atas izin dari pihak pelapor.

Setiap pelapor wajib memiliki alasan yang kuat dalam menyampaikan laporan pelanggaran atau potensi pelanggaran, serta wajib memiliki itikad yang baik. HUMI memberikan kebebasan dan tidak mewajibkan pelapor untuk menyertakan identitasnya maupun bukti atas pelanggaran yang dilaporkan. Sementara bukti berupa data, informasi atau indikasi awal atas terjadinya pelanggaran, dapat disertakan saat pelaporan.

The WBS team is responsible for implementing the whistleblower protection program, especially aspects of confidentiality and ensuring the security of the whistleblower.

As stipulated in HUMI's internal policy, management is committed to providing protection for the whistleblower by maintaining the confidentiality of the identity when reporting or when the report is followed up by the unit conducting the investigation. All names/identities/e-mails/telephone numbers of the whistleblower can only be provided with the permission of the whistleblower.

Every whistleblower must have a strong reason in submitting a report of a violation or alleged violation, and must have good intentions. HUMI provides freedom and does not require whistleblowers to include their identity or evidence of the reported violation. Meanwhile, evidence in the form of data, information or early indications of a violation can be included when reporting.

Penanganan Pengaduan
Complaints Handling

Laporan atau aduan yang diterima, selanjutnya dilakukan klarifikasi awal Tim Pengelola WBS, yang meliputi identitas pelapor dan bukti dokumen. Berikutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pelanggaran, apabila ada indikasi awal pelanggaran maupun tidak, maka laporan disampaikan kepada Direktur Utama.

Indikasi awal adalah informasi yang disampaikan dalam pelaporan meliputi:
1. Permasalahan.
2. Siapa yang terlibat.
3. Bentuk dan besar kerugian.
4. Kapan dan tempat terjadi.

Selanjutnya, dilakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang dimiliki atas laporan dugaan pelanggaran menetapkan atau menyimpulkan apakah laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti ke tahap investigasi atau dihentikan.

The reports or complaints received are then subject to initial clarification by the WBS Management Team, which includes the identity of the whistleblower and documentary evidence. Next, an examination of the violation report is carried out, if there is an initial indication of a violation or not, the report is submitted to the President Director.

Early indications are information conveyed in the report including:
1. Issues.
2. Parties involved.
3. Nature and extent of the loss.
4. When and where the incident occurred.

Next, an initial evaluation/review is carried out according to the data held regarding the report of alleged violations to determine or conclude whether the report of alleged violations will be followed up to the investigation stage or stopped.

Selain itu, Tim Pengelola WBS bisa melakukan komunikasi dengan pelapor jika diperlukan dalam rangka:

- Melakukan klarifikasi dan evaluasi apakah materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan relevan dan berhubungan secara langsung dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi).
- Pengumpulan bukti-bukti pendukung sebagai bahan analisa terjadinya tindak pelanggaran.
- Setelah itu, melakukan pembahasaan atau diskusi dengan Tim Investigasi atas perkembangan pelaksanaan investigasi dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Investigasi dalam pelaksanaan investigasi.
- *Draft* laporan hasil investigasi dan memberikan masukan kepada Tim investigasi dalam menyusun *draft* final laporan hasil investigasi.

Selanjutnya, tim melakukan penyampaian laporan hasil investigasi kepada Direktur Utama, dan rencana tindak lanjut atas hasil investigasi.

In addition, the WBS Management Team can communicate with the whistleblower if necessary in order to:

- Conduct clarification and evaluation whether the reported alleged violation material is relevant and directly related to matters related to the Company (not personal matters).
- Collect supporting evidence as material for analysis of the occurrence of violations.
- After that, conduct a discussion with the Investigation Team on the progress of the investigation implementation and provide input as a consideration for the Investigation Team in implementing the investigation.
- Draft the investigation report and provide input to the Investigation Team in preparing the final draft of the investigation report.

Next, the team submits a report on the results of the investigation to the President Director, and a follow-up plan for the results of the investigation.

Pihak yang Mengelola Pengaduan
Parties Managing Complaints

Berdasarkan kebijakan internal Perseroan, pihak yang ditunjuk untuk mengelola pengaduan saat ini adalah terdiri dari:

1. Tim Perlindungan Pelapor yang menerima pelaporan pelanggaran yang beridentitas.
2. Tim Investigasi, atas perintah Direktur Utama Perseroan dan melalui surat tugas untuk melaksanakan investigasi terhadap pengaduan tersebut. Kedua tim tersebut dirahasiakan, ditunjuk langsung oleh Direksi HUMI.

Based on the Company's internal policy, the parties appointed to manage complaints currently consist of:

1. The Whistleblower Protection Team that receives reports of violations with identity.
2. The Investigation Team, on the orders of the Company's President Director and through a letter of assignment to carry out an investigation into the complaint. Both teams are confidential, appointed directly by HUMI's Board of Directors.

Peran Dewan Komisaris
Role of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan atas penerapan sistem pelaporan pelanggaran HUMI (*whistleblowing system*) berupa:

1. Dewan Komisaris menjadi pihak penerima laporan bilamana indikasi pelanggaran dilakukan oleh Direktur Utama, Anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Utama.
2. Dewan Komisaris menandatangani Pakta Integritas dimana didalamnya terdapat komitmen untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan HUMI.

The Board of Commissioners plays an active role in the implementation and supervision of the application of the HUMI's whistleblowing system in the form of:

1. The Board of Commissioners becomes the recipient of the report if there is an indication of violation committed by the President Director, Members of the Board of Commissioners and the President Commissioner.
2. The Board of Commissioners signs the Integrity Pact which contains a commitment to play an active role in efforts to prevent and eradicate fraud and is willing to report in the event of fraud in HUMI's environment.

Jumlah Laporan dan Tindak Lanjutnya
Number of Reports and Follow-Up

Sepanjang tahun 2024 tidak ada informasi pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS.

Throughout 2024, there was no complaint information received through the WBS mechanism.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Governance Guidelines for Public Companies

Terdapat 5 aspek, 8 prinsip, serta 25 rekomendasi Tata Kelola yang disampaikan oleh OJK, sebagaimana yang tertuang dalam POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. HUMI telah menerapkan aspek, prinsip, dan rekomendasi tersebut berdasarkan pendekatan "*comply or explain*" dengan informasi secara rinci, sebagai berikut:

There are 5 aspects, 8 principles, and 25 recommendations of Governance submitted by the Financial Services Authority (OJK), as stated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies and the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies. HUMI has implemented these aspects, principles, and recommendations based on the "comply or explain" approach with detailed information, as follows:

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham **Relationship of the Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights**	
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **Increasing the Value of Holding General Meetings of Shareholders (GMS)**	
Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham. Public Companies have technical methods or procedures for collecting votes (voting), both openly and confidentiality, which prioritize independence and the interests of Shareholders.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*), Perusahaan saat ini telah melakukan *voting* secara terbuka sebagaimana yang telah dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada bulan Juni 2024. Prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat atas setiap agenda dalam RUPS Tahunan. **Fulfilled** The Company has a technical method or procedure for voting, the Company is currently conducting open voting as was done at the Annual General Meeting of Shareholders held in June 2024. The technical procedure for voting undertaken is by providing an opportunity for all shareholders to submit questions and/or opinions on each agenda at the Annual GMS.
Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.	**Terpenuhi** Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris HUMI hadir dalam RUPS Tahunan yang telah diselenggarakan pada bulan Juni 2024. **Fulfilled** All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of HUMI were present in the Annual GMS which was held in June 2024.
Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka. Summary of minutes of the GMS is available on the website of the Public Company.	**Terpenuhi** HUMI mengunggah Ringkasan Risalah RUPS pada hari yang sama seusai penyelenggaraan RUPS ke situs web HUMI. Ringkasan Risalah RUPS baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. **Fulfilled** HUMI uploads the Summary of Minutes of the GMS on the same day after the GMS is held to the HUMI's website. The Summary of Minutes of the GMS is available both in Indonesian and English.

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor **Improving the Communication Quality of the Public Company with the Shareholders or Investors**	
Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor. Public Company has a communication policy with Shareholders or investors.	**Terpenuhi** Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham yang saat ini telah dilakukan oleh HUMI di antaranya melalui pelaksanaan RUPS yang akan datang, Paparan publik, publikasi Laporan Keuangan Triwulan, serta melakukan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu. HUMI juga menyediakan informasi alamat kantor pusat dan cabang, alamat *e-mail* dan nomor telepon baik dalam situs web maupun Laporan Tahunan sebagai sarana bagi Pemegang Saham maupun Pemangku Kepentingan lainnya agar dapat melakukan komunikasi dengan HUMI dengan mudah. **Fulfilled** The Communication Policy with Shareholders that has currently been implemented by HUMI includes holding upcoming GMS, Public Expose, publication of Quarterly Financial Statements, and providing accurate and timely information disclosure. HUMI also provides information on the addresses of head offices and branch offices, e-mail addresses and telephone numbers both on the website and the Annual Report as a means for Shareholders and other Stakeholders to easily communicate with HUMI.
Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs web. Public Company discloses the communication policy of the Public Company with Shareholders or investors on the website.	**Terpenuhi** Telah terpenuhi dan tertuang dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi HUMI No. 10/PEDOMAN-GCG/XII/2023, pedoman telah tersedia di situs web perusahaan. **Fulfilled** It has been fulfilled and stated in HUMI's Information Disclosure Policy No. 10/PEDOMAN-GCG/XII/2023, the guidelines are available on the Company's website.
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris **Function and Role of the Board of Commissioners**	
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris **Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners**	
Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the conditions of the Public Company.	**Terpenuhi** Dalam pedoman Dewan Komisaris HUMI sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris No. 02/GCG/IX/2022, tercantum persyaratan nominasi anggota Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan HUMI. Per 3 November 2022, Dewan Komisaris HUMI berjumlah 2 orang, dan salah satunya merupakan komisaris Independen. **Fulfilled** In HUMI's Board of Commissioners Charter as stated in the Board of Commissioners Charter No. 02/GCG/IX/2022, the requirements for nomination of members of the Board of Commissioners are listed by considering the needs, conditions and capabilities of HUMI. As of November 3, 2022, HUMI's Board of Commissioners consists of 2 people, one of whom is an Independent Commissioner.
Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	**Terpenuhi** Dewan Komisaris HUMI memiliki latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis HUMI. Hal tersebut dapat dilihat melalui profil masing-masing Dewan Komisaris yang tertuang dalam *website* Perusahaan. **Fulfilled** HUMI's Board of Commissioners has a diverse background in terms of expertise, knowledge that aims to support the development of HUMI's business. This can be seen through the profile of each Board of Commissioners contained in the Company's website.
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris **Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners**	
Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.	**Terpenuhi** Penilaian Kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang dapat diakses melalui situs web HUMI. **Fulfilled** The Board of Commissioners' Performance Assessment is regulated in the Board of Commissioners Charter and the Nomination and Remuneration Committee Charter which can be accessed via HUMI's website.

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Public Company.	**Terpenuhi** Penilaian kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam bagian Tata Kelola Perusahaan yang baik. **Fulfilled** The performance assessment of the Board of Commissioners has been regulated in the Board of Commissioners Charter and the Nomination and Remuneration Committee Charter disclosed in the Good Corporate Governance section.
Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes.	**Terpenuhi** Pedoman Dewan Komisaris HUMI No. 02/GCG/IX/2022 (*point* 4.c.6) secara tegas menyatakan jabatan Dewan Komisaris berakhir apabila terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan. **Fulfilled** HUMI's Board of Commissioners Charter No. 02/GCG/IX/2022 (point 4.c.6) explicitly states that the Board of Commissioners' position ends if they are involved in financial crimes.
Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the Nomination and Remuneration function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors.	**Terpenuhi** Kebijakan Suksesi diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkap dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan ini. **Fulfilled** The Succession Policy is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter and disclosed in the Report on Implementation of Duties of the Nomination and Remuneration Committee in this Annual Report.
Fungsi dan Peran Direksi **Function and Role of the Board of Directors**	
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi **Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors**	
Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of the number of members of the Board of Directors takes into account the conditions of the Public Company, as well as the effectiveness in decision making.	**Terpenuhi** Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah Direksi HUMI per tanggal 2 November 2022 hingga kini adalah 2 orang. **Fulfilled** The Board of Directors is appointed and dismissed by the GMS. The determination of the number of members of the Board of Directors has taken into account the conditions of the Public Company and the effectiveness of decision-making referring to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. The number of HUMI's Board of Directors as of November 2, 2022 until present, amounting to 2 people.
Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge, and experience required.	**Terpenuhi** Direksi HUMI memiliki latar belakang yang beragam dalam hal keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang bertujuan untuk mendukung perkembangan bisnis HUMI. Hal tersebut dapat dilihat melalui profil masing-masing Direksi yang tercantum dalam *website* Perusahaan. **Fulfilled** HUMI's Board of Directors has a diverse background in terms of expertise, knowledge and experience aimed at supporting HUMI's business development. This can be seen through the profile of each Director listed on the Company's website.
Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors who oversee the field of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the accounting field.	**Terpenuhi** Direktur Utama membawahi bidang akutansi dan keuangan, Direktur Utama memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang akutansi dan keuangan, memenuhi kriteria memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akutansi dan/atau keuangan. **Fulfilled** The President Director is in charge of accounting and finance, the President Director has expertise and knowledge in the field of accounting and finance, meets the criteria of having expertise and/or knowledge in the field of accounting and/or finance.

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi **Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors**	
Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.	**Terpenuhi** Penilaian kinerja Direksi diatur dalam Pedoman Direksi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang dapat diakses melalui situs *website* HUMI. **Fulfilled** The performance assessment of the Board of Directors is regulated in the Board of Directors Charter and the Nomination and Remuneration Committee Charter which can be accessed through HUMI'swebsite.
Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the Annual Report of the Public Company.	**Terpenuhi** Penilaian Kinerja Direksi telah diatur dalam Pedoman Direksi dan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam bagian Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. **Fulfilled** The performance assessment of the Board of Directors has been regulated in the Board of Directors Charter and the Nomination and Remuneration Committee Charter disclosed in the Corporate Governance section of this Annual Report.
Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes.	**Terpenuhi** Pedoman Direksi HUMI No. 03/GCG/IX/2022 (*point* 4.c.6) secara tegas menyatakan jabatan Direksi berakhir apabila terlibat dalam tindakan kejahatan keuangan. **Fulfilled** HUMI's Board of Directors Charter No. 03/GCG/IX/2022 (point 4.c.6) explicitly states that the Board of Directors' position ends if they are involved in financial crimes.
Partisipasi Pemangku Kepentingan **Stakeholders Participation**	
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan **Improving Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation**	
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Company has a policy to prevent insider trading.	**Terpenuhi** Untuk mencegah terjadinya *Insider Trading*, HUMI telah memiliki Kebijakan *Insider Trading* yang telah diunggah ke dalam situs *website* HUMI. Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan aturan dan mengidentifikasi adanya potensi praktik-praktik perdagangan efek dalam kategori manipulasi pasar. **Fulfilled** To prevent Insider Trading, HUMI has an Insider Trading Policy that has been uploaded to HUMI's website. This policy aims to establish rules and identify potential securities trading practices in the category of market manipulation.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-*fraud*. Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki kebijakan antikorupsi dan anti-*fraud* dan telah disosialisasikan secara intensif dalam internal HUMI Grup. Agar Perusahaan bersih dari tindakan korupsi serta kecurangan karena dapat mengganggu stabilitas Perusahaan, merugikan keuangan Perusahaan dan menghambat pertumbuhan serta kelangsungan usaha Perusahaan yang dituntut untuk dapat melakukan efisiensi yang tinggi. **Fulfilled** The Company has anti-corruption and anti-fraud policies and have been intensively socialized within HUMI's Group. So that the Company is free from corruption and fraud because it can disrupt the stability of the Company, harm the Company's finances and hinder the growth and sustainability of the Company's business which is required to be able to carry out high efficiency.

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public Company has a policy on supplier or vendor selection and capacity building.	**Terpenuhi** HUMI telah memiliki kebijakan dengan Pihak Ketiga untuk penyediaan barang atau jasa serta Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa. Tata cara hubungan dengan Pemasok telah diatur lebih lanjut dalam kebijakan Komunikasi, dimana dalam proses pengadaan barang dan jasa, HUMI wajib melakukan dengan cara yang adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. **Fulfilled** HUMI has a policy with Third Parties for the provision of goods or services as well as the Procedure for Procurement of Goods and Services. The procedure for relations with Suppliers have been further regulated in the Communication policy, where in the procurement process for goods and services, HUMI is required to do so in a fair, transparent and accountable manner in accordance with applicable laws and regulations and the principles of Good Corporate Governance.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Public Company has a policy on fulfilling creditor rights.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pemenuhan Hak-hak Kreditur dan kewajiban kewajiban HUMI dalam melakukan pemenuhan kepada Hak-hak Kreditur dengan mengatur penggunaan modal kerja dan fasilitas yang diberikan oleh kreditur secara akuntabel, transparan dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Kebijakan No. 07/PEDOMAN-GCG/XII/2023, untuk menjaga kepercayaan antara HUMI dengan krediturnya. **Fulfilled** The Company has a Creditor Rights Fulfillment Policy and HUMI's obligations in fulfilling Creditor Rights by regulating the use of working capital and facilities provided by creditors in an accountable, transparent and efficient manner as stated in Policy No. 07/PEDOMAN-GCG/XII/2023, to maintain trust between HUMI and its creditors.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*. Public Company has a whistleblowing system policy.	**Terpenuhi** Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang dimaksudkan untuk memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan Perusahaan untuk melaporkan penyimpangan atau pelanggaran yang berkaitan dengan Perseroan, baik yang terjadi di unit kerjanya sendiri, maupun di lingkungan kerja sekitarnya. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor. **Fulfilled** The Company has a whistleblowing system that is intended to facilitate all Company stakeholders to report deviations or violations related to the Company, whether occurring in their own work units or in the surrounding work environment. The Company guarantees the confidentiality of identities and provides protection to the whistleblower.
Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Company has a policy of providing long-term incentives to the Board of Directors and employees.	**Penjelasan** Perusahaan sedang dalam proses merumuskan kebijakan pemberian insentif jangka panjang (*Long Term Incentive Plan*) kepada Direksi dan karyawan yang didasarkan atas pencapaian kinerja tahun tertentu. Insentif jangka panjang dilakukan dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas yang akan berdampak pada peningkatan kinerja Perseroan. **Explanation** The Company is in the process of formulating a policy for providing long-term incentives (Long Term Incentive Plan) to the Board of Directors and employees based on the achievement of performance in a certain year. Long-term incentives are carried out in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve performance or productivity which will have an impact on improving the Company's performance.

Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Sarana Means
Keterbukaan Informasi **Disclosure of Information**	
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi **Improving the Disclosure of Information**	
Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company utilizes the use of information technology more widely in addition to website as a medium for disclosure of information.	**Terpenuhi** Selain situs web, HUMI memanfaatkan teknologi informasi lainnya seperti wawancara TV, media cetak, media sosial sebagai saluran media untuk menyampaikan keterbukaan informasi. Sebagaimana diungkapkan pada halaman 85 Laporan Tahunan ini. **Fulfilled** In addition to the website, HUMI utilizes other information technologies such as TV interviews, print media, social media as media channels to convey disclosure of information. As stated on page 85 of this Annual Report.
Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Public Company's Annual Report discloses the ultimate beneficial owners in the shares ownership of the Public Company of at least 5%, in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owners in the shares ownership of the Public Company through the Major and Controlling Shareholders.	**Terpenuhi** HUMI sudah memenuhi, sebagaimana diungkapkan pada halaman 75 Laporan Tahunan ini. **Fulfilled** HUMI has fulfilled, as stated on page 75 of this Annual Report.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

HUMI melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui kegiatan operasional yang bertanggung jawab, membentuk sumber daya manusia yang unggul, mengutamakan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja, serta menciptakan nilai bagi sesama. Informasi tentang kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan diungkapkan secara terpisah dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) tahun 2024. Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

HUMI carries out social and environmental responsibilities through responsible operational activities, forming superior human resources, prioritizing occupational protection, security, and safety, as well as creating value for others. Information on the Company's social and environmental responsibility activities is disclosed separately in the 2024 Sustainability Report. The report is an integral part of this Annual Report.

GRIYA CIREBON

06

Laporan Keuangan Konsolidasi

Consolidated Financial Report

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2024
and for the year then ended
with independent auditor's reports

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Statement Letter of the Board of Directors*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6 - 7	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 104	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK

STATEMENT OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2024 AND 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini : / *We, the undersigned below:*

1. Nama	:	Tirta Hidayat	:	*Name*
Alamat kantor	:	Mangkuluhur City Tower One 27th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.. 1 – 3, Jakarta Selatan, 12930	:	*Office address*
Alamat domisili atau sesuai KTP	:	Jl. Kenari II/G. 133 RT 002/ RW 004 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen Jakarta Pusat	:	*Domicile address or address according to ID*
Nomor telepon	:	021-50933159	:	*Telephone number*
Jabatan	:	Direktur Utama/*President Director*	:	*Title*
2. Nama	:	Dedi Hudayana	:	*Name*
Alamat kantor	:	Mangkuluhur City Tower One 27th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.. 1 – 3, Jakarta Selatan 12930	:	*Office address*
Alamat domisili atau sesuai KTP	:	Jl. Buluh Perindu II, No. 20-21. RT 015/ RW 006 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur	:	*Domicile address or address according to ID*
Nomor telepon	:	021-50933159	:	*Telephone number*
Jabatan	:	Direktur/*Director*	:	*Title*

menyatakan bahwa: / *declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("Perseroan") dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan dan entitas anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("the Company") and its subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
   b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This statement is made truthfully.*

Jakarta, 28 Maret 2025/ *Jakarta, 28 March 2025*
Atas nama dan mewakili Direksi/ *for and on behalf of the Directors*

Tirta Hidayat	**Dedi Hudayana**
Direktur Utama/*President Director*	Direktur/*Director*

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. "Perseroan" dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Humpuss Maritim InternasionalTbk. (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Purwantono, Sungkoro & Surja
Registered Public Accountants KMK No. 603/KM.1/2015
A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Pengujian penurunan nilai kapal

Impairment assessment of vessels

Penjelasan atas hal audit utama:

Description of the key audit matter:

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup menyajikan kapal konsolidasiannya (bagian dari aset tetap konsolidasian) dengan nilai tercatat sebesar AS$123 juta, yang merupakan 41% dari total aset konsolidasian. Sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 3l dan catatan 12 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, nilai tercatat dari kapal konsolidasian ditelaah untuk penurunan nilai ketika terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat terpulihkan sepenuhnya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Hal ini diidentifikasi sebagai hal audit utama karena nilai kapal konsolidasian yang material dan bahwa audit atas penurunan nilai kapal konsolidasian merupakan hal yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan signifikan karena hal tersebut melibatkan penggunaan asumsi signifikan tertentu mengenai nilai wajar dan biaya pelepasan kapal.

As of December 31, 2024, the Group presented its consolidated vessels (part of consolidated fixed assets) with a carrying amount of US$123 million, which represents 41% of the consolidated total assets. As described in Notes 3l and notes 12 to the accompanying consolidated financial statements, the carrying amount of consolidated vessels is tested for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that carrying amount may not be fully recoverable as required by Indonesian Financial Accounting Standards. This matter was identified as a key audit matter due to the material amount of the consolidated vessels and that auditing the impairment of vessels is complex and requires significant judgment because it involves the use of certain significant assumptions regarding fair value and costs of disposal of the vessels.

Respons audit:

Audit response:

Kami memeroleh suatu pemahaman mengenai proses Grup atas penilaian tahunan penurunan nilai kapal konsolidasian dan menguji kelengkapan dan keakurasian data relevan yang digunakan dalam penilaian tersebut.

We obtained an understanding of Group's process of assessing the annual impairment of its consolidated vessels and tested the completeness and accuracy of the relevant data used in such assessment.

Untuk menguji estimasi jumlah terpulihkan dari kapal konsolidasian, kami melaksanakan prosedur audit yang meliputi, antara lain, penilaian atas indikasi penurunan nilai dan metodologi yang digunakan, serta pengujian atas asumsi signifikan dan data yang mendasari penilaian tersebut yang digunakan oleh Grup dalam melakukan analisisnya. Selain itu, kami melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam mengevaluasi data pasar kapal sejenis yang digunakan oleh pakar manajemen dengan membandingkan spesifikasi kapal tersebut dengan spesifikasi Grup dan membandingkan harga pasar kapal yang sebanding dengan sumber data yang dapat diakses publik. Kami juga menilai kecukupan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan konsolidasian.

To test the estimated recoverable amount of the consolidated vessels, we performed audit procedures which include, among others, assessing the impairment indicators and methodologies used, and testing the significant assumptions and underlying data used by the Group in its analysis. In addition, we involved our auditor's internal expert to assist us in evaluating the market data of comparable vessels used by management's expert by comparing the vessels specifications to those of the Group and comparing market prices of the comparable vessels to data sources accessible to public. We also assessed the adequacy of the disclosures regarding fixed assets in the consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanaannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2024 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00497/2.1032/AU.1/06/1294-4/1/III/2025 (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Said Amru
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1294/*Public Accountant Registration No. AP.1294*

28 Maret 2025/*March 28, 2025*

00497

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	41.139.250	3g,3r,5a,46	41.373.913	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	3.599.090	3g,3r,5b,46	-	*Time deposits*
Piutang usaha:				*Trade receivables:*
Pihak-pihak ketiga, neto	27.087.013	3r,7,46	13.065.248	*Third parties, net*
Pihak-pihak berelasi	1.784.367	3r,7,37,46	7.229.481	*Related parties*
Piutang lainnya:				*Other receivables:*
Pihak-pihak ketiga, neto	139.688	3r,8,46	9.900.624	*Third parties, net*
Persediaan	7.173.522	9	4.823.036	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	1.262.093	29a	1.747.739	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	1.372.361	10	1.601.898	*Other current assets*
Total aset lancar	83.557.384		79.741.939	*Total current assets*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Dana yang dibatasi penggunaannya	3.172.513	3g,3r,6,46	1.335.908	*Restricted funds*
Piutang kepada pihak berelasi	21.104.536	3r,37,46	19.810.523	*Due from related parties*
Pinjaman kepada pihak berelasi	9.722.000	3r,37,46	9.722.000	*Loan to a related party*
Aset hak guna, neto	41.690.694	3l,13	38.507.004	*Right of use asset, net*
Aset tetap, neto	123.118.403	3j,12	105.618.759	*Fixed assets, net*
Investasi pada entitas asosiasi	14.364.628	11	13.015.181	*Investment in an associate entitty*
Aset pajak tangguhan	203.510	3o,4,29d	116.047	*Deferred tax assets*
Goodwill	742.565	3c,14	778.499	*Goodwill*
Uang jaminan	383.992	15	476.743	*Refundable deposits*
Aset tidak lancar lainnya	2.473.107	16	2.609.895	*Other non-current assets*
Total aset tidak lancar	216.975.948		191.990.559	*Total non-current assets*
TOTAL ASET	**300.533.332**		**271.732.498**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha:				*Trade payables:*
Pihak-pihak ketiga, neto	11.288.671	3r,17,46	13.195.183	*Third parties, net*
Pihak berelasi	10.040.602	3r,17,37,46	7.814.095	*Related party*
Utang pajak	841.837	3o,29b	507.904	*Taxes payable*
Utang dividen	222.707	18	-	*Dividend payable*
Utang lain-lain -				*Other payables -*
pihak-pihak ketiga	1.456.066	3r,19,46	72.704	*third parties*
Liabilitas imbalan kerja				*Short-term employee*
jangka pendek	8.494	3q,26,46	13.760	*benefit liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	8.748.281	3r,20,46	9.764.987	*Accrued expenses*
Pendapatan ditangguhkan	-	3n,21	34.834	*Deferred income*
Liabilitas kontrak:				*Contract liabilities:*
Pihak-pihak ketiga	406.069	22	227.198	*Third parties*
Pinjaman bank jangka pendek	3.127.662	3r,25,46	1.889.702	*Short-term bank loans*
Bagian lancar atas liabilitas				*Current maturities of*
jangka panjang:				*long-term liabilities:*
Liabilitas sewa	6.508.002	3l,23	5.320.993	*Lease liabilities*
Utang pembiayaan konsumen	147.087	3r,24,46	74.032	*Consumer finance lease*
Pinjaman bank jangka panjang	10.563.650	3r,25,46	5.120.775	*Long-term bank loans*
Total liabilitas jangka pendek	53.359.128		44.036.167	*Total current liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang, setelah				*Long-term liabilities, net of*
bagian tidak lancar:				*current portion:*
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	3r,28,46	19.442.397	*Loan from third parties*
Liabilitas sewa	23.247.598	3l,23,46	25.240.846	*Lease liabilities*
Utang pembiayaan konsumen	245.896	24	256.804	*Consumer finance lease*
Pinjaman bank jangka panjang	28.737.044	3r,25,46	15.776.545	*Long-term bank loans*
Liabilitas imbalan kerja				*Long-term employee*
jangka panjang	2.060.080	3q,27	2.006.465	*benefits liabilities*
Total liabilitas jangka panjang	73.733.015		62.723.057	*Total non-current liabilities*
TOTAL LIABILITAS	**127.092.143**		**106.759.224**	***TOTAL LIABILITIES***

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to equity holders of the parent entity*
Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham				*Share capital - par value of Rp100 (full amount) per share*
Modal dasar -				*Authorized -*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 18.046.514.360 (2023: 18.046.450.000) saham	120.391.500	32	120.391.095	*Issued and fully paid - 18,046,514,360 (2023: 18,046,450,000) shares*
Tambahan modal disetor	(51.084.818)	33	(51.085.223)	*Additional paid-in capital*
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	9.965.041	34	9.965.041	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Penghasilan komprehensif lain:				*Other comprehensive income:*
Selisih kurs	(3.557.706)	35	(1.624.308)	*Foreign exchange translation*
Pengukuran kembali imbalan pasti	80.454	35	(22.559)	*Remeasurement of defined benefit plan*
Bagian laba neto dari entitas asosiasi	2.291.179	35	1.567.876	*Equity in net gain of associated company*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Ditentukan penggunaannya	10.000		-	*Appropriated -*
- Belum ditentukan penggunaannya	73.534.539		63.213.217	*Unappropriated -*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	151.630.189		142.405.139	*Total equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	21.811.000	3b,30	22.568.135	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	**173.441.189**		**164.973.274**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**300.533.332**		**271.732.498**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	127.681.245	3p,39	106.381.904	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	(96.513.325)	3p,41	(77.234.659)	*Cost of revenue*
Laba bruto	31.167.920		29.147.245	*Gross profit*
Beban usaha:				*Operating expenses:*
Umum dan administrasi	(13.957.468)	42	(13.686.469)	*General and administrative*
Pendapatan operasi lainnya	2.032.018	43a	1.144.629	*Other operating income*
Beban operasi lainnya, neto	(792.904)	43b	(1.830.165)	*Other operating expenses, net*
Total beban usaha	**(12.718.354)**		**(14.372.005)**	***Total operating expenses***
Laba usaha	18.449.566		14.775.240	*Operating income*
Pendapatan keuangan	1.986.615	44a	1.671.104	*Finance income*
Biaya keuangan	(5.994.431)	44b	(3.543.217)	*Finance costs*
Keuntungan atas pelepasan saham entitas anak	-	2	1.396.286	*Gain from disposal of a subsidiary shares*
Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi	496.495	11	(80.677)	*Equity in net gain/(loss) of associated company*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	**14.938.245**		**14.218.736**	***Profit before final and income tax***
Beban pajak final	(1.615.709)	3o,29c	(1.103.454)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan	13.322.536		13.115.282	*Profit before income tax*
Beban pajak penghasilan, neto	(264.503)	3o,29c	(425.852)	*Income tax expense, net*
Laba tahun berjalan	**13.058.033**		**12.689.430**	***Profit for the year***
Penghasilan komprehensif lain:				*Other comprehensive income:*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will be reclassified to profit or loss:*
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(1.933.398)	3f,35	256.960	*Exchange differences due to financial statements translation*
Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi	852.952	11	(381.977)	*Equity in net gain/(loss) of associated company*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	106.469	3q	5.342	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait	(3.456)		7.215	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain	**(977.433)**		**(112.460)**	***Total other comprehensive income***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**12.080.600**		**12.576.970**	***Total comprehensive income for the year***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN RUGI KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE LOSS (continued)
For the Years Ended
December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ Notes	2023	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Profit for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	11.517.108	31	10.414.262	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	1.540.925	3b,30	2.275.168	*Non-controlling interests*
	13.058.033		**12.689.430**	
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada:				***Other comprehensive income for the year after effect of merging entity's income adjustment attributable to:***
Pemilik entitas induk	10.410.026		10.359.862	*Owners of the parent entity*
Kepentingan non pengendali	1.670.574	3b	2.217.108	*Non-controlling interests*
	12.080.600		**12.576.970**	
Laba per saham dasar (dinyatakan dalam nilai penuh Dolar AS per saham)	**0,0006**	3t,31	**0,0006**	***Basic earnings per share*** *(expressed in US Dollar full amount per share)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / *Equity attributable to owners of the parent entity*										
				Penghasilan/(rugi)komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income/(loss)*							
	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih transaksi dengan pihak Non-pengendali/ *Difference in value of transactions with non-controlling interest*	Selisih kurs penjabaran/ *Foreign exchange translation*	Pengukuran kembali imbalan pasti/ *remeasurment of defined benefit plans*	Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi/*Equity in net gain/(loss) of associated company*	Saldo laba belum ditentukan penggunaannya/ *Retained earnings unappropriated*	Total/ *Total*	Kepentingan non pengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2022	**102.615.795**	**(47.268.142)**	**7.832.520**	**(1.881.268)**	**(35.116)**	**1.891.792**	**52.798.955**	**115.954.536**	**21.976.847**	**137.931.383**	***Balance at December 31, 2022***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	10.414.262	10.414.262	2.275.168	12.689.430	*Profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	12.557	(323.916)	-	(311.359)	(58.061)	(369.420)	*Other comprehensive income*
Kenaikan kepemilikan pada entitas anak	-	(2.650.779)	2.132.521	-	-	-	-	(518.258)	(867.354)	(1.385.612)	*Increase in ownership in subsidiaries*
Selisih kurs penjabaran	-	-	-	256.960	-	-	-	256.960	-	256.960	*Foreign exchange translation*
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.365.120)	(1.365.120)	*Dividend distributed by subsidiaries*
Penambahan modal saham	17.775.300	(1.166.302)	-	-	-	-	-	16.608.998	-	16.608.998	*Increase in share capital*
Tambahan kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	606.655	606.655	*Addition of non-controlling interest*
Saldo 31 Desember 2023	**120.391.095**	**(51.085.223)**	**9.965.041**	**(1.624.308)**	**(22.559)**	**1.567.876**	**63.213.217**	**142.405.139**	**22.568.135**	**164.973.274**	***Balance at December 31, 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated)

	Ekuitas dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent entity*											
				Penghasilan/(rugi) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*			Saldo laba/*Retained earnings*					
	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Selisih transaksi dengan pihak Non-pengendali/ *Difference in value of transactions with non-controlling interest*	Selisih kurs penjabaran/ *Foreign exchange translation*	Pengukuran kembali imbalan pasti /*remeasurement of defined benefit plan*	Bagian laba(rugi) neto dari entitas asosiasi/*Equity in net gain/(loss) of associated company*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *unappropriated*	Total/ *Total*	Kepentingan non pengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2023	**120.391.095**	**(51.085.223)**	**9.965.041**	**(1.624.308)**	**(22.559)**	**1.567.876**	**-**	**63.213.217**	**142.405.139**	**22.568.135**	**164.973.274**	***Balance at December 31, 2023***
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	11.517.108	11.517.108	1.540.925	13.058.033	*Profit for the year*
Cadangan umum (Catatan 32a)	-	-	-	-	-	-	10.000	(10.000)	-	-	-	*General reserve (Note 32a)*
Konversi waran (Catatan 32b)	405	405	-	-	-	-	-	-	810	-	810	*Warrant conversion (Note 32b)*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(1.933.398)	103.013	723.303	-	-	(1.107.082)	129.649	(977.433)	*Other comprehensive income*
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.427.709)	(2.427.709)	*Dividend distributed by subsidiaries*
Dividen didistribusikan oleh Perusahaan (Catatan 36)	-	-	-	-	-	-	-	(1.185.786)	(1.185.786)	-	(1.185.786)	*Dividend distributed by by the Company (Note 36)*
Saldo 31 Desember 2024	**120.391.500**	**(51.084.818)**	**9.965.041**	**(3.557.706)**	**80.454**	**2.291.179**	**10.000**	**73.534.539**	**151.630.189**	**21.811.000**	**173.441.189**	***Balance at December 31, 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2024
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)***

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:***
Penerimaan kas dari pelanggan	120.378.690		91.448.501	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(73.022.771)		(64.795.803)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(17.356.072)		(14.238.329)	*Cash paid to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(1.943.230)		(1.526.339)	*Income taxes paid*
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**28.056.617**		**10.888.030**	***Net cash flows provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:***
Pengembalian uang muka pembangunan kapal	8.485.703		-	*Refund of advances for shipbuilding*
Penerimaan pendapatan bunga	837.143		566.969	*Interest income received*
Uang muka pengedokan	(64.727)	16	(798.672)	*Advances for docking*
Uang muka pembelian aset tetap	(2.000.000)		(1.524.515)	*Advances for purchase of fixed assets*
Penempatan deposito berjangka	(3.599.090)		-	*Placement of time deposits*
Perolehan aset tetap	(31.726.125)		(8.979.568)	*Acquisition of fixed assets*
Uang muka pembangunan kapal	-		(8.591.918)	*Advances for ship bulding*
Perolehan dari penjualan entitas anak	-		2.999.965	*Proceeds from sale of subsidiary*
Penerimaan penjualan aset tetap	-	12	3.300.000	*Proceeds sale of fixed asset*
Akuisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-		(1.207.567)	*Acquisition of a subsidiary from non-controlling interest*
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(28.067.096)**		**(14.235.306)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:***
Pinjaman bank jangka pendek:				*Short-term bank loans:*
Penerimaan	3.037.457	25	932.716	*Received*
Pembayaran	(1.605.919)	25	(3.519.355)	*Repayments*
Pinjaman bank jangka panjang:				*Long-term bank loans:*
Penerimaan	27.285.211	25	20.538.416	*Received*
Pembayaran	(6.927.907)	25	(3.622.832)	*Repayments*
Pembayaran bunga	(4.747.884)		(2.695.626)	*Interest paid*
Pembayaran dividen entitas anak	(2.427.709)		(1.365.120)	*Dividend paid by subsidiaries*
Dana yang dibatasi penggunaannya:				*Restricted funds:*
Penarikan	-		3.109.434	*Withdrawal*
Penempatan	(1.836.605)		(1.208.499)	*Placement*
Pembayaran liabilitas sewa	(8.381.315)		(8.319.528)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran dividen	(1.185.786)		-	*Payment of dividend*
Penerimaan dari konversi waran	810	32b	-	*Receipt from warrant conversions*
Hasil penawaran umum perdana, dikurangi biaya penerbitan saham	-		16.608.998	*Receipt from initial public offering, net of shares issuance cost*
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	**3.210.353**		**20.458.604**	***Net cash flows provided by financing activities***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(3.434.537)		661.945	*Effect from changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalent*
(PENURUNAN)/ KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(234.663)**		**17.773.273**	***(DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**41.373.913**	**5**	**23.600.640**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**41.139.250**	**5**	**41.373.913**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain)**

***PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk.
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and for
the Year Then Ended
(Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. ("Perusahaan"), adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 20 September 2016 oleh Martina, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0042923.AH.01.01. Tahun 2016 tanggal 28 September 2016.

Anggaran Dasar Perusahaan beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir adalah dengan Akta Notaris No. 112 tertanggal 13 April 2023 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Perusahaan menyetujui rencana untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dan menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka. Perusahaan juga menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU.AH.01.03-0054862 tanggal 14 April 2023.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi layanan Aktivitas Konsultasi Manajemen, Aktivitas Perusahaan *Holding*, Angkutan Laut, Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja, Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, Pendidikan Lainnya dan Kegiatan Penunjang Pendidikan. Perusahaan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ("SIUPAL") dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan No. AL.001/714/SP_SIUPAL/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. Perusahaan memulai operasi komersialnya sejak September 2016.

Perusahaan berdomisili di Jakarta.

Kegiatan Perusahaan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terutama mencakup pengiriman gas alam cair ("LNG"), minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, peti kemas, batu bara serta kargo laut lainnya. Grup juga menyediakan anak buah kapal, jasa manajemen kepada pemilik-pemilik kapal, jasa keruk, dan jasa penyimpanan regasifikasi terapung.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (the "Company"), is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 21 dated September 20, 2016 of Martina, S.H., Notary in Jakarta. The Company's Articles of Association was approved by the Minister of Justice and Human Rights in letter No. AHU-0042923.AH.01.01. Tahun 2016 dated September 28, 2016.

The Company's Article of Association have undergone several changes. The latest change is with Notarial Deed No. 112 dated April 13, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. the Company agreed the plan to conduct an Initial Public Offering of share to the public and approved the changed of the Company's status to Public Company. The Company also agreed to change the Company's name to PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. This amendment has been acknowledge by Ministry of Law and Human Rights through its decision letter No. AHU.AH.01.03-0054862 dated April 14, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities includes the service of Management Consultation Activities, Holding Company Activities, Sea Transportation, Labor Placement Activities, Provision of Human Resources and Human Resource Management Functions, Other Education and Education Support Activities. The Company has obtained a Authorization as a Sea Transportation Company ("SIUPAL") from the Directorate General of Sea Transportation of the Department of Transportation No. AL.001/714/SP_SIUPAL/VII/2022 dated July 1, 2022. The Company commenced its commercial operations since September 2016.

The Company is domiciled in Jakarta.

The activities of the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") mainly involve transporting liquified natural gas ("LNG"), crude oil, fuel oil, chemicals, containers, coal and other sea cargoes. The Group also provides vessel crews, management services to vessel owners, dredging service, and floating storage regasification service.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Entitas induk Perusahaan adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. Pihak pengendali Perusahaan adalah H. Hutomo Mandala Putra, SH.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Dalam rangka penawaran umum perdana saham Perusahaan, Perusahaan mendapatkan Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran No. S-06428/BEI.PP1/08-2023 tertanggal 3 Agustus 2023 dari Bursa Efek Indonesia ("BEI") untuk melakukan penawaran umum perdana sebanyak 2.707.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (angka penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp100 (angka penuh) per lembar saham. Seluruh saham yang ditawarkan ke masyarakat pada saat penawaran umum perdana berasal dari saham baru yang diterbitkan Perusahaan. Efektif tanggal 9 Agustus 2023, saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024, dan 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Komisaris Utama	Abdul Rachim Sofyan	Abdul Rachim Sofyan	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Daryono	Daryono	*Independent Commissioner*
Direktur Utama	Tirta Hidayat	Tirta Hidayat	*President Director*
Direktur	Dedi Hudayana	Dedi Hudayana	*Director*

Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Daryono	Daryono	*Chairman*
Anggota	Mirawati Sudjono	Mirawati Sudjono	*Member*
Anggota	JT. Duma	JT. Duma	*Member*

Susunan Komite Audit Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/DEKOM-HUMI/III/2023 tanggal 31 Maret 2023.

Sekretaris Perusahaan adalah Okty Saptarini Minarti berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 042/SK/DU-HUMI/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

Parent entity of the Company is PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. The Company's controlling party is H. Hutomo Mandala Putra, SH.

b. Public Offering of the Company's Shares

In relation to the initial public offering of the Company's shares, the Company obtained the Notification Letter of Statement of Effective Registration No. S-06428/BEI.PP1/08-2023 dated August 3, 2023 from the Indonesia Stock Exchange ("IDX") to conduct an initial public offering of 2,707,000,000 shares to the public with par value of Rp100 (full amount) per share at an offering price of Rp100 (full amount) per share. All of the shares offered to the public in the initial public offering were new shares issued by the Company. Effective on August 9, 2023, the Company's shares have been listed in the Indonesia Stock Exchange.

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

As of December 31, 2024 and 2023, the composition of Boards of Commissioners and Directors are as follows:

The members of the Company's Audit Committee are as follows:

The composition of the Company's Audit Committee was based on Decree of the Board of Commissioners No. 002/SK/DEKOM-HUMI/III/2023 dated March 31, 2023.

The Company's Corporate Secretary is Okty Saptarini Minarti based on Directors Decision Letter No. 042/SK/DU-HUMI/X/2023 dated October 26, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan No. 007/SK/DIREKSI-HUMI/IX/2022 tanggal 26 September 2022, Direksi memutuskan pengangkatan Rahardian Agung Nugoroho sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mempekerjakan 267 karyawan dan 1.821 awak kapal (814 awak Perusahaan dan 1.006 awak pihak ketiga yang dikelola Perusahaan) (2023: 147 karyawan dan 1.306 awak kapal; 477 awak Perusahaan dan 829 awak pihak ketiga yang dikelola Perusahaan) (tidak diaudit).

Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 28 Maret 2025.

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Directors Resolutions No. 007/SK/DIREKSI-HUMI/IX/2022 dated September 26, 2022, the Directors approved the appointment of Rahardian Agung Nugroho as the Head of Internal Audit Department.

As of December 31, 2024, the Group has 267 employees and 1,821 vessel crews (814 crews of the Company and 1,006 crews of third parties which managed by the Company) (2023: 147 employees and 1,306 vessel crews; 477 crews of the Company and 829 crews of third parties which managed by the Company) (unaudited).

Key management includes members of the Boards of Commissioners and Directors of the Company.

d. Completion of the consolidated financial statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Board of Directors of the Company on March 28, 2025.

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK

Perincian dari penyertaan dan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak adalah sebagai berikut:

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES

The details of the Company's ownership interests in subsidiaries are as follows:

Entitas, Domisili dan Kegiatan Usaha/ *Entity, Domicile, and Nature of Business*	Mulai Secara Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan Efektif/ *Effective Percentage of Ownership*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
		31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
Pemilikan langsung/*Direct ownership*					
PT GTS Internasional Tbk. ("GTSI") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2013	85%	85%	88.176.986	80.706.952
PT PCS Internasional ("PCSI") Indonesia Konsultasi manajemen lainnya/ *Other management consulting*	2013	100%	100%	39.519.735	13.910.826
PT OTS Internasional ("OTSI") Indonesia Konsultasi manajemen lainnya/ *Other management consulting*	2013	100%	100%	29.182.837	29.419.548

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES (continued)

Perincian dari penyertaan dan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak adalah sebagai berikut:

The details of the Company's ownership interests in subsidiaries are as follows:

Entitas, Domisili dan Kegiatan Usaha/ *Entity, Domicile, and Nature of Business*	Mulai Secara Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan Efektif/ *Effective Percentage of Ownership*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
		31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
Pemilikan langsung/*Direct ownership*					
PT MCS Internasional ("MCSI") Indonesia Jasa manajemen awak kapal/ *Crew management service*	2016	100%	100%	5.060.765	5.454.347
PT ETSI Hutama Maritim ("ETSI") Indonesia Jasa pelatihan awak kapal/ *Training crew service*	2016	100%	100%	1.731.436	1.794.355
PT Humpuss Transportasi Curah ("HTC") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2017	100%	100%	34.827.062	32.501.069
Pemilikan tidak langsung melalui HTC/ *Indirect ownership through HTC*					
PT Energi Maritim Indonesia ("EMI") Indonesia Jasa transportasi air/ *Water transportation*	2015	100%	100%	840.379	840.379
PT CTS Internasional ("CTSI") Indonesia Jasa transportasi air/ *Water transportation*	2012	100%	100%	15.892	15.892
Pemilikan tidak langsung melalui OTSI/ *Indirect ownership through OTSI*					
PT Baraka Alam Sari ("BAS") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2012	99%	99%	27.388.921	28.694.765
PT Hummingbird Trans Ocean ("HTO") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2017	100%	100%	934.416	938.549
Pemilikan tidak langsung melalui PCSI/ *Indirect ownership through PCSI*					
PT Hutama Trans Kencana ("HTK2") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2013	99%	99%	125.707.660	101.322.009
PT Hutama Trans Kontinental ("HTK3") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2016	100%	100%	19.712.826	12.849.085

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

Perincian dari penyertaan dan kepemilikan Perusahaan pada entitas anak adalah sebagai berikut:

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES (continued)

The details of the Company's ownership interests in subsidiaries are as follows:

Entitas, Domisili dan Kegiatan Usaha/ *Entity, Domicile, and Nature of Business*	Mulai Secara Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan Efektif/ *Effective Percentage of Ownership*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
		31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023	31 Desember/ *December 31,* 2024	31 Desember/ *December 31,* 2023
Pemilikan tidak langsung melalui MCSI/ ***Indirect ownership through MCSI***					
PT McMol Crewing International ("McMol") Indonesia Jasa manajemen awak kapal/ *Crew management service*	2023	51%	51%	1.820.325	1.453.564
Pemilikan tidak langsung melalui GTSI/ ***Indirect ownership through GTSI***					
PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2015	85%	85%	42.120.376	39.799.790
PT Bhaskara Inti Samudera ("BIS") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter service*	2016	43%	43%	26.901.533	29.898.849
PT Humolco LNG Indonesia ("HLI") Indonesia Jasa manajemen kapal/ *Vessel management service*	2016	85%	85%	1.914.983	1.629.097
PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR") Indonesia Perdagangan/*Trading*	2018	85%	85%	29.067.062	26.727.757
PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA") Indonesia Perusahaan investasi/ *Investment company*	2020	85%	85%	2.811.337	3.139.860
GTS Energy Trading Pte. Ltd. ("GET") Singapore Perdagangan/*Trading*	2024	85%	85%	296.924	-
PT Surya Gaschem Perkasa ("SGP") Indonesia Jasa sewa kapal/ *Vessel charter services*	2024	85%	85%	2.612.516	-

Penjualan entitas anak

Berdasarkan akta No. 10 tanggal 27 Juni 2023, dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., di Jakarta Selatan, ANOA dan HTK, pemegang saham SRGS menyetujui untuk melakukan penjualan seluruh saham SRGS kepada PT EMP Daya Nusantara dan PT EMP Tunas Persada, pihak ketiga.

Sale of a subsidiary:

Based on Notarial Deed No. 10 dated June 27, 2023, made before Hizmelina, S.H., in South Jakarta, ANOA and HTK, the shareholders of SRGS, a subsidiary, agreed to sell all of SRGS shares to PT EMP Daya Nusantara and PT EMP Tunas Persada, third parties.

2. PENYERTAAN PADA ENTITAS ANAK (lanjutan)

Penjualan entitas anak

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 27 Juni 2023, dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., di Jakarta Selatan, ANOA, menyetujui untuk menjual seluruh saham SRGS kepada PT EMP Daya Nusantara, pihak ketiga, dengan nilai penjualan sebesar AS$3.499.965. Atas penjualan saham SRGS tersebut, Grup membukukan laba sebesar AS$1.396.286.

Akuisisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")

PT GTS Internasional ("GTSI"), entitas anak, meningkatkan kepemilikannya di HSB dengan membeli 5% kepemilikan saham atau setara dengan 7.750 saham HSB pada nilai pengalihan sebesar AS$1.207.567 dari Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), pihak ketiga. Transaksi pembelian saham ini efektif sejak 8 November 2023.

Selisih neto sebesar AS$448.271 antara nilai akuisisi dan proporsional saham sebesar 5% dari nilai buku neto liabilitas HSB yang merupakan nilai yang tercatat pada buku Perusahaan, dicatat sebagai "Selisih transaksi pemegang saham non-pengendali" dan disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA")

Pada tanggal 2 November 2023, GTSI meningkatkan kepemilikannya di ANOA dengan membeli 4,64% kepemilikan saham atau setara dengan 2.744 saham ANOA pada nilai pengalihan sebesar Rp2.744.000.000 dari PT Humpuss Transportasi Kimia ("HTK"), pihak berelasi dan OTSI.

Adapun imbalan yang dialihkan untuk memperoleh tambahan investasi adalah sebesar AS$178.045. Atas transaksi ini terdapat selisih neto sebesar AS$2.650.779 antara nilai akuisisi dan proporsional saham dari nilai buku neto liabilitas ANOA yang merupakan nilai yang tercatat pada buku Perusahaan, dicatat sebagai "Selisih transaksi pemegang saham sepengendali" dan disajikan sebagai bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. EQUITY PARTICIPATION IN SUBSIDIARIES (continued)

Sale of a subsidiary:

Based on Notarial Deed No. 11 dated June 27, 2023, made before Hizmelina, S.H., in South Jakarta, ANOA, agreed to sell all of SRGS shares to PT EMP Daya Nusantara, a third party, with a selling price of US$3,499,965. From the sale of SRGS shares, the Group recorded gain amounted to US$1,396,286.

Acquisition of subsidiary from non-controlling interest

PT Hikmah Sarana Bahari ("HSB")

PT GTS Internasional ("GTSI"), a subsidiary, increased its ownership in HSB by purchasing of 5% share ownership or representing 7,750 shares of HSB at the transfer price of US$1,207,567 from Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL"), a third party. This transaction was effective on November 8, 2023.

Net difference of US$448,271 between the acquisition price and proportionate share of 5% in the book value of the net assets of HSB as carried in the books of the Company is recorded as "Difference in value of transaction with non-controlling interest" and presented as part of equity in capital account in the consolidated statement of financial position.

PT Anoa Sulawesi Regas ("ANOA")

On November 2, 2023, GTSI increased its ownership in ANOA by purchasing of 4,64% share ownership or representing 2,744 shares of ANOA at the transfer price of Rp2,744,000,000 from PT Humpuss Transportasi Kimia ("HTK"), a related party and OTSI.

The purchase consideration for obtaining additional investment amounting to US$178,045. Regarding this transaction, net difference of US$2,650,779 between the acquisition price and proportionate share in the book value of the net liabilities of ANOA as carried in the books of the Company is recorded as "Difference in value of transaction with under common control" and presented as part of equity in capital account in the consolidated statement of financial position.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan menjaga kelangsungan usaha.

Mata uang fungsional Grup adalah Dolar Amerika Serikat, kecuali HTC, MCSI, McMol, dan ETSI dalam Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"/"AS$"), yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan HTC, MCSI, McMol, dan ETSI dijabarkan dalam mata uang Dolar AS dengan cara sebagai berikut:

a) Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;

b) Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan

c) Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam selisih kurs penjabaran sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya.

Periode pelaporan keuangan Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants ("DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (" OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to as a going concern.

The Group's functional currency is United States Dollar, except HTC, MCSI, McMol, and ETSI in Rupiah.

The consolidated financial statements are presented in United States Dollar ("US Dollar"/"US$"), which is the Group's functional and presentation currency.

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of HTC, MCSI, McMol, and ETSI were translated to US Dollar currency based on the following:

a) Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at the reporting date;

b) Income and expenses were translated using the average exchange rate;

c) All resulting exchange differences were recognized in foreign exchange translation as part of other comprehensive income.

The financial reporting period of the Group is January 1 - December 31.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu investee, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

c. Kombinasi bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

c. Business combination and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kombinasi bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output, dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan output.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup menentukan dan mengklasifikasikan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 109, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 109. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 109 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Business combination and Goodwill (continued)

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Group acquires a business, it assesses and classifies the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 109. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 109 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kombinasi bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi *item* yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Business combination and Goodwill (continued)

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Kombinasi bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

d. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
i) Akun dilunasi dalam siklus operasi normal

ii) Untuk diperdagangkan
iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) Tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Business combination and Goodwill (continued)

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

Business combinations under common control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

d. Current and non-current classification

A liability is current when it is:
i) Expected to be settled in the normal operating cycle
ii) Held primarily for the purpose of trading
iii) Due to be settled within twelve months after the reporting period, or
iv) There is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at lease twelve months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   i) has control or joint control over the reporting entity;
   ii) has significant influence over the reporting entity; or
   iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
   iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Seluruh saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 37.

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing Grup dijabarkan ke Dolar AS dengan menggunakan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Laba atau rugi nilai tukar yang diakibatkan oleh penjabaran tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berjalan. Perbedaan nilai tukar yang timbul atas aset atau liabilitas moneter intragrup, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang tidak dapat dieliminasi satu sama lainnya, diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Transactions with related parties (continued)

The transactions are made based on terms agreed by the parties.

All material balance and transactions with related parties are described in Note 37.

f. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time of the transactions. At end of reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies of the Group are translated into US Dollar at the middle rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year as published by Bank Indonesia. The resulting exchange gains or losses arising from the translation are recognized in the current period's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The exchange differences arising on intra-group monetary items, whether short-term or long-term, which cannot be eliminated against a corresponding amount are recognized as an income or an expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The rates of exchange used are as follows:

	2024	2023	
AS$1/Rupiah	16.162,00	15.416,00	*US$1/Rupiah*
AS$1/EUR	0,96	0,90	*US$1/EUR*
AS$1/SG$	1,36	1,32	*US$1/SG$*
AS$1/JP¥	157,89	140,72	*US$1/JP¥*

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun dari tanggal penempatannya disajikan sebagai bagian dari "kas dan setara kas dan deposito".

Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah dari kas dan setara kas. Apabila akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari aset lancar dan apabila akan digunakan untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar.

h. Persediaan

Persediaan diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada tanggal pelaporan.

i. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

g. Cash and cash equivalent

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not exceeding 1 (one) year at the time of placement are presented as part of "cash and cash equivalent and time deposits".

Restricted cash accounts are presented separately from cash and cash equivalents. If it will be used for repayment of obligations maturing within 1 (one) year are presented as part of current assets and if it will be used for repayment of obligations maturing more than 1 (one) year are presented as part of non-current assets.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowance for inventories obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the reporting dates.

i. Investments in associated companies

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. Goodwill yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Investments in associated companies (continued)

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

j. Aset tetap dan penyusutan

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat di atribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap dua hingga dua setengah tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Investments in associated companies (continued)

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

j. Fixed assets and depreciation

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Cost includes the cost of replacing part of fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

The Group's vessels are dry-docked in general every two up to two and a half years periodically and the costs are capitalized to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalized costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred dry-docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortized over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous dry-docking is derecognized, and charged to current period consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomi sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Kapal, kapal tunda dan tongkang	10 - 40	*Vessels, tugs and barges*
Bangunan	20	*Building*
Perabotan dan perlengkapan kantor	4 - 10	*Office furniture and equipments*
Kendaraan	4 - 5	*Vehicles*
Peti kemas	10	*Containers*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, dan disesuaikan secara prospektif, jika relevan. Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup atas nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset, tidak terdapat perubahan atas estimasi nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024.

Uang muka pengedokan kapal merupakan pembayaran ke galangan kapal sehubungan dengan pengedokan kapal yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Fixed assets and depreciation (continued)

Depreciation of an asset starts when it is available for use and is computed using the straight line method based on the estimated useful lives as follows:

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year when the asset is derecognized.

Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end. Based on review of the Group's management on the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets, no changes made on the residual values, useful lives and methods of depreciation of fixed assets as of December 31, 2024.

Advances for docking represent payments to shipyards in relation to the docking of vessels which has not been completed yet at the date of consolidated statement of financial position.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Grup.

l. Sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan mempertimbangkan apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang penentuan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
  2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal dimulainya atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Borrowing costs

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

l. Leases

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company considers whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing the determination of how and for what purpose the asset is used and:*
  1. *The Company has the right to operate the asset; or*
  2. *The Company has designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose it will be used.*

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Leases (continued)

The Company recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

	Tahun/*Years*	
Kapal	10 - 12	*Vessel*
Bangunan	2,5 - 10	*Building*

Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate on the finance balance outstanding.

Pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa atas aset bernilai rendah diakui dengan dasar garis lurus sebagai beban di dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan jangka waktu sewa hingga 12 bulan.

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in the statements of profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term up to 12 months.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

Aset hak guna juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi pada bagian penurunan nilai aset non-keuangan.

The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in section impairment of non-financial assets.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laba rugi konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan lainya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those or from other assets category. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated profit or loss as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks of asset. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat - neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

n. Pendapatan ditangguhkan

Pendapatan untuk periode buku mendatang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian periode berjalan dan diamortisasi ketika pendapatan telah layak untuk diakui atau dapat direalisasi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Impairment of non-financial assets (continued)

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

In this case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated profit or loss. After such a reversal, the depreciation expense on the asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful lives.

Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

n. Deferred income

Income relating to future financial periods is accounted for as deferred income in the current period's consolidated statement of financial position and amortized as earned or realized.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Perpajakan

Grup menerapkan PSAK 212, "Pajak Penghasilan". Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak final yang sebelumnya dimasukkan sebagai bagian dari beban pajak penghasilan, telah dipisahkan menjadi pos tersendiri dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak final

Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan domestik yang diberikan kepada Perusahaan Indonesia dikenakan pajak final dengan tarif 1.20% sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan jasa perkapalan sebagai pos tersendiri.

Untuk pendapatan selain dari jasa perkapalan, beban pajak kini ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang berjalan. Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena penghasilan kena pajak tidak termasuk pos-pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan pajak atau dikurangkan.

Pajak penghasilan badan kini yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan atau secara substansial ditetapkan pada akhir periode pelaporan.

Pajak Penghasilan Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Taxation

The Group applied PSAK 212, "Income taxes". Tax expense on revenue subject to final tax which was previously included as part of income tax expense, has been separated into a separate item in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Final tax

The Group's domestic vessel charter income services provided to Indonesian companies is subject to a final tax at rates of 1,20% under the Taxation Laws of Indonesia.

Final tax is out of scope of PSAK 212. Therefore, the Group have decided to present all of the final tax arising from vessel charter income as separate line item.

For income other than vessel charter income, current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

The Group's liability for current corporate income tax is calculated using tax rates based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Current Income Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika Grup mengajukan banding, apabila: (1) pada saat hasil dari banding tersebut ditetapkan, kecuali bila terdapat ketidakpastian yang signifikan atas hasil banding tersebut, maka koreksi berdasarkan surat ketetapan pajak terhadap kewajiban perpajakan tersebut dicatat pada saat pengajuan banding dibuat, atau (2) pada saat dimana berdasarkan pengetahuan dari perkembangan atas kasus lain yang serupa dengan kasus yang sedang dalam proses banding, berdasarkan ketentuan dari Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, dimana hasil yang diharapkan dari proses banding secara signifikan tidak pasti, maka pada saat tersebut perubahan kewajiban perpajakan berdasarkan ketetapan pajak diakui.

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan sejauh tidak lagi terdapat kemungkinan jumlah laba kena pajak yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua dari aset pajak tangguhan untuk direalisasi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Taxation (continued)

Current Income Tax (continued)

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendment to taxation obligation is recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when: (1) the result of the appeal is determined, unless there is significant uncertainty as to the outcome of such appeal, in which event the impact of the amendment of tax obligations based on an assessment is recognized at the time of making such appeal, or (2) at the time based on knowledge of developments in similar cases involving matters appealed, based on rulings by the Tax Court or the Supreme Court, that a positive appeal outcome is adjudged to be significantly uncertain, in which event the impact of an amendment of tax obligations based on an assessment is recognized.

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry-forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry-forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Grup menyajikan penyesuaian pajak penghasilan dari tahun-tahun sebelumnya, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Kini (Beban)/Manfaat" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling menghapuskan jika secara legal dapat saling menghapuskan antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

Pajak pertambahan nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at consolidated statement financial position date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/(Expense), Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Group present adjustments of income tax from previous years, if any, as part of "Current Tax (Expense)/Benefit" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value added tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
1. *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
2. *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the tax office is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pengakuan beban

Grup menerapkan PSAK 115, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan dari jasa sewa kapal dan jasa pengelolaan kapal diakui pada saat penyerahan jasa kepada pelanggan. Jika pendapatan dari sewa kapal berbasis waktu *(vessel time charter)* mencakup lebih dari satu periode akuntansi maka pengakuan pendapatan diakui secara proporsional sesuai dengan periode yang dicakup (suatu periode waktu).

Pendapatan dalam hubungan keagenan dicatat sebesar jumlah tagihan bruto kepada pelanggan ketika Grup bertindak sebagai prinsipal dalam penjualan barang dan jasa. Pendapatan dicatat sebesar jumlah bersih yang diperoleh (jumlah yang dibayarkan pelanggan dikurangi jumlah yang dibayarkan kepada pemasok) ketika secara substansi, Grup bertindak sebagai agen dan memperoleh komisi dari pemasok atas penjualan barang dan jasa.

Beban diakui pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from contracts with customers and recognition of expenses

The Group has adopted PSAK 115, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessments as follows:

1. *Identify contracts with customers*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to the customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

Revenue on vessel charter and ship management service are recognized when services are rendered to the customers. If the vessel time charter revenue covers more than one accounting period, then revenue is recognized proportionally over the period covered (over time).

Revenues from an agency relationship are recorded based on the gross amount billed to the customers when the Group acts as principal in the sale of goods and services. Revenues are recorded based on the net amount retained (the amount paid by the customer less amount paid to the suppliers) when, in substance, the Group has acted as agent and earned commission from the suppliers of the goods and services sold.

Expenses are recognized as incurred.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Liabilitas imbalan kerja

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2023 ("UUCK"), Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 ("PP35") dan Peraturan Perusahaan. Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode "*Projected Unit Credit*".

Keseluruhan dari keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain (other comprehensive income method). Biaya jasa lalu diakui seketika di dalam laba rugi.

Perusahaan mengakui laba atau rugi dari kurtailmen pada saat kurtailmen terjadi, yaitu apabila terdapat komitmen untuk melakukan pengurangan material terhadap jumlah karyawan yang ditanggung oleh suatu program atau apabila terdapat perubahan terhadap ketentuan-ketentuan pada suatu program imbalan pasti, dimana bagian yang material untuk jasa yang diberikan oleh karyawan pada masa depan tidak lagi memberikan suatu imbalan, atau memberikan imbalan yang lebih rendah. Laba atau rugi penyelesaian diakui apabila terdapat transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas seluruh imbalan dalam program manfaat pasti. Keuntungan atau kerugian kurtailmen terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini dari liabilitas dan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui sebelumnya.

r. Instrumen keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Employee benefits liabilities

The Company recognizes long-term employee benefits liabilities in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under the Indonesian Law No. 6 year 2023 ("UUCK"), Government Regulation No. 35 year 2021 ("PP35") and Company Regulations. The liabilities are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

All actuarial gains and losses are recognized as other comprehensive income (other comprehensive income method). Past service costs are directly charged to profit or loss.

The Company recognizes gains or losses on the curtailment when the curtailment occurs, that is when there is a commitment to make a material reduction in the number of employees covered by a plan or when there is an amendment of the defined benefit plan terms such that a material element of future services to be provided by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits. The gain or loss on settlement recognized when there is a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan. The gain or loss on curtailment comprises any resulting change in present value of the obligations and any related actuarial gains and losses and past service cost that had not previously been recognized.

r. Financial instruments

The Company classifies financial instruments into financial assets and financial liabilities. A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran selanjutnya

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan pada kategori ini meliputi kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent measurements

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, time deposits, trade and other receivables, and other non-current assets - guarantee deposits.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspetasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment

The Company recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because trade and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Perusahaan menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 90 hari. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman, dan hutang atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

For debt instruments at fair value through other comprehensive income, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Company considers that there has been a significant increase in credit risk when contractual payments are more than 30 days past due.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Initial recognized and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, payables or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai:
- Kewajiban keuangan pada FVTPL atau
- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi

Liabilitas keuangan Grup termasuk utang usaha, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka panjang, liabilitas sewa, dan pinjaman dari pihak ketiga

Pengukuran selanjutnya

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Grup. Setelah pengakuan awal, pinjaman dengan bunga dan pinjaman lainnya selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi EIR. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan setiap diskon atau premi atas perolehan dan biaya atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR.

Amortisasi EIR termasuk sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi. Kategori ini umumnya berlaku untuk pinjaman berbunga dan pinjaman lainnya.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan jumlah bersih dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk saling hapus jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikannya kewajiban secara bersamaan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities

Initial recognized and measurement

The Group classifies its financial liabilities as:
- *Financial obligations on FVPTL or*
- *Financial liabilities measured at amortized acquisition cost*

The Group's financial liabilities include trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accrued expenses, short-term and long-term bank loans, lease liabilities, and loan from a third party

Subsequent measurement

Financial liabilities measured at amortized cost

This is the category most relevant to the Group. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortiszd cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR.

The EIR amortization is included as finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Off-setting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are off-set and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

s. Segmen usaha

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat dalam menyediakan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Segmen pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas termasuk komponen-komponen yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Informasi pelaporan segmen usaha disajikan di Catatan 40 untuk menunjukkan aset dan hasil usaha Grup yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha.

Grup tidak menyajikan informasi sehubungan dengan segmen geografis dikarenakan manajemen Grup berpendapat bahwa Grup beroperasi pada suatu lingkungan ekonomi yang memiliki resiko dan imbalan yang sama.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

s. Business segments

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing certain services (business segment), or in providing services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those in other segments.

Revenue, expenses, results, assets and liabilities segment include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before balances and transactions between the Group, are eliminated as part of the consolidation process.

Information on business segments is presented in Note 40 disclosing the Group's assets and results arising from segments which are based on business activities.

The Group did not disclose information related to geographical segment since the Group believed that the Group operated in the same economic environment, which is subject to the same risks and benefits.

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, tidak termasuk saham treasuri, pada periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan 2023 masing-masing adalah 18.046.455.284 dan 16.422.250.000 lembar (Catatan 31).

u. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

v. Perubahan dalam kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2024, grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amandemen PSAK 201: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amandemen PSAK 116: Liabilitas sewa dalam jual beli dan sewa balik
- Amandemen PSAK 207 dan PSAK 107: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Basic earnings per share

Earnings per share are computed by dividing profit attributable to equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding, excluding treasury shares, during the period. The weighted average number of shares outstanding for the year ended December 31, 2024, and 2023 are 18,046,455,284 and 16,422,250,000 shares (Note 31).

u. Provision

Provisions are recognized when the Group have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

v. Changes in accounting principles

On January 1, 2024, the grup adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Group's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Group accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *Amendment of PSAK 201: Non-current Liabilities with Covenants*
- *Amendments of PSAK 116: Lease liability in a Sale and leaseback*
- *Amendments of PSAK 207 and PSAK 107: Supplier Finance Arrangements*

3. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Biaya emisi saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan modal saham Perusahaan kepada publik dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Issuance costs of share capital

Costs incurred in connection with the Company's issuance of share capital to the public were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the consolidated statement of financial position.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian grup berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan Manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat pertimbangan, estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires Management to make judgment, estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might differ from those estimates.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan ditetapkan oleh Grup dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti dijelaskan pada Catatan 3r.

Sewa

Grup mempunyai perjanjian-perjanjian sewa dimana Grup bertindak sebagai lessor atau lessee untuk beberapa aset tetap tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 116, "Sewa", yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Financial assets and liabilities classifications

Classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if the Group meets the definition set forth in PSAK 109, "Financial Instrument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with accounting policies disclosed in Note 3r.

Lease

The Group has entered into lease agreements where the Group acts as lessor or lessee for a certain fixed assets. The Group evaluates whether there are significant risks and rewards of assets transferred under PSAK 116, "Leases", which requires the Group to make judgments and estimates of the transfer of risks and rewards incidental to ownership.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Grup merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional Perusahaan adalah Dolar AS.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian dari piutang

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang. Tarif provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks penyediaan awalnya didasarkan pada tarif default yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan semakin memburuk tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di "sector" manufaktur, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili default pelanggan sebenarnya di masa depan. Informasi tentang ECL pada piutang Grup diungkapkan dalam Catatan 7 dan 8.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions

Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Group's management assessment, the Group's functional currency is US Dollar.

Provision for expected credit losses of receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Group's receivables is disclosed in Notes 7 and 8.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan nilai sisa (lanjutan)

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap. Depresiasi dihitung berdasarkan biaya komponen-komponen aset tetap dikurangi dengan nilai sisa. Estimasi utama mencakup estimasi masa manfaat kapal yang bisa berbeda signifikan dengan masa manfaat sesungguhnya. Masa manfaat sesungguhnya akan bergantung pada berbagai faktor seperti pemeliharaan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nilai sisa kapal juga sulit diestimasi karena lamanya masa manfaat kapal dan ketidakpastian akan kondisi ekonomi. Nilai sisa diestimasi setiap tahun berdasarkan kondisi terakhir kapal tersebut.

Jika estimasi masa manfaat dan nilai sisa harus direvisi, tambahan beban depresiasi dapat terjadi di masa yang akan datang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 3j dan 12.

Imbalan pasca-kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuaria berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya bersih imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi-asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca-kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca-kerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 3q, 26 dan 27.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets and residual value (continued)

Management determines the estimated useful lives and depreciation of fixed assets. Depreciation is calculated based on the various components of the cost of fixed assets less the residual value. The main estimate includes the estimated useful life of the vessel which could be significantly different from the actual useful life. Actual useful life will depend on various factors such as maintenance, technology development, etc. Residual value of the vessel is also difficult to estimate because of the length of the useful life of the vessel and the uncertainty of economic conditions. The residual value is estimated annually based on the latest condition of the vessel.

If the estimated useful lives and residual values should be revised, additional depreciation expense may occur in the future. Further details are disclosed in Notes 3j and 12.

Post-employment benefit

The present value of post-employment liability depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include a discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of other post-employment liabilities.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Group considers the interest rates of government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which has a similar time period with a period of related employment benefits liability.

The key assumption used for determining post-employment liabilities include current market conditions. Additional information is disclosed in Notes 3q, 26 and 27.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi pajak

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 237, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3n dan 29b.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 3o dan 29d.

Instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laporan laba atau rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Grup. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 3r dan 46.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Provision for tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 237, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognized tax expense should be recognized.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 3n and 29b.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 3o and 29d.

Financial instruments

The Group carries certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Group utilizes a different valuation methodology. Any changes in the fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Group's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Further details are disclosed in Notes 3r and 46.

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yaitu yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk lima tahun ke depan dan tidak mencakup aktivitas restrukturisasi yang belum ada komitmennya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan dan juga arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan pencatatan kerugian penurunan nilai pada tanggal pelaporan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection is for a period of five years and does not include restructuring activities not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes. Management believes that no impairment loss is required at reporting dates.

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA

Rincian kas dan setara kas berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut:

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS

The details of cash and cash equivalents based on currency and banks are as follows:

a. Kas dan setara kas

a. Cash and cash equivalent

	2024	2023	
Kas			***Cash on hand***
Rupiah			*Rupiah*
(2024: Rp2.305 juta; 2023: Rp2.118 juta)	142.628	137.423	*(2024: Rp2,305 million; 2023: Rp2,118 million)*
Dolar AS	10.369	9.531	*US Dollar*
Total kas	152.997	146.954	*Total cash on hand*

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Rincian kas dan setara kas berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut: (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS (continued)

The details of cash and cash equivalents based on currency and banks are as follows: (continued)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

a. Cash and cash equivalent (continued)

	2024	2023	
Kas di bank			***Cash in banks***
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp204.297 juta; 2023: Rp173.852 juta)	12.640.568	11.277.373	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp204,297 million; 2023: Rp173,852 million)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp94.126 juta; 2023: Rp149.057 juta)	5.823.948	9.668.975	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp94,126 million; 2023: Rp149,057 million)*
PT Bank KB Bukopin Syariah (2024: Rp25.622 juta; 2023: Rp73.332 juta)	1.585.354	4.756.885	*PT Bank KB Bukopin Syariah (2024: Rp25,622 million; 2023: Rp73,332 million)*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2024: Rp4.073 juta; 2023: Rp8.247 juta)	252.040	534.984	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2024: Rp4,073 million; (2023: Rp8,247 million)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp3.392 juta 2023: Rp4.449 juta)	209.905	288.594	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp3,392 million 2023: Rp4,449 million)*
PT Bank Capital Indonesia Tbk. (2024: Rp1.962 juta; 2023: RpNihil)	121.405	-	*PT Bank Capital Indonesia Tbk. (2024: Rp1,962 million; 2023: RpNil)*
PT Bank Pan Indonesia Tbk. (2024: Rp298 juta; 2023: Rp4,6 juta)	18.472	303	*PT Bank Pan Indonesia Tbk. (2024: Rp298 million; 2023: Rp4,6 million)*
PT Bank KB Bukopin Tbk. (2024: Rp231 juta; 2023: Rp228 juta)	14.303	14.765	*PT Bank KB Bukopin Tbk. (2024: Rp231 million; 2023: Rp228 million)*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2024: Rp16.7 juta; 2023: Rp10.7 juta)	1.037	696	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (2024: Rp16,7 million; 2023: Rp10,7 million)*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024: RpNihil; 2023: Rp45 juta)	-	2.912	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024: RpNil; 2023: Rp45 million)*
Sub-total	20.667.032	26.545.487	*Sub-total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	896.670	645.810	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk.*
PT Bank KB Bukopin Tbk.	63.090	103.795	*PT Bank KB Bukopin Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	44.810	39.975	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank KB Bukopin Syariah	3.133	187	*PT Bank KB Bukopin Syariah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	1.745	1.000	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk.*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.	196	201	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.*
Mizuho Corporate Bank Ltd.	130	138	*Mizuho Corporate Bank Ltd.*
PT Bank Central Asia Tbk.	66	98	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Sub-total	1.009.840	791.204	Sub-total
Total kas di bank	**21.676.872**	**27.336.691**	***Total cash in banks***

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Rincian kas dan setara kas berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut: (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSITS (continued)

The details of cash and cash equivalents based on currency and banks are as follows: (continued)

a. Cash and cash equivalent (continued)

	2024	2023	
Deposito berjangka - tiga bulan atau kurang			***Time deposits - three months or less***
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp145.000 juta) 2023: Rp113.861 juta)	8.971.662	7.385.885	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp145,000 million 2023: Rp113,861 million)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp144.000 juta) 2023: Rp50.000 juta)	8.909.789	3.243.383	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp144,000 million 2023: Rp50,000 million)*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp5.300 juta) 2023: RpNihil)	327.930	-	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp5,300 million 2023: RpNil)*
Pihak ketiga			*Third parties*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.100.000	3.261.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Jumlah deposito berjangka	19.309.381	13.890.268	*Total time deposits*
Total kas dan setara kas	**41.139.250**	**41.373.913**	***Total cash and cash equivalents***

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun berkisar antara:

The range of the interest rates per annum for time deposits as follows:

	2024	2023	
Rupiah	2,5% - 6,25%	2,50% - 6,25%	*Rupiah*
Dollar AS	2,5% - 3,75%	3,0%	*US Dollar*

Deposito berjangka tiga bulan atau kurang jatuh tempo pada Januari 2025 dan dapat diperpanjang secara otomatis. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, deposito tersebut belum dicairkan. Jangka waktu penempatan deposito berjangka tersebut adalah 1 sampai 3 bulan.

The time deposits three months or less mature on January 2025 and can be rolled over automatically. As of the date of these consolidated financial statements, the time deposits has not been withdrawn. Term deposits placement period is 1 to 3 months.

5. KAS DAN SETARA KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Rincian kas dan setara kas dan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut: (lanjutan)

b. Deposito berjangka

	2024	2023	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Capital Indonesia Tbk (2024: Rp46.952 juta) 2023: RpNihil)	2.905.105	-	*PT Bank Capital Indonesia Tbk (2024: Rp46,952 million 2023: RpNil)*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp11.216 juta) 2023: RpNihil)	693.985	-	*PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten Tbk. (2024: Rp11,216 million 2023: RpNil)*
Jumlah deposito berjangka	**3.599.090**	**-**	***Total time deposit***

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun berkisar antara:

	2024	2023	
Rupiah	3,0% - 4,25%	-	*Rupiah*

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang rupiah berkisar antara 3,0% sampai dengan 4,25%. Jangka waktu penempatan deposito berjangka tersebut lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun

5. *CASH AND CASH EQUIVALENTS AND TIME DEPOSIT (continued)*

The details of cash and cash equivalents and time deposits based on currency and banks are as follows: (continued)

b. *Time deposits*

The range of the interest rates per annum for time deposits as follows:

For the year ended December 31, 2024, the annual interest rates on time deposits in Indonesian Rupiah ranged from 3.0% to 4.25% The maturity period of these time deposits range from more than 3 months to up to 1 year.

6. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Rincian dana yang dibatasi penggunaannya berdasarkan jenis mata uang dan nama bank sebagai berikut:

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024: Rp40.254 juta; 2023: Rp14.074 juta)	2.490.677	912.972	*PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. (2024: Rp40,254 million; 2023: Rp14,074 million)*
PT Bank KB Bukopin Syariah (2024: Rp6.900 juta; 2023: Rp4.245 juta)	426.937	275.385	*PT. Bank KB Bukopin Syariah (2024: Rp6,900 million; 2023: Rp4,245 million)*
PT Bank Pan Indonesia Tbk. (2024: Rp4.119 juta; 2023: Rp2.275 juta)	254.899	147.551	*PT Bank Pan Indonesia(Persero)Tbk. (2024: Rp4,119 million; 2023: Rp2,275 million)*
	3.172.513	**1.335.908**	

6. *RESTRICTED FUNDS*

The details of restricted funds based on currency and banks are as follows:

6. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA (lanjutan) / *6. RESTRICTED FUNDS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2024, dana yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT Bank Pan Indonesia Tbk. merupakan *sinking funds* yang dialokasikan oleh HTK2, HTK3 dan HTC, entitas anak, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman kredit (Catatan 25).

As of December 31, 2024, funds placed in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank KB Bukopin Syariah and PT Bank Pan Indonesia Tbk represent sinking funds allocated by HTK2, HTK3 and HTC, subsidiaries, as required in the loan agreements (Note 25).

7. PIUTANG USAHA / *7. TRADE RECEIVABLES*

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 37)			*Related parties (Note 37)*
Dalam Rupiah			*In Rupiah*
(2024: Rp 28.839 juta;			*(2024: Rp 28,839 million;*
2023: Rp 86.554 juta)	1.784.367	5.614.575	*2023: Rp86,554 million)*
Dalam Dolar AS	-	1.614.906	*In US Dollar*
Sub-total	1.784.367	7.229.481	*Sub-total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Dalam Rupiah			*In Rupiah*
(2024: Rp388.048 juta;			*(2024: Rp388,048 million;*
2023: Rp217.499 juta)	24.009.939	14.108.638	*2023: Rp217,499 million)*
Dalam Dolar AS	4.423.303	157.665	*In US Dollar*
Sub-total	28.433.242	14.266.303	*Sub-total*
Dikurangi: penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian			*Less: Allowance for expected credit losses*
Pihak ketiga	(1.346.229)	(1.201.055)	*Third parties*
Piutang usaha, neto	**28.871.380**	**20.294.729**	***Trade receivables, net***

Piutang usaha terutama merupakan piutang dari pemberian jasa sewa kapal.

The trade receivables mainly represent the vessel charter services.

Analisa piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2024	2023	
Belum jatuh tempo	14.405.307	14.557.304	*Current*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 hingga 30 hari	10.177.265	3.675.324	*1 to 30 days*
31 hingga 60 hari	1.847.725	1.018.580	*31 to 60 days*
61 hingga 90 hari	670.752	216.191	*61 to 90 days*
lebih dari 90 hari	3.116.560	2.028.385	*over 90 days*
	30.217.609	21.495.784	
Dikurangi: penyisihan atas kerugian kredit ekspektasin	(1.346.229)	(1.201.055)	*Less: Allowance for expected credit losses*
Piutang usaha, neto	**28.871.380**	**20.294.729**	***Trade receivables, net***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *7. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Detail saldo piutang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

	2024	2023	
Rupiah (2024: Rp416.888 juta; 2023: Rp304.053 juta)	25.794.306	19.723.214	*Rupiah (2024: Rp416,8828 million; 2023: Rp304,053 million)*
Dolar AS	4.423.303	1.772.570	*US Dollar*
	30.217.609	21.495.784	
Dikurangi: penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian	(1.346.229)	(1.201.055)	*Less: allowance for expected credit losses*
Piutang usaha, neto	**28.871.380**	**20.294.729**	***Trade receivables, net***

Mutasi saldo penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

The movements in balance of allowance for expected credit losses are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal tahun	1.201.055	1.238.710	*Balance at the beginning of the year*
Penambahan tahun berjalan	203.664	-	*Additions during the year*
Pemulihan piutang	-	(59.375)	*Recovery of allowance*
Selisih kurs	(58.490)	21.720	*Foreign exchange difference*
Saldo akhir tahun	**1.346.229**	**1.201.055**	***Balance at the end of the year***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for expected credit losses on trade receivables at the end of the year, the management believes that the allowance for expected credit losses of trade receivables above is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

Beberapa piutang milik Grup dengan total nilai pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS$5.358.319 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang tertentu (Catatan 25).

Several receivable owned by the Group with a total net values of US$5,358,319 as of December 31, 2024, are pledged as collateral for certain long-term bank loans (Note 25).

8. PIUTANG LAINNYA / *8. OTHER RECEIVABLES*

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2024	2023	
Pihak ketiga	**139.688**	**9.900.624**	*Third parties*

8. PIUTANG LAINNYA (lanjutan)

Piutang lainnya terutama merupakan piutang pembayaran pembangunan kapal, dana talangan, biaya manajemen dan kru kapal.

Pada tanggal 27 Juli 2023, PCSI, OTSI, dan HTC, entitas anak, menyepakati perjanjian pembangunan kapal dengan PT Trinusa Mulya Mandiri (“TMM”), pihak ketiga. Pada tanggal 29 Desember 2023, seluruh pihak telah bersepakat untuk melakukan pengakhiran perjanjian kerjasama pembangunan kapal tersebut. Pada tanggal 21 Maret 2024, TMM telah mengembalikan uang muka tersebut kepada PCSI, OTSI, dan HTC seluruhnya.

Berdasarkan penilaian atas kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

8. OTHER RECEIVABLES (continued)

Other receivables mainly represent receivable arising from ship building, reimbursement expense, management fee and crew payments.

On July 27, 2023, PCSI, OTSI, and HTC, subsidiaries, agreed to the shipbuilding agreement ith PT Trinusa Mulya Mandiri ("TMM"), a third party. On December 29, 2023, all parties agreed to terminate the shipbuilding agreement. As of March 21, 2024, TMM has fully refunded all advance to PCSI, OTSI, and HTC.

Based on the assessment of expected credit losses on other receivables at the end of the year, management believes that an allowance for impairment of other receivables is not considered necessary.

9. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

9. INVENTORIES

Inventories consist of:

	2024	2023	
Bahan bakar kapal	6.219.222	3.944.902	*Vessel's fuel*
Suku cadang, perlengkapan kapal, dan minyak pelumas	945.823	871.792	*Supplies vessel, vessel spare part, and lubricating oils*
Air bersih	8.477	6.342	*Fresh water*
	7.173.522	**4.823.036**	

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai persediaan atau keusangan persediaan tidak diperlukan, mengingat semua persediaan dapat digunakan.

Grup tidak mengasuransikan persediaan mengingat jenis, sifat dan risiko masing-masing persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan.

Management believes that allowance for decline in value or obsolescence of inventories is not required, as all inventories are usable.

The Group does not insure the inventories considering the type, nature and risks of the inventories.

As of December 31, 2024 and 2023, there is no inventory used as collateral.

10. ASET LANCAR LAINNYA / *10. OTHER CURRENT ASSETS*

	2024	2023	
Pihak-pihak ketiga:			*Third parties:*
Uang muka	640.077	926.853	*Advances*
Asuransi dibayar di muka	554.455	502.185	*Prepaid insurance*
Bank garansi	116.500	-	*Bank guarantee*
Lain-lain (dibawah AS$100.000)	61.329	172.860	*Others (under US$100,000)*
	1.372.361	**1.601.898**	

Uang muka merupakan uang muka pembelian suku cadang, dan operasional kapal.

Advances represent advances for purchase of spare parts, and vessels operations.

Asuransi dibayar di muka merupakan uang muka pembayaran asuransi kapal.

Prepaid insurance represent prepaid for vessel insurance.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE ENTITY*

			2024			
	% kepemilikan/ *of ownership*	Nilai tercatat 1 Jan. 2024/ *Carrying amount Jan 1, 2024*	Penambahan/ (Pengurangan)/ *Addition/ (Deduction)*	Bagian laba/ *Share of gain*	Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*	Nilai tercatat 31 Des. 2024/ *Carrying amount Dec 31, 2024*
Perusahaan asosiasi/ *Associated company*						
Entitas anak/*Subsidiary*						
Metode ekuitas/*Equity method*						
PT Jawa Satu Regas	**25%**	**13.015.181**	**-**	**496.495**	**852.952**	**14.364.628**

			2023			
	% kepemilikan/ *of ownership*	Nilai tercatat 1 Jan. 2023/ *Carrying amount Jan 1, 2023*	Penambahan/ (Pengurangan)/ *Addition/ (Deduction)*	Bagian rugi/ *Share of loss*	Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*	Nilai tercatat 31 Des. 2023/ *Carrying amount Dec 31, 2023*
Perusahaan asosiasi/ *Associated company*						
Entitas anak/*Subsidiary*						
Metode ekuitas/*Equity method*						
PT Jawa Satu Regas	**25%**	**13.477.835**	**-**	**(80.677)**	**(381.977)**	**13.015.181**

PT Jawa Satu Regas ("JSR") didirikan pada tanggal 22 Juni 2018, untuk memiliki dan mengoperasikan jasa unit penyimpanan dan regasifikasi terapung.

PT Jawa Satu Regas ("JSR") was established on June 22, 2018, to own and operate the LNG floating storage regasification unit.

11. INVESTASI DI ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan informasi keuangan atas entitas asosiasi:

11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE ENTITY (continued)

The following table illustrates summarized financial information of an associated company:

Perusahaan asosiasi	**2024**	**2023**	***Associated company***
PT Jawa Satu Regas			*PT Jawa Satu Regas*
Total aset lancar	27.507.823	29.978.161	*Total current assets*
Total aset tidak lancar	296.130.825	318.004.389	*Total non-current assets*
Total liabilitas jangka pendek	20.448.742	43.716.210	*Total current liabilities*
Total liabilitas jangka panjang	254.272.774	260.746.998	*Total non-current liabilities*
Ekuitas	48.917.132	43.519.342	*Equity*
Pendapatan atas kontrak dari pelanggan	21.999.115	-	*Revenue from contracts with customers*
Laba/(rugi) tahun berjalan	1.985.981	(322.706)	*Gain/ (loss) for the year*
Penghasilan komprehensif lain	3.411.809	(1.527.903)	*Other comprehensive income*

Investasi pada PT Jawa Satu Regas ("JSR"), entitas asosiasi, merupakan investasi PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), entitas anak, dengan persentase kepemilikan sebesar 25%. Penyertaan pada entitas asosiasi ini dicatat menggunakan metode ekuitas.

Investment in PT Jawa Satu Regas ("JSR"), an associated company, represents the investment of PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), a subsidiary, involving an ownership interest of 25%. This investment is recorded using equity method.

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

	2024						
	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposal***	**Efek Selisih Kurs/*Foreign Exchange Effect***	**Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment***	**Saldo Akhir/ *Ending Balances***	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Kapal dan kapal tunda	206.515.275	33.939.688	(3.223.493)	(1.053.981)	356.205	236.533.694	*Vessels and tugs*
Bangunan	255.280	-	-	-	-	255.280	*Building*
Perabotan dan perlengkapan kantor	680.627	309.417	(11.120)	(25.772)	-	953.152	*Office furniture and equipment*
Kendaraan	626.227	576.018	(186.384)	(26.230)	-	989.631	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	568.225	136.387	-	(17.498)	(687.114)	-	*Asset under construction*
	208.645.634	34.961.510	(3.420.997)	(1.123.481)	(330.909)	238.731.757	
Aset sewa							*Leased assets*
Kendaraan	421.306	23.627	-	(232.612)	-	212.321	*Vehicles*
	209.066.940	34.985.137	(3.420.997)	(1.356.093)	(330.909)	238.944.078	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Kapal dan kapal tunda	101.781.682	16.075.265	(3.223.493)	(579.748)	-	114.053.706	*Vessels and tugs*
Bangunan	23.569	85.768	-	(212)	-	109.125	*Building*
Perabotan dan perlengkapan kantor	510.461	85.147	(4.018)	(2.220)	-	589.370	*Office furniture and equipment*
Kendaraan	138.569	230.239	(115.393)	(104.622)	-	148.793	*Vehicles*
	102.454.281	16.476.419	(3.342.904)	(686.802)	-	114.900.994	
Aset sewa							*Leased assets*
Kendaraan	253.787	30.389	-	(138.121)	-	146.055	*Vehicles*
	102.708.068	16.506.808	(3.342.904)	(824.923)	-	115.047.049	
Penurunan nilai kapal	740.113	240.000	(201.487)	-	-	778.626	*Impairment of vessels*
	103.448.181	16.746.808	(3.544.391)	(824.923)	-	115.825.675	
	105.618.759					**123.118.403**	

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*[1]	Pengurangan/ *Disposal*	Efek Selisih Kurs/*Foreign Exchange Effect*	Reklasifikasi dan penyesuaian/ *Reclassification and adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Kapal dan kapal tunda	205.300.192	8.396.717	(12.955.851)	159.359	5.614.858	206.515.275	*Vessels and tugs*
Bangunan	-	255.280	-	-	-	255.280	*Building*
Perabotan dan perlengkapan kantor	565.770	86.665	(5.688)	33.880	-	680.627	*Office furniture and equipment*
Kendaraan	307.399	406.742	(88.126)	212	-	626.227	*Vehicles*
Aset dalam pembangunan	3.299.642	2.804.534	-	78.907	(5.614.858)	568.225	*Asset under construction*
	209.473.003	11.949.938	(13.049.665)	272.358	-	208.645.634	
Aset sewa							*Leased assets*
Kendaraan	361.310	94.635	(40.328)	5.689	-	421.306	*Vehicles*
	209.834.313	12.044.573	(13.089.993)	278.047	-	209.066.940	
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct ownership*
Kapal dan kapal tunda	98.196.464	13.225.235	(9.831.508)	191.491	-	101.781.682	*Vessels and tugs*
Bangunan	-	23.569	-	-	-	23.569	*Building*
Perabotan dan perlengkapan kantor	424.399	84.610	(5.477)	6.929	-	510.461	*Office furniture and equipment*
Kendaraan	118.684	98.397	(79.317)	805	-	138.569	*Vehicles*
	98.739.547	13.431.811	(9.916.302)	199.225	-	102.454.281	
Aset sewa							*Leased assets*
Kendaraan	218.820	56.949	(26.058)	4.076	-	253.787	*Vehicles*
	98.958.367	13.488.760	(9.942.360)	203.301	-	102.708.068	
Penurunan nilai kapal	201.487	538.626	-	-	-	740.113	*Impairment of vessels*
	99.159.854	14.027.386	(9.942.360)	203.301	-	103.448.181	
	110.674.459					**105.618.759**	

Penambahan beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Addition of depreciation expense was allocated to the following:

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 41)	16.075.265	13.225.235	*Cost of revenue (Note 41)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 42)	431.543	263.525	*General and administrative (Note 42)*
	16.506.808	**13.488.760**	

Rincian rugi penurunan nilai aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of impairment losses of fixed assets are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	740.113	201.487	*Beginning balance*
Penambahan tahun berjalan	240.000	538.626	*Addition during the year*
Pemulihan tahun berjalan	(201.487)	-	*Recovery during the year*
	778.626	**740.113**	

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup telah melakukan pengujian penurunan nilai untuk beberapa aset tetap. Sebagai hasil pengujian, salah satu jumlah tercatat unit penghasil kas melebihi jumlah terpulihkannya. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa saldo penyisihan penurunan nilai aset tetap cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

As of December 31, 2024, the Group performed impairment testing for several fixed assets. As a result of the tests, one of the carrying amount of the cash-generating unit exceed its recoverable amount. Therefore, management believes that the allowance for impairment losses of fixed assets is adequate to cover possible losses.

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2024, kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup terdiri dari:

As of December 31, 2024, vessels owned by the Group consist of:

Jenis kapal/ Vessel type	Nilai buku neto 31 Desember 2024/ *Net book value December 31, 2024*
Kapal gas alam cair ("LNG")/*Vessel liquefied natural gas ("LNG")*	43.080.584
Kapal kimia cair/*Chemical vessel*	23.416.317
Kapal minyak jadi/*Oil product vessel*	21.988.258
Kapal tunda/*Tug boats*	12.179.117
Kapal minyak mentah/*Crude oil vessel*	11.442.857
Kapal tunda/*Harbour tug*	7.623.329
Tongkang/*Barge*	1.970.900
TOTAL	**121.701.362**

Rincian aset tetap yang dilepas adalah sebagai berikut:

The details of fixed assets disposed are as follows:

	2024	2023	
Harga jual neto	-	3.300.000	*Net proceeds*
Nilai buku neto	78.093	3.124.343	*Net book value*
(Kerugian)/keuntungan pelepasan aset tetap, neto	**(78.093)**	**175.657**	***(Loss)/gains on disposal of of fixed asset, net***

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 Grup melakukan pelepasan aset tetap dengan nilai buku sebesar AS$78.093. Grup mengakui kerugian penjualan aset tetap sebesar AS$78.093 (2023: keuntungan sebesar AS$175.657) atas pelepasan aset tetap ini.

For the year ended December 31, 2024, the Group disposed fixed asset with book value of US$78,093. The Group recognized loss on sale of fixed asset of US$78,093 (2023: gain amounted to US$175,657) on disposal of these fixed assets.

Beberapa aset tetap milik Grup dengan total nilai buku pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar AS$45.647.285 digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka panjang tertentu (Catatan 25).

Several fixed assets owned by the Group with a total net book values of US$45,647,285 as of December 31, 2024, are pledged as collateral for certain long-term bank loans (Note 25).

Kapal-kapal yang dijaminkan kepada kreditur (Catatan 25) adalah sebagai berikut:

Vessels pledged to the creditors (Note 25) are as follows:

Perusahaan/ *Company*	Kreditur/ *Creditors*	Nama Kapal/ *Vessel Name*
PT Hutama Trans Kencana	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Kapal minyak jadi dan kimia cair/*Oil product and chemical vessels*
PT Hutama Trans Kencana	PT Bank KB Bukopin Syariah	Kapal minyak jadi, minyak mentah dan kimia cair/*Oil product, chemical and crude oil vessels*
PT Hutama Trans Kontinental	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Kapal kimia cair/*Chemical vessels*
PT Humpuss Transportasi Curah	PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")	Kapal tunda dan tongkang/*Tug boats and barge*

Pada tanggal 31 Desember 2024, seluruh aset dalam pembangunan telah diselesaikan.

As of December 31, 2024, all asset under construction has been completed.

12. ASET TETAP (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The details of assets under construction as of December 31, 2023 are as follows:

Jenis aset tetap / *Type of fixed assets*	Tanggal 31 Desember 2023/*As of December 31, 2023*			
	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Estimasi tanggal penyelesaian/ *Estimated date of completion*	
Kapal dan kapal tunda	90%	568.225	April 2024 /*April 2024*	*Vessel and tugs*

Aset dalam penyelesaian di atas telah selesai seluruhnya pada bulan April 2024.

The above construction in progress is completed in April 2024.

Kapal-kapal yang dimiliki sendiri telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar AS$237.866.130 yang meliputi penutupan kerugian atas kerusakan rangka dan mesin-mesin kapal. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan untuk aset tetap kapal tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

The owned vessels have been insured for US$237,866,130 to cover losses from hull and machineries vessel damage. The Group's management believes that the insurance coverage for these vessels is adequate to cover the risk of potential loss of the insured assets.

13. ASET HAK GUNA, NETO / *13. RIGHT OF USE ASSETS, NET*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024						
	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Efek Selisih Kurs/*Foreign Exchange Effect*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Kapal	37.361.225	6.297.591	-	-	-	43.658.816	*Vessels*
Bangunan	4.427.747	525.863	(240.021)	(321.411)	-	4.392.178	*Building*
Total biaya perolehan	41.788.972	6.823.454	(240.021)	(321.411)	-	48.050.994	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi							***Accumulated amortization***
Kapal	2.198.603	2.950.124	-	-	-	5.148.727	*Vessels*
Bangunan	1.083.365	515.744	(240.021)	(147.515)	-	1.211.573	*Building*
Total akumulasi amortiasi	3.281.968	3.465.868	(240.021)	(147.515)	-	6.360.300	*Total accumulated amortization*
	38.507.004					**41.690.694**	

13. ASET HAK GUNA, NETO (lanjutan) / *13. RIGHT OF USE ASSETS, NET (continued)*

	2023						
	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Disposal*	Efek Selisih Kurs/*Foreign Exchange Effect*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Kapal	8.164.924	29.196.301	-	-	-	37.361.225	*Vessels*
Bangunan	1.989.190	2.651.050	(210.965)	(1.528)	-	4.427.747	*Building*
Total biaya perolehan	10.154.114	31.847.351	(210.965)	(1.528)	-	41.788.972	*Total acquisition cost*
Akumulasi amortisasi							***Accumulated amortization***
Kapal	78.254	2.120.349	-	-	-	2.198.603	*Vessels*
Bangunan	417.176	695.115	(20.487)	(8.439)	-	1.083.365	*Building*
Total akumulasi amortiasi	**495.430**	**2.815.464**	**(20.487)**	**(8.439)**	**-**	**3.281.968**	***Total accumulated amortization***
	9.658.684					**38.507.004**	

Beban amortisasi yang dibebankan ke operasi sebagai bagian dari berikut ini:

Amortization expenses were charged to operations as part of the following:

	2024	2023	
Beban pokok usaha	2.950.124	2.120.349	*Cost of revenue*
Beban umum dan administrasi (Catatan 42)	515.744	695.115	*General and administrative expense (Note 42)*
	3.465.868	**2.815.464**	

14. GOODWILL / *14. GOODWILL*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2024	2023	
Goodwill	**742.565**	**778.499**	*Goodwill*

Goodwill berasal dari transaksi akuisisi tambahan 40% kepemilikan saham di HTC pada tanggal 11 Oktober 2018, yang merupakan selisih atas harga beli AS$4.988.361 dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi sebesar AS$4.184.467 dan efek translasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar AS$61.329, dan AS$25.395. Pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas *goodwill*.

Goodwill resulted from acquisition of an additional 40% share ownerships in HTC on October 11, 2018, which derived from the difference between the purchase price consideration amounted to US$4,988,361 and the fair value of identifiable net assets amounted to US$4,184,467 and with the translation effect on December 31, 2024 and 2023 amounted to US$61,329 and US$25,395, respectively. At year end, management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai wajar dikurangi biaya pelepasan" dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Ringkasan dari asumsi utama yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

For impairment testing purposes, the recoverable amount of the CGU was determined based on "fair value less cost to disposal" using discounted cash flows method. The summary of key assumptions used as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024	2023	
Tingkat diskonto	9,88%	10,34%	*Discount rate*
Tingkat kelangsungan pertumbuhan	3,40%	2,61%	*Perpetuity growth rate*

14. *GOODWILL* (lanjutan) / *GOODWILL (continued)*

Goodwill di atas diuji untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Manajemen berkeyakinan tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal 31 Desember 2024, karena jumlah terpulihkan dari UPK lebih tinggi dari nilai tercatat UPK beserta *goodwill* terkait.

The goodwill was tested for impairment at December 31, 2024 and 2023. Management believe there was no impairment loss recognized at December 31, 2024 as the recoverable amounts of CGU was in excess of the carrying value of the CGU and the related goodwill.

15. UANG JAMINAN / *REFUNDABLE DEPOSITS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2024	2023	
Jaminan sewa kapal	272.113	400.808	*Vessel rental deposits*
Jaminan sewa kantor	84.916	53.551	*Office rental deposits*
Lain-lain	26.963	22.384	*Others*
	383.992	**476.743**	

Jaminan sewa kapal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 merupakan jaminan atas sewa kapal oleh HTK2, entitas anak, kepada PT Pelayaran Citra Armada Nusantara, pihak ketiga.

Vessel rental deposits as of December 31, 2024 and 2023, represents deposits for charter vessel by HTK2, a subsidiary, to PT Pelayaran Citra Armada Nusantara, a third party.

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2024	2023	
Uang muka pembelian aset tetap	2.000.000	1.524.515	*Advance for purchase of fixed assets*
Perangkat lunak	184.698	-	*Software*
Uang muka pengedokan	64.727	798.672	*Advances for docking*
Lain-lain	223.682	286.708	*Others*
	2.473.107	**2.609.895**	

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, uang muka penambahan aset hak guna kapal dan aset tetap oleh HTK2, entitas anak.

As of December 31, 2024 and 2023, advance for addition of right of use asset and fixed assets represents advance for vessel from HTK2, a subsidiary.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, uang muka pengedokan merupakan uang muka pengedokan untuk kapal Triputra oleh BIS, entitas anak.

As of December 31, 2024 and 2023, advance for docking are advances for docking of Triputra by BIS, a subsidiary.

17. UTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan utang usaha kepada pihak ketiga sehubungan dengan, antara lain: (i) pembelian persediaan dan suku cadang yang digunakan untuk keperluan kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup; (ii) utang atas biaya pengedokan kapal-kapal yang dimiliki oleh Grup dan utang atas sewa kapal.

This account represents payables to third parties involving, among others: (i) purchases of inventories and consumables for vessels owned by the Group; and (ii) docking expenses payable for vessels owned by the Group and payable for rent vessels.

	2024	2023	
Pihak-pihak ketiga:			*Third parties:*
- Rupiah			*Rupiah -*
(2024: Rp174.384 juta; 2023: Rp185.382 juta)	10.789.763	12.025.297	*(2024: Rp174,384 million; 2023: Rp185,382 million)*
- Dolar AS	463.144	634.876	*US Dollar -*
- Euro			*Euro -*
(2024: EUR18.659; 2023: EUR5.389)	19.437	5.988	*(2024: EUR18,659; 2023: EUR5,389)*
- Yen Jepang			*Japanese Yen -*
(2024: JP¥2.196 ribu; 2023: JP¥72.024 ribu)	13.912	511.829	*(2024: JP¥2,196 thousand; 2023: JP¥72,024 thousand)*
- Dolar Singapura			*Singapore Dollar -*
(2024: SG$3.275; 2023: SG$22.695)	2.415	17.193	*(2024: SG$3,275; 2023: SG$22,695)*
	11.288.671	13.195.183	
Pihak berelasi (Catatan 37):			*Related parties (Note 37):*
- Rupiah			*Rupiah -*
(2024: Rp162.276 juta; 2023: Rp120.462 juta)	10.040.602	7.814.095	*(2024: Rp162,276 million; 2023: Rp120,462 million)*
Utang usaha, neto	**21.329.273**	**21.009.278**	***Trade payables, net***

Saldo utang usaha pada akhir periode tidak dijaminkan. Tidak ada jaminan yang diberikan maupun diterima untuk utang usaha. Untuk penjelasan tentang manajemen risiko likuiditas Grup, lihat Catatan 46.

Outstanding balances of trade payables at the end of period are unsecured. There have been no guarantees provided or received for any trade payables. For explanation on the Group's liquidity risk management processes, refer to Note 46.

18. UTANG DIVIDEN / *18. DIVIDEND PAYABLE*

	2024	2023	
Pihak-pihak ketiga:			*Third parties:*
Pemegang saham non pengendali dari entitas anak	**222.707**	**-**	*The non-controlling interest shareholders of subsidiary*

Pada tanggal 30 Desember 2024, berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris menyetujui Direksi GTSI, entitas anak, mengumumkan interim dividen periode 2024 sebesar AS$222.707 (setara dengan Rp3.596.479.238) kepada pihak non-pengendali, yang dibagikan pada Januari 2025.

On December 30, 2024, based on the decision letter from the Board of Commissioners, the Board of Directors GTSI, a subsidiary, declared interim dividend for the fiscal year 2024 amounting to US$222,707 (equivalent to Rp3,596,479,238) to non-controlling interests, which were distributed on January 2025.

19. UTANG LAIN-LAIN / *19. OTHER PAYABLES*

Akun ini merupakan utang lain-lain kepada pihak ketiga sehubungan dengan utang atas operasional awak kapal.

This account represents payables to third parties related to payables for operational crew vessels.

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *20. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	2024	2023	
Bunga	7.269.797	5.809.681	*Interest*
Jasa profesional	281.046	238.228	*Professional fees*
Operasi kapal	121.079	1.087.959	*Vessel operations*
Pengedokan	-	1.157.697	*Docking*
Lain-lain	1.076.359	1.471.422	*Others*
	8.748.281	**9.764.987**	

21. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *21. DEFERRED INCOME*

Rincian pendapatan tangguhan adalah sebagai berikut: / *The details of deferred income are as follows:*

	2024	2023	
Pihak ketiga	**-**	**34.834**	*Third parties*

Pendapatan ditangguhkan merupakan tagihan pendapatan kontrak sewa kapal untuk tahun buku berikutnya dan penerimaan di muka yang akan dicatat sebagai pendapatan pada saat biaya yang terkait dengan penerimaan tersebut dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

Deferred income represents time charter income for the upcoming fiscal year, as well as advance receipts that will be recognized as revenue when the associated costs are recorded in the consolidated financial statements.

22. LIABILITAS KONTRAK / *22. CONTRACT LIABILITIES*

	2024	2023	
Entitas asosiasi	248.160	-	*Associated entity*
Pihak-pihak ketiga	157.909	227.198	*Third parties*
	406.069	**227.198**	

Pada tanggal 31 Desember 2024, liabilitas kontrak merupakan uang muka dari pelanggan yang akan digunakan untuk biaya operasional kapal Jawa Satu, penyewaan kapal tunda, dan agen pelayaran.

As of December 31, 2024, contract liabilities represents advance from customer that will be used for the operational costs of the Jawa Satu vessel, charter of tug boat, and shipping agency.

23. LIABILITAS SEWA / *23. LEASE LIABILITIES*

Liabilitas sewa Grup pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The Group's lease liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Kapal dan bangunan / ***Vessels and buildings***

	2024	2023	
Saldo awal	30.561.839	8.553.991	*Beginning balance*
Penambahan	6.554.857	29.743.724	*Addition*
Penambahan bunga	1.246.547	847.591	*Accretion of interest*
Pembayaran	(8.381.315)	(8.319.528)	*Payments*
Efek selisih kurs	(225.521)	(227.778)	*Foreign exchange effect*
Pengurangan	(807)	(36.161)	*Deduction*
Total liabilitas	**29.755.600**	**30.561.839**	***Total liabilities***
Dikurangi bagian jangka pendek	(6.508.002)	(5.320.993)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**23.247.598**	**25.240.846**	***Long-term portion***

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sewa yang timbul dari hak guna atas sewa kapal Hanyu Glory sampai 27 November 2027, sewa kapal New Stella sampai 7 Mei 2028, sewa kapal Asian Rigel sampai 1 Juli 2028, sewa kapal Arahan sampai 9 November 2028, sewa kapal Mutiara Global sampai 23 Mei 2028, sewa Gedung Mangkuluhur Office Tower One dan Gedung Granadi selama 10 tahun, serta sewa kantor Singapore Convention & Exhibition Centre untuk 2,5 tahun.

The lease liabilities represent lease liabilities arising from right of use of Hanyu Glory vessel until November 27, 2027, New Stella vessel until May 7, 2028, Asian Rigel vessel until July 1, 2028, Arahan vessel until November 9, 2028, Mutiara Global vessel until May 23, 2028, Mangkuluhur Office Tower One Building and Granadi Building for 10 years, also Singapore Convention & Exhibition Centre Buildin for 2.5 years.

24. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *24. CONSUMER FINANCE LEASE*

Kendaraan / ***Vehicle***

	2024	2023	
PT Maybank Indonesia Finance	142.151	119.569	*PT Maybank Indonesia Finance*
PT BNI Multifinance	140.380	112.093	*PT BNI Multifinance*
PT Toyota Astra Financial Services	55.841	48.082	*PT Toyota Astra Financial Services*
PT Clipan Finance Indones Tbk.	38.987	51.092	*PT Clipan Finance Indones Tbk.*
PT Mandiri Tunas Finance	15.624	-	*PT Mandiri Tunas Finance*
Total liabilitas sewa	**392.983**	**330.836**	***Total lease liabilities***
Dikurangi bagian jangka pendek	(147.087)	(74.032)	*Less current portion*
Bagian jangka panjang	**245.896**	**256.804**	***Long-term portion***

24. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / *24. CONSUMER FINANCE LEASE (continued)*

Rincian sewa pembiayaan kendaraan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group finance lease of vehicles are as follows:

	2024	2023	
Dalam satu tahun	147.087	74.032	*Within one year*
Lebih dari satu tahun tetapi kurang dari lima tahun	305.535	328.884	*After one year but not more than five years*
Minimum pembayaran sewa	452.622	402.916	*Minimum lease payments*
Dikurangi bagian bunga	(59.639)	(72.080)	*Less interest portion*
Nilai kini pembayaran sewa minimum	392.983	330.836	*Present value of minimum lease payments*
Bagian jangka pendek	(147.087)	(74.032)	*Current portion*
Bagian jangka panjang	**245.896**	**256.804**	***Long-term portion***

Utang pembiayaan konsumen dijamin oleh kendaraan yang diperoleh melalui utang pembiayaan. Utang pembiayaan konsumen ini dikenakan bunga berkisar antara 3,75% sampai dengan 11% per tahun dan akan jatuh tempo dari May 2025 sampai dengan Juli 2028.

The consumer finance lease are secured by vehicles acquired through finance lease. The consumer finance lease bear interest at rates ranging from 3.75% to 11% per annum and will be mature, vary from May 2025 to July 2028.

25. PINJAMAN BANK / *25. BANK LOANS*

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK / *SHORT-TERM BANK LOANS*

	2024	2023	
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.605.251	1.662.192	*PT Bank Pan Indonesia Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1.529.840	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	227.510	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Total pinjaman bank jangka pendek	3.135.091	1.889.702	*Total short-term bank loans*
Dikurangi:			*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(7.429)	-	*Unamortized costs of loans*
	3.127.662	**1.889.702**	

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (“Panin”)

Berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayuningsih, S.H., No. 23 tanggal 21 Agustus 2019, Panin menyetujui penambahan fasilitas kredit kepada HTC berupa Pinjaman Rekening Koran 1 dengan nilai maksimum sebesar Rp8 miliar, mengubah Pinjaman Rekening Koran 2 dengan nilai maksimal sebesar Rp1.500 juta menjadi sebesar Rp3.500 juta dan Pinjaman Berulang tetap dengan nilai maksimum sebesar Rp20 miliar. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11,75% per tahun.

Berdasarkan Akta Notaris No. 07 dari Sri Rahayuningsih, S.H. tanggal 21 Agustus 2024, kedua belah pihak sepakat untuk mengubah tingkat suku bunga menjadi sebesar 10,5% dan memperpanjang periode fasilitas-fasilitas tersebut hingga 8 Oktober 2025.

PT Bank Pan Indonesia Tbk. (“Panin”)

Based on Notarial Deed No. 23 of Sri Rahayuningsih, S.H., dated August 21, 2019, Panin agreed the additional credit facilities to HTC, such as Overdraft Facility 1 with a maximum amount of Rp8 billion, amendment of Overdraft Facility 2 with a maximum amount of Rp1,500 million to Rp3,500 million and Revolving Credit Facility remain with a maximum amount of Rp20 billion. This facility is subject to interest at the rate of 11,75%.

Based on Notarial Deed No. 07 of Sri Rahayuningsih, S.H. dated August 21, 2024, both parties agreed to change the interest rate to 10.5% and extend the facilities period to October 8, 2025.

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") (lanjutan)

Selama 2024, HTC melakukan penarikan atas pinjaman ini sebesar Rp319 juta atau setara dengan AS$20.101.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo terutang atas fasilitas kredit ini adalah sebesar Rp25.944 juta atau setara dengan AS$1.605.251.

PT Bank Negara Indonesia Tbk. ("BNI")

Berdasarkan surat keputusan kredit tanggal 30 September 2024, BNI setuju untuk memberikan fasilitas "KMK Plafond" kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp25.000 juta atau setara dengan AS$1.546.838. Fasilitas ini tersedia hingga 30 September 2025 dan dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun.

Selama 2024, HTK2 melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp40.250 juta atau setara dengan AS$2.616.181 dan melakukan pembayaran sebesar Rp15.525 juta atau setara dengan AS$984.300.

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo terutang atas fasilitas kredit ini sebesar Rp24.725 juta atau setara dengan AS$1.529.840.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. ("BRI")

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Abraham Yazdi Martin, SH, M.Kn No. 22 tanggal 11 Oktober 2022, BRI menyetujui pembukaan fasilitas "kredit modal kerja withdrawal approval plafond" kepada MCSI sebesar Rp15 miliar dipergunakan untuk tujuan penambahan modal kerja alih daya pengelolaan awak kapal untuk proyek yang dimenangkan dan dikerjakan oleh MCSI dengan pemilik proyek (bowheer), PT Pelindo Marine Services.

Berdasarkan Akta Notaris No. 62 tanggal 26 April 2024 dari Dr. Abraham Yazdi Martin, SH, M.Kn., kedua belah pihak sepakat untuk mengubah plafond menjadi sebesar Rp10 miliar dan memperpanjang periode fasilitas tersebut hingga 26 Januari 2025.

Selama 2024, MCSI melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp6.381 juta atau setara dengan AS$401.175, dan melakukan pembayaran sebesar Rp9.888 juta atau setara dengan AS$621.678. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun dan telah dilunasi seluruhnya oleh MCSI pada tanggal 3 Juli 2024.

25. BANK LOANS (continued)

SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin") (continued)

During 2024, HTC withdrew from this loan with a total amount of Rp319 million or equivalent to US$20,101.

As of December 31, 2024, the outstanding amount of this credit facility amounted to Rp25,944 million or equivalent to US$1,605,251.

PT Bank Negara Indonesia Tbk. ("BNI")

Based on credit decision letter dated September 30, 2024, BNI agreed to provide "KMK Plafond" facility to HTK2 with maximum amount of Rp25,000 million or equivalent to US$1,546,838. This facility is available until September 30, 2025 and subject to interest at the rate of 10.5% per annum.

During 2024, HTK2 withdrew from this loan facility with a total amount of Rp40,250 million or equivalent to US$2,616,181 and made repayment of Rp15,525 million or equivalent to US$984,300.

As of December 31, 2024, the outstanding amount of this credit facility amounted to Rp24,725 million or equivalent to US$1,529,840.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. ("BRI")

Based on Notarial Deed No. 22 of Dr. Abraham Yazdi Martin, SH, M.K, dated October 11, 2022, BRI approve the opening of "working capital credit facility withdrawal approval plafond" of MCSI amounted to Rp15 billion for the purpose of additional working capital of crew vessels management for projects won and carried out by MCSI with project owner (bowheer), PT Pelindo Marine Services.

Based on Notarial Deed No. 62 of Dr. Abraham Yazdi Martin, SH, M.Kn dated April 26, 2024, both parties agreed to change plafond amounted to Rp10 billion and extend the facilities period to January 26, 2025.

During 2024, MCSI withdrew from this loan facility with a total amount of Rp6,381 million or equivalent to US$401,175, and made repayment of Rp9,888 million or equivalent to US$621,678. This loan is subject to interest at the rate of 11% per annum and has been fully paid off by MCSI on July 3, 2024.

25. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *BANK LOANS (continued)*

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG / *LONG-TERM BANK LOANS*

Pinjaman bank jangka panjang terdiri dari: / *Long-term bank loans consist of the following:*

	2024	2023	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	18.210.940	5.546.186	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")*
PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")	13.419.444	9.670.065	*PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")*
PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")	7.918.535	5.681.069	*PT Bank Pan Indonesia Tbk. ("Panin")*
	39.548.919	20.897.320	
Dikurangi:			*Less:*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(248.225)	-	*Unamortized costs of loans*
	39.300.694	20.897.320	
Bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	(10.563.650)	(5.120.775)	*Maturity within a year*
Bagian jangka panjang	**28.737.044**	**15.776.545**	*Sub-total of long-term portion*

Rincian pinjaman bank jangka panjang Grup adalah sebagai berikut: / *The details of the Group long-term bank loans are as follows:*

Kreditur /*Creditor*	Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/*Type of loan and maximum credit limit*		Jadwal pembayaran/*Payment schedule*	Bunga /*interest*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/*Facility maturity date*	Peruntukkan /*purpose*
PT Bank Negara Indonesia Tbk.	Fasilitas Pinjaman Investasi/ *Investment Loan Facility* Rp90.000 juta/*Rp90,000 million*	a)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 45 kali dengan total sejumlah Rp67.500 juta atau setara dengan AS$4.176.463/ *45 monthly remaining installments totalling to Rp67,500 million or equivalent to US$4,176,463*	Tingkat bunga 11% per tahun/ *Interest at the rate of 11% per annum*	Jatuh tempo September 2028/*Will be due in September 2028*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Pinjaman Investasi II/ *Investment Loan Facility II* Rp73.000 juta/ *Rp73,000 million*	b)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 57 kali dengan total sejumlah Rp69.352 juta atau setara dengan AS$4.291.054/ *57 monthly remaining installments totalling to Rp69,352 million or equivalent to US$4,291,054*	Tingkat bunga 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo September 2029/*Will be due in September 2029*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Pinjaman Investasi Pembelian/ Investment Loan Purchasing Facility Rp46.500 juta/ Rp46,500 million	b)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 44 kali dengan total sejumlah Rp41.744 juta atau setara dengan AS$2.582.861/ *44 monthly remaining installments totalling to Rp41,744 million or equivalent to US$2,582,861*	Tingkat bunga 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo Agustus 2028/ *Will be due in August 2028*	Pembiayaan pembelian kapal/ *Financing of vessels acquisition*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

25. BANK LOANS (continued)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Rincian pinjaman bank jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group long-term bank loans are as follows:

Kreditur /*Creditor*	Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/*Type of loan and maximum credit limit*		Jadwal pembayaran/*Payment schedule*	Bunga /*interest*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/*Facility maturity date*	Peruntukkan /*purpose*
PT Bank Negara Indonesia Tbk. (lanjutan/ *continued*)	Fasilitas Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit Facility* Rp20.000 juta/ *Rp20,000 million*	b)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 57 kali dengan total sejumlah Rp19.001 juta atau setara dengan AS$1.175.659/ *57 monthly remaining installments totalling to Rp19,001 million or equivalent to US$1,175,659*	Tingkat bunga 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo September 2029/*Will be due in September 2029*	Modal kerja usaha/ *Working capital*
	Fasilitas Pinjaman Investasi I/ *Investment Loan Facility I* Rp49.000 juta/ *Rp49,000 million*	c)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 54 kali dengan total sejumlah Rp44.800 juta atau setara dengan AS$2.771.934/ *54 monthly remaining installments totalling to Rp44,800 million or equivalent to US$2,771,934*	Tingkat bunga 10% per tahun/ *Interest at the rate of 10% per annum*	Jatuh tempo Juni 2029/*Will be due in June 2029*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Pinjaman Investasi II/ *Investment Loan Facility II* Rp34.600 juta/ *Rp34,600 million*	c)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 30 kali dengan total sejumlah Rp28.828 juta atau setara dengan AS$1.429.279/ *30 monthly remaining installments totalling to Rp28,828 million or equivalent to US$1,429,279*	Tingkat bunga 10% per tahun/ *Interest at the rate of 10% per annum*	Jatuh tempo Juni 2027/*Will be due in June 2027*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Pinjaman Investasi III/ *Investment Loan Facility III* Rp26.400 juta/ *Rp26,400 million*	c)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 42 kali dengan total sejumlah Rp23.100 juta atau setara dengan AS$1.783.690/*42 monthly remaining installments totalling to Rp23,100 million or equivalent to US$1,783,690*	Tingkat bunga 10% per tahun/ *Interest at the rate of 10% per annum*	Jatuh tempo Juni 2028/*Will be due in June 2028*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
PT Bank KB Bukopin Syariah	Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah I/*Musyarakah Mutanaqisah Facility I* Rp75.000 juta/ *Rp75,000 million*	d)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 42 kali dengan total sejumlah Rp56.633 juta atau setara dengan AS$3.504.081/*42 monthly remaining installments totalling to Rp56,633 million or equivalent to US$3,504,081*	Tingkat bunga 11% per tahun/ *Interest at the rate of 11% per annum*	Jatuh tempo Juni 2028/*Will be due in June 2028*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:

25. BANK LOANS (continued)

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The details of the Group long-term bank loans are as follows:

Kreditur /*Creditor*	**Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/*Type of loan and maximum credit limit***		**Jadwal pembayaran/*Payment schedule***	**Bunga /*interest***	**Tanggal jatuh tempo fasilitas/*Facility maturity date***	**Peruntukkan /*purpose***
PT Bank KB Bukopin Syariah (lanjutan/ *continued*)	Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah II/*Musyarakah Mutanaqisah Facility II* Rp52.388 juta/ *Rp52,388 million*	e)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 24 kali dengan total sejumlah Rp34.410 juta atau setara dengan AS$2.129.041/*24 monthly remaining installments totalling to Rp34,410 million or equivalent to US$2,129,041*	Tingkat bunga 11% per tahun/ *Interest at the rate of 11% per annum*	Jatuh tempo Desember 2026/*Will be due in December 2026*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah III/*Musyarakah Mutanaqisah Facility III* Rp33.021 juta/ *Rp33,021 million*	f)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 24 kali dengan total sejumlah Rp21.689 juta atau setara dengan AS$1.341.995/*24 monthly remaining installments totalling to Rp21,689 million or equivalent to US$1,341,995*	Tingkat bunga 11% per tahun/ *Interest at the rate of 11% per annum*	Jatuh tempo Desember 2026/*Will be due in December 2026*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah/ *Musyarakah Mutanaqisah Facility* Rp75.000 juta/ *Rp75,000 million*	g)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 51 kali dengan total sejumlah Rp66.193 juta atau setara dengan AS$4.095.617/*51 monthly remaining installments totalling to Rp66,193 million or equivalent to US$4,095,617*	Tingkat bunga 11% per tahun/ *Interest at the rate of 11% per annum*	Jatuh tempo Maret 2029/*Will be due in March 2029*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessels acquisition*
	Fasilitas Kredit Modal Kerja/ *Working Capital Credit Facility* Rp40.000 juta/ *Rp40,000 million*	h)	Sisa pembayaran bulanan sebanyak 45 kali dengan total sejumlah Rp37.960 juta atau setara dengan AS$2.348.710/ *45 monthly remaining installments totalling to Rp37,960 million or equivalent to US$2,348,710*	Tingkat bunga 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo September 2028/ *Will be due in September 2028*	Modal kerja operasional/ *Operational working capital*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:

25. BANK LOANS (continued)

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The details of the Group long-term bank loans are as follows:

Kreditur /*Creditor*	Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/*Type of loan and maximum credit limit*		Jadwal pembayaran/*Payment schedule*	Bunga /*interest*	Tanggal jatuh tempo fasilitas/*Facility maturity date*	Peruntukkan /*purpose*
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	Fasilitas pinjaman tetap modal angsuran II/ *Fixed working capital installment loan facility II* Rp25.000 juta/ *Rp25,000 million*	i)	-	Tingkat bunga sebesar 11,75% per tahun/ *Interest at the rate of 11.75% per annum*	Telah lunas pada Mei 2024/*Has been repaid in May 2024*	Fasilitas kredit berjangka untuk pembayaran utang debitur/ *Credit loan facility for debt payment*
	Fasilitas pinjaman tetap modal angsuran III/ *Fixed working capital installment loan facility III* Rp63,000 juta/ *Rp63,000 million*	j)	Sisa pembayaran sebesar Rp34.029 juta atau setara dengan AS$2.105.517/ *Remaining installments of Rp34,029 million or equivalent to US$2,105,517*	Tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo pada Agustus 2027/*Will be due in August 2027*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessel acquisition*
	Fasilitas pinjaman tetap modal angsuran IV/ *Fixed working capital installment loan facility IV* Rp40.000 juta/ *Rp40,000 million*	j)	Sisa pembayaran sebesar Rp28.950 juta atau setara dengan AS$1.791.239/ *Remaining installments of Rp28,950 million or equivalent to US$1,791,239*	Tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo pada Juli 2028/*Will be due in July 2028*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessel acquisition*
	Fasilitas pinjaman tetap modal angsuran V/ *Fixed working capital installment loan facility V* Rp29.000 juta/ *Rp29,000 million*	j)	Sisa pembayaran sebesar Rp27.080 juta atau setara dengan AS$1.675.535/ *Remaining installments of Rp27,080 million or equivalent to US$1,675,535*	Tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo pada Agustus 2029/*Will be due in August 2029*	Pembiayaan kembali atas pembelian kapal/ *Refinancing of vessel acquisition*
	Fasilitas pinjaman tetap modal angsuran VI/ *Fixed working capital installment loan facility VI* Rp41.000 juta/ *Rp41,000 million*	j)	Sisa pembayaran sebesar Rp37.920 juta atau setara dengan AS$2.346.244/ *Remaining installments of Rp37,920 million or equivalent to US$2,346,244*	Tingkat bunga sebesar 10,5% per tahun/ *Interest at the rate of 10.5% per annum*	Jatuh tempo pada Agustus 2029/*Will be due in August 2029*	Pembiayaan pembelian kapal/ *Financing of vessel acquisition*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang Grup adalah sebagai berikut:

25. BANK LOANS (continued)

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The details of the Group long-term bank loans are as follows:

a) Berdasarkan surat penawaran No. 024/JJM/PK-KI/2023, tanggal 27 September 2023, BNI memberikan fasilitas kredit investasi kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp90.000 juta atau setara dengan AS$5.568.618/*Based on Summary Offering Letter No. 024/JJM/PK-KI/2023, dated September 27, 2023, BNI agreed to provide investment loan facilities to HTK2 with the maximum amount of Rp90,000 million or equivalent to US$5,568,618.*
b) Berdasarkan surat penawaran No. CMB1/8/170/R, tanggal 30 September 2024, BNI memberikan fasilitas kredit investasi kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp139.500 juta atau setara dengan AS$8.631.357/*Based on Summary Offering Letter No. CMB1/8/170/R, dated September 30, 2024, BNI agreed to provide investment loan facilities to HTK2 with the maximum amount of Rp139,500 million or equivalent to US$8,631,357.*
c) Berdasarkan surat penawaran No. CMB1/8/117/R, tanggal 21 Juni 2024, BNI memberikan fasilitas kredit investasi kepada HTK3 dengan nilai maksimum sebesar Rp110.000 juta atau setara dengan AS$6.806.088/*Based on Summary Offering Letter No. CMB1/8/117/R, dated June 21, 2024, BNI agreed to provide investment loan facilities to HTK3 with the maximum amount of Rp110,000 million or equivalent to US$6,806,088.*
d) Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahua, SH., Mkn., No. 27, tanggal 31 Mei 2023, KBBS memberikan fasilitas musyawarah mutanaqisah kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp75.000 juta atau setara dengan AS$4.640.515/*Based on Notarial Deed No. 27, dated May 31, 2023 of Muchlis Patahua, SH., Mkn., KBBS agreed to provide musyawarah mutanaqisah facility to HTK2 with the maximum amount of Rp75,000 million or equivalent to US$4,640,515.*
e) Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahua, SH., Mkn., No. 21, tanggal 20 Oktober 2023, KBBS memberikan fasilitas musyawarah mutanaqisah kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp52.388 juta atau setara dengan AS$3.241.436/*Based on Notarial Deed No. 21, dated October 20, 2023 of Muchlis Patahua, SH., Mkn., KBBS agreed to provide musyawarah mutanaqisah facility to HTK2 with the maximum amount of Rp52,388 million or equivalent to US$3,241,436*.
f) Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahua, SH., Mkn., No. 22, tanggal 20 Oktober 2023, KBBS memberikan fasilitas musyawarah mutanaqisah kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp33.021 juta atau setara dengan AS$2.043.170/*Based on Notarial Deed No. 22, dated October 20, 2023 of Muchlis Patahua, SH., Mkn., KBBS agreed to provide musyawarah mutanaqisah facility to HTK2 with the maximum amount of Rp33,021 million or equivalent to US$2,043,170*.
g) Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahua, SH., Mkn., No. 9, tanggal 14 Maret 2024, KBBS memberikan fasilitas musyawarah mutanaqisah kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp75.000 juta atau setara dengan AS$4.640.515/*Based on Notarial Deed No. 9, dated March 14, 2024 of Muchlis Patahua, SH., Mkn., KBBS agreed to provide musyawarah mutanaqisah facility to HTK2 with the maximum amount of Rp75,000 million or equivalent to US$4,640,515.*
h) Berdasarkan Akta Notaris Muchlis Patahua, SH., Mkn., No. 13, tanggal 12 September 2024, KBBS memberikan fasilitas musyawarah mutanaqisah kepada HTK2 dengan nilai maksimum sebesar Rp40.000 juta atau setara dengan AS$2.474.941/*Based on Notarial Deed No. 13, dated September 12, 2024 of Muchlis Patahua, SH., Mkn., KBBS agreed to provide musyawarah mutanaqisah facility to HTK2 with the maximum amount of Rp40,000 million or equivalent to US$2,474,941.*
i) Fasilitas pinjaman ini telah dilunasi oleh HTC pada tanggal 15 Mei 2024/*This loan facility has been fully settled by HTC on May 15, 2024.*
j) Berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayuningsih, SH. No. 07, tanggal 21 Agustus 2024, Panin memberikan fasilitas pinjaman tetap modal angsuran kepada HTC dengan nilai maksimum sebesar Rp173.000 juta atau setara dengan AS$10.704.121/*Based on Notarial Deed No. 07, dated August 21, 2024 of Sri Rahayuningsih, SH., Panin agreed to provide fixed working capital installment loan facilities to HTC with the maximum amount of Rp173,000 million or equivalent to US$10,704,121.*

Jumlah pembayaran cicilan pokok pinjaman bank jangka panjang yang dilakukan selama tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, dan 2023 adalah sebagai berikut:

Total installment payments of long-term bank loan principal made for the year ended December 31, 2024, dan 2023 are as follows:

	2024	2023	
KBBS	2.919.729	735.345	*KBBS*
BNI	2.295.600	1.206.354	*BNI*
Panin	1.712.578	1.681.133	*Panin*
	6.927.907	**3.622.832**	

Jaminan-jaminan

BRI

Fasilitas pinjaman jangka pendek dijamin dengan, diantaranya:
1. Jaminan fidusia atas piutang usaha sebesar Rp3.000 juta.
2. Jaminan atas hak tagih pendapatan atas proyek yang dibiayai BRI.
3. Hipotik atas kapal Baruna Antasena 1 dan Baruna Antasena 2 yang dimiliki HIT, entitas induk (Catatan 12).

Securities

BRI

The short-term credit facility is secured by, among others:
1. *Fiduciary security over trade receivables amounted to Rp3,000 million.*
2. *Guarantees for revenue collection rights for projects financed by BRI.*
3. *Mortgage over vessel Baruna Antasena 1 and Baruna Antasena 2, owned by HIT, the parent entity (Note 12).*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan)

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Jaminan-jaminan (lanjutan)

BNI

Fasilitas pinjaman jangka pendek dijamin dengan, diantaranya:
1. Jaminan fidusia atas piutang usaha HTK2 per tanggal 30 Juni 2024.

Fasilitas-fasilitas pinjaman jangka panjang dijamin dengan, diantaranya:
1. Hipotik atas kapal Griya Jawa, Semar 77, Griya Sunda, dan Griya Ambon yang dimiliki HTK2 (Catatan 12).
2. Kinerja dan jaminan perusahaan dari PCSI.
3. Hipotik atas kapal Jabbar Energy, Griya Ternate dan Griya Bugis yang dimiliki HTK3 (Catatan 12).

KBBS

Fasilitas-fasilitas pinjaman jangka panjang dijamin dengan, diantaranya:
1. Hipotik atas kapal Griya Enim, Griya Melayu dan Griya Cirebon yang dimiliki HTK2 (Catatan 12).
2. Kinerja dan jaminan perusahaan dari PCSI

PANIN

Fasilitas-fasilitas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dijamin dengan, diantaranya:
1. Hipotik atas 15 kapal tunda dan 3 kapal tongkang yang dibeli dan terdaftar atas nama HTC, dan sebuah kapal crane yang terdaftar atas nama LISI.
2. Jaminan fidusia atas tagihan piutang
3. Jaminan fidusia atas tagihan klaim asuransi.

25. BANK LOANS (continued)

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Securities (continued)

BNI

The short-term credit facility is secured by, among others:
1. *Fiduciary security over trade receivables as if June 30, 2024.*

The long-term credit facilities are secured by, among others:
1. *Mortgage over Griya Jawa, Semar 77, Griya Sunda, and Griya Ambon, vessels owned by HTK2 (Note 12).*
2. *Performance and corporate guarantee from the PCSI.*
3. *Mortgage over Griya Jawa, Semar 77, Griya Sunda, and Griya Ambon, vessels owned by HTK3 (Note 12).*

KBBS

The long-term credit facilities are secured by, among others:
1. *Mortgage over Griya Enim, Griya Melayu and Griya Cirebon, vessels owned by the HTK2 (Note 12).*
2. *Performance and corporate guarantee from PCSI.*

PANIN

The short-term and long-term credit facilities are secured by, among others:
1. *Mortgage on 15 of tugboats and 3 barges which purchased and owned by HTC and a crane vessel which owned by LISI.*
2. *Fiduciary security over billed receivables.*
3. *Fiduciary security over billed insurance claims.*

25. PINJAMAN BANK (lanjutan) / *BANK LOANS (continued)*

PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

PEMBATASAN / *COVENANTS*

Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman bank, Grup diwajibkan untuk mematuhi beberapa pembatasan yang dipersyaratkan oleh para kreditur, antara lain, dengan rincian sebagai berikut:

Based on the bank loan facilities agreements, Group required to comply with several covenants as required by creditors, among others, as follows:

Kreditur/ *Creditors*	Pembatasan/*Covenants*
BRI	1. Menjaga *net work capital* selalu positif/*Maintain positive net work capital*. 2. Menjaga *debt to equity ratio* maksimal sebesar 300%/*Maintain debt to equity ratio of maximal 300%.* 3. Menjaga *interest coverage ratio* minimal sebesar 200%/*Maintain interest coverage ratio of minimal 200%.* 4. Melakukan pembagian pembagian dividen kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor/*Distribute dividends in exception dividends used for additional paid-in capital.*
BNI	1. Menjaga Rasio Lancar minimal 1 kali/*Maintain Current ratio minimum of 1.* 2. Menjaga Rasio Debt to Equity maksimal 2,5 kali/*Maintain Debt to equity ratio maximum of 2.5.* 3. Menjaga Rasio Debt Service Coverage minimal 100%/*Maintain Debt Service Coverage Ratio minimum of 100%.*
KBBS	1. Menjaga Rasio Lancar minimal 1,33 kali/*Maintain Current ratio minimum of 1.33.* 2. Menjaga Rasio *Debt Service Coverage* minimal 1 kali/*Maintain Debt Service Coverage Ratio minimum of 1.* 3. Menjaga Rasio *Debt to Equity* maksimal 3 kali/*Maintain Debt to equity ratio maximum of 3.*
Panin	1. Menjaga rasio antara nilai pasar jaminan dengan total plafond pinjaman minimal 180%/*Maintain the ratio between the market value of the collaterals and the total loan's plafond minimum of 180%.* 2. Tidak diperkenankan untuk membayar atau membagikan dividen, melunasi pinjaman dari pemegang saham, perusahaan terafiliasi, dan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Panin/*Not allowed to pay or distribute dividends, make settlement of loans obtained from the shareholder, affiliated company, subsidiary, and third parties, unless written approval is obtained from the bank.* 3. Tidak diperkenankan untuk melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau pelepasan harta atas harta kekayaan debitur, kecuali melalui persetujuan tertulis dari Panin/*Not allowed conduct mergers, acquisitions, and the sale or transfer of property rights of the Company, unless written approval is obtained from Panin.*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 Grup telah memenuhi seluruh pembatasan pinjaman bank sebagaimana dipersyaratkan.

As of December 31, 2024, and 2023 the Group has complied with all of the covenants of the bank loans as required.

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2024	2023	
Jaminan sosial tenaga kerja	5.818	8.508	*Jamsostek*
Dana pensiun	2.676	5.252	*Pension funds*
	8.494	**13.760**	

Akun ini merupakan imbalan kerja jangka pendek yang terdiri dari iuran dana pensiun dan iuran jaminan sosial tenaga kerja.

This account represents short-term employee benefits liability consisting of amount payable for pension funds contribution and employee social security.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Perusahaan dan entitas anak tertentu, yaitu GTSI, MCSI, HTC, dan PCSI mempunyai program pensiun iuran pasti yang meliputi seluruh karyawan tetap, yang didanai melalui iuran tetap bulanan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dana pensiun ini didirikan berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusannya No. 301/KM 17/1993. Program pensiun imbalan pasti telah disesuaikan untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2023 ("UUCK"), Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 ("PP35") dan Peraturan Perusahaan. Tidak ada pendanaan atas tambahan imbalan berdasarkan Undang-undang ini. Usia pensiun normal adalah 57 tahun.

Perusahaan dan entitas anak tertentu melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, menggunakan metode projected unit credit, tertanggal 17 Februari 2025 (2023: 21 Febuari 2024).

Asumsi yang digunakan dalam menentukan provisi imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

27. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

The Company and certain subsidiaries, GTSI, MCSI, HTC, and PCSI have a defined contribution pension plan covering all permanent employees, which is funded through monthly fixed contributions to Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The Pension Plan was established based on the approval from the Ministry of Finance in its decree No. 301/KM 17/1993. The benefits under such pension plan have been adjusted to cover minimum benefits under the Indonesian Law No. 6 year 2023 ("UUCK"), Government Regulation No. 35 year 2021 ("PP35") and Company Regulation. The additional benefits under the Law are unfunded. The normal retirement age is 57 years of age.

The Company and certain subsidiaries provided provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as of December 31, 2024 and 2023, are based on calculation performed by Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, an independent actuary, using the projected unit credit method, dated February 17, 2025 (2023: February 21, 2024).

The assumptions used in determining the provision for employee benefit for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Tingkat diskonto tahunan	:	7,10% (2023: 6,70%)	:	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	7,00% (2023: 7,00%)	:	*Future annual salary increase*
Tingkat pengunduran diri karyawan tahunan	:	3% sampai dengan usia 20 tahun dan berkurang secara linear ke 1,0% di usia 45/ *3% per annum up to age 20 years old and decreasing linearly to 1.0% at age 45 year old*	:	*Annual employee turn-over rate*
Umur pensiun	:	57 tahun/*57 years*	:	*Retirement age*
Tingkat kecacatan tahunan	:	10% dari tingkat mortalitas/*10% of mortality rate*	:	*Annual disability rate*
Referensi tingkat kematian	:	TMI 2019	:	*Mortality rate reference*
Metode	:	*Projected Unit Credit*	:	*Method*

a. Beban imbalan kerja karyawan / *a. Employee benefits expense*

	2024	2023	
Biaya jasa kini	238.938	200.297	*Current service costs*
Biaya bunga	132.838	114.497	*Interest cost*
Liabilitas atas karyawan transfer masuk	-	331.282	*Liability due to employee transferred in*
Biaya jasa lalu	5.263	(8.981)	*Past service cost*
Pengakuan segera kerugian/ aktuaria - Imbalan kerja lainnya jangka panjang	-	1.169	*Immediate recognition of actuarial loss - Other long-term employee benefit*
	377.039	**638.264**	

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan) / *LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

b. Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang / *The movement of long-term employee benefits liabilities*

	2024	2023	
Saldo awal tahun	2.006.465	1.411.709	*Balance at beginning of year*
Beban imbalan kerja (Catatan 27)	377.039	638.264	*Employee benefit expense (Note 27)*
Keuntungan aktuaria yang diakui sebagai rugi komprehensif lainnya	(106.469)	(1.480)	*Actuarial gain charged to other comprehensive loss*
Pembayaran manfaat	(128.125)	(63.526)	*Benefit payments*
Efek selisih kurs	(88.830)	21.498	*Foreign exchange effect*
Saldo akhir tahun	**2.060.080**	**2.006.465**	***Balance at end of year***

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

A one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and increase rate at December 31, 2024, would have the following effects:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Perubahan tingkat diskonto:			*Change in discount rate:*
Nilai kini liabilitas imbalan karyawan	(1.925.840)	2.210.482	*Present value of employee benefit obligations*
Perubahan tingkat kenaikan gaji:			*Change in salary increase rate:*
Nilai kini liabilitas imbalan karyawan	2.211.455	(1.922.456)	Present value of employee *benefit obligations*

Pembayaran berikut merupakan pembayaran yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

The following payments are expected payments to present value of benefit obligation in future years:

	2024	
Dalam waktu 12 bulan mendatang	242.373	*Within the next 12 months*
Antara 2 hingga 5 tahun	756.899	*Between 2 and 5 years*
Antara 5 hingga 10 tahun	1.246.566	*Between 5 and 10 year*
Lebih dari 10 tahun	2.735.706	*Beyond 10 years*

Jangka waktu rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2024 adalah 11,91 tahun (2023: 12,09 tahun).

The average duration of the benefit obligation at December 31, 2024 was 11.91 years (2023: 12.09 years).

28. PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA

Pada tahun 2019, pinjaman dari pihak ketiga merupakan pinjaman GTSI dari Bamboo Mountain Power B.V sebesar AS$19.442.397 (Catatan 45a) terkait dengan proyek *Floating Storage and Regasification Unit* ("FSRU") Jawa 1 yang telah dimulai pada tahun 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga pada tingkat 6,07% per tahun sampai dengan tanggal operasi komersial ("*COD*") yang dijadwalkan untuk konstruksi FSRU pada tahun 2021 dan dengan tingkat 8,39% per tahun untuk periode selanjutnya sampai dengan tanggal jatuh tempo akhir pada bulan Febuari 2047. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan saham GTSI dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PKR.

Pada tanggal 6 Maret 2025, berdasarkan risalah rapat antara GTSI dengan Bamboo Mountain Power B.V., para pihak setuju untuk mengubah tanggal jatuh tempo terakhir menjadi Maret 2049 dan mengubah bunga pinjaman setelah tanggal operasi komersial menjadi 8,27%. Perubahan suku bunga berlaku sejak *COD*. Suku bunga tersebut akan ditinjau kembali setiap tahun.

28. LOAN FROM THIRD PARTY

In 2019, loan from a third party represents the GTSI's loan from Bamboo Mountain Power B.V amounting to US$19,442,397 (Note 45a) related to the Floating Storage and Regasification Unit ("FSRU") Jawa 1 project that started in 2021. The loan is subject to interest at the rate of 6.07% per annum until scheduled commercial operation date ("COD") of FSRU construction in 2021 and at the rate of 8.39% per annum thereafter until final maturity date in February 2047. This loan is secured with share pledge of the GTSI and Koperasi Karyawan Bhakti Samudra in PKR.

On March 6, 2025, based on the minutes of meeting the GTSI with Bamboo Mountain Power B.V., the parties agreed to change the final maturity date to March 2049 and change the loan interest rate after the commercial operation date to 8.27%. The changes on interest rate effective since COD. The interest rate will be reviewed annually.

29. PERPAJAKAN / *29. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	2024	2023	
Entitas induk:			*Parent entity:*
Pajak pertambahan nilai	19.005	47.252	*Value added tax*
Piutang pajak lainnya	59	-	*Other tax receivables*
	19.064	47.252	
Entitas anak:			*Subsidiaries:*
Pajak pertambahan nilai	1.183.314	1.645.603	*Value added tax*
Piutang pajak lainnya	59.715	54.884	*Other tax receivables*
	1.243.029	1.700.487	
	1.262.093	**1.747.739**	

29. PERPAJAKAN (lanjutan) / *29. TAXATION (continued)*

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan) / *a. Prepaid taxes (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan dan perhitungan beban pajak penghasilan serta utang pajak penghasilan badan Perusahaan dalam Dolar AS adalah sebagai berikut:

The reconciliations between profit before final and income tax, tax expense, and the corporate income tax payable position of the Company in US Dollar are as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - konsolidasian	14.938.245	14.218.736	*Profit before final and income tax - consolidated*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - entitas anak	(14.290.517)	(16.127.139)	*Profit before final and income tax - subsidiary*
Laba/(rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	647.728	(1.908.403)	*Profit/(loss) before final and income tax - the Company*
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Biaya-biaya yang tidak bisa dikurangkan	731.262	325.218	*Non-deductible expenses*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(51.126)	(667)	*Income subject to final income tax*
Dividen didistribusikan oleh entitas anak	(2.794.963)	(913.329)	*Dividend distributed by subsidiaries*
	(2.114.827)	(588.778)	
Estimasi rugi kena pajak Perusahaan	(1.467.099)	(2.497.181)	*Estimated taxable loss of the Company*
Beban pajak kini:			***Current tax expense:***
Beban pajak penghasilan			*Income tax expense*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	359.738	432.637	*Subsidiary*
	359.738	432.637	
Dikurangi:			***Less:***
Entitas anak			*Subsidiary*
Pajak penghasilan yang dibayar selama tahun berjalan:	(320.419)	(407.068)	*Corporate income tax paid during the year:*
Estimasi utang pajak penghasilan badan Grup	**39.319**	**25.569**	***Estimated corporate income tax payable of the Group***

29. PERPAJAKAN (lanjutan) / *29. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2024	2023	
Perusahaan:			*The Company:*
Pajak penghasilan - Pasal 21	19.061	33.836	*Withholding income tax - Article 21*
Pajak penghasilan - Pasal 4(2)	7.353	600	*Witholding income tax - Article 4(2)*
Pajak penghasilan - Pasal 23	3.007	2.102	*Withholding income tax - Article 23*
	29.421	36.538	
Entitas anak:			*Subsidiary:*
Pajak penghasilan jasa perkapalan	297.216	71.783	*Shipping income tax*
Pajak pertambahan nilai	179.223	210.364	*Value added tax*
Pajak penghasilan - Pasal 23	155.121	34.381	*Withholding income tax - Article 23*
Pajak penghasilan - Pasal 21	94.021	58.061	*Withholding income tax - Article 21*
Pajak penghasilan - Pasal 29	48.579	80.893	*Withholding income tax - Article 29*
Pajak penghasilan - Pasal 26	17.409	7.005	*Withholding income tax - Article 26*
Pajak penghasilan - Pasal 4(2)	16.774	8.879	*Withholding income tax - Article 4(2)*
Utang pajak lainnya	4.073	-	*Other tax payable*
	812.416	471.366	
	841.837	**507.904**	

c. Analisa beban pajak penghasilan / *c. Analysis of corporate income tax expense*

	2024	2023	
Pajak final:			*Final tax:*
Entitas anak	1.615.709	1.103.454	*Subsidiary*
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income tax*
Entitas anak:			*Subsidiary:*
Pajak kini	359.738	432.637	*Current tax expense*
Manfaat pajak tangguhan	(95.235)	(6.785)	*Deferred tax benefit*
	264.503	**425.852**	

d. Aset pajak tangguhan, neto / *d. Deferred tax assets, net*

Mutasi tahun 2024 / ***Movement in 2024***

	31 Desember/ *December 31,* 2023	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit or loss*	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Charged to other comprehensive income*	Selisih Kurs/ *Foreign exchange*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Aset pajak tangguhan, neto						***Deferred tax assets, net***
Perusahaan	-	-	-	-	-	**The Company**
Entitas anak						***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	80.081	95.179	(3.456)	(4.823)	166.981	*Employee benefit liabilities*
Aset tetap	35.966	56	-	507	36.529	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	116.047	95.235	(3.456)	(4.316)	203.510	*Deferred tax assets net - subsidiaries*
Total	**116.047**	**95.235**	**(3.456)**	**(4.316)**	**203.510**	***Total***

29. PERPAJAKAN (lanjutan) / *29. TAXATION (continued)*

d. Aset pajak tangguhan, neto (lanjutan) / *d. Deferred tax assets, net (continued)*

Mutasi tahun 2023 / ***Movement in 2023***

	31 Desember/ *December 31,* 2022	Pengaruh ke laba rugi/ *Effect to profit or loss*	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ *Charged to other comprehensive income*	Selisih Kurs/ *Foreign exchange*	31 Desember/ *December 31,* 2023	
Aset pajak tangguhan, neto Perusahaan	-	-	-	-	-	***Deferred tax assets, net The Company***
Entitas anak						***Subsidiaries***
Liabilitas imbalan kerja	67.150	1.402	7.215	4.314	80.081	*Employee benefit liabilities*
Aset tetap	30.454	5.383	-	129	35.966	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan neto - entitas anak	97.604	6.785	7.215	4.443	116.047	*Deferred tax assets net - subsidiaries*
Total	**97.604**	**6.785**	**7.215**	**4.443**	**116.047**	***Total***

Penggunaan aset pajak tangguhan yang diakui Grup tergantung pada kelebihan laba fiskal pada masa mendatang atas penghasilan yang timbul dari pemulihan perbedaan temporer kena pajak yang ada. Pajak tangguhan yang tidak diakui sehubungan dengan rugi fiskal yang dapat dikompensasi dan penyisihan penurunan nilai piutang karena realisasi aset pajak tangguhan tersebut pada saat ini belum dapat dipastikan.

The utilization of deferred tax assets recognized by the Group is dependent upon future taxable income in excess of income arising from the reversal of existing taxable temporary differences. Deferred tax assets relating to tax losses carried forward and allowance for impairment of receivables are unrecognized as realization of these deferred tax assets are presently not assured beyond reasonable doubt.

e. Rekonsiliasi beban pajak penghasilan Perusahaan / *e. Reconciliation of corporate income tax expense*

Rekonsiliasi antara taksiran beban pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku di Indonesia dari laba sebelum pajak penghasilan badan dengan beban pajak penghasilan badan Perusahaan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between corporate income tax expense calculated using Indonesian tax rate of profit before corporate income tax and corporate income tax expense of the Company as shown in the consolidated statement profit or loss and other comprehensive income for the periods ended December 31, 2024 and 2023 are presented below:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - konsolidasian	14.938.245	14.218.736	*Profit before final and income tax - consolidated*
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia sebesar 22%	3.286.414	3.128.122	*Tax expense at the Indonesia statutory rate 22% tax effect*
Pengaruh pajak atas beda tetap:			*Tax effect of permanent difference:*
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan	(27.668.511)	(21.443.240)	*Non-deductible income*

29. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Rekonsiliasi beban pajak penghasilan Perusahaan (lanjutan)

29. TAXATION (continued)

e. Reconciliation of corporate income tax expense (continued)

	2024	2023	
Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan	24.646.600	18.740.970	*Non-deductible expenses*
Total beban pajak penghasilan, neto	**264.503**	**425.852**	***Total corporate income tax expense, net***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal sebagai berikut:

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has cumulative tax losses as follows:

	2024	2023	
Tahun yang berakhir pada:			*Year ended:*
- 31 Desember 2019	-	46.477	*December 31, 2019 -*
- 31 Desember 2020	8.229	8.229	*December 31, 2020 -*
- 31 Desember 2021	30.081	30.081	*December 31, 2021 -*
- 31 Desember 2022	184.877	184.877	*December 31, 2022 -*
- 31 Desember 2023	2.497.181	2.497.181	*December 31, 2023 -*
- 31 Desember 2024	1.467.099	-	*December 31, 2024 -*
	4.187.467	**2.766.845**	

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Grup melaporkan pajak berdasarkan *self-assessment*.

Grup melakukan perhitungan laba/(rugi) kena pajak dan pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan ("SPT") sendiri. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. DJP dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Perhitungan laba kena pajak untuk tahun 2024 hasil rekonsiliasi akan menjadi dasar dalam pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan kepada Kantor Pajak.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Group submits tax returns on the basis of self-assessment.

The Group's computes taxable income/(losses) and submits their annual tax returns ("SPT"). Consolidated SPT are not permitted under Indonesian taxation laws. DGT may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The calculation of taxable income for 2024 will be resulted from reconciliation used as the basis of its SPT Corporate Income Tax reported to Tax Office.

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI / *30. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Rincian kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak yang dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

The details of non-controlling interests in net assets of consolidated subsidiaries are as follows:

	2024	2023	
PT GTSI Internasional Tbk dan entitas anak	21.811.000	22.568.135	*PT GTS Internasional Tbk and its subsidiaries*

Mutasi kepentingan non-pengendali adalah sebagai berikut:

Movements of non-controlling interest are as follows:

	2024	2023	
Saldo awal	22.568.135	21.976.847	*Beginning balance*
Bagian atas laba, neto	1.540.925	2.275.168	*Share in net profit, net*
Tambahan kepentingan non-pengendali	-	606.655	*Addition of non-controlling interest*
Akuisisi entitas anak dari kepentingan non-pengendali	-	(867.354)	*Acquisition of subsidiary from non-controlling interest*
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	129.649	(58.061)	*Other comprehensive income/(loss)*
Dividen yang didistribusikan	(2.427.709)	(1.365.120)	*Dividend distributed*
Saldo akhir	**21.811.000**	**22.568.135**	***Ending balance***

Ringkasan informasi keuangan dari entitas anak tersebut disajikan berikut ini, berdasarkan jumlah sebelum eliminasi antar-perusahaan:

The summary of financial information of this subsidiary is provided below, based on amounts before inter-company eliminations:

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian / *Summary of consolidated statement of financial position*

	2024	2023	
Aset lancar	37.123.752	31.110.593	*Current assets*
Aset tidak lancar	75.759.394	76.729.735	*Non-current assets*
Liabilitas jangka pendek	(15.077.879)	(13.893.231)	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	(31.455.915)	(32.316.654)	*Non-current liabilities*
Total ekuitas	**66.349.352**	**61.630.443**	***Total equity***
Dapat diatribusikan kepada :			*Attributable to :*
Pemilik entitas induk	53.386.712	47.240.139	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	12.962.640	14.390.304	*Non-controlling interest*
	66.349.352	**61.630.443**	

30. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan) / *30. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)*

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian / *Summary of consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*

	2024	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	32.153.797	32.160.145	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	(19.919.146)	(21.928.388)	*Cost of revenue*
Laba bruto	**12.234.651**	**10.231.757**	***Gross profit***
Beban usaha :			*Operating expenses :*
Umum dan administrasi	(3.971.395)	(4.217.358)	*General and administrative*
(Beban)/pendapatan operasi lainnya, neto	(327.793)	1.178.750	*Other (expenses)/ income, net*
Total beban usaha	**(4.299.188)**	**(3.038.608)**	***Total operating expenses***
Laba usaha	7.935.463	7.193.149	*Operating income*
Pendapatan keuangan	1.454.099	1.381.644	*Finance income*
Biaya keuangan	(1.723.170)	(1.715.199)	*Finance cost*
Keuntungan atas pelepasan saham entitas anak	-	1.396.286	*Gain from disposal of subsidiary shares*
Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi	496.495	(80.677)	*Equity in net income/(loss) of of subsidiary shares*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	**8.162.887**	**8.175.203**	***Profit before final and corporate income tax***
Beban pajak final	(508.921)	(291.120)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan	**7.653.966**	**7.884.083**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan	(110.308)	(84.906)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	**7.543.658**	**7.799.177**	***Profit for the year***
Penghasilan/(rugi) komprehensif lain	848.430	(360.981)	*Other comprehensive income/(loss)*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**8.392.088**	**7.438.196**	***Total comprehensive income for the year***

31. LABA PER SAHAM DASAR / *31. EARNINGS PER SHARE*

	2024	2023	
Laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk perhitungan laba neto per saham dasar	11.517.108	10.414.262	*Net profit attributable to the equity holders of parent entity for computation of basic earnings per share*
Total rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	18.046.455.284	16.422.250.000	*Weighted average numbers of shares outstanding (shares)*
Laba per saham dasar	**0,0006**	**0,0006**	***Earnings per share***

31. LABA PER SAHAM DASAR (lanjutan)

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

31. EARNINGS PER SHARE (continued)

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2024 and 2023, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statement of comprehensive income.

32. MODAL SAHAM

Rincian modal disetor Perusahaan dengan nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

32. SHARE CAPITAL

Details of the Company's paid up capital of par value of Rp100 (full amount) per share as at December 31, 2024 and 2023.

31 Desember 2024 / ***December 31, 2024***

Pemegang saham / *Shareholders*	Jumlah saham/ *Number of shares*	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ *Value in thousand of Rupiah*	Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk / *PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk*	13.805.172.800	1.380.517.280	76,50%
PT Humpuss Transportasi Kimia / *PT Humpuss Transportasi Kimia*	1.533.945.000	153.394.500	8,50%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra / *Koperasi Karyawan Bhakti Samudra*	330.000	33.000	0,00%
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) / *Public (each less than 5% ownership interests)*	2.707.066.560	270.706.656	15,00%
	18.046.514.360	1.804.651.436	100%
*Setara dengan / *Equivalent to**		AS$120.391.500	

31 Desember 2023 / ***December 31, 2023***

Pemegang saham / *Shareholders*	Jumlah saham/ *Number of shares*	Nilai dalam Ribuan Rupiah/ *Value in thousand of Rupiah*	Persentase kepemilikan/ *Percentage ownership*
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk / *PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk*	13.805.175.000	1.380.517.500	76,50%
PT Humpuss Transportasi Kimia / *PT Humpuss Transportasi Kimia*	1.533.945.000	153.394.500	8,50%
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra / *Koperasi Karyawan Bhakti Samudra*	330.000	33.000	0,00%
Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%) / *Public (each less than 5% ownership interests)*	2.707.000.000	270.700.000	15,00%
	18.046.450.000	1.804.645.000	100%
*Setara dengan / *Equivalent to**		AS$120.391.095	

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan modal saham Perusahaan per tanggal 31 Desember 2023, terkait dengan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat (Catatan 1b).

Berdasarkan akta No. 63 tertanggal 9 Agustus 2023 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, tentang perubahan anggaran dasar dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0107193 tanggal 16 Agustus 2023, yang telah dinyatakan kembali dengan Akta No. 161 tertanggal 19 Januari 2024 oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0031117 tertanggal 23 Januari 2024, para pemegang saham Perusahaan menyetujui jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dalam Penawaran Umum Saham Perusahaan kepada masyarakat adalah sebanyak 2.707.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp270.700.000.000, sehingga seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan adalah sebanyak 18.046.450.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.804.645.000.000.

a. Penyisihan saldo laba

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut dilakukan sampai dengan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah melakukan pencadangan umum sebesar AS$10.000.

b. Pelaksanaan waran

Perusahaan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.353.500.000. Pada tahun 2024, jumlah waran yang dikonversi sebanyak 64.360 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200 per saham.

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh jumlah waran yang sudah dikonversi sebanyak 64.360.

32. SHARE CAPITAL (continued)

Changes in the Company's share capital as of December 31, 2023, related to Initial Public Offering of share of the Company (Note 1b).

Based on Notarial Deed No. 63 dated August 9, 2023 of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, regarding the amendment to the article of association, that has been acknowledged by th Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia based on its letter number AHU-AH.01.03-0107193 dated August 16, 2023, which has been restated by Deed No. 161 dated January 19, 2024 by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notary in Jakarta, and has received notification of changes in the Company's data from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.09-0031117 dated January 23, 2024, the shareholder of the Company's shareholder approved the number of shares issued by the Company in the Company's Public Offering of Shares to the public is 2,707,000,000 shares with a total nominal value of Rp270,700,000,000, so that all shares issued by the Company are 18,046,450,000 shares with a total nominal value of Rp1,804,645,000,000.

a. Appropriation of retained earnings

Based on Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund should be provided until at minimum 20% of the issued and paid-up capital.

Until December 31, 2024, the Company has provided general reserve of US$10,000

b. Exercise of warrant

The Company also issued Series I Warrants of a maximum of 1,353,500,000. In 2024, the number of converted warrants is 64.360 with an exercise price of Rp200 per share.

Up to December 31, 2024, the total number of converted warrants is 64,360.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali			*Difference in value of restructuring transactions between entities under common control*
PT Hateka Trans Internasional	(32.607.822)	(32.607.822)	*PT Hateka Trans Internasional*
PT Anoa Sulawesi Regas	(10.349.444)	(10.349.444)	*PT Anoa Sulawesi Regas*
PT Humpuss Transportasi Curah	(5.835.253)	(5.835.253)	*PT Humpuss Transportasi Curah*
PT GTS Internasional Tbk	(2.237.753)	(2.237.753)	*PT GTS Internasional Tbk*
Biaya emisi saham (Catatan 3w)	(1.166.302)	(1.166.302)	*Issuance costs of share capital (Note 3w)*
PT LIS Internasional	1.140.448	1.140.448	*PT LIS Internasional*
Pelaksanaan waran	405	-	*Exercise of warrant*
Lainnya	(29.097)	(29.097)	*Others*
	(51.084.818)	**(51.085.223)**	

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The details of additional paid-in capital are as follows:

Efektif pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT Hateka Trans International ("HTI") dimana Perusahaan menjadi entitas yang menerima penggabungan sedangkan HTI bubar demi hukum. Penggabungan usaha Perusahaan dan HTI ini menimbulkan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar AS$32.607.822.

The merger between the Company and PT Hateka Trans International ("HTI") was effective on December 31, 2022, with the Company as the surviving entity and HTI being dissolved by the law. The merger between the Company and HTI has resulted in difference in value of restructuring transactions between entities under common control amounting to US$32,607,822.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - PT LIS Internasional merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku pada saat akuisisi, sebesar AS$1.140.448.

Difference in value of restructuring transactions between entites under common control - PT LIS Internasional represents the difference between consideration transferred and book value amounted to US$1,140,448.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - PT Anoa Sulawesi Regas merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku pada saat akuisisi, sebesar AS$10.349.444.

Difference in value of restructuring transactions between entites under common control - PT Anoa Sulawesi Regas represents the difference between consideration transferred and book value amounted to US$10,349,444.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - PT Humpuss Transportasi Curah merupakan selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku pada saat akuisisi, sebesar AS$5.835.253.

Difference in value of restructuring transactions between entites under common control - PT Humpuss Transportasi Curah represents the difference between consideration transferred and book value amounted to US$5,835,253.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali - PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) merupakan selisih antara harga pembelian dan nilai buku Kapal ST Eka Putra pada tanggal efektif transaksi jual beli dengan Cometco Shipping Inc. ("CSI"), yang sebelumnya merupakan entitas sepengendali, sebesar AS$2.237.753.

Difference in value of restructuring transactions between entites under common control - PT GTS Internasional Tbk. ("GTSI") represents the difference between purchase consideration and book value of ST Eka Putra Vessel at the effective date of the sale and purchase transaction with Cometco Shipping Inc. ("CSI"), previously an under common control entity, amounted to US$2,237,753.

34. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK NON-PENGENDALI

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Perubahan kepemilikan kepentingan non-pengendali pada:			*Changes in ownership interest of non-controlling interest*
- PT GTS Internasional Tbk.	(9.961.225)	(9.961.225)	*PT GTS Internasional Tbk -*
- PT Hikmah Sarana Bahari	(448.271)	(448.271)	*PT Hikmah Sarana Bahari -*
- PT LIS Internasional	444.455	444.455	*PT LIS Internasional -*
	(9.965.041)	**(9.965.041)**	

34. DIFFERENCE IN THE VALUE OF TRANSACTION WITH NON-CONTROLLING INTEREST

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

35. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan konsolidasian pada saat perubahan mata uang fungsional Perusahaan efektif mulai 31 Desember 2024, pengukuran kembali atas program imbalan pasti, dan laba/(rugi) dari entitas asosiasi dengan rincian sebagai berikut:

35. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account represents foreign exchange differences resulting from translation of consolidated financial statements in respect of the change of the Company's functional currency effectively from December 31, 2024, remeasurement of defined benefit plan, and gain/(loss) of associated company with detail as follow:

	Selisih kurs Penjabaran/ *Foreign exchange translation*	Pengukuran kembali imbalan pasti/ *Remeasurement of defined benefit plan*	Bagian laba/(rugi) neto dari entitas asosiasi/*Equity in net gain/(loss) of associated company*	Total/ *Total*	
Saldo 31 Desember 2022	**(1.881.268)**	**(35.116)**	**1.891.792**	**(24.592)**	***Balance December 31, 2022***
Perubahan penghasilan komprehensif lain période berjalan	256.960	12.557	(323.916)	(54.399)	*Changes in other comprehensive income for the period*
Saldo 31 Desember 2023	**(1.624.308)**	**(22.559)**	**1.567.876**	**(78.991)**	***Balance December 31, 2023***
Perubahan penghasilan komprehensif lain période berjalan	(1.933.398)	103.013	723.303	(1.107.082)	*Changes in other comprehensive income for the period*
Saldo 31 Desember 2024	**(3.557.706)**	**80.454**	**2.291.179**	**(1.186.073)**	***Balance December 31, 2024***

36. DIVIDEN

Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk tahun buku 2023 yang telah disahkan dalam Akta Notaris Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 14 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp18.046.483.948 (setara dengan AS$1.185.786) atau setara dengan Rp1 per lembar saham yang telah dibayarkan oleh Perusahaan kepada para pemegang saham pada tanggan 12 Juli 2024.

36. DIVIDENDS

The Company

Based on Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") for the financial year 2023 which has been legalized by Dr. Putra Hutomo, S.H., Notarial Deed No. 8 dated June 14, 2024, the shareholders approved cash dividend distribution amounting to Rp18,046,483,948 (equivalent to US$1,185,786) equivalent with Rp1 per share which had been paid by the Company to the shareholders on July 12, 2024.

36. DIVIDEN (lanjutan)

Entitas-entitas anak

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BIS, entitas anak, yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2024, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2023 adalah sebesar AS$2.000.000 yang dibagikan pada Januari 2024. Dividen sebesar AS$980.000 didistribusi kepada pihak non-pengendali (Catatan 30).

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BIS yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2024, para pemegang saham menyetujui, antara lain penyisihan cadangan wajib minimum dari laba ditahan tahun buku 2023 sebesar AS$10.000. Pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebesar AS$2.500.000 yang dibagikan pada Mei 2024. Dividen sebesar AS$1.225.000 didistribusi kepada pihak non-pengendali (Catatan 30).

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham BIS yang diadakan pada tanggal 30 Mei 2023, para pemegang saham menyetujui, antara lain penyisihan cadangan wajib minimum dari laba ditahan tahun buku 2022 sebesar AS$10.000. Pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 adalah sebesar AS$2.500.000 yang dibagikan pada Juni 2023. Dividen sebesar AS$1.225.000 didistribusi kepada pihak non-pengendali (Catatan 30).

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Hikmah Sarana Bahari (“HSB”), entitas anak, yang diadakan pada tanggal 12 April 2023, para pemegang saham menyetujui, antara lain penyisihan cadangan wajib minimum dari laba ditahan tahun buku 2022 sebesar AS$10.000. Pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2022 adalah sebesar AS$2.800.000 yang dibagikan pada bulan Mei 2023. Dividen sebesar US$140.000 didistribusi kepada pihak non-pengendali (Catatan 30).

36. DIVIDENDS (continued)

Subsidiaries

Based on the Circular Resolution of Shareholders of Meeting of BIS, a subsidiary, held on January 16, 2024, the shareholders approved the distribution of cash dividends interim for fiscal year 2023 of US$2,000,000 which were distributed on January 2024. The dividend amounting to US$980,000 is distributed to non-controlling parties (Note 30).

Based on BIS Circular Resolution of Shareholders of Meeting held on May 21, 2024, the shareholders, among others, approve the minimum mandatory reserve allowance from retained earnings for the 2023 financial year of US$10,000. The shareholders also approved the distribution of cash dividends for fiscal year 2023 of US$2,500,000 which were distributed on May 2024. The dividend amounting to US$1,225,000 is distributed to non-controlling parties (Note 30).

Based on BIS Circular Resolution of Shareholders of Meeting held on May 30, 2023, the shareholders, among others, approve the minimum mandatory reserve allowance from retained earnings for the 2022 financial year of US$10,000. The shareholders also approved the distribution of cash dividends for fiscal year 2022 of US$2,500,000 which were distributed on June 2023. The dividend amounting to US$1,225,000 is distributed to non-controlling parties (Note 30).

Based on the Circular Resolution of Shareholder of Meeting of PT Hikmah Sarana Bahari (“HSB”), a subsidiary, held on April 12, 2023, the shareholders, among others, approve the minimum mandatory reserve allowance from retained earnings for the 2022 financial year of US$10,000. The shareholders also approved the distribution of cash dividends for fiscal year 2022 of US$2,800,000 which were distributed on May 2023. The dividend amounting to US$140,000 is distributed to non-controlling party (Note 30).

37. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Perusahaan merupakan bagian dari suatu Grup, dan sebagaimana djelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati masing-masing pihak.

- **Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak berelasi**

37. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The Company is part of a business group, as explained below, and enters into transactions with related parties in its operations.

Transactions with related parties are entered under normal terms and conditions agreed by each parties.

- ***Nature of transactions and relationships with related parties***

Sifat Hubungan/*Relationship*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Transaksi/*Transactions*
Entitas dengan kontrol signifikan atas HIT/*Entity with significant influence over HIT*	- PT Humpuss	Jasa transportasi kimia dan pembayaran biaya operasional/*Chemicals cargo transportation and payments of operational expenses*
Entitas induk terakhir/*Ultimate parent*	- PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("HIT")	Penggantian biaya operasional /*Payments of reimbursement of operational expense*
Entitas di bawah sepengendali HIT/ *Entities under common control of HIT*	- PT Humpuss Transportasi Kimia	Jasa transportasi kimia dan pembayaran biaya operasional/*Chemicals cargo transportation and payments of operational expense*
	- PT LIS Internasional	Pembayaran biaya operasional/ *Payments of operational expense*
	- PT Jawa Satu Regas	Pinjaman dan pendapatan bunga/*Loan and interest income*
Pihak berelasi lainnya/*Other related parties*	- PT Wisma Purnayudha Putra	Biaya sewa kantor/*Office rental cost*
	- PT Humpuss Trading	Pembelian bahan bakar kapal/ *Purchase of vessel fuel*
	- Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	Biaya operasional/*IOperational cost*

- **Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi**
- ***Significant transactions with related parties***

	2024	2023	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (Catatan 39)			***Revenue from contracts with customer (Note 39)***
Entitas dengan kontrol signifikan atas HIT			*Entity with significant influence over HIT*
PT Humpuss	16.190.154	13.179.028	*PT Humpuss*
Entitas di bawah sepengendali HIT			*Entities under common control of HIT*
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.150.809	21.513.615	*PT Humpuss Transportasi Kimia*
PT LIS Internasional	19.665	24.233	*PT LIS Internasional*
Entitas asosiasi			*Associated entity*
PT Jawa Satu Regas	154.198	182.597	*PT Jawa Satu Regas*
	17.514.826	**34.899.473**	
Sebagai persentase terhadap total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan konsolidasian	**13,62%**	**32,80%**	*As percentage of total consolidated revenue from contracts with customer*

37. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. *BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

- **Transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)**
- ***Significant transactions with related parties (continued)***

	2024	2023	
Beban pokok pendapatan			***Cost of revenue***
Pihak berelasi lainnya			*Other related party*
PT Humpuss Trading	**20.386.507**	**12.242.565**	*PT Humpuss Trading*
Sebagai persentase terhadap total beban pokok pendapatan	**21,12%**	**15,85%**	*As percentage of total cost of revenue*

	2024	2023	
Pendapatan bunga			***Interest income***
Entitas asosiasi			*Associated entity*
PT Jawa Satu Regas	**906.073**	**873.694**	*PT Jawa Satu Regas*
Sebagai persentase terhadap total pendapatan keuangan	**45,61%**	**52,28%**	*As percentage of total finance income*

	2024	2023	
Beban umum dan administrasi			***General and administrative expense***
Pihak berelasi lainnya			*Other related party*
PT Wisma Purnayudha Putra	**359.069**	**625.021**	*PT Wisma Purnayudha Putra*
Sebagai persentase terhadap total beban umum dan administrasi konsolidasian	**2,53%**	**4,57%**	*As percentage of total consolidated general and administrative expense*

- **Saldo dengan pihak-pihak berelasi**
- ***Balances with related parties***

	2024	2023	
Piutang usaha (Catatan 7)			***Trade receivables (Note 7)***
Entitas dengan kontrol signifikan atas HIT			*Entity with significant influence over HIT*
PT Humpuss	1.784.367	5.614.575	*PT Humpuss*
Entitas di bawah sepengendali HIT			*Entity under common control of HIT*
PT Humpuss Transportasi Kimia	-	1.614.906	*PT Humpuss Transportasi Kimia*
	1.784.367	**7.229.481**	
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	**0,59%**	**2,66%**	*As percentage of total consolidated assets*

Saldo piutang usaha kepada pihak berelasi pada akhir tahun tidak dijaminkan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk piutang usaha pihak berelasi. Berdasarkan penilaian atas kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang usaha pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha pihak berelasi.

Outstanding balances of trade receivables at year-end are unsecured. There have been no guarantees provided or received for any trade receivables from related parties - current. Based on the assessment of expected credit losses on trade receivable at the end of the year, Management believes that an allowance for impairment of trade receivables is not considered necessary.

37. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

- **Saldo dengan pihak-pihak berelasi**
- ***Balances with related parties***

	2024	2023	
Piutang dari pihak berelasi			***Due from related parties***
Entitas induk terakhir			*Ultimate parent entity*
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.	2.030.600	1.798.951	*PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.*
Entitas di bawah sepengendali HIT			*Entities under common control of HIT*
PT Humpuss Transportasi Kimia	9.128.451	9.479.672	*PT Humpuss Transportasi Kimia*
PT LIS Internasional	4.965.726	4.542.326	*PT LIS Internasional*
Entitas asosiasi			*Associated entity*
PT Jawa Satu Regas	4.979.759	3.989.401	*PT Jawa Satu Regas*
Pihak berelasi lainnya			*Other related party*
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	-	173	*Koperasi Karyawan Bhakti Samudra*
	21.104.536	**19.810.523**	
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	**7,02%**	**7,29%**	*As percentage of total consolidated assets*

Piutang kepada pihak berelasi merupakan piutang atas transaksi dana talangan untuk kegiatan operasional dan piutang bunga pinjaman. Saldo piutang kepada pihak berelasi pada akhir tahun tidak dijaminkan. Tidak ada surat jaminan yang diberikan maupun diterima untuk piutang pihak berelasi - lancar. Berdasarkan penilaian atas kerugian kredit ekspektasian atas saldo akun piutang kepada pihak berelasi pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang usaha pihak berelasi.

Due from related parties represent receivable from reimbursement for operational expense and loan interest receivables. Outstanding balance of due from related parties at year-end are unsecured. There have been no guarantees provided or received for any trade receivables from related parties - current. Based on the assessment of expected credit losses on due from related parties at the end of the year, Management believes that an allowance for impairment of due from related parties is not considered necessary.

- **Saldo dengan pihak-pihak berelasi**
- ***Balances with related parties***

	2024	2023	
Utang usaha (Catatan 17)			***Trade payables (Note 17)***
Entitas dengan kontrol signifikan atas HIT			*Entity with significant influence over HIT*
PT Humpuss	128.310	-	*PT Humpuss*
Entitas di bawah sepengendali HIT			*Entity under common control of HIT*
PT LIS Internasional	3.180.995	3.227.131	*PT LIS Internasional*
Pihak berelasi lainnya			*Other related party*
PT Humpuss Trading	6.713.114	4.575.068	*PT Humpuss Trading*
Koperasi Karyawan Bhakti Samudra	14.433	11.896	*Koperasi Karyawan Bhakti Samudra*
PT Wisma Purnayudha Putra	3.750	-	*PT Wisma Purnayudha Putra*
	10.040.602	**7.814.095**	
Sebagai persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	**7,90%**	**7,32%**	*As percentage of total consolidated liabilities*
Pinjaman kepada pihak berelasi			***Loan to a related party***
Entitas asosiasi			*Associated entity*
PT Jawa Satu Regas	**9.722.000**	**9.722.000**	*PT Jawa Satu Regas*
Sebagai persentase terhadap total aset konsolidasian	**3,23%**	**3,58%**	*As percentage of total consolidated assets*

37. SALDO DAN TRANSAKSI DAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

37. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

- **Kompensasi manajemen kunci**
- ***Key management compensation***

	2024	2023	
Imbalan kerja jangka pendek			*Short-term employee benefits*
Direksi			*Directors*
(2024: Rp6.916 juta; 2023: Rp5.749 juta)	427.915	376.895	*(2024: Rp6,916 million; 2023: Rp5,749 million)*
Komisaris			*Commisioners*
(2024: Rp2.956 juta; 2023: Rp1.168 juta)	182.898	76.584	*(2024: Rp2,956 million; 2023: Rp1,168 million)*
	610.813	**453.479**	
Sebagai persentase terhadap total beban umum dan administrasi konsolidasi	**5,06%**	**3,31%**	*As percentage of total consolidated general and administrative expenses*

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*		Setara dengan/ *Equivalent to* Dolar AS/ *US Dollar*	
31 Desember 2024				***December 31, 2024***
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	Rp(*)	630.626	39.019.040	*Cash and cash equivalents*
Deposito Berjangka	Rp(*)	56.552	3.499.090	*Time Deposit*
Dana yang dibatasi penggunaannya	Rp(*)	51.274	3.172.513	*Restricted funds*
Piutang usaha, neto:				*Trade receivables, net:*
- pihak-pihak ketiga	Rp(*)	416.888	25.794.306	*third parties -*
- pihak berelasi	Rp(*)	28.839	1.784.367	*related parties -*
Piutang dari pihak berelasi lainnya	Rp(*)	207.789	12.856.651	*Due from related parties, net*
	SG$	36.758	27.109	
Piutang lain-lain	Rp(*)	2.018	124.833	*Other receivable*
Uang Jaminan	Rp(*)	6.206	383.992	*Refundable deposit*
Total aset	Rp(*)	1.400.192	86.634.792	*Total assets*
	SG$	36.758	27.109	
Utang				***Liabilities***
Utang usaha:				*Trade payables:*
- pihak-pihak ketiga	Rp(*)	174.384	10.789.763	*third parties -*
	SG$	3.275	2.415	
	JP¥	2.196.636	13.912	
	EUR	18.642	19.437	
- pihak berelasi	Rp(*)	111.559	6.902.577	*related parties -*
Utang lain-lain	Rp(*)	20.456	1.265.669	*Other payables*
Beban yang masih harus dibayar	Rp(*)	4.922	304.560	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan				*Short-term employee*
kerja jangka pendek	Rp(*)	137	8.494	*benefits liabilities*
Liabilitas sewa	Rp(*)	98.292	6.081.662	*Lease liabilities*
Utang pembiayaan konsumen	Rp(*)	6.351	392.983	*Consumer finance lease*
Pinjaman bank jangka pendek	Rp(*)	50.549	3.127.662	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	Rp(*)	635.178	39.300.694	*Long-term bank loans*
Total liabilitas	Rp(*)	1.101.828	68.174.064	*Total liabilities*
	SG$	3.275	2.415	
	JP¥	2.196.636	13.912	
	EUR	18.642	19.437	
Aset Neto	Rp(*)	298.364	18.460.728	***Net Assets***
	SG$	33.483	24.694	
	JP¥	(2.196.636)	(13.912)	
	EUR	(18.642)	(19.437)	
			18.452.073	

* Dalam jutaan Rupiah

**In millions of Rupiah*

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Apabila nilai tukar pada tanggal 31 Desember 2024 digunakan untuk menyajikan kembali saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 28 Maret 2025, aset neto di atas akan turun sekitar AS$475.035.

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

If the exchange rate on December 31, 2024 been used to restate the balances of monetary assets and liabilities in foreign currencies as of March 28, 2025, the above foreign currency denominated net assets would have decreased by approximately US$475.035.

39. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Rincian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menurut pelanggan adalah sebagai berikut:

39. REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

The details of revenue from contracts with customers by customer are as follows:

	2024	2023	
Pihak-pihak ketiga	110.166.419	71.482.431	*Third parties*
Pihak-pihak berelasi (Catatan 37)	17.514.826	34.899.473	*Related parties (Note 37)*
Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**127.681.245**	**106.381.904**	***Total revenue from contracts with customers***

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan menurut jenis jasa yang diberikan adalah sebagai berikut:

Revenue from contracts with customers based on services rendered is as follows:

	2024	2023	
Jasa sewa kapal:			*Chartered vessel services:*
Bahan kimia	65.662.340	38.151.941	*Chemicals*
Gas alam cair	31.339.082	24.259.996	*Liquefied natural gas*
Minyak mentah dan bahan bakar minyak	16.407.379	20.578.214	*Crude oil and fuel oil*
Penunjang kegiatan lepas pantai	9.695.705	12.256.076	*Offshore support vessel*
Penunjang armada laut	2.761.840	2.547.906	*Marine support*
Unit penyimpanan dan regasifikasi terapung	-	7.061.608	*Floating storage and regasification unit ("FSRU")*
	125.866.346	104.855.741	
Jasa pengelolaan awak kapal	944.955	867.986	*Crew management services*
Jasa pengelolaan kapal	750.953	532.000	*Ship management services*
Pusat pelatihan awak kapal	118.991	126.177	*Manning training center*
Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**127.681.245**	**106.381.904**	***Total revenue from contracts with customers***

39. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (lanjutan)

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan melebihi 10% dari jumlah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan adalah sebagai berikut:

39. REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS (continued)

The details of customers which represent more than 10% of the total revenue from contracts with customers are as follows:

	2024	2023	
Pihak-pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Pertamina International Shipping	40.547.019	20.031.609	*PT Pertamina International Shipping*
PT PLN Energi Primer Indonesia	28.854.183	7.061.608	*PT PLN Energi Primer Indonesia*
PT Pelindo Marine Services	9.774.300	11.546.536	*PT Pelindo Marine Services*
Pihak-pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Humpuss	16.190.154	13.179.028	*PT Humpuss*
PT Humpuss Transportasi Kimia	1.150.809	21.513.615	*PT Humpuss Transportasi Kimia*
Total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**96.516.465**	**73.332.396**	***Total revenue from contracts with customers***
Pihak-pihak ketiga:			*Third parties:*
PT Pertamina International Shipping	32%	19%	*PT Pertamina International Shipping*
PT PLN Energi Primer Indonesia	23%	7%	*PT PLN Energi Primer Indonesia*
PT Pelindo Marine Services	8%	11%	*PT Pelindo Marine Services*
Pihak-pihak berelasi:			*Related parties:*
PT Humpuss	13%	12%	*PT Humpuss*
PT Humpuss Transportasi Kimia	1%	20%	*PT Humpuss Transportasi Kimia*
Persentase pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	**77%**	**69%**	***Percentage of total revenue from contracts with customers***

40. INFORMASI SEGMEN USAHA

Grup dikelola dan dikelompokkan dalam divisi usaha yang terdiri dari jasa sewa kapal dan jasa anak buah kapal dan pengelolaan kapal. Divisi usaha ini digunakan sebagai dasar pelaporan informasi segmen. Penetapan harga antar segmen didasarkan pada kesepakatan masing-masing pihak.

40. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

The Group is managed and categorized in business divisions which consist of chartered vessels and vessel crew and management services. These business divisions are used as the segment reporting basis. Pricing determination between segments is based on agreements between the parties.

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *40. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: / *Business segment information of the Group is as follows:*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 / ***For the year ended December 31, 2024***

	Jasa Sewa Kapal/ *Chartered Vessel Services and Other*	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ *Crews and Vessel Management Services Services*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	145.589.194	2.854.026	(20.761.975)	127.681.245	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	(116.150.714)	(75.928)	19.713.317	(96.513.325)	*Cost of revenue*
Hasil Segmen	29.438.480	2.778.098	(1.048.658)	31.167.920	***Segmented Result***
Beban usaha	(6.086.738)	(7.680.274)	1.048.658	(12.718.354)	*Operating expense*
Pendapatan keuangan	1.756.238	1.116.290	(885.913)	1.986.615	*Finance income*
Biaya keuangan	(5.803.281)	(1.077.063)	885.913	(5.994.431)	*Finance costs*
Beban rugi neto dari entitas asosiasi	-	496.495	-	496.495	*Equity in net loss of associated company*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	19.304.699	(4.366.454)	-	14.938.245	*Profit before final tax and income tax*
Beban pajak final	(1.615.709)	-	-	(1.615.709)	*Final tax expense*
Beban pajak Penghasilan, neto	(109.989)	(154.514)	-	(264.503)	*Income tax expense, net*
Laba segmen	17.579.001	(4.520.968)	-	13.058.033	*Segment income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
Total aset	**337.783.439**	**49.411.238**	**(86.661.345)**	**300.533.332**	***Total assets***
Total liabilitas	**(170.779.523)**	**(42.973.965)**	**86.661.345**	**(127.092.143)**	***Total liabilities***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATIONS***
Belanja Modal	41.008.640	977.151	-	41.985.791	*Capital expenditure*
Penyusutan	19.396.946	575.729	-	19.972.675	*Depreciation*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 / ***For the year ended December 31, 2023***

	Jasa Sewa Kapal/ *Chartered Vessel Services and Other*	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ *Crews and Vessel Management Services*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	111.134.789	2.414.506	(7.167.391)	106.381.904	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	(83.597.490)	(804.560)	7.167.391	(77.234.659)	*Cost of revenue*
Hasil Segmen	27.537.299	1.609.946	-	29.147.245	***Segmented Result***
Beban usaha	(7.772.880)	(6.599.125)	-	(14.372.005)	*Operating expense*
Pendapatan keuangan	668.936	1.933.678	(931.510)	1.671.104	*Finance income*
Biaya keuangan	(2.259.036)	(2.215.691)	931.510	(3.543.217)	*Finance costs*
Keuntungan atas pelepasan saham entitas anak	-	1.396.286	-	1.396.286	*Gain from disposal of a subsidiary shares*
Beban rugi neto dari entitas asosiasi	-	(80.677)	-	(80.677)	*Equity in net loss of associated company*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	18.174.319	(3.955.583)	-	14.218.736	*Profit before final tax and income tax*

40. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / *40. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi segmen usaha Grup adalah sebagai berikut (lanjutan):

Business segment information of the Group is as follows (continued):

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (lanjutan) / ***For the year ended December 31, 2023 (continued)***

	Jasa Sewa Kapal/ *Chartered Vessel Services and Other*	Jasa Manajemen Awak dan Kapal dan Jasa Lainnya/ *Crews and Vessel Management Services*	Eliminasi/ *Elimination*	Konsolidasian/ *Consolidation*	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan	18.174.319	(3.955.583)	-	14.218.736	*Profit before final tax and income tax*
Beban pajak final	(1.103.454)	-	-	(1.103.454)	*Final tax expense*
Beban pajak Penghasilan, neto	(314.475)	(111.377)	-	(425.852)	*Income tax expense, net*
Laba segmen	16.756.390	(4.066.960)	-	12.689.430	*Segment income*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					***CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION***
Total aset	**295.583.459**	**79.421.665**	**(103.272.626)**	**271.732.498**	***Total assets***
Total liabilitas	**(135.597.391)**	**(74.434.459)**	**103.272.626**	**(106.759.224)**	***Total liabilities***
INFORMASI LAINNYA					***OTHER INFORMATIONS***
Belanja Modal	7.117.519	532.941	-	7.650.460	*Capital expenditure*
Penyusutan	21.009.956	564.915	-	21.574.871	*Depreciation*

41. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *41. COST OF REVENUE*

	2024	2023	
Biaya sewa kapal	28.066.985	16.664.404	*Vessel lease charges*
Bahan bakar	22.668.267	17.388.816	*Vessel's fuel*
Biaya penyusutan aset tetap (Catatan 12)	16.075.265	13.225.235	*Depreciation expense of fixed assets (Note 12)*
Biaya anak buah kapal	10.457.956	9.094.470	*Crew expense*
Biaya pelabuhan	4.497.199	2.778.904	*Port charges*
Biaya persediaan kapal	4.103.713	4.063.139	*Vessel supplies expense*
Biaya penyusutan aset hak guna	2.950.124	7.654.521	*Depreciation of right of use*
Perlengkapan kapal	2.154.906	1.955.369	*Consumables*
Biaya asuransi kapal	1.879.944	1.663.003	*Vessel insurance costs*
Perbaikan dan perawatan	952.521	1.189.984	*Repairs and maintenance*
Sertifikat dan inspeksi	752.992	715.657	*Certification and inspection*
Lain-lain	1.953.453	841.157	*Others*
Total beban pokok pendapatan	**96.513.325**	**77.234.659**	***Total cost of revenue***

41. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan) / *41. COST OF REVENUE (continued)*

Rincian pemasok dengan nilai pembelian melebihi 10% dari total pendapatan Grup adalah sebagai berikut:

The details of supplier which represent more than 10% of the total revenue from contracts with customers are as follows:

	31 Desember/*December 31,*				
	Beban pokok pendapatan *Cost of revenue*		Persentase dari total beban pokok pendapatan/*percentage of total cost of revenue*		
	2024	2023	2024	2023	
Pihak-pihak berelasi:					***Related party:***
PT Humpuss Trading	20.386.507	12.242.565	21,12%	15,85%	*PT Humpuss Trading*
Pihak-pihak ketiga:					***Third party:***
Zhejiang Huaxiang Shipping Co., Ltd.	-	8.640.491	-	11,19%	*Zhejiang Huaxiang Shipping Co., Ltd.*
	20.386.507	**20.883.056**	**21,12%**	**27,04%**	

42. UMUM DAN ADMINISTRASI / *42. GENERAL AND ADMINISTRATIVE*

	2024	2023	
Beban tenaga kerja	6.515.811	5.054.037	*Employee costs*
Jasa profesional	1.854.627	2.078.985	*Professional fees*
Beban kantor	1.171.742	1.206.022	*Office expenses*
Perjalanan dinas	750.346	603.740	*Business travel*
Biaya penyusutan aset hak hak guna (Catatan 13)	515.744	695.115	*Depreciation expense of right of use (Note 13)*
Biaya penyusutan aset tetap (Catatan 12)	431.543	263.525	*Depreciation expense of fixed assets (Note 12)*
Biaya penelitian dan pengembangan	423.565	502.558	*Research and development*
Beban imbalan kerja karyawan (Catatan 27)	377.039	638.264	*Employee benefits expense (Note 27)*
Promosi	170.893	528.469	*Promotion*
Lain-lain (dibawah AS$100.000)	1.746.158	2.115.754	*Others (below US$100,000)*
	13.957.468	**13.686.469**	

43. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA / *43. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES*

a. Pendapatan operasi lainnya / *a. Other operating income*

	2024	2023	
Pendapatan pengembalian pajak	700.224	518.941	*Tax from refundable taxes*
Pendapatan kompensasi	616.126	-	*Compensation income*
Laba selisih kurs	490.587	3.350	*Foreign exchange gain*
Laba atas penjualan aset tetap	-	175.657	*Gain on sale of fixed asset*
Pemulihan nilai piutang	-	59.375	*Recovery of allowance of receivables*
Lain-lain	225.081	387.306	*Others*
	2.032.018	**1.144.629**	

43. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA (lanjutan) / *43. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES (continued)*

b. Beban operasi lainnya / ***b. Other operating expenses***

	2024	2023	
Pajak dan denda	342.668	1.163.627	*Taxes and penalties*
Penambahan penyisihan atas kerugian redit ekspektasian piutang usaha	203.664	-	*Addition allowance for expected credit losses of trade receivable*
Rugi atas penjualan aset tetap	78.093	-	*Loss on sale of fixed asset*
Rugi penurunan nilai kapal	38.513	538.626	*Loss on impairment of vessel*
Lain-lain	129.966	127.912	*Others*
	792.904	**1.830.165**	

44. PENDAPATAN DAN BIAYA KEUANGAN / *44. FINANCE INCOME AND COST*

a. Pendapatan keuangan / ***a. Finance income***

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pendapatan keuangan terutama merupakan bunga dari pinjaman kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2024 and 2023, finance income mainly represents interest income from loan to a related party.

b. Biaya keuangan / ***b. Finance costs***

	2024	2023	
Beban bunga dari pihak ketiga	1.526.383	1.196.414	*Interest expense from third parties*
Beban bunga liabilitas sewa	1.246.547	1.068.393	*Interest expense from lease liabilities*
Beban bunga dari bank	3.221.501	1.278.410	*Interest expense from banks*
	5.994.431	**3.543.217**	

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING / *45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS*

Grup telah mengadakan kontrak-kontrak penting dengan beberapa pihak sebagai berikut:

The Group has engaged into significant contracts with several parties as follows:

a. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), entitas anak, dan Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL") telah menandatangani perjanjian pinjaman dimana PKR, entitas anak, telah memperoleh fasilitas pinjaman dari MOL sebesar AS$19.442.397 dengan tingkat bunga 6,07% per tahun untuk periode sebelum tanggal operasi komersial PT Jawa Satu Regas ("JSR"), dan 8,39% per tahun untuk periode selanjutnya. Pinjaman ini dijamin dengan saham GTSI dan Koperasi Karyawan Bhakti Samudra di PKR. Tujuan pinjaman adalah untuk membiayai partisipasi PKR pada proyek FSRU di JSR. Pinjaman ini dibayar kembali mulai dari Mei 2026 sampai dengan jatuh tempo terakhir pada bulan Februari 2047.

a. On December 31, 2018, PT Permata Khatulistiwa Regas ("PKR"), a subsidiary, and Mitsui O.S.K. Lines Ltd. ("MOL") have signed Loan Agreement where PKR, a subsidiary, has obtained a loan facility from MOL amounting to US$19,442,397 with an interest rate of 6.07% per annum for the period before commercial operation date of PT Jawa Satu Regas ("JSR"), and 8.39% per annum for the period thereafter. This loan is secured with share pledge of the GTSI, and Koperasi Karyawan Bhakti Samudra in PKR. The loan purpose is to finance the PKR participation of FSRU project in JSR. The loan is subject to be repaid from May 2026 until final maturity date in February 2047.

45. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Grup telah mengadakan kontrak-kontrak penting dengan beberapa pihak sebagai berikut:

a. Pada tanggal 8 Maret 2019, MOL dan PKR sepakat untuk amendemen perjanjian mengubah pemberi pinjaman dari MOL menjadi Bamboo Mountain Power B.V ("*Bamboo*") dan peminjam dari PKR ke GTSI.

b. Pada tanggal 23 November 2018, PKR dan JSR telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi ("SLA") di mana berdasarkan SLA, PKR, telah mensubordinasi fasilitas pinjaman sebesar AS$19.297.000 ke JSR, entitas asosiasi, dengan tingkat bunga 4,3% per tahun hingga dijadwalkan tanggal operasi komersial konstruksi FSRU, dan pada tingkat 8% per tahun sesudahnya. Pinjaman ini wajib dikonversi ke ekuitas setidaknya 50% dari total pinjaman pada tanggal operasi komersial yang tidak lebih dari 17 Desember 2021. Jumlah pinjaman yang tersisa harus dibayar kembali dari Januari 2028 hingga tanggal jatuh tempo terakhir pada Oktober 2039. Pada tanggal 13 Desember 2021, PKR telah melakukan konversi pinjaman ke ekuitas sebesar AS$9.575.000.

45. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

The Group has engaged into significant contracts with several parties as follows:

a. On March 8, 2019, MOL and PKR agreed to amend the agreement to change the lender from MOL to Bamboo Mountain Power B.V ("Bamboo") and the borrower from PKR to the GTSI.

b. On November 23, 2018, PKR and JSR have signed Subordinated Loan Agreement ("SLA") where based on the SLA, PKR, has subordinated the loan facility amounting to US$19,297,000 to JSR an associated entity with the interest rate of 4.3% per annum in arrears until scheduled commercial operation date of FSRU construction, and at the rate of 8% per annum thereafter. The loan is mandatorily converted to equity at least 50% of total loan at commercial operation date which no later than December 17, 2021. The remaining amount of loan is subject to be repaid from January 2028 until final maturity date in October 2039. On December 13, 2021, PKR has converted loan to equity amounting to US$9,575,000.

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The following table presents financial assets and financial liabilities of the Group:

	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
31 Desember 2024			***December 31, 2024***
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	41.139.250	41.139.250	*Cash and cash equivalents*
Deposito berjangka	3.599.090	3.599.090	*Time deposits*
Piutang usaha pihak-pihak ketiga, neto	27.087.013	27.087.013	*Trade receivables third parties, net*
Piutang usaha pihak berelasi	1.784.367	1.784.367	*Trade receivables related parties*
Piutang lainnya pihak-pihak ketiga	139.688	139.688	*Other receivables third parties, net*
Dana yang dibatasi penggunaannya	3.172.513	3.172.513	*Restricted funds*
Piutang kepada pihak berelasi	21.104.536	21.104.536	*Due from related parties*
Pinjaman kepada pihak berelasi	9.722.000	9.722.000	*Loan to a related party*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang usaha - pihak-pihak ketiga	11.288.671	11.288.671	*Trade payables - third parties*
Utang usaha - pihak berelasi	10.040.602	10.040.602	*Trade payables - related parties*
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	1.456.066	1.456.066	*Other payables - third parties*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	8.494	8.494	*Short-term employee benefit liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	8.748.281	8.748.281	*Accrued expenses*
Pinjaman bank jangka pendek	3.127.662	3.127.662	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	39.300.694	39.300.694	*Long-term bank loans*
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.044	19.442.044	*Long-term bank loans*

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Tabel berikut menyajikan aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup: (lanjutan)

The following table presents financial assets and financial liabilities of the Group: (continued)

	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
31 Desember 2023			***December 31, 2023***
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	41.373.913	41.373.913	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha pihak-pihak ketiga, neto	13.065.248	13.065.248	*Trade receivables third parties, net*
Piutang usaha pihak berelasi	7.229.481	7.229.481	*Trade receivables related parties*
Piutang lainnya pihak-pihak ketiga	9.900.624	9.900.624	*Other receivables third parties, net*
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.335.908	1.335.908	*Restricted funds*
Piutang kepada pihak berelasi	19.810.523	19.810.523	*Due from related parties*
Pinjaman kepada pihak berelasi	9.722.000	9.722.000	*Loan to a related party*
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang usaha - pihak-pihak ketiga	13.195.183	13.195.183	*Trade payables - third parties*
Utang usaha - pihak berelasi	7.814.095	7.814.095	*Trade payables - related parties*
Utang lain-lain - pihak-pihak ketiga	72.704	72.704	*Other payables - third parties*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	13.760	13.760	*Short-term employee benefit liabilities*
Beban yang masih harus dibayar	9.764.987	9.764.987	*Accrued expenses*
Pinjaman bank jangka pendek	1.889.702	1.889.702	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	20.897.320	20.897.320	*Long-term bank loans*
Pinjaman dari pihak ketiga	19.442.397	19.442.397	*Loan from third parties*

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Financial instruments presented in the statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured .

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar untuk setiap instrumen keuangan:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of the financial instruments:

- Nilai wajar kas dan setara kas, deposito berjangka, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, neto, piutang lainnya, pinjaman kepada pihak berelasi, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, utang kepada pihak berelasi, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

- *Fair value of cash and cash equivalents, time deposits, restricted funds, trade receivables, net, due from a related party, loan to related party, trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accrued expenses, due to related parties, short-term bank loan, long-term bank loan, approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.*

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar untuk setiap instrumen keuangan:

- Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar piutang lainnya pihak-pihak berelasi dan pinjaman kepada pihak-pihak berelasi dianggap tidak material karena suku bunga yang dikenakan oleh pihak berelasi mendekati suku bunga pasar.
- Nilai wajar dari liabilitas sewa dan pinjaman bank jangka panjang dengan suku mengambang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.
- Nilai wajar dari utang lain-lain pihak-pihak berelasi tidak lancar tidak dapat diukur dengan handal karena tidak memiliki jangka waktu realisasi yang jelas. Nilai wajar utang lain-lain pihak-pihak berelasi tidak lancar dianggap mendekati nilai tercatatnya.

Selain aset dan liabilitas keuangan diatas, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar. Sehingga tidak ada pengungkapan nilai wajar yang berdasarkan hirarki nilai wajar.

Risiko pasar

Selain aset dan liabilitas keuangan di atas, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar. Sehingga tidak ada pengungkapan nilai wajar yang berdasarkan hirarki nilai wajar.

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

- **Risiko tingkat suku bunga**

  Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, liabilitas sewa, dan pinjaman bank jangka pendek, yang dimiliki Grup.

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of the financial instruments:

- *The difference between the carrying amount and the the fair value of other receivables related parties and loan to a related party is considered not material due to the interest rate charged by the related party is close to the market interest rate.*
- *Fair value of lease liabilities and long-term bank loans, loan from third parties with floating interest rates approximate their fair values as they are re-assessed frequently.*
- *The fair value of non-current other payables - related parties can not be measured reliably since they have no fixed realization period. The fair value of non-current other payables to related parties is considered to be approximately equal to their carrying amounts.*

Other than above mentioned financial assets and liabilities, there are no financial assets and liabilities measured at fair value. Therefore, there is no disclosure on fair value based on fair value hierarchy.

Market risk

Other than above mentioned financial assets and liabilities, there are no financial assets and liabilities measured at fair value. Therefore, there is no disclosure on fair value based on fair value hierarchy.

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.

- ***Interest rate risk***

  Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, lease liabilities, and short-term bank loans.

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

- **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

  Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

  Pada tanggal 31 Desember 2024, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 50 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan lebih rendah/tinggi sebesar AS$155.354 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

- **Risiko nilai tukar mata uang asing**

  Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank jangka panjang, utang usaha, utang lain-lain, dan biaya yang masih harus dibayar, utang pembiayaan konsumen, dan liabilitas sewa dalam mata uang Rupiah.

  Pada tanggal 31 Desember 2024, jika nilai tukar AS Dolar terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 akan lebih tinggi/rendah sebesar AS$511.926.

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Market risk (continued)

- ***Interest rate risk (continued)***

  There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

  As at December 31, 2024, had the interest rates of the loans and borrowings been 50 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended December 31, 2024, would have been US$155.354 lower/higher, accordingly, mainly as a result of, higher/lower interest charge on the loans and borrowings with floating interest rates.

- ***Foreign exchange rate risk***

  Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from Rupiah denominated short-term bank loans, long-term bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses, consumer finance liability and lease liabilities.

  As of December 31, 2024, had the exchange rate of the US Dollar against the foreign currency depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended December 31, 2024, would have been US$511.926 higher/lower.

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk (continued)***

Risiko kredit / ***Credit risk***

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Grup mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau risiko terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from their customers or counterparties' failure to fulfill their contractual obligations. The Group manages and controls this credit risk by setting limits on the amount of risk they are willing to accept for individual customers and by monitoring exposures in relation to such limits.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

At the reporting date, the Group maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai serta piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired:

	2024	2023	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	14.405.307	14.557.304	*Neither past due nor impaired*
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	14.466.073	5.737.425	*Past due but not impaired*
Mengalami penurunan nilai	1.346.229	1.201.055	*Impaired*
	30.217.609	21.495.784	
Dikurangi:			***Less:***
Penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian	(1.346.229)	(1.201.055)	*Allowance for expected credit losses*
	28.871.380	**20.294.729**	

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from repayments of bank loans and related interest and vessel operational cost. The source of fund to fulfill repayment of long-term bank loans from contractual rental with third party in short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Total/ *Total*	
31 Desember 2024						***December 31, 2024***
Utang usaha	21.329.273	-	-	-	21.329.273	*Trade payables*
Utang lain-lain	1.456.066	-	-	-	1.456.066	*Other payables*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	8.494	-	-	-	8.494	*Short-term employee benefits liability*
Beban yang masih harus dibayar	8.748.281	-	-	-	8.748.281	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa:						*Lease liabilities:*
Pokok liabilitas	6.707.109	6.524.965	6.294.768	5.508.657	25.035.499	*Principal*
Utang pembiayaan konsumen:						*Consumer finance lease*
Pokok liabilitas	147.087	128.786	99.122	17.988	392.983	*Principal*
Pinjaman bank jangka pendek:						*Short-term bank loans:*
Pokok pinjaman	3.127.662	-	-	-	3.127.662	*Principal*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(7.429)	-	-	-	(7.429)	*Unamortized costs of loans*
Bunga pinjaman	312.413	-	-	-	312.413	*Interest*
Pinjaman bank jangka panjang:						*Long-term bank loans:*
Pokok pinjaman	10.682.178	11.198.716	8.964.375	8.703.650	39.548.919	*Principal*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(118.527)	(44.045)	(41.934)	(43.719)	(248.225)	*Unamortized costs of loans*
Bunga pinjaman	3.693.958	2.391.045	1.428.618	612.862	8.126.483	*Interest*
Pinjaman dari pihak ketiga						*Loan from a third party*
Pokok pinjaman	-	231.661	306.261	18.904.475	19.442.397	*Principal*
Beban bunga masa depan	1.629.980	1.629.980	1.629.980	31.212.068	36.102.008	*Future imputed interest charges*
	57.716.545	**22.061.108**	**18.681.190**	**64.915.981**	**163.374.824**	

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

46. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Risiko likuiditas

Liquidity risk

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak:

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Total/ *Total*	
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Utang usaha	21.009.278	-	-	-	21.009.278	*Trade payables*
Utang lain-lain	72.704	-	-	-	72.704	*Other payables*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	13.760	-	-	-	13.760	*Short-term employee benefits liability*
Beban yang masih harus dibayar	9.764.987	-	-	-	9.764.987	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa:						*Lease liabilities:*
Pokok liabilitas	7.595.294	6.430.545	6.433.042	11.930.677	32.389.558	*Principal*
Utang pembiayaan konsumen:						Consumer *finance lease*
Pokok liabilitas	74.032	54.713	54.058	148.033	330.836	*Principal*
Pinjaman bank jangka pendek:						*Short-term bank loans:*
Pokok pinjaman	1.889.702	-	-	-	1.889.702	*Principal*
Bunga pinjaman	207.867	-	-	-	207.867	*Interest*
Pinjaman bank jangka panjang:						*Long-term bank loans:*
Pokok pinjaman	5.120.776	6.511.201	4.608.160	4.657.184	20.897.321	*Principal*
Bunga pinjaman	1.701.345	1.202.798	716.215	694.907	4.315.265	*Interest*
Pinjaman dari Pihak-pihak ketiga	75.117	240.461	228.613	18.898.206	19.442.397	*Loan - third parties*
	47.524.862	**14.439.718**	**12.040.088**	**36.329.007**	**110.333.675**	

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

Pengelolaan modal

Capital management

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Group capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pengelolaan modal selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

The Group manages their capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes of capital management during the year ended December 31, 2024.

48. TRANSAKSI NON KAS / *48. NON-CASH TRANSACTIONS*

Transaksi non kas Grup adalah sebagai berikut / *Non-cash transactions of the Group are as follow:*

	2024	2023	
Penambahan aset tetap melalui utang dan beban yang masih harus dibayar	1.418.103	2.809.457	*Addition fixed asset through payables and accruals*
Penambahan aset tetap dari uang muka	1.510.000	255.548	*Addition fixed asset through advances*

Informasi tambahan kas / *Supplementary cash flow information*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut: / *Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated cash flow statements are as follows:*

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Arus kas/ *Cash flow*	*Foreign exchange*	*Lainnya/ others*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pinjaman bank pendek	1.889.702	1.434.072	(188.683)	(7.429)	3.127.662	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	20.897.320	20.357.304	(1.705.705)	(248.225)	39.300.694	*Long-term bank loans*

	1 Januari 2023/ *January 1, 2023*	Arus kas/ *Cash flow*	*Foreign exchange*	*Lainnya/ others*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Pinjaman bank pendek	4.386.706	(2.586.639)	89.635	-	1.889.702	*Short-term bank loans*
Pinjaman bank jangka panjang	4.090.902	16.915.584	(109.166)	-	20.897.320	*Long-term bank loans*

49. STANDAR AKUNTANSI BARU / *49. NEW ACCOUNTING STANDARDS*

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal: / *The following are several issued accounting standards by DSAK that are considered relevant to the financial reporting of the Company and will be effective for reporting periods beginning on or after:*

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2025: / *Effective on or after the date of January 1, 2025:*

- PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. / *PSAK 221: The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates.*

49. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh DSAK yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Perusahaan dan akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal:

Efektif berlaku pada atau tanggal setelah tanggal 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan"

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

49. NEW ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following are several issued accounting standards by DSAK that are considered relevant to the financial reporting of the Company and will be effective for reporting periods beginning on or after:

Effective on or after the date of January 1, 2026:

- *PSAK 109 "Financial Instruments" and PSAK 107 "Financial Instruments: Disclosure about the Classification and Measurement of Financial Statements".*

As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Group's consolidated financial statements.

50. KEJADIAN SETELAH LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 11 Januari 2025, HTK2, entitas anak dan PT Patria Nusasegara, pihak ketiga melakukan perjanjian jual beli kapal Marlin 88 dengan harga AS$7.050.000. Tanggal efektif pembelian kapal ini adalah pada 17 Februari 2025 berdasarkan tanggal on *Protocol of Delivery and Acceptance.*

50. EVENT AFTER REPORTING DATE

On January 11, 2025, HTK2, a subsidiary, and PT Patria Nusasegara, a third party, entered into an agreement to sell the ship Marlin 88 for a price of US$7,050,000. The effective date of the vessel purchase transaction was on February 17, 2025 based on Protocol of Delivery and Acceptance date.

Indeks Referensi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 Reference Index

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
1		**Laporan Tahunan paling sedikit memuat:**	**The Annual Report shall at least contain:**	
	a	Ikhtisar data keuangan penting	Key financial highlights	✓
	b	Informasi saham (jika ada)	Stock information (if any)	✓
	c	Laporan Direksi	Report of the Board of Directors	✓
	d	Laporan Dewan Komisaris	Report of the Board of Commissioners	✓
	e	Profil Emiten atau Perusahaan Publik	Profile of the Issuer or Public Company	✓
	f	Analisis dan pembahasan manajemen	Management discussion and analysis	✓
	g	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Corporate governance of the Issuer or Public Company	✓
	h	Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	Social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company	✓
	i	Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit	Audited financial statements for the year	✓
	j	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan	Statement of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report	✓
2		**Uraian Isi Laporan Tahunan**	**Details of the Annual Report Content**	
	a	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	**Key Financial Highlights** Summary of important financial data including financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting the business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	12-15
	1	Pendapatan/penjualan	Revenue/sales	12
	2	Laba bruto	Gross profit	12
	3	Laba (rugi)	Profit (loss)	12
	4	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali	Profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests	12
	5	Total laba (rugi) komprehensif	Total comprehensive profit (loss)	12
	6	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali	Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests	12
	7	Laba (rugi) per saham	Profit (loss) per share	12
	8	Jumlah aset	Total assets	13
	9	Jumlah liabilitas	Total liabilities	13
	10	Jumlah ekuitas	Total equity	13
	11	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset	Return on assets	14
	12	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas	Return on equity	14
	13	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan	Net profit margin	14
	14	Rasio lancar	Current ratio	14
	15	Rasio liabilitas terhadap ekuitas	Debt to equity ratio	14
	16	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	Debt to assets ratio	14
	17	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya	Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry	14

Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies				Halaman Page
b		**Informasi Saham**	**Stock Information**	**16-18**
		Informasi saham bagi perusahaan terbuka paling sedikit memuat:	Information on the stock of the public company shall at least contain:	
	1	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	Shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 financial years, containing at least:	
		a Jumlah saham yang beredar	Number of shares outstanding	
		b Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan	Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed	
		c Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan	Highest, lowest, and closing prices based on the stock exchange where the shares are listed	
		d Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan	Volume of trading on the stock exchange where the shares are listed	
		Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek	Information in points b), c), and d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange	
	2	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	In the event of a corporate action that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the par value of shares, issuance of convertible securities, as well as capital additions and deductions, the share information as referred to in number 1) shall at least include an explanation regarding:	N/A
		a Tanggal pelaksanaan aksi korporasi	Date of implementation of corporate action	
		b Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham	Stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, and changes in the par value of the shares	
		c Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi	Number of shares outstanding prior to and after the corporate action	
		d Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada)	Number of convertible securities executed (if any)	
		e Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi	Share price before and after corporate action	
	3	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut	In the event of a temporary suspension of trading and/or delisting of shares in the financial year, the reasons for such suspension and/or delisting shall be provided	18
	4	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut	In the event that the temporary suspension of trading as referred to in number 3) and/or the process of delisting of the shares is ongoing until the end of the Annual Report period, the actions taken to resolve the temporary suspension of trading and/or delisting of the shares must be detailed	18

Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies				Halaman Page
c		**Laporan Direksi**	**Report of the Board of Directors**	**42-50**
	1	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
	a	Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	The Issuer or Public Company's strategic strategies and policies	44-46
	b	Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik	Roles of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of the Issuer or Public Company	46-47
	c	Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik	Processes carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer or Public Company's strategy	
	d	Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik	Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company	47
	e	Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik	Constraints faced by the Issuer or Public Company	48
	2	Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Overview of the business prospects of the Issuer or Public Company	48
	3	Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Implementation of governance in the Issuer or Public Company	48-49
d		**Laporan Dewan Komisaris**	**Report of the Board of Commissioners**	**32-40**
		Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
	1	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi	Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of the Issuer or Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors	33
	2	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi	Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors	37
	3	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik	Views on the implementation of governance in the Issuer or Public Company	38
e		**Profil Emiten atau Perusahaan Publik**	**Issuer or Public Company's Profile**	**54-89**
		Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	The profile of the Issuer or Public Company shall contain at least the following information:	
	1	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku	Name of the Issuer or Public Company, including whether there has been a change of name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the financial year	54
	2	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	Access to the Issuer or Public Company including branch offices or representative offices that allow the public to obtain information about the Issuer or Public Company, including:	55
	a	Alamat	Address	
	b	Nomor telepon	Phone number	
	c	Alamat surat elektronik	E-mail address	
	d	Alamat situs web	Website	
	3	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Brief history of the Issuer or Public Company	56-57
	4	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan	Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or values	4-5

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
5		Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan	Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, and types of goods and/or services produced	58-60
6		Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik	The operational area of the Issuer or Public Company	62-63
7		Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan	The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to a structure of 1 level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, alongside the names and positions	65
8		Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan	List of memberships in industry associations both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance	64
9		Profil Direksi, paling sedikit memuat:	Profile of the Board of Directors, at least containing:	68-69
	a	Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	Name and position in accordance with the duties and responsibilities	
	b	Foto terbaru	Latest photo	
	c	Usia	Age	
	d	Kewarganegaraan	Citizenship	
	e	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi	Education history and/or certification	
	f	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	Work experience, including information on:	
		(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan (2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	(1) The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company (2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of committees and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this shall be disclosed (3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company	
	g	Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut	Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority shareholders, and controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including names of the affiliated parties In the event that a member of the Board of Directors does not have an affiliated relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter	
	h	Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	Changes in the composition of the members of the Board of Directors and reasons for such changes In the event of no change in the composition of the members of the Board of Directors, this shall be disclosed	70
10		Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Profile of the Board of Commissioners, at least containing:	66-67
	a	Nama dan jabatan	Name and position	
	b	Foto terbaru	Latest photo	
	c	Usia	Age	
	d	Kewarganegaraan	Citizenship	
	e	Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi	Education history and/or certification	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	f	Riwayat jabatan, meliputi informasi: (1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris (2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan (3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut (4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	Work experience, including information on: (1) The legal basis for appointment as a member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company (2) Legal basis for initial appointment as an independent member of the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company (3) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of committees and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this shall be disclosed (4) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company	66-67
	g	Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut	Affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, majority shareholders, and controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners, including names of the affiliated parties In the event that a member of the Board of Commissioners does not have an affiliated relationship, the Issuer or Public Company shall disclose this matter	189
	h	Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 periode	Statement of independence of the independent commissioner(s) should the independent commissioner(s) have served more than 2 terms	N/A
	i	Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and reasons for such changes In the event of no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this shall be disclosed	70
11		Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya	In the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the financial year ends, up to the deadline for submitting the Annual Report, the compositions presented in the Annual Report are the current and previous compositions of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners	N/A
12		Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel	Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year This information can be presented in tabulated format	70-74
13		Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	Names of shareholders and percentages of ownership at the beginning and end of the financial year, consisting of the following information regarding:	75-76
	a	Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik	Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	b	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares in the Issuer or Public Company In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this shall be disclosed	76
	c	Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel	Public shareholders, namely shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company This information can be presented in tabulated format	76-77
14		Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	Percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including the shareholders registered in the shareholder register for indirect ownership of interests by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this shall be disclosed	76
15		Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	Number of shareholders and the percentage of ownership at the end of the financial year, classified by:	76-77
	a	Kepemilikan institusi lokal	Local institutional ownership	
	b	Kepemilikan institusi asing	Foreign institutional ownership	
	c	Kepemilikan individu lokal	Local individual ownership	
	d	Kepemilikan individu asing	Foreign individual ownership	
16		Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan	Information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, down to the individual owners, presented in the form of a scheme or chart	77
17		Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut	Names of subsidiaries, associated entities, joint ventures in which the Issuer or Public Company has joint control of the entities (if any), along with the percentages of share ownership, lines of business, total assets, and operating status of the subsidiaries, associated entities, and joint ventures For subsidiaries, their addresses must be provided	79-82
18		Kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek di mana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada)	Chronology of share listing, number of shares, par value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including events of stock splits, reverse stock, stock dividends , bonus shares, and changes in the par value of shares, issuance of convertible securities, capital additions and subtractions (if any)	78

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
19		Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada)	Information on the listing of securities other than those referred to in number 18), which have not matured in the financial year, at least containing the names of the securities, issuance year, interest rate/yield, maturity date, offering value, and ratings (if any)	79
20		Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	Information on the procurement of services from public accountants and public accounting firms along with their networks/associations/alliances, including:	83-84
	a	Nama dan alamat	Names and addresses	
	b	Periode penugasan	Assignment periods	
	c	Informasi jasa audit dan/atau non-audit yang diberikan	Information on audit and/or non-audit services rendered	
	d	Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non-audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku	Audit and/or non-audit fee for each assignment performed during the financial year	
	e	Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non-audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel	In the event that the appointed public accountants and public accounting firms and their networks/associations/alliances did not provide non-audit services, this shall be disclosed Disclosure of information on the procurement of services from public accountants and public accounting firms along with their networks/associations/alliances can be presented in tabulated format	
21		Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP	Names and addresses of capital market supporting institutions and/or professions other than the public accountants and public accounting firms	84
f		**Analisis dan Pembahasan Manajemen**	**Management Analysis and Discussion**	**92-138**
		Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	Management's analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the financial year, which at least contains:	
1		Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	Review of operations for each business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	97-106
	a	Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya	Production, which includes the process, capacity, and developments thereof	
	b	Pendapatan/penjualan	Revenue/sales	
	c	Profitabilitas	Profitability	
2		Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	Comprehensive financial performance, which includes a comparison of financial performance in the last 2 financial years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	109-123
	a	Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset	Current assets, non-current assets, and total assets	110-112
	b	Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	Current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities	112-114
	c	Ekuitas	Equity	114
	d	Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif	Revenue/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss)	115-120
	e	Arus kas	Cash flows	120-123
3		Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	Ability to pay debts or obligations, by presenting the calculations for the relevant ratios	123-125

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
4		Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan	Collectibility of the Issuer or Public Company's receivables, by presenting the calculations for the relevant ratios	125-126
5		Struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud	Capital structure and management policy on the capital structure along with the basis for determining such policy	126
6		Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	Discussion of material commitments for capital goods investments, with the explanation containing at least:	126
	a	Tujuan dari ikatan tersebut	Purposes of commitments	
	b	Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut	Expected sources of funding to fulfill such commitments	
	c	Mata uang yang menjadi denominasi	Currencies in which such commitments are denominated	
	d	Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	Measures planned by the Issuer or Public Company to take to protect against the risk arising from the related foreign currency positions	
7		Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	Discussion of capital goods investments realized in the last financial year, containing at least:	127
	a	Jenis investasi barang modal	Types of capital goods investments	
	b	Tujuan investasi barang modal	Purposes of capital goods investments	
	c	Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan	Amounts disbursed in capital goods investments	
8		Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada)	Material information and facts occurring after the date of the accountant's report (if any)	127
9		Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	Business prospects of the Issuer or Public Company related to the conditions in the relevant industry, the general economy, and the international market, accompanied by supporting quantitative data from reliable sources	128-129
10		Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	Comparison between the target/projection at the beginning of the financial year with the results achieved, regarding:	129-130
	a	Pendapatan/penjualan	Revenue/sales	
	b	Laba (rugi)	Profit (loss)	
	c	Struktur modal (*capital structure*) atau	Capital structure or	
	d	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	Other matters deemed important to the Issuer or Public Company	
11		Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 tahun mendatang, mengenai:	Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 year, regarding:	130
	a	Pendapatan/penjualan	Revenue/sales	
	b	Laba (rugi)	Profit (loss)	
	c	Struktur modal (*capital structure*)	Capital structure	
	d	Kebijakan dividen atau	Dividend policy or	
	e	Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	Other matters deemed important to the Issuer or Public Company	
12		Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar	Marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding marketing strategy and market share	107-108
13		Uraian mengenai dividen selama 2 tahun buku terakhir, paling sedikit:	Description of dividends for the last 2 financial years, at least containing:	131
	a	Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih	Dividend policy, which includes information on the ratio of dividends to net income	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	b	Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non-kas	Cash dividend payment date and/or non-cash dividend distribution date	
	c	Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non-kas)	Amount of dividend per share (cash and/or non-cash)	
	d	Jumlah dividen per tahun yang dibayar	Amount of dividends disbursed per year	
		Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel	This information can be presented in tabulated format	
		Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	In the event that the Issuer or Public Company did not distribute dividends in the last 2 years, this shall be disclosed	
14		Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	Realization of the use of public offering proceeds, by taking into consideration the following:	132
	a	Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku	In the event that during the financial year the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of the public offering proceeds shall be disclosed up to the end of the financial year	
	b	Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut	In the event of a change in the use of proceeds, as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority regarding the report on the realization of the use of public offering proceeds, the Issuer shall explain such change	
15		Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	Material information (if any), among others regarding investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, debt/capital restructurings, material transactions, affiliated transactions, and transactions with conflict of interest which occurred during the financial year, containing at least:	132-136
	a	Tanggal, nilai, dan objek transaksi	Dates, values, and objects of the transactions	
	b	Nama pihak yang melakukan transaksi	Names of parties conducting the transactions	
	c	Sifat hubungan afiliasi (jika ada)	Nature of the affiliations (if any)	
	d	Penjelasan mengenai kewajaran transaksi	Explanation of the fairness of the transactions	
	e	Pemenuhan ketentuan terkait	Compliance with related provisions	
	f	Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	In the event that there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letters a) to e) above, the Issuer or Public Company also shall disclose the following:	
		(1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*)	(1) A statement from the Board of Directors that the affiliated transactions have undergone adequate procedures to ensure that affiliated transactions have been carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	
		(2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*)	(2) The roles of the Board of Commissioners and the audit committee in undertaking the adequate procedures to ensure that the affiliated transactions have been carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle	

			Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies	Halaman Page
	g	Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan	For affiliated transactions or material transactions that are business activities carried out in order to generate business revenue and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation shall be added that the affiliated transactions or material transactions are related to business activities carried out in order to generate business revenue and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously	
		Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut	In the event that the affiliated transactions or material transactions have been disclosed in the annual financial statements, an information regarding the reference to such disclosure in the annual financial statements shall be provided	
	h	Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut	For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or transactions with conflict of interest shall be provided	
	i	Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	In the event of no affiliated transaction and/or transaction with conflict of interest, this shall be disclosed	
16		Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	Changes in the laws and regulations that bear a significant effect on the Issuer or Public Company and their impact on the financial statements (if any)	137
17		Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada)	Changes in accounting policies, the reasons for such changes, and their impact on the financial statements (if any)	137
g		**Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik**	**Governance of the Issuer or Public Company**	**140-273**
		Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	Details on the governance of the Issuer or Public Company must contain at least a brief explanation on:	
1		RUPS, paling sedikit memuat:	GMS, at least regarding:	147-159
	a	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku meliputi:	Resolutions of the GMS in the financial year and 1 year prior to the financial year, including:	
		(1) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku	(1) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 year before the financial year that were implemented in the financial year	151-159
		(2) Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan	(2) Resolutions of the GMS in the financial year and 1 year before the financial year that were not implemented along with the reasons for not implementing them	N/A
	b	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	In the event that the Issuer or Public Company uses an independent party at the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed	152
2		Direksi, paling sedikit memuat:	Board of Directors, at least regarding:	172-185
	a	Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel	Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors This information shall be described and may be presented in tabulated format	175-178
	b	Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi	Statement that the Board of Directors has guidelines or charter of the Board of Directors	172-173

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS	Policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in these meetings including attendance at the GMS	178-183
		Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel	Level of attendance of members of the Board of Directors in meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS, can be presented in tabulated format	
	d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	Training and/or competence development for members of the Board of Directors:	
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada) dan	(1) Policy on training and/or competence development for members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any) and	183-184
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada)	(2) Training and/or competence development programs attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any)	184
	e	Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the financial year shall at least contain:	N/A
		(1) Prosedur penilaian kinerja	(1) Performance appraisal procedure	
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	(2) Criteria used, such as performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings	
	f	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut	In the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this shall be disclosed	185
3		Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	The Board of Commissioners, at least regarding:	160-171
	a	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Duties and responsibilities of the Board of Commissioners	163-165
	b	Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris	Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter of the Board of Commissioners	160
	c	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS	policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS	167-169
		Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel	Level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabulated format	
	d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	Training and/or competence development for members of the Board of Commissioners:	
		(1) Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada)	(1) Policy on training and/or competence development for members of the Board of Commissioners, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any)	170
		(2) Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada)	(2) Training and/or competence development programs attended by members of the Board of Commissioners in the financial year (if any)	169-170

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	e	Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	193-194
		(1) Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja	(1) Performance appraisal procedures	
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	(2) Criteria used, such as performance achievements during the financial year, competence, and attendance at meetings	
		(3) Pihak yang melakukan penilaian	(3) The party conducting the assessment	
	f	Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	The Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year, including:	171
		(1) Prosedur penilaian kinerja	(1) Performance appraisal procedures	
		(2) Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat	(2) Criteria used, such as performance achievements during the financial year, competence, and attendance at meetings	
4		Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	195-199
	a	Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	Nomination procedure, including a brief description of the policy and process of nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners	195-197
	b	Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	198-199
		(1) Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	(1) Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners	
		(2) Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya	(2) The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners, such as salary, allowances, tantiem/bonus and others	
		(3) Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	(3) The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners	
		Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel	Disclosure of information can be presented in tabulated format	
5		Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	The sharia supervisory board, should the Issuer or Public Company carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, at least regarding:	N/A
	a	Nama	Names	
	b	Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah	Legal basis for appointment	
	c	Periode penugasan dewan pengawas syariah	Term of office	
	d	Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah	Duties and responsibilities	
	e	Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervision of compliance with sharia principles in the capital market for the Issuer or Public Company	
6		Komite audit, paling sedikit memuat:	The audit committee, at least contains:	200-210
	a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	Name and position in the committee membership	
	b	Usia	Age	
	c	Kewarganegaraan	Citizenship	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	d	Riwayat pendidikan	Educational background	
	e	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	Work experience, including information on:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	(1) Legal basis for appointment as committee member	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of a committee as well as other positions (if any)	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	(3) Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company	
	f	Periode dan masa jabatan anggota komite audit	Period and term of office of audit committee members	
	g	Pernyataan independensi komite audit	Audit committee independence statement	
	h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	Training and/or competence development programs attended in the financial year (if any)	
	i	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut	Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and level of attendance of audit committee members in these meetings	
	j	Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit	Implementation of audit committee activities in the financial year in accordance with those stated in the audit committee guidelines or charter	
7		Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Committee or function of nomination and remuneration of the Issuer or Public Company, at least regarding:	210-219
	a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	Name and position in the committee membership	
	b	Usia	Age	
	c	Kewarganegaraan	Citizenship	
	d	Riwayat pendidikan	Educational background	
	e	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	Work experience, including information on:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	(1) Legal basis for appointment as committee member	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of a committee as well as other positions (if any)	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	(3) Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company	
	f	Periode dan masa jabatan anggota komite	Period and term of office of committee members	
	g	Pernyataan independensi komite	Committee independence statement	
	h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	Training and/or competence development attended in the financial year (if any)	
	i	Uraian tugas dan tanggung jawab	Description of duties and responsibilities	
	j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	A statement that the committee has a guideline or charter	
	k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut	Policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members in the meetings	
	l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku	Brief description of the activities carried out in the financial year	
	m	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:	In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company shall disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
		(1) Alasan tidak dibentuknya komite	(1) Reasons for not forming the committee	
		(2) Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi	(2) The party carrying out the nomination and remuneration function	
8		Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	Other committees in the Issuer or Public Company that support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least regarding:	219-224
	a	Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite	Name and position in the committee membership	
	b	Usia	Age	
	c	Kewarganegaraan	Citizenship	
	d	Riwayat pendidikan	Educational background	
	e	Riwayat jabatan, meliputi informasi:	Work experience, including information on:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite	(1) Legal basis for appointment as committee member	
		(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada)	(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, a member of the Board of Directors, and/or a member of a committee as well as other positions (if any)	
		(3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	(3) Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company	
	f	Periode dan masa jabatan anggota komite	Period and term of office of committee members	
	g	Pernyataan independensi komite	Committee independence statement	
	h	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada)	Training and/or competence development attended in the financial year (if any)	
	i	Uraian tugas dan tanggung jawab	Description of duties and responsibilities	
	j	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite	Statement that the committee has a committee guideline or charter	
	k	Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut	Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members in the meetings	
	l	Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku	Brief description of the activities carried out in the financial year	
9		Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat:	Corporate Secretary, at least regarding:	225-232
	a	Nama	Name	
	b	Domisili	Domicile	
	c	Riwayat jabatan, meliputi:	Work experience, including:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan	(1) Legal basis for appointment as company secretary	
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik	(2) Work experience and time period both inside and outside the issuer or public company	
	d	Riwayat pendidikan	Educational background	
	e	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku	Training and/or competence development attended in the financial year	
	f	Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku	Brief description of the implementation of the duties of the company secretary in the financial year	
10		Unit audit internal, paling sedikit memuat:	Internal audit unit, at least regarding:	232-239
	a	Nama kepala unit audit internal	Name of head of internal audit unit	
	b	Riwayat jabatan, meliputi:	Work experience, including:	
		(1) Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal	(1) Legal basis for appointment as head of internal audit unit	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
		(2) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik	(2) Work experience and time period both inside and outside the Issuer or Public Company	
	c	Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada)	Qualification or certification in the internal audit profession (if any)	
	d	Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku	Training and/or competence development attended in the financial year	
	e	Struktur dan kedudukan unit audit internal	Structure and position of the internal audit unit	
	f	Uraian tugas dan tanggung jawab	Description of duties and responsibilities	
	g	Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal	Statement that there is a guideline or charter of the internal audit unit	
	h	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/atau komite audit	Brief description of the implementation of the duties of the internal audit unit in the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/or audit committee	
11		Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat:	Description of the internal control system implemented by the issuer or public company, at least regarding:	247-254
	a	Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya	Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations	
	b	Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal	Review of the effectiveness of the internal control system	
	c	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal	Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system	
12		Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least regarding:	240-246
	a	Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	Overview of the risk management system in the Issuer or Public Company	
	b	Jenis risiko dan cara pengelolaannya	Types of risks and ways to manage them	
	c	Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik	Review of the effectiveness of the risk management system	
	d	Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko	Statement from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system	
13		Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	Legal cases with a material impact involving the Issuer or Public Company, its subsidiaries, the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least regarding:	255
	a	Pokok perkara/gugatan	Legal case/lawsuit matter	
	b	Status penyelesaian perkara/gugatan	Status of settlement	
	c	Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik	Effect on the condition of the Issuer or Public Company	
14		Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada)	Information on administrative sanctions imposed on the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities in the financial year (if any)	255
15		Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	Information on the code of ethics prevailing in the Issuer or Public Company, including:	260-264
	a	Pokok-pokok kode etik	Code of ethics	
	b	Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	Dissemination of the code of ethics and enforcement mechanisms	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
	c	Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	Statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company	
16		Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP)	Brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees of the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or employee stock ownership program (ESOP)	199
		Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	In the event that the compensation is provided in the form of MSOP and/or ESOP, the information disclosed must at least contain:	N/A
	a	Jumlah saham dan/atau opsi	Number of shares and/or options	
	b	Jangka waktu pelaksanaan	Implementation period	
	c	Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak	Requirements for the eligibility of employees and/or management	
	d	Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan	Exercise price or determination thereof	
17		Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	Brief description of the information disclosure policy, regarding:	188
	a	Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka	Share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company	
	b	Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud	Implementation of said policy	
18		Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Description of the whistleblowing system prevailing in the Issuer or Public Company, at least regarding:	265-267
	a	Cara penyampaian laporan pelanggaran	Mechanism for reporting submission	
	b	Perlindungan bagi pelapor	Protection for whistleblowers	
	c	Penanganan pengaduan	Handling of complaints/reports	
	d	Pihak yang mengelola pengaduan	Party managing the reports	
	e	Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	Results of the handling of complaints/reports, at least:	
		(1) Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku	(1) The number of reports received and processed in the financial year	
		(2) Tindak lanjut pengaduan	(2) Follow-up to the reports.	
		Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut	In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, then this shall be disclosed	
19		Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least regarding:	255-257
	a	Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik	Programs and procedures carried out to address practices of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/or gratuities in the Issuer or Public Company	
	b	Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	Anti-corruption training/dissemination thereof to employees of the Issuer or Public Company	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
		Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud	In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having said policy shall be provided	
20		Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	Implementation of the guidelines for the governance of issuers and public companies, including:	268-273
	a	Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	A statement regarding the recommendations that have been implemented and/or	
	b	Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada)	An explanation of the recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any)	
		Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel	This information can be presented in tabulated format	
h		**Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik**	**Issuer or Public Company's Corporate Social and Environmental Responsibility**	**273**
1		Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	Information disclosed in the corporate social and environmental responsibility chapter shall be the Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and the report shall contain at least:	✓
	a	Penjelasan strategi keberlanjutan	Explanation of sustainability strategy	
	b	Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)	Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental)	
	c	Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Brief profile of the Issuer or Public Company	
	d	Penjelasan Direksi	Explanation by the Board of Directors	
	e	Tata kelola keberlanjutan	Sustainability governance	
	f	Kinerja keberlanjutan	Sustainability performance	
	g	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada	Written verification from an independent party, if any	
	h	Lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada	Feedback sheet for readers, if any	
	i	Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya	Issuer or Public Company's response to the previous year's report feedback	
2		Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Sustainability Report as referred to in number 1) shall be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies, as contained in Appendix II of this Circular of the Financial Services Authority	✓
3		Informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat:	Information on the Sustainability Report in number 1) may:	✓
	a	Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi dan/atau	Disclosed in other relevant sections outside of the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report and/or	
	b	Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum alam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik	Refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as profiles Issuer or Public Company	

		Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies		Halaman Page
4		Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan	The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report, however it may be presented separately from the Annual Report	✓
5		Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report shall:	✓
	a	Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1)	Contain all the information as referred to in number 1)	
	b	Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini	Be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II of this Circular of the Financial Services Authority	
6		Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan	In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section shall state that the information regarding social and environmental responsibility is disclosed in the Sustainability Report presented separately from the Annual Report	✓
7		Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan	Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be done together with the submission of the Annual Report	✓
i		**Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit** **Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek**	**Audited Financial Statements for the Year** **The financial statements contained in the Annual Report shall be prepared in accordance with the financial accounting standards prevailing in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. Said annual financial statements shall contain a statement regarding the accountability for the financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation on the responsibility of the Board of Directors for financial reporting, or the laws and regulations in the capital market which regulate the periodic reporting of securities companies, in the event that the Issuer is a securities company**	✓
j		**Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan** **Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini**	**Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibility for the Annual Report** **The statement letter from members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibility for the Annual Report shall be prepared in accordance with the prescribed format provided in Appendix I of this Circular of the Financial Services Authority**	**51**

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is left intentionally blank

2024

Laporan Tahunan
Annual Report

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.

Mangkuluhur City Tower One 27th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta 12930, Indonesia

Email Informasi
Information Email
corpsec@humi.co.id

Layanan Informasi
Information Services
62-21 395 06655

www.humi.co.id